Kementerian Agama RI
2023

# Saga Moderasi dari Penjuru Indonesia

*Abdul Jamil Wahab dkk.*

KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

Milik Kementerian Agama RI
Tidak Diperjualbelikan

# Saga Moderasi dari Penjuru Indonesia

**Kementerian Agama RI**
**Tahun 2023**

Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan
Kementerian Agama Republik Indonesia

Hak Cipta 2023, pada Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan

**Pengarah**
Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan

**Saga Moderasi dari Penjuru Indonesia**
© Abdul Jamil Wahab, dkk 2023
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
x + 246 halaman, 148 x 210 mm
Cetakan I, Desember 2023

**Penulis**
Abdul Jamil Wahab, Ahsanul Khalikin, Anik Farida, Asnawati, Azis Awaluddin, Edi Junaedi, Eka Gustiana, Kustini, Raudatul Ulum, Reslawati, Suhanah, Wakhid Sugiyarto, Warnis

**Editor**
Haris Burhani, Alamsyah M Dja'far, Fahmi Syahirul Alim

**Rancang Sampul & Tata Letak Isi**
Miftah Fadhlullah

ISBN: 9-786022-931539

**Diterbitkan oleh**
Kementerian Agama RI

**Dikeluarkan oleh**
Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat
2023

# Daftar Isi


1 Sambutan
Kepala Puslitbang Bidang Agama dan Layanan Keagamaan
3 Kata Pengantar
Tim Editor

4 Moderasi di Mata Tokoh Agama Jombang
Abdul Jamil Wahab
29 Kisah Minoritas di Minahasa Utara
Ahsanul Khalikin
39 Moderasi di Lereng Merapi
Anik Farida
80 Moderasi Beragama di Purwakarta
Asnawati dan Kustini
109 Moderasi di Kota Seribu Masjid
Azis Awaluddin
121 Ikhtiar Moderasi dari Makassar
Edi Junaedi
145 Kontak Sosial dan Keberagamaan di Jembrana
Raudatul Ulum
169 Toleransi di Kota Timah
Reslawati dan Eka Gustiana
197 Menyibak Moderasi di Lebak
Suhanah
209 Moderasi Beragama di Dataran Tinggi Gayo
Wakhid Sugiyarto
226 Suara Moderasi dari Bukittinggi
Warnis

# Sambutan

Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, serta taufik-Nya, sehingga penulisan buku dengan judul "Saga Moderasi dari Penjuru Indonesia" dapat terselesaikan dengan baik dan berhasil diterbitkan dalam bentuk buku. Tentu saja, diperlukan kerja keras dan ketelitian yang tinggi untuk menghasilkan penelitian yang berubah menjadi buku, termasuk proses pengumpulan data, analisis, penulisan, dan penyuntingan.

Kami mengucapkan selamat dan terima kasih kepada para penulis: Abdul Jamil Wahab, Ahsanul Khalikin, Anik Farida, Asnawati, Azis Awaluddin, Edi Junaedi, Eka Gustiana, Kustini, Raudatul Ulum, Reslawati, Suhanah, Wakhid Sugiyarto, Warnis; yang telah bekerja keras menuntaskan naskah yang sangat berharga ini. Tidak lupa Kami sampakan terima kasih kepada saudara Ahmad Fahrudin, selaku Kasubag TU dan Tim TU Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Kementerian Agama yang telah memfasilitasi dan memastikan produk-produk penelitian di Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Kementerian Agama tidak hanya menjadi dokumen mati yang tersimpan di rak arsip, tetapi menjadi bacaan hidup yang layak dibaca khalayak dalam menambah pengetahuan dan sebagai bahan kebijakan bagi pemangku kebijakan.

Secara khusus kami juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI yang telah memberi kepercayaan dan mendukung kami untuk menjalankan penelitian serta menerbit-

kan hasilnya dalam bentuk buku.

Akhirnya, kita berserah diri kepada Allah, semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi agama, bangsa, dan negara yang kita cintai, serta menjadi amal saleh bagi semua pihak yang telah berkontribusi, serta mendapat pahala dan balasan yang setimpal dari-Nya.

Selamat Membaca.

Kepala Pusat Litbang Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
**M Arfi Hatim**

# Kata Pengantar

Puji syukur kami sampaikan semata-mata untuk Allah Swt. Karena rahmat dan hidayah-Nya jua naskah buku *Saga Moderasi dari Penjuru Indonesia* siap diterbitkan. Selawat dan salam kami kirimkan kepada Nabi Muhammad saw, makhluk mulia yang mengangkat harkat dan martabat manusia, khususnya umat Islam, sehingga menjadi insan kamil dan mulia.

Secara khusus kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI yang memberi kepercayaan untuk menerbitkan buku ini. Kami mengucapkan penghargaan setinggi-tingnya atas kesediaan setiap pihak yang meluangkan waktu dan berkontribusi dalam upaya ini.

Buku ini merupakan kumpulan tulisan tentang kisah dan praktik Moderasi Beragama dari penjuru Indonesia. Dinamika relasi antarumat beragama yang terjadi di berbagai pelosok negeri dengan cermat dan detail dihadirkan dalam buku ini. Karena itu, buku diharapkan dapat memperkaya khazanah Moderasi Beragama lebih otentik, lebih kaya dan lebih luas karena bersumber langsung dari dinamika yang terjadi di akar rumput.

Akhirnya, kepada Allah jua kita berserah diri dan semoga amal saleh yang ikhlas dari semua pihak mendapat pahala dan balasan yang setimpal dari-Nya. Selamat membaca!

Jakarta, Oktober 2023.

# Moderasi di Mata Tokoh Agama Jombang

Abdul Jamil Wahab

## Pendahuluan

Menjelang Era Reformasi ketika keran demokrasi semakin terbuka, berbagai potensi konflik yang mengarah disintegrasi bangsa muncul dalam dinamika kehidupan keagamaan. Di antaranya yaitu, pertama, munculnya gerakan-gerakan keagamaan yang bersifat transnasional yang tidak sejalan dengan jati diri bangsa. Transnasionalisme merupakan gerakan keagamaan yang melewati batas-batas teritorial negara, dan cenderung mengabaikan konteks lokal dalam beragama. Kedua, muncul tantangan eksternal yaitu komodifikasi agama, di mana agama lebih dijadikan sebagai nilai komoditas, sehingga menimbulkan polarisasi di masyarakat karena adanya kepentingan ekonomi dan politik. Ketiga, isu-isu sensitif keagamaan sangat ampuh digunakan sebagai nilai jual untuk meraih dukungan publik, di sini politik identitas banyak digunakan untuk meraih posisi penting dalam kontestasi meraih kekuasaan.

Atas adanya berbagai tantangan tersebut, Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saifuddin pada tahun 2019, mendeklarasikan program yang kemudian disebut "Penguatan Moderasi Beragama". Dalam acara Rakernas Kementerian Agama tahun 2019, Menag menegaskan bahwa *framing* Moderasi Beragama penting dalam mengelola kehidupan beragama pada masyarakat

Indonesia yang plural dan multikultural. Saat itu Menag juga mengatakan, moderasi harus dipahami sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna, di mana setiap warga masyarakat, apa pun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya harus mau saling mendengarkan satu sama lain, serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka. Jadi jelas bahwa moderasi beragama sangat erat terkait dengan menjaga kebersamaan dengan memiliki sikap "tenggang rasa" terhadap perbedaan yang ada.

Salah satu prinsip dasar dalam moderasi beragama adalah selalu menjaga keseimbangan di antara dua hal yang diciptakan oleh Sang Pencipta secara berpasangan: keseimbangan akal dan wahyu, antara jasmani dan rohani, jasad dan ruh, hak dan kewajiban, kepentingan individual, dan kemaslahatan komunal, antara keharusan dan kesukarelaan, antara teks agama dan ijtihad tokoh agama, antara gagasan ideal dan kenyataan, serta keseimbangan antara masa lalu dan masa depan (Kementerian Agama, 2019)

Penguatan Moderasi Beragama adalah upaya yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk mewujudkan moderasi beragama. Upaya penguatan tersebut, utamanya ditujukan kepada kelompok moderat agar mereka memiliki imunitas dan tidak mudah terpapar paham keagamaan yang ekstrem. Selama ini, kelompok yang masuk kategori ekstrem tersebut sangat gigih dalam menyebarkan pahamnya di masyarakat, sebagian kelompok moderat mulai terkontaminasi paham yang mereka sebarkan. Atas dasar pemikiran tersebut, Penguatan Moderasi Beragama diutamakan kepada kelompok moderat ini sebagai upaya preventif. Penguatan Moderasi Beragama terhadap kelompok moderat diharapkan akan meneguhkan kembali proses ideologisasi atas moderasi beragama yang selama berabad-abad sudah berjalan dalam tradisi masyarakat muslim Indonesia.

Moderasi beragama atau "jalan tengah" keberagamaan yang menitikberatkan pada spirit ajaran agama yang moderat dan esensial, selama ini telah diikhtiarkan oleh pemerintah, terutama melalui Kementerian Agama sebagai *leading sector*-nya. Meski sejak digulirkannya, umumnya upaya Penguatan Moderasi Beragama oleh Kementerian Agama pada mendapat respons positif dari berbagai pihak, tidak berarti semua menerima dengan baik, ada saja pihak-pihak yang menolak dan menuding Moderasi Beragama sebagai upaya melemahkan gerakan Islam, memalingkan paham Islam ke arah seku-

larisme, atau lainnya.

Atas dasar pemikiran tersebut, penting dilakukan kajian, terkait pandangan tokoh-tokoh agama di berbagai daerah, bagaimana persepsi dan sikap mereka tentang Moderasi Beragama, apakah persepsi dan sikap mereka sama dengan yang dipahami pemerintah atau adakah pemahaman lain yang berbeda, serta apa saja pranata sosial yang ada di masing-masing daerah yang mencerminkan Moderasi Beragama. Melalui penelusuran terkait persepsi, sikap, dan pengalaman empiris masyarakat melalui pranata sosial yang ada di daerah dalam mempraktikkan moderasi beragama, akan diperoleh gambaran utuh terkait *best practices* moderasi beragama di berbagai daerah, sehingga dapat menjadi masukan bagi konsep dan implementasi Moderasi Beragama yang selama ini dikembangkan Kementerian Agama.

## Diskursus Moderasi Beragama

Secara etimologis, kata "moderasi" berasal dari bahasa Latin "*moderâtio*", yang berarti "kesedangan" (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Kata itu juga berarti "penguasaan diri" (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyediakan dua pengertian kata "moderasi", yakni: (1) pengurangan kekerasan dan (2) penghindaran keekstreman. Jika dikatakan, "orang itu bersikap moderat", kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem.

Dalam bahasa Inggris, kata "*moderation*" sering digunakan dalam pengertian *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligned* (tidak berpihak). Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan (*belief*), moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi negara.

Salah satu prinsip dasar dalam moderasi beragama adalah selalu menjaga keseimbangan di antara dua hal yang diciptakan oleh Sang Pencipta secara berpasangan: keseimbangan akal dan wahyu, antara jasmani dan rohani, jasad dan ruh, hak dan kewajiban, kepentingan individual dan kemaslahatan komunal, antara keharusan dan kesukarelaan, antara teks agama dan ijtihad tokoh agama, antara gagasan ideal dan kenyataan, serta keseimbangan antara masa lalu dan masa depan. Inti dari Moderasi Beragama adalah adil dan berimbang dalam memandang, menyikapi, dan mempraktikkan semua

konsep yang berpasangan di atas (Kementerian Agama, 2019*).*

Keseimbangan adalah istilah untuk menggambarkan cara pandang, sikap, dan komitmen untuk selalu berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan persamaan. Kecenderungan untuk bersikap seimbang tidak seyogianya dipahami bahwa kata ini menggambarkan orang yang tidak punya pendapat. Mereka yang mengadopsi sikap ini berarti tegas, tetapi tidak keras karena selalu berpihak kepada keadilan, hanya saja keberpihakannya itu tidak sampai merampas hak orang lain sehingga merugikan. Keseimbangan dapat dianggap sebagai satu bentuk cara pandang untuk mengerjakan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan dan juga tidak kurang, tidak konservatif dan juga tidak liberal. Dengan demikian, Moderasi Beragama berarti selalu menjaga keseimbangan di antara dua hal yang diciptakan oleh Sang Pencipta secara berpasangan (Kementerian Agama, 2019).

Moderasi Beragama dapat didefinisikan sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa (Kementerian Agama, 2020, h. 16.)

Ada beberapa pesan kunci dalam definisi tersebut. Frasa "dalam kehidupan bersama" mengindikasikan bahwa penguatan cara pandang, sikap dan praktik beragama yang dimaksud dalam penguatan Moderasi Beragama terutama terkait dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian frasa "mengejawantahkan esensi ajaran agama" juga mengindikasikan bahwa Moderasi Beragama menekankan adanya pemahaman dan praktik beragama yang substantif, yang selalu mengedepankan esensi setiap ajaran dan ritual agama.

Dalam kerangka berpikir urgensi Moderasi Beragama, salah satu esensi ajaran agama yang paling luhur adalah martabat kemanusiaan. Itu mengapa bahwa frasa berikutnya menekankan pentingnya "melindungi martabat kemanusiaan." Pesan kunci lainnya tecermin dari frasa" membangun kemaslahatan umat". Ini menegaskan bahwa praktik kehidupan beragama harus diproyeksikan untuk menghadirkan kemaslahatan umat. Karena praktik beragama harus melandaskan prinsip adil, seimbang/berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa". Frasa menaati konstitusi

menegaskan tidak dibenarkannya adanya cara pandang, sikap dan praktik yang mengatasnamakan agama tapi melanggar ideologi dasar negara, Pancasila, UUD 1945 yang sudah menjadi kesepakatan bangsa.

Dari definisi tersebut, juga dapat diambil pengertian, bahwa cara pandang, sikap, dan praktik keagamaan seseorang dianggap tidak moderat atau ekstrem, jika atas nama agama ia: (1) mencederai nilai luhur kemanusiaan, (2) melabrak kesepakatan bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yaitu Pancasila dan UUD 1945, dan (2) melanggar ketentuan hukum yang menjadi panduan bermasyarakat dan bernegara. (Kementerian Agama, 2020, h. 16).

## Urgensi Moderasi Beragama

Adapun latar belakang mengapa diperlukan penguatan Moderasi Beragama. Setidaknya ada beberapa pemikiran, mengapa Moderasi Beragama menjadi urgen dikembangkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yaitu, pertama, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara multikultur dan majemuk terbesar di dunia selain Amerika Serikat dan India. Hal ini dapat dilihat dari kondisi geografis dan sosiokultural Indonesia yang beragam, kompleks, dan luas. Kebinekaan bangsa Indonesia dapat dilihat secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal, kebinekaan bangsa Indonesia dapat dilihat dari perbedaan etnis, agama, makanan, pakaian, bahasa daerah dan budaya, sedangkan secara vertikal, kebinekaan bangsa Indonesia dapat dilihat dari perbedaan tingkat sosial budaya, ekonomi dan pendidikan. Hal tersebut menjadi kekayaan dan keunikan tersendiri bagi bangsa Indonesia.

Selain agama dan kepercayaan yang beragam, dalam tiap agama pun terdapat lagi keragaman penafsiran atas ajaran agama, khususnya ketika berkaitan dengan praktik dan ritual agama. Umumnya, masing-masing penafsiran ajaran agama itu memiliki penganutnya yang meyakini kebenaran atas tafsir yang dipraktikkannya. Dalam era demokrasi yang serba terbuka, perbedaan pandangan dan kepentingan di antara warga negara yang sangat beragam itu dikelola sedemikian rupa sehingga semua aspirasi dapat tersalurkan sebagaimana mestinya. Namun demikian, faktanya konflik-konflik bernuansa agama tetap banyak terjadi.

Penyelesaian kasus-kasus aktual keagamaan tersebut membutuhkan strategi dan pendekatan yang didasari sikap inklusif dalam menyikapi per-

bedaan, akomodatif (lentur) terhadap budaya, dan mampu mengontekstualisasi nilai-nilai agama dengan tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dan esensi ajarannya. Dalam hal ini, paradigma Moderasi Beragama penting diterapkan untuk merespons isu-isu keagamaan tersebut, sebagai solusi yang dapat menciptakan kerukunan, sekaligus kebebasan, dalam menjalankan kehidupan keagamaan. Moderasi Beragama diharapkan akan menjadi "lem perekat" di antara berbagai pluralitas dan kemajemukan yang ada, hingga tidak mudah terjadi konflik antar sesama anak bangsa.

Kedua, saat ini, berkembang di masyarakat suatu paham dan pengamalan agama yang ekstrem atau berlebihan dalam memahami teks agama, hingga terjadi kecenderungan terpolarisasinya pemeluk agama dalam dua kutub ekstrem. Satu kutub terlalu mendewakan teks tanpa memperhatikan sama sekali kemampuan akal/nalar. Teks kitab suci dipahami lalu kemudian diamalkan tanpa memahami konteks. Beberapa kalangan menyebut kutub ini sebagai golongan ultra konservatif. Kutub ekstrem yang lain, sebaliknya, yang sering disebut kelompok ultra liberal, yaitu kelompok yang terlalu mendewakan akal pikiran sehingga mengabaikan teks itu sendiri. Jadi terlalu liberal dalam memahami nilai-nilai ajaran agama juga sama ekstremnya. Karena itu, salah satu misi Kementerian Agama adalah agar agama dipahami dan diamalkan oleh seluruh bangsa dengan paham dan bentuk pengamalan yang moderat sehingga kedua kutub itu kembali ke tengah.

Ketiga, berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai NKRI. Sebagaimana telah dilaporkan oleh hasil riset berbagai lembaga, saat ini, masih terdapat penolakan di kalangan ulama terhadap konsep negara-bangsa. Sebagian masyarakat masih memiliki cita-cita mendirikan negara atas dasar agama, melalui pembentukan daulah/khilafah Islamiah dan pemberlakuan syariat Islam secara formal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar itu, Penguatan Moderasi Beragama menjadi penting, karena salah satu semangat moderasi beragama adalah menjadikan konstitusi sebagai panduan kehidupan umat beragama dalam berbangsa dan bernegara, serta menaati aturan hukum dan kesepakatan bersama.

## Moderasi Beragama dalam Perspektif Islam

Secara normatif, dalam literatur keislaman, istilah "Islam moderat" iden-

tik dengan "Islam *wasaṭiyyah* (wasatiah)" yang merujuk pada kata "*ummatan wasaṭan*" yang ada pada firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 143 yaitu:

> Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.

Imam at-Thabari mengartikan "*ummatan wasaṭan*" dalam ayat tersebut dengan "*khiyār*" artinya yang terpilih, sehingga maksud kata "*ummatan wasaṭan*" adalah umat terpilih/terbaik. Namun demikian, di dalamnya terdapat makna simbolik lain yaitu *'adl* (keadilan), karena adil atau keadilan merupakan perwujudan umat pilihan.

Imam Fakhruddin ar-Razi dalam tafsirnya menyatakan, kata "*wasaṭ*" dalam ayat tersebut mengandung empat arti. Pertama, *'adl* (keadilan) yaitu tidak memihak salah satu pihak. '*Adl* juga berarti jauh dari dua sisi ekstrem (*al-bu'du 'an ṭarafain al-ifraṭ wa tafrīṭ*), karena dengan menjauhi sikap ekstrem, adil itu akan muncul. Kedua, sesuatu yang terbaik (*khiyār*). Ketiga, paling utama *(akṡaru faḍlan).* Keempat, tidak berlebihan dalam melakukan ibadah dan kegiatan keagamaan.

Imam Qurtuby mengartikan kata "*ummatan wasaṭan*" sebagai '*adl*, kata "*wasaṭ*" dimaknai '*adl*, karena tidak condong pada salah satu titik ekstrem. '*Adl* adalah sikap di pertengahan, tidak memihak ke ujung kanan atau kiri. Kata "*wasaṭ*" juga berarti "*khiyāruh*" yaitu yang terbaik. Jika dikatakan, "*fulan ausaṭunā nasaban*", artinya Fulan memiliki banyak memiliki keutamaan dalam nasab. Dengan demikian, kata "*ummatan wasaṭan*" memiliki arti umat yang adil dan terbaik.

Sejalan dengan Imam at-Thabari, Imam Ibnu Katsir mengartikan kata "*wasaṭ*" dalam ayat tersebut dengan "*khiyar*" yang artinya terpilih, sehingga "*ummatan wasaṭan*" artinya umat pilihan (*khiyār al-umam).* Kata "*wasaṭ*" juga mengandung arti "*asyraf*" atau yang paling mulia. Untuk itu ketika dikatakan "*Rasūlallah wasatan fi qauminā*, bisa diartikan bahwa Rasulullah adalah sosok yang paling terhormat di antara kami.

Dalam konteks kekinian, beberapa cendekiawan Islam memberikan definisi yang lebih komprehensif terkait makna "Islam wasatiah" (Islam mo-

derat). Yusuf Al-Qardhawi mengembangkan pandangan Islam moderat dengan menekankan pentingnya pendekatan yang lentur terhadap hukum Islam dan menolak kekakuan penafsiran Al-Qur'an. Al-Qardhawi merumuskan delapan karakteristik Islam moderat (wasatiah) yaitu: memberikan fasilitasi (*taysīr*) dalam pemberian pendapat hukum keagamaan (fatwa) dan kabar gembira (*tabsyīr*) dalam dakwah. Kombinasi antara prinsip-prinsip yang dipegang ulama terdahulu (*salafiya*h) dengan kebutuhan masa kini (tajdid). Keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum Islam yang permanen (*al-Ṡawābit*) dengan yang berubah (*mutaghayyirāt*). Mengawinkan kewajiban keagamaan (*al-wajib*) dengan pemahaman tentang realitas sosial. Lebih banyak menggunakan cara dialog (*al-ḥiwār*), hidup berdampingan (*ta'ayus*) dengan kelompok lain, mempraktikkan toleransi (*tasāmuḥ*) dengan yang berbeda. Mengadopsi prinsip musyawarah (*al-syurā*), keadilan (*alʿadālah*), kebebasan manusia (*ḥurriyat al-syuʿūb*), dan hak asasi *manusia (ḥuqūq al-insān).* Bersikap jujur dan adil kepada perempuan, membebaskan mereka dari belenggu adat istiadat yang diwarisi dari era keterbelakangan, dan dari belenggu adat istiadat yang berasal dari peradaban yang telah hancur. Menyajikan Islam sebagai suatu misi peradaban yang utuh dan seimbang dalam rangka kebangkitan dan pembebasan umat.

Sedangkan menurut cendekiawan Malaysia Kamal Hasan, wasatiah tidak cukup disamakan dengan moderasi, karena moderasi yang dalam bahasa Inggris adalah "*moderation*" sama artinya dengan "seimbang" (*balance*), yang merupakan bagian dari wasatiah. Sementara wasatiah memiliki tiga unsur yang saling berkaitan, yaitu keadilan (*justice* atau *ʿadālah*), baik/unggul (*goodness/excellence* atau *khairiyyah*), dan seimbang (*balance* atau *tawasuth*, *tawāzun*, dan *i'tidāl*). Ketiga unsur itu merupakan pengertian dari "*ummatan waṣatan*", oleh sebab itu kalimat "*ummatan waṣatan*" dalam QS Al-Baqarah ayat 143, diterjemahkan oleh Kamal Hasan dengan "*justly balanced community*" (masyarakat yang berkeadilan dan seimbang).

Menurut Mohammad Hasyim Kamali, sebenarnya wasatiah menggambarkan saling hubungan dan tarik menarik di antara dua konsep yang berpasangan, seperti antara rasio dengan wahyu, hak dengan kewajiban, individualisme dengan sosialisme, keharusan dengan kesukarelaan, cita-cita dengan kenyataan, dan kesinambungan dengan perubahan. Masih menurut Hasyim Kamali, wasatiah ditandai dengan ketidaksukaan terhadap ekstre-

misme. Di antara tanda-tanda ekstremisme adalah pembelaan fanatik atas suatu pandangan dengan mengabaikan pandangan lain yang berbeda. Ekstremisme juga ditunjuk dengan cara pandang hitam putih, dan cenderung merasa yakin dengan kebenaran pendapatnya sendiri. Ekstremisme cenderung mengaburkan mana primer dan sekunder, mana yang inti dan bukan inti (Kamali, 2015).

Pemerintah Indonesia pernah memfasilitasi pertemuan forum Konsultasi Tingkat Tinggi Tokoh Ulama dan Cendekiawan Muslim Dunia yang diselenggarakan di Bogor yang berlangsung tanggal 1 – 3 Mei 2018. Forum tersebut dihadiri sekitar 100 ulama menghasilkan apa yang disebut "Pesan Bogor" (*Bogor Massage*), Dalam hasil akhir, forum tersebut mengakui bahwa paradigma wasatiah Islam sebagai ajaran utama Islam, telah dipraktikkan sepanjang sejarah sejak masa Nabi Muhammad SAW, Khulafaurasyidin, hingga periode modern dan kontemporer, di berbagai negara di seluruh dunia, serta menegaskan kembali peran dan tanggung jawab moral para ulama dan cendekiawan muslim untuk memastikan dan mendidik generasi masa depan dengan membangun peradaban *ummatan wasaṭan.*

Sebagai kesimpulan, forum berkomitmen untuk mengaktifkan kembali paradigma *wasaṭiyyat al-Islām* sebagai ajaran Islam pusat yang meliputi tujuh nilai utama: tawasut, posisi di jalur tengah dan lurus; iktidal, berperilaku proporsional dan adil dengan tanggung jawab; tasamuh, mengakui dan menghormati perbedaan dalam semua aspek kehidupan; syura, bersandar pada konsultasi dan menyelesaikan masalah melalui musyawarah untuk mencapai konsensus; islah, terlibat dalam tindakan yang reformatif dan konstruktif untuk kebaikan bersama; *qudwah*, merintis inisiatif mulia dan memimpin untuk kesejahteraan manusia; *muwāṭnah*, mengakui negara bangsa dan menghormati kewarganegaraan.

Forum juga menyepakati untuk mendorong negara-negara dan komunitas Muslim untuk mengambil inisiatif untuk mempromosikan paradigma *wasaṭiyyat al-Islām*, melalui Poros Wasatiah Islam Dunia, dalam rangka membangun *ummatan wasaṭan*, sebuah masyarakat yang adil, makmur, damai, inklusif, harmonis, berdasarkan pada ajaran Islam dan moralitas.

## Jombang dan Keberagamaan

Kabupaten Jombang terletak di tengah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten

Jombang memiliki posisi yang sangat strategis, karena berada di jalur utama Pulau Jawa (Yogyakarta – Surabaya). Pada tahun 2020, penduduk Jombang mencapai 1.318.062 jiwa, dengan kepadatan penduduk 1.137 jiwa per kilometer (BPS Jombang, 2021). Terdiri dari 664.605 laki-laki, dan 653.457 perempuan. Sedikitnya 55% penduduk tinggal di wilayah perkotaan.

Sebagian besar agama yang dianut penduduk Jombang adalah Islam dianut oleh 97,35% penduduk Kabupaten Jombang, diikuti dengan agama Kristen Protestan (1,63%), Katolik(0,53%), Hindu (0,33%), Buddha (0,09%),dan Konghucu (%0,07) (BPS Jombang, 2021). Jombang juga dikenal dengan sebutan kota santri, karena banyaknya institusi pendidikan Islam (pondok pesantren) di wilayahnya seperti Tebuireng (Cukir), Darul Ulum (Peterongan), Manbaul Ulum (Denanyar), Bahrul Ulum (Tambak Beras), dan lainnya.

Secara historis, Jombang merupakan daerah basis Nahdlatul Ulama. KH. Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyyah (NU) berasal dari Jombang. Beliau mendirikan Pesantren Tebuireng dan kemudian menjadikannya sebagai basis pergerakan Jam'iyyah tersebut. Selain KH. Hasyim Asyari, banyak tokoh Islam lainnya yang lahir di Jombang antara lain: Wahid Hasyim, Gus Dur, Nurcholish Madjid, Emha Ainun Najib, dan lainnya.

Selain banyak ormas keagamaan yang menjadi afiliasi orientasi sosial keagamaan masyarakat, Kabupaten Jombang juga merupakan pusat beberapa organisasi tarekat seperti Shiddiqiyah, Naqsabandiyah Kholidiyah, Qadiriyah Naqsabandiyah, Shadhiliyah, dan lainnya. Selain penduduk yang mayoritas memeluk agama Islam, di Kecamatan Mojowarno (sekitar 8 km dari Ponpes Tebuireng), merupakan kawasan dengan pemeluk mayoritas beragama Kristen Protestan, dan daerah tersebut pernah menjadi pusat penyebaran salah satu aliran agama Kristen Protestan pada Era Kolonial Belanda, dengan bangunan gereja tertua, dan salah satu yang terbesar di Jawa Timur, yaitu Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Mojowarno, dengan dilengkapi rumah sakit Kristen, dan sekolah-sekolah Kristen.

Agama Hindu juga dianut sebagian penduduk Jombang, terutama di kawasan selatan (Wonosalam, Bareng, dan Ngoro). Sementara itu, untuk agama Konghucu, Kabupaten Jombang memiliki tiga kelenteng yang cukup tua, dan terkenal di Pulau Jawa, yakni Hok Liong Kiong di Kecamatan Jombang (didirikan sekitar 1890), Hong San Kiong di Kecamatan Gudo (didirikan se-

kitar 1710), dan Boo Hway Bio di Kecamatan Mojoagung (didirikan ± tahun 1930).

## Implementasi Moderasi Agama di Jombang

Kehidupan keagamaan di Kabupaten Jombang berlangsung dinamis. Konflik dan hubungan harmonis antarumat beragama kadang berlangsung fluktuatif. Beberapa konflik bernuansa keagamaan beberapa kali terjadi. Meski demikian, secara umum hubungan antarumat beragama berjalan harmonis dan damai. Kondisi demikian, tidak lepas dari paham keagamaan masyarakat yang secara *mainstream* memiliki pandangan keagamaan yang moderat dan tidak ekstrem. Untuk mendapatkan gambaran terkait bagaimana implementasinya di Kabupaten Jombang, berikut pandangan para tokoh agama, yang menyoroti beberapa persoalan pokok dalam moderasi yaitu toleransi, komitmen kebangsaan, antikekerasan, dan apresiasi terhadap tradisi lokal, serta bagaimana implementasinya dalam menghadapi isu dan dinamika sosial keagamaan yang terjadi di Kabupaten Jombang.

Agar kajian ini lebih fokus dan mendalam, studi ini mendeskripsikan empat pandangan tokoh agama saja yaitu: Kiai Kholil Ridwan (MUI/NU/tokoh pesantren/tokoh tarekat), Fathurrohman (Muhammadiyah), Totok (LDII), dan Ilham Rohim (pejabat Kankemenag). Kholil Ridwan saat ini menjabat sebagai ketua MUI. Selain itu, beliau juga merupakan salah satu tokoh NU, pimpinan tarekat Qadariyah Naqsabandiyah, dan pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum, Peterongan, Jombang, bahkan pimpinan Asosiasi Pondok Pesantren se-Kabupaten Jombang. Wawancara dilakukan di Kantor Sekretariat Pusat Pesantren Darul Ulum. Deskripsi berikut ini adalah pernyataan Kholil Ridwan terkait implementasi Moderasi Beragama di Kabupaten Jombang.

Masyarakat muslim umumnya berafiliasi ke dalam organisasi kemasyarakatan dan keagamaan (ormas) seperti NU, Muhammadiyah, FPI, LDII, dan lainnya, serta organisasi lembaga keagamaan seperti asosiasi pesantren dan tarekat. Selain memiliki banyak ormas keagamaan seperti telah disebutkan, Kabupaten Jombang juga memiliki banyak pondok pesantren dan organisasi tarekat. Selain adanya ormas dan lembaga keagamaan, di Kabupaten Jombang juga terdapat tiga organisasi yang menjadi wadah bersama ormas dan lembaga keagamaan yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mendisku-

sikan soal keagamaan bagi umat Islam, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membahas soal keagamaan lintas agama, serta Forum Komunikasi Masyarakat Jombang (FKMJ) untuk membahas persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan yang dihadapi masyarakat Jombang.

Adanya asosiasi yang merupakan wadah pertemuan organisasi-organisasi tersebut, menjadikan pola hubungan keagamaan baik intra dan antara agama berjalan dialogis dan komunikatif. Di MUI Kabupaten Jombang, semua ormas keagamaan Islam ada perwakilan yang duduk di pengurus harian, bukan sekadar di lembaga atau departemen. Termasuk ormas keagamaan yang jumlah pengikutnya tidak begitu besar. Misalnya FPI, LDII, dan Al-Washliyah, pengurus ketiga ormas tersebut juga duduk di pengurus harian MUI.

Susunan MUI Kabupaten Jombang sejak dulu, komposisinya, ketua umum itu dari asosiasi pesantren. Ketua dari ketua 1-7 perwakilan ormas keagamaan Islam. Dalam kepengurusan juga diakomodasi asosiasi tarekat. Di Kabupaten Jombang ada beberapa pusat tarekat yang memiliki jemaah besar. Antara lain: Itqon (Qodiriyah-Naqsabandiyah), Jatman (Jamiyyah Mu'tabaroh an-Nahdliyyah) pimpinan Habib Lutfi, Shiddiqiyah, dan lainnya. Mereka sengaja diakomodasi dalam kepengurusan, karena MUI mengedepankan prinsip silaturahmi antar ormas keagamaan supaya tidak ada kesalahpahaman intern agama Islam.

Keberadaan MUI menjadi media komunikasi bagi para pengurus ormas keagamaan Islam. Dalam wadah MUI, berbagai persoalan umat Islam didiskusikan. MUI Jombang ada beberapa aktivitas. Misalnya: ada rapat mingguan dan bulanan. Rapat Mingguan untuk menetapkan teknis kepengurusan. Sedangkan rapat bulanan menetapkan kebijakan. Dalam rapat bulanan akan dihadiri oleh perwakilan ormas keagamaan. Umat Islam memiliki banyak persamaan paham keagamaan dan hanya sedikit perbedaan. Secara *uṣul* ( usul, pokok agama), semua ormas Islam itu sama, tapi secara *furu'* (furuk, cabang) itu bisa berbeda-beda. Hal itu sudah terjadi semenjak zaman Khulafaurasyidin. Karenanya, di MUI setiap ormas keagamaan tidak bisa memaksakan hal yang sifatnya furuk. Hal yang furuk sifatnya *sharing* (berbagi inforasi) saja, tidak boleh menjadikannya sebagai ketetapan MUI, sebab akan terjadi kontroversi. Hal itu bisa terjadi, jika hal furuk dianggap *uṣūl*. Misalnya saat terjadi pilpres dan pilkada. Para pengurus tidak akan menjadikan-

nya sebagai hal yang menjadi pembahasan MUI sebab itu soal furuk.

Salah satu persoalan furuk adalah soal bentuk negara Indonesia, tapi adanya sebuah pemerintahan atau negara itu usul. Membentuk organisasi itu juga usul, tapi bentuknya seperti apa negara atau organisasinya itu persoalan furuk. Karena itu, di MUI, soal HTI tidak menjadi bahan yang didiskusikan. Persoalan daulah itu sudah jadi perdebatan setelah Khulafaurasyidin. Sebab setelah Era Khulafaurasyidin, semakin jauh dari ajaran Islam. Itu yang jadi pemahaman di MUI. Soal khilafiah saat ini banyak dibicarakan, itu *kan* gagasan Taqiyuddin An-Nabhani saja. Itu soal furuk sebenarnya tapi oleh An-Nabhani dianggap soal usul. Terkait dengan persoalan FPI, jika ingin menetapkan Syariah Islam, juga harus mengikuti peraturan perundangan yang ada, yaitu lewat parlemen. Tidak bisa menetapkan sesuatu yang tidak diundangkan parlemen. Kita harus ingat sejarah, *Khalīfat al-Rasyīd* (Utsman bin Affan) saja dibunuh, ketika terjadi konflik sesama muslim di masa itu.

Persoalan pemerintahan yang sebenarnya sifatnya furuk, jika kemudian dianggap sebagai usul, bisa menyebabkan saling membunuh. Hal tersebut pernah terjadi di masa awal perkembangan Islam. Jika HTI atau siapa pun, mau menegakkan khilafah silakan tapi jangan di Indonesia, jika mau di Indonesia harus lewat parlemen. Secara syariah, penerapannya harus lewat itu. Ketaatan pada ulil amri itu juga usul. Sehingga memberontak atau berbuat makar dilarang dalam agama. Terkait penghormatan terhadap tradisi atau budaya lokal. Soal tradisi, itu kembali pada soal furuk tadi. Niatnya menjalankan tradisi itu apa? Akan menjadi syirik jika merusak usul yang sifatnya akidah. Misalnya sembahyang di kuburan, sesajen ketika ada selamatan yang bersifat persembahan untuk selain Allah. Menyikapi hal demikian, harus dipikirkan solusinya supaya tidak masuk kategori syirik, misalnya setelah selesai acara selamatan, makanan dimakan bersama-sama oleh masyarakat.

Sikap akomodatif dilakukan terhadap tradisi yang sejalan dengan nilai-nilai agama, jika ada tradisi yang bertentangan, dilakukan upaya dakwah, namun tetap dengan pendekatan yang persuasif. Tidak semua tradisi, harus dibuang. Belajar dari Wali Sanga (Sunan Kalijaga), wayang itu aslinya syirik. Sebab terasuk mengandung tuntunan rohani yang tidak didasarkan keyakinan Islam. Namun, oleh para wali, tokoh wayang seperti Betoro kemudian dijadikan sebagai malaikat, sedang Sang Hyang Widi (Tunggal) itu

diganti dengan istilah "Tuhan", dan sebutan lainnya. Demikian dengan kisah dalam wayang tersebut kemudian disusupi konten keislaman. Intinya oleh Wali Sanga, semua dijadikan sarana untuk mengenalkan ajaran Islam.

Selain terhadap Kiai Kholil Dahlan selaku tokoh MUI yang juga salah satu tokoh NU, wawancara Fathurrohman Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jombang. Wawancara dilakukan di Gedung Dakwah Muhammadiyah, yang berlokasi di Jalan Dr. Sutomo Nomor 15, tepatnya di sebelah timur RS Muhammadiyah. Berikut deskripsi pernyataan Fathurrohman tentang implementasi Moderasi Beragama di Kabupaten Jombang Di masa reformasi, yaitu ketika menjelang akhir Pemerintahan Gus Dur, sekitar tahun 2000, terjadi ketegangan antara warga NU dan Muhammadiyah. Suasana politik memanas. Saat pemerintahan Gus Dur, ada pihak-pihak yang ingin menjatuhkan Gus Dur. Salah satunya adalah Amien Rais yang ketika itu adalah sebagai ketua umum Muhammadiyah.

Situasi mencekam, beberapa rumah tokoh Muhammadiyah diberi tanda silang merah. Bahkan ada yang sudah dilempari batu. Saat itu wilayah Jawa Timur (Jatim) tegang, sebab Jatim merupakan basis NU. Saat itu ada gagasan untuk mencairkan suasana dengan membentuk Forum Komunikasi Masyarakat Jombang (FKMJ). Forum yang dibentuk pada tahun 2000 itu ditujukan untuk menjembatani jika ada permasalahan di Jombang. Jika ada konflik, maka para tokoh masyarakat, berunding untuk memecahkan masalah tersebut.

Di dalam Forum tersebut, dilakukan pertemuan dua atau tiga bulan sekali. Dalam pertemuan itu, perwakilan tokoh dari NU, Muhammadiyah, LDII, dan lainnya, bertemu dan berdiskusi. Misalnya ada permasalahan pembangunan masjid, tanah wakaf, pendirian gereja; ada gedung milik umat Kristen yang ingin dijadikan rumah ibadah yaitu Gereja Masa Depan Cerah (GMDC). FKMJ efektif menjadi media komunikasi lintas tokoh agama. Selain persoalan yang pernah terjadi di masa lalu, juga dibahas persoalan yang terjadi saat ini, misalnya persoalan keresahan akibat peristiwa di Jombang, yaitu dampak kasus penolakan pendirian masjid milik Muhammadiyah di Banyuwangi. Alhamdulillah, sudah ada titik temu, di mana permasalahan pendirian masjid tersebut dikembalikan ke isi PBM tahun 2006. FKMJ sudah berdiri sebelum Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jombang berdiri. FKUB berdiri tahun 2007. Hingga kini, FKMJ telah banyak

memberikan kontribusi positif bagi suasana harmoni dan damai di Kabupaten Jombang.

Dalam kasus Khilafah (HTI) dan isu syariat Islam tidak banyak pengaruhnya di Jombang, namun bersyukur dibubarkan pemerintah. Sebab banyak kader Muhammadiyah yang punya motivasi tinggi kemudian berhasil direkrut oleh HTI. Pada tahun 2009 – 2010 dulu, banyak kader Muhammadiyah yang menyeberang, syukur alhamdulillah sekarang sudah banyak yang Kembali ke Muhammadiyah. Selain HTI, kelompok Salafi selama ini, juga banyak yang terkesan ingin membonceng Muhammadiyah. Kami merasa tidak nyaman. Sebab Muhammadiyah itu paham keagamaannya wasatiah. Tapi banyak orang-orang yang tidak paham, sehingga sering menyamakan Muhammadiyah dengan Salafi. Ada perbedaan Muhammadiyah dan Salafi, misalnya meski Muhammadiyah berpedoman pada Al-Qur'an dan sunah, tapi Muhammadiyah membedakan antara mana yang ibadah mahda dan tidak. Muhammadiyah memiliki semboyan tajdid jadi tidak Salafi murni. Misalnya soal *isbal* (pemakaian celana di atas mata kaki), Muhammadiyah tidak sependapat. Muhammadiyah soal ibadah mahda memang ketat dan selektif. Sementara yang *ghairu* mahda maka berpedoman di mana ada hadis, "Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian".

Kesimpulannya dalam paham Muhammadiyah ada *taaqquli* (menggunakan pertimbangan akal) dan *taʿabbudi* (harus mematuhi karena soal ibadah, tidak boleh menggunakan akal). Prinsip *taʿaqquli* atau semangat tajdid pada persoalan yang *ghairu* mahda. Sementara *taʿabbudi* pada persoalan ibadah mahda. Sebagai bukti otentik, setelah Muktamar di Makassar muncul fatsun gerakan "Muhammadiyah Berkemajuan", itu artinya Muhammadiyah memikirkan ke depan, tidak seperti Wahabi-Salafi yang berorientasi ke masa lalu. Dalam konteks pelaksanaan moderasi, di Masjid Agung sebagai masjid jami. Masjid adalah tempat ibadah seluruh umat. Tapi, pada tataran implementasinya, yang mengisi semua NU. Sementara ormas lainnya mengikuti saja. Harusnya proporsional, perlu ada partisipasi ormas lain. Jadi, ini bentuk implementasi moderasi beragama.

Namun demikian, secara umum, warga Muhammadiyah merasakan ketenangan dalam menjalankan aktivitasnya dan tidak merasa terpinggirkan, jadi nyaman-nyaman saja. Terkait persoalan tradisi yang berkembang di masyarakat, Muhammadiyah tidak serta merta menolak, tapi menerima se-

penuhnya juga tidak. Hal itu sejauh tidak ada syirik di dalamnya. Jika ada maka diserahkan ke pemerintah. Muhammadiyah tidak melakukan *hizbah*. Muhammadiyah tidak akan membubarkan tapi dakwah saja. Semua dikembalikan pada masyarakat. Meski ada prinsip amar makruf nahi munkar, tapi soal nahi mungkar diserahkan ke pemerintah. Sebab jika masyarakat diberi kewenangan nahi munkar, maka negara akan kacau balau.

Dalam hal mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat, banyak kelompok masyarakat yang menyikapinya dengan melakukan unjuk rasa atau demonstrasi. Terkait soal demonstrasi ini, Muhammadiyah tidak menyarankan semua hal yang tidak cocok perlu didemo. Muhammadiyah biasanya melakukan langkah persuasif, menyerahkan persoalan pada ahlinya, sesuai jalur hukum. Muhammadiyah selama 100 tahun lebih bisa bertahan, karena menjaga ukhuwah *Islāmiyyah*, *basyariyyah*, dan *waṭaniyyah*. Jika ada permasalahan maka diselesaikan di "meja" (perundingan) bukan di lapangan.

Terkait program Penguatan Moderasi Beragama yang akan diusulkan menjadi , beliau kurang setuju. Sebab jika suatu aturan menjadi perpres, aturan tersebut akan menjadi kaku: ada sanksi. Moderasi Beragama itu bukan perkara salah atau benar. Nilai-nilai Moderasi Beragama itu menunjukkan keluwesan. Jangan sampai Moderasi Beragama nantinya menjadi alat kepentingan. Moderasi Beragama harus mencerminkan *frame* kebangsaan yang benar. Wadah yang "luas" dan "luwes". Contohnya Pancasila. Ketika menjadi alat kepentingan maka menjadi tidak berfungsi. Jangan sampai Moderasi Beragama nantinya menghambat kreativitas komponen bangsa. Moderasi itu mengandung nilai mana yang pantas dan tidak pantas dalam kehidupan beragama di tengah masyarakat. Wawancara dengan tokoh LDII dilakukan di kantor Sekretariat Masjid Nur Hasan yang terletak di lokasi Pesantren LDII di Gadingwangi, Jombang. Berikut ini deskripsi pernyataan Ustaz Totok, sekretaris LDII, terkait respons warga LDII dan bagaimana implementasi Moderasi Beragama di Kabupaten Jombang. Tidak seperti di daerah lain, LDII di Kabupaten Jombang merupakan salah satu organisasi Islam yang memiliki penganut relatif banyak. Lokasi pusat LDII adalah di pesantren yang letaknya di Gadingwangi, Jombang. Pesantren ini selain memiliki jumlah siswa yang besar, juga memiliki prasarana yang juga cukup megah seperti masjid, asrama, beberapa bangunan gedung sekolah, sekre-

tariat, dan halaman parkir.

Kurikulum Pesantren tidak hanya kurikulum agama, tapi perpaduan dengan lainnya. Kurikulum yang ada di sini yaitu: (1) materi umum terdiri dari: wawasan kebangsaan, keorganisasian, tata krama (budi pekerti), olahraga; (2) materi keagamaan terdiri dari: Al-Qur'an, al-hadis, fikih, *musthalah* hadis, nahu dan saraf, faraid; (3) kewirausahaan terdiri dari: manajemen keuangan dan keterampilan (*life skill*); (4) pengembangan SDM yaitu terdiri dari: pelatihan dakwah, teknik komunikasi, *outbound* (prima siswa/*super camp*), *leadership.*

Pesantren juga memiliki beberapa sarana pendidikan yaitu: ruang pengajian putra 23 ruang, putri 17 ruang. Asrama putra 62 kamar, putri 25 kamar. Sarana penunjang antara lain: poskestren, kamar mandi, aula, lapangan basket, futsal (2 buah), dapur, lokasi *outbound*, dan lapangan bolak (milik desa) yang biasa dipakai para santri. Sumber daya yang dimiliki Pesantren antara lain: ustaz90 orang, ustazah 40 orang, dan karyawan 105 orang. Adapun untuk sekolah SMA ada 146 guru/karyawan, SMK 110 guru/karyawan, SMP 76 guru/karyawan. Sedangkan jumlah siswa SMA 2.585 orang, SMK 2.175 orang, dan SMP 1.220 orang. Jumlah santri di asrama pondok putra 977 orang, santri putri 638 orang, jumlahnya menjadi 1.615 orang. Sedangkan santri yang mondok di luar asrama pondok 4.365 orang. Dengan demikian jumlah total santri adalah 5.680 orang. Untuk membekali siswa terkait komitmen kebangsaan, ada kegiatan seminar kebangsaan dan bela negara. Kegiatan seminar tersebut bertujuan agar generasi muda tidak terpengaruh paham radikal. Selain itu juga, ada kegiatan *nonton* bareng film G 30 S/PKI, kegiatan cita alam Indonesia (CAI), dan bakti sosial.

LDII sebagai organisasi keagamaan juga ikut terlibat dalam perkumpulan Forum Komunikasi Masyarakat Jombang (FKMJ), dalam forum tersebut permasalahan yang ada di Jombang bisa didiskusikan dan diselesaikan. Dalam FKMJ terdapat perwakilan tokoh-tokoh lintas etnis dan agama. FKMJ menjadi forum yang menghubungkan berbagai kelompok dalam masyarakat di Jombang. Salah satu kegiatan yang sifatnya lintas sosial misalnya buka puasa bersama. Saat itu hadir dari berbagai lapisan seperti pedagang, tukang becak, dan lainnya. Mereka mendapatkan bingkisan dan uang tunai. Pesantren LDII mendukung paham moderat dalam Islam dan menolak paham radikal. Saat ini banyak paham radikal seperti khilafah, bahkan

FPI dalam pandangan LDII itu ujung-ujungnya juga radikal. Untuk itu pihak Pesantren menyelenggarakan diklat dakwah. Kegiatan tersebut diisi oleh narasumber dari Polres Jombang, dengan tujuan agar generasi muda mewaspadai paham dan gerakan radikal. Kegiatan tersebut juga mengundang ulama dari ormas lain. Jika untuk persoalan keagamaan, Pesantren memiliki kemampuan untuk membina santri, namun soal radikalisme membutuhkan pihak yang kompeten. Sehingga mendatangkan narasumber dai luar.

Sejauh ini tidak ada informasi, bahwa santri LDII ada yang terlibat radikalisme. LDII beberapa kali menyelenggarakan kegiatan dan mengundang pembicara dari Polres Jombang, sementara pesertanya para santri LDII, intinya kegiatan tersebut dimaksudkan agar para santri dapat memiliki semangat cinta tanah air dan bela negara. Setiap Senin para santri dan siswa di sini mengikuti upacara bendera. Kegiatan tersebut sebagai ungkapan terima kasih atas pengorbanan para pejuang kemerdekaan dan rasa syukur atas hadirnya Negara Republik Indonesia, yang hingga kini masih ada. Dalam pelaksaan upacara bendera ini, pernah suatu ketika hujan turun, namun para santri tetap berdiri meski hujan turun. Hal ini bukan sesuatu yang baru dilaksanakan, sejak pendiri Pesantren masih ada, sudah ditanamkan semboyan "cinta tanah air sebagian dari iman".

Ketika kedatangan Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Timur, seluruh santri berdiri menyambut beliau dengan bendera merah putih di tangan. Para santri berdiri sepanjang jalan menyambut kedatangan beliau, ini juga sebagai bentuk adanya penghormatan kepada kepala pemerintahan daerah. Sehingga LDII bersikap akomodatif dan tidak bersifat konfrontatif terhadap pemerintah. Konsep yang ditanamkan oleh LDII sederhana dan logis, bahwa kita tidak akan bisa ibadah, jika menentang pemerintah. Karena dalam suasana konflik, tidak akan bisa menjalankan ibadah dengan baik. Atas dasar itu, LDII siap bekerja sama dengan pihak mana pun, demi terwujudnya suasana yang harmonis dan damai di tengah masyarakat.

Ilham Rohim Kepala Seksi Bimas Islam Kankemenag Kabupaten Jombang. Wawancara dilakukan di Kankemenag. Berikut deskripsi pernyataan Ilham Rohim terkait implementasi Moderasi Beragama di Kabupaten Jombang. Penguatan Moderasi Beragama di Kabupaten Jombang antara lain dilakukan melalui penyuluh, kegiatan-kegiatan KUA, kegiatan lintas satker, penyuluhan oleh Polres, dan dakwah multikutural. Kegiatan tersebut, baik

langsung bertema Moderasi Beragama atau kegiatan lain, namun memiliki konten yang sejalan Moderasi Beragama, dilakukan dalam bentuk penyuluhan, pengajian, *workshop*, seminar, bimtek, dan kegiatan sosial keagamaan lainnya. Saat ini di Kabupaten Jombang telah ada 11 orang yang tersertifikasi ulama. Kegiatan yang bersifat langsung bertema Moderasi Beragama pernah dilakukan oleh Kanwil Kementrian Agama Jawa Timur dalam bentuk penyuluhan. Sementara untuk tingkat kankemenag kabupaten/kota, ada anggaran untuk kabupaten/kota, kegiatan jenis sehari penuh dengan peserta 168 non-PNS dan 13 PNS. Selain itu, dalam rangka memenuhi undangan dari Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur, Kankemenag Jombang pernah mengikutkan diklat, dengan mengirim peserta sebanyak tiga orang penyuluh. Program Moderasi Beragama ini, juga dilakukan oleh kakankemenag untuk tingkat kecamatan, utamanya melalui ceramah-ceramah bertemakan moderasi.

Untuk ormas keagamaan lintas agama, kegiatan Moderasi Beragama dilakukan melalui wadah FKUB dalam bentuk kegiatan menunjuk desa percontohan yang disebut "Desa Sadar Kerukunan". Salah satu desa yang masuk kategori "Desa Sadar Kerukunan" adalah Desa Ngepeh, Kecamatan Ngoro, yang jaraknya sekitar 20 kilometer dari kota. Di sana ada gereja, masjid, dan pura. Kehidupan di desa tersebut sangat rukun meski masyarakatnya multiagama. Selain Desa Ngepeh, juga ada Desa Kepanjen di Kecamatan Mojo Agung, Kota Jombang. Jaraknya sekitar 15 kilometer. Desa tersebut juga masyarakatnya terdiri dari multiagama namun memiliki kehidupan yang rukun. Di FKUB ada anggaran untuk itu (desa percontohan). FKUB juga mempunyai kegiatan dalam bentuk pertemuan lintas agama yang bertemakan "Damai untuk Semua".

Dari apa yang telah di uraian tersebut di atas, tidak berarti di Kabupaten Jombang tidak ada konflik. Sebagaimana pernah viral di media massa, pernah ada seseorang bernama Jari, yang mengaku sebagai Nabi Isa di Buluharjo dan mengajarkan salat tiga waktu. Peristiwa itu disikapi secara emosional oleh sebagian warga, sehingga hampir menimbulkan konflik. Peristiwa itu kemudian didialogkan tokoh-tokoh agama dari MUI, NU, Muhammadiyah, LDII, dan lainnya. Akhirnya orang yang mengaku sebagai Nabi Isa tersebut, kemudian sudah syahadat lagi. Di Kabupaten Jombang, sinergi antara komponen masyarakat berjalan baik. Polres Jombang sering mengumpulkan

para penyuluh, kemudian mendatangi sekolah-sekolah dan memberikan penyuluhan. Pengurus MUI, PCNU juga sering mendatangi masjid-masjid dalam program turun ke akar rumput. Sekitar 70 – 100 orang hadir dalam acara tersebut. Pengurus MUI, PCNU kemudian memberikan ceramah, di antaranya tema tentang deradikalisasi. Dalam ceramah tersebut, disampaikan dalil-dalil tentang taat pada pemimpin. Misalnya hadis, "Barang siapa meremehkan umara (pemerintah), akan mendapat kerugian di dunia".

Relasi antara ormas juga berjalan baik. Ormas LDII sinkron dengan ormas agama lainnya, mereka beberapa mengadakan diklat dakwah. Dalam kegiatan tersebut, mereka mengundang Kankemenag Jombang dan MUI. Selain itu mereka juga mengundang pihak Polres untuk memberikan pembekalan kepada siswa-siswa yang lulus SMK, untuk dibekali materi wawasan kebangsaan sebagai bagian dari bekal mereka dalam berdakwah. Sebagai bagian dari diseminasi Moderasi Beragama, di Kabupaten Jombang ada kegiatan Subuh Keliling, yang dilakukan di masjid-masjid kecamatan. Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat dan staf dari seksi Bimas Islam, penyuluh agama, dan kapolsek. Kegiatan ini sebagai salah satu upaya sosialisasi konten Moderasi Beragama. Kegiatan Subuh Keliling tersebut, dalam satu bulan dilakukan dua kali, yaitu tiap Sabtu. Kegiatan dilakukan sejak 2018 hingga Maret 2019 (sebelum pandemi Covid-19). Kini, karena situasi Pandemi Covid-19, kegiatan tersebut ditunda.

Masyarakat sangat mendukung berbagai bentuk kegiatan yang mengandung semangat Moderasi Beragama yang dapat menciptakan kerukunan dan suasana damai. Masyarakat merasa dengan kerukunan maka aktivitas menjadi mudah, saling asah-asuh, dan senang. Jika ada gejolak mereka tidak aman, dan tidak bisa beraktivitas dengan damai. Selain kegiatan-kegiatan tersebut, ada banyak kegiatan lainnya yang menopang semangat Moderasi Beragama. Misalnya di Masjid Agung ada kuliah subuh setiap hari, kegiatan kuliah subuh ini juga menyampaikan materi-materi yang berhubungan dengan Moderasi Beragama. Ada juga kegiatan Rijalul Anshor, yang dilakukan di tiap kecamatan. Kegiatan tersebut merupakan gabungan antara Pemuda Ansor dan IPNU. Kemudian kegiatan Sorban (Seribu Rebana) dihadiri 1000an orang. Mereka datang ke kecamatan dengan jumlah yang hadir sekitar 800an orang. Selain itu, ada juga Banter (*Debaan Muter*).

## Pranata Sosial Moderasi Beragama

Implementasi Moderasi Beragama diwujudkan dalam berbagai bentuk pranata sosial, baik yang bersifat formal maupun nonformal. Pranata tersebut antara lain dengan terbentuknya MUI sebagai wadah komunikasi internal agama Islam, FKUB sebagai wadah komunikasi lintas agama, dan FKMJ sebagai wadah komunikasi vertikal antarpemerintah daerah dan masyarakat. Pranata sosial Moderasi Beragama di Kabupaten Jombang, juga terwujud dalam bentuk "Desa Sadar Kerukunan" yang ada di Desa Ngepeh dan Kepanjen. Kedua desa tersebut, merupakan potret masyarakat yang memiliki penduduk yang terdiri dari beberapa agama, namun memiliki sikap toleransi yang tinggi. Sehingga tidak pernah terjadi konflik antarumat beragama.

Selain wadah formal (organisasi) dan "Desa Sadar Kerukunan", pranata sosial moderasi beragama juga terimplementasi dalam berbagai kegiatan sosial keagamaan yang dilakukan secara sinergi oleh pemerintah daerah dan masyarakat seperti: Turun ke Bawah (Turba) melakukan penyuluhan, Subuh Keliling, Sorban (Seribu Rebana), dan Banter (*Debaan Muter*). Berbagai kegiatan tersebut, selain sebagai sarana komunikasi warga masyarakat secara vertikal dan horizontal, juga merupakan media bagi diseminasi Penguatan Moderasi Beragama.

William James seorang psikolog agama dalam *The Varieties of Religious Experience*, membagi tipe keberagamaan dalam dua tipe yaitu *healty minded religion* (keberagamaan yang sehat) dan *sick souled religion* (keberagamaan yang sakit). Keberagamaan yang sehat menurut James dicirikan dengan adanya pandangan terhadap dunia dan kehidupan yang optimistis, percaya diri, terbuka, dan gradual (sabar) melalui berbagai proses dan tahapan pematangan diri. Sebaliknya, keberagamaan yang sakit, menurut James, dicirikan oleh pandangan terhadap dunia yang pesimistis, penuh curiga, tertutup, serta nongradual atau instan dalam proses pencapaian tujuan dan cita-cita.

Organisasi-organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, serta pondok pesantren, dikenal memiliki sikap keagamaan yang terbuka (inklusif). Secara historis, keberadaan organisasi dan lembaga sosial keagamaan tersebut, telah lahir dan eksis sebelum NKRI dideklarasikan. Dalam proses sejarahnya, gerakan organisasi dan lembaga tersebut, juga menunjukkan adanya pencapaian tujuan dan cita-cita yang ingin diperjuangkan melalui proses gradual. Hal tersebut membuktikan bahwa organisasi dan lembaga

sosial keagamaan tersebut, dalam istilah William James memiliki tipe keagamaan yang sehat (*healty minded religion*). Tipe keagamaan model ini, tidak akan merasa terganggu oleh keberadaan kejahatan (*evil*) yang ada di sekelilingnya dan percaya diri bahwa dengan keimanannya ia akan mampu menghindarinya, bahkan mampu menanggulanginya. Atas dasar itu, sangat wajar jika tokoh agama dan masyarakat yang umumnya berafiliasi ke ormas dan lembaga keagamaan tersebut memiliki sikap keagamaan yang moderat.

Sementara itu, Gordon Willard Allport (1897 – 1967) seorang psikolog yang juga dikenal dengan teorinya tentang *mature and immature religion*. Dalam teorinya Allport menguraikan perbedaan masing-masing. Secara sederhana, *mature religion* merupakan sikap keagamaan yang matang atau dewasa (*mature religiosity*) yang di antaranya dicirikan dengan sikap keagamaan yang terbuka dan dinamis. Sedangkan *immature religion* merupakan sikap keagamaan yang mentah atau tidak dewasa, dan sikap kekanak-kanakan yang dicirikan dengan sikap mementingkan diri sendiri. Selanjutnya Allport mengembangkan teori orientasi beragama yang diklasifikasi menjadi intrinsik dan ekstrinsik. Selanjutnya, Allport menjelaskan, mereka yang memiliki orientasi ekstrinsik akan beragama secara instrumental dan utilitarian. Cara beragama semacam ini, menjadikan agama hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, baik personal maupun sosial. Orientasi beragama semacam ini, menurut Allport, adalah bentuk dari beragama yang belum matang.

Sementara itu, terdapat orang-orang yang memiliki orientasi intrinsik, di mana dalam keberagamaannya mereka cenderung berorientasi pada nilai dan substantif, serta menjadikan agama sebagai jalan dan orientasi hidup. Orientasi ini merupakan bentuk beragama yang tulus, dihayati, tanpa pamrih, matang, dan tidak memiliki prasangka rasial. Beberapa organisasi dan lembaga keagamaan sebagaimana dideskripsikan di atas, sejak lama tumbuh dan berkembang di Kabupaten Jombang, sebut saja misalnya NU, Muhammadiyah, LDII, pondok-pondok pesantren dan sejumlah tarekat. Organisasi dan lembaga keagamaan tersebut, selain sudah lama berdiri dan eksis di Jombang, juga dikenal memiliki sejumlah tokoh yang memiliki pemikiran keagamaan yang luas dan mendalam. Meminjam istilah Allport, mereka memiliki *mature religiosity* atau sikap keagamaan yang matang dan dewasa. *Mature religiosity* melahirkan orientasi keagamaan yang intrinsik yaitu

sikap keagamaan yang tanpa pamrih, tulus, dan tidak memiliki prasangka rasial, sehingga sikap yang ditunjukkan tokoh agama dan masyarakat dari pengikut organisasi dan lembaga keagamaan tersebut, paralel dengan cara pandang, sikap, dan tindakan yang menunjukkan keberagamaan yang moderat.

## Penutup

Moderasi Beragama dipahami para tokoh agama di Kabupaten Jombang sebagai sikap toleran terhadap pemeluk agama lain yang berbeda keyakinan, tidak konfrontatif terhadap pemerintah, mengedepankan dialog dalam menyikapi perbedaan, serta menghargai dan sikap persuasif terhadap tradisi atau budaya lokal. Tokoh agama umumnya memandang positif program Penguatan Moderasi Beragama, karena dinilai dapat menciptakan kerukunan dan suasana damai dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat merasa dengan terwujudnya kerukunan, aktivitas keseharian mereka menjadi mudah dilaksanakan.

Implementasi Moderasi Beragama, sebagai cara pandang, sikap, dan tindakan, terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan yang mengarah pada terwujudnya kerukunan, harmoni, dan damai di tengah masyarakat, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal seperti saling menghargai paham dan keyakinan agama, bersikap kooperatif dan tidak konfrontatif terhadap pemerintah, dan mengutamakan dialog dalam menghadapi perbedaan pendapat.

Moderasi Beragama menjadi *mainstream* sikap keberagamaan masyarakat Kabupaten Jombang. Moderasi Beragama terwujud dalam beberapa pranata sosial antara lain, organisasi MUI yang merupakan wadah komunikasi internal Islam, FKUB wadah komunikasi lintas pemeluk agama, dan FKMJ wadah komunikasi antarwarga masyarakat dan pemerintah, penetapan "Desa Sadar Kerukunan" sebagai desa percontohan, serta berbagai bentuk kegiatan sosial keagamaan lainnya.

## Daftar Pustaka

Al-Qaradhawi, Y (2006). Fiqh Maqashid Syariah; Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Al-Qurthubi. (2006) Al-Jami li Ahkami Al-Qur'an, Beirut Lebanon: Muassasah

ar-Risalah.

At-Thabari, I J (2008) Tafsir Ath-Thabari, Jakarta: Pustaka Azzam.

Azra, A (1999). Reinaisans Islam Asia Tenggara, Sejarah, Wacana, dan Kekuasaan. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Azra, A (2017). Islam Indonesia Inklusif vs Ekslusif. Makalah tidak diterbitkan, untuk Pengajian Ramadan PP Muhammadiyah. Jakarta 6 Juni 2017.

Van Brruinessen, M (1995). Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat. Bandung: Mizan.

Burhanuddin, J (2012). Ulama dan Kekuasaan, Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia. Bandung: Mizan.

Dhofier, Z (1994). Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kyai. Jakarta: LP3ES.

Effendy, B, dan Prasetyo, H (1998). Radikalisme Agama. Jakarta: PPIM UIN Syarif Hidayatullah.

Effendy, B (1998). Munculnya Intelektualisme Islam Baru di Indonesia: Tiga Aliran Pemikiran. Jakarta: Paramadina.

Esposito, J L (2010). Masa depan Islam, antara Tantangan Kemajemukan dan Benturan dengan Barat. Bandung: Mizan.

Hadi, A (2010). Aceh, Sejarah, Budaya, dan Tradisi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Hafner, R W (2000). Islam Pasar Keadilan. Yogyakarta: LKiS.

Hassan, M K (2015) The Concept of Wasathiyah and the Place of Islamic Moderation. In Yousuf, A.F. (ed), Applications of Wasatiyyah in the Contemporary Muslim World., Gombak: IIUM Press. http://irep.iium.edu.my/42616/1/42616.pdf

Jamhari (ed) (2005). Gerakan Salafi Radikal di Indonesia. Jakarta: Gramedia.

Jones, R (1979) "Ten Conversion Myths From Indonesia" dalam Nehemia Levtzion (ed.) Conversion to Islam, Jakarta: Gramedia.

Kamali, M H (2015). The Middle Path of Moderation in Islam, the Quranic Principle of Wasathiyah. Oxford University Press.

Kurzman, C (ed) (2003). Wacana Islam Liberal, Pemikirian Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global. Jakarta: Paramadina.

Kementerian Agama (2019). Moderasi Beragama.

Kementerian Agama (2020). Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020 – 2024.

Ma'arif Institute (2015). Fikih Kebinekaan, Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewargaan, dan Kepemimpinan Non-Muslim.

Mahmud, Y (2021). Timur Tengah dalam Sorotan, Dinamika Timur Tengah dalam Perspektif Indonesia. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Rahmatullah (2011). Islam Moderat dalam Perdebatan, dalam Jurnal Dialog vol 71, No.1, Tahun XXXIV, Juli 2011.

Ricklefs, M C (2001). A History of Modern Indonesia since c. 1300. Basingstoke: Palgrave.

Rumadi (2008). Post-Tradisionalisme Islam, Wacana Intelektualisme dalam Komunitas NU. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

Shihab, Q (2019). Kaidah Tafsir, Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an. Ciputat: Lentera Hati

Shodiqin, M A (2014). Muhammadiyah itu NU. Jakarta: Noura Book.

Setara Institute (2010). Laporan Penelitian: Radikalisme Agama di Jabodetabek dan Jawa Barat, Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan.

Woodward, M R (2004). Islam Jawa, Kesalehan Normatif versus Kebatinan. Yogyakarta: LKiS.

Yusqi, I (2015). Mengenal Konsep Islam Nusantara. Jakarta: Pustaka STAINU.

# Kisah Minoritas di Minahasa Utara

Ahsanul Khalikin

## Pendahuluan

Secara operasional, konsep moderasi beragama bukanlah sesuatu yang baru, namun sudah ada sejak lama ada di masyarakat, dan menjadi praktik keberagamaan di masyarakat. Yakni sikap terbuka, menghormati kepada kelompok lain, dan tidak mempertentangkan masalah keagamaan dengan persoalan kebangsaan. Hanya saja tidak seluruh komponen masyarakat mudah mencerna konsep moderasi beragama, sehingga selalu saja ada juga pihak-pihak tertentu di masyarakat yang kritis dan bahkan menolaknya. *Studi tentang Fungsi Masjid sebagai Pusat Pendidikan Moderasi Beragama* (Farida & Silvita, 2020) memperlihatkan penolakan terhadap konsepsi moderasi beragama telah menyisakan pekerjaan rumah yang cukup besar dalam mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat. Bisa jadi inilah yang menjadi penyebab terjadinya berbagai peristiwa kekerasan berbasis agama. Penyebabnya karena keberagamaan yang ekstrem, diperparah dengan minimnya ruang dan aktivitas perjumpaan yang melibatkan ragam identitas keagamaan. Artinya, semakin sedikit berinteraksi maka akan semakin tinggi tingkat kecurigaan dan salah paham antarumat beragama.

Setiap umat beragama memiliki kewajiban dan komitmen untuk menja-

ga keindonesiaan, dengan senantiasa memperkuat rasa persatuan dan kesatuan, serta memupuk rasa sebangsa dan setanah air, apa pun agama, suku, dan etnisnya. Misi ini mendapat tantangan dengan berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu dibutuhkan cara pandang, sikap dan praktik keberagamaan yang moderat.

Untuk meminimalisasi konflik yang mungkin terjadi sebagai akibat dari pemahaman agama yang ekstrem ataupun yang liberal dibutuhkan sebuah kebijakan nasional yang berbasis pada model-model moderasi beragama yang sudah lahir dan tumbuh di masyarakat. Gerakan merajut toleransi dan kebinekaan di negeri ini terus tumbuh. Tak hanya dalam wadah dialog yang merupakan ruang perjumpaan masyarakat lintas agama, suku dan ras, melainkan juga dalam aksi solidaritas kemanusiaan. Aksi terkini, di beberapa daerah masyarakat menginisiasi membangun monumen sebagai simbol perdamaian, seperti Monumen Merpati Perdamaian di Kota Padang, Tugu Perdamaian di Kota Sampit, Tugu Cinta Damai di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, dan lain-lain (Kompas, 2018). Aneka tugu atau monumen perdamaian, bahkan moral, sebagai simbol diam itu sebagai pengingat pentingnya merajut dan menjaga toleransi.

Beberapa model kerukunan umat beragama merupakan contoh yang banyak ditemukan di berbagai belahan Indonesia. Seluruh model moderasi beragama yang berbasis kearifan lokal tersebut merupakan sebuah ikhtiar masyarakat agar harmoni tetap terjadi. Upaya-upaya ini menarik untuk dikaji, kajian difokuskan pada konsepsi moderasi beragama di masyarakat, pentingnya moderasi beragama dan implementasi di lapangan.

Berdasarkan narasi di atas, studi tentang pemahaman masyarakat tentang moderasi beragama penting dilakukan. Studi ini menggali model-model moderasi beragama yang sudah ada dan tumbuh berkembang di masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan utama yang digali dalam studi ini adalah: bagaimana pemahaman masyarakat tentang moderasi beragama? Mengapa moderasi beragama dipandang penting untuk dikembangkan? Bagaimana implementasi moderasi beragama di masyarakat? Apa pranata yang dipilih untuk melembagakan moderasi beragama?

Hasil studi ini akan digunakan untuk merumuskan kebijakan moderasi beragama yang berbasis pada kebutuhan masyarakat. Manfaat secara prak-

sis terletak pada upaya tulisan ini untuk menyusun sebuah model dan formula yang berguna untuk mengidentifikasi berbagai bentuk kebijakan moderasi beragama.

## Keberagamaan dan Moderasi Beragama Minahasa Utara

Sebagian penduduk Minahasa Utara memeluk agama Protestan (78,08%) sebagai keyakinannya, kemudian diikuti dengan agama Islam (14,19%), Katolik (7,73%), Hindu (0,02%), Buddha (0,14%) dan Konghucu (0,01%). Data untuk lainnya untuk sementara belum tersedia di Kementerian Agama Minahasa Utara.

Berkaitan moderasi beragama sebenarnya erat kaitannya toleransi beragama namun ada pemutakhiran istilah yang tengah menjadi tren. Di Minahasa Utara secara umum Sulawesi Utara sebenarnya ada kearifan lokal yang dikatakan BKSAUA (Badan Kerja Sama Antarumat Beragama) dan Badan Musyawarah Antar Gereja (Bamag) itu bentuk dari aktualisasi pengejawantahan moderasi beragama. Dalam keanggotaan BKSAUA semua ada unsur agama, terdiri dari beberapa tokoh: tokoh Kristen, Islam, Katolik, Hindu, dan Buddha. Karena itu selain umat Kristen yang tinggal di Minahasa Utara termasuk umat Islam dan umat lainnya merasa nyaman dan tidak ada masalah tinggal termasuk dalam hal ini Ketua MUI Kabupaten Minahasa Utara sekitar 20 tahun tinggal di Kompleks Perumahan Bumi Kawangkoan Baru, Desa Kalawat. Termasuk dalam hal kegiatan hari raya besar Islam maupun Kristen dan yang lainnya saling menjaga dan memelihara. Berkaitan dengan konflik keagamaan yang terjadi ada beberapa riak-riak, tapi bisa diatasi tokoh setempat dengan cepat sehingga tidak terjadi konflik terbuka.

Di samping itu, tidak menutup kemungkinan kadang-kadang ada friksi, yang membuat kehidupan beragama bisa bergejolak, tapi para tokoh agama sudah biasa menyikapi hal itu, namun secara umum masyarakatnya sangat terbuka. Orang Manado disebut gampangan, diasumsikan gampangan negatif sekali. Ternyata kenyataannya gampangan begitu peduli atau mudah menerima, termasuk dalam hal berbeda agama, keyakinan, dan suku. Contoh, keluarga Ketua MUI Minahasa Utara sendiri dari pihak istri orang Minahasa Kamka Lewu diakui keluarga "pelangi" agamanya berbeda-beda, artinya mereka bergaul dengan keluarga tidak ada sekat. Inilah miniatur bagaimana mereka bisa memahami kepercayaan masing-masing individu, itu yang di-

anggap luar biasa.

Di tempat tinggal Ketua MUI Minahasa Utara terdapat Masjid Al-Muhsinin Desa Kalawat, Kecamatan Kalawat, padahal lingkungan paling banyak umat Kristen, jarak masjid sekitar 1 km. Lingkungan sekitar masjid umat muslim sangat sedikit, ketika pengelola masjid memutar suara *murattal*, *tarhim* salat Subuh tidak ada yang menegur atau merasa terganggu. Umat Islam merasa nyaman, umat Kristen sendiri merasa bersyukur dengan adanya sebelum subuh diputar *murattal* mereka terbangun dan waktu itu jam aktivitas umat Kristen juga. Mereka berterima kasih, bahkan ada beberapa kesempatan Bupati Minahasa Utara dan beberapa pejabat yang datang memberikan sambutan. Termasuk ada agenda pagi-pagi dibiasakan tali silaturahmi kehidupan beragama dengan pemanfaatan keberadaan di lingkungan Masjid Al-Muhsinin. Masjid Al-Muhsinin dibangun dari tanah wakaf pada 1997. Umat Kristen di sekitar lokasi tidak keberatan dengan rencana tersebut. Di lingkungan Kompleks Perumahan Bumi Kawangkoan Baru Desa Kalawat, lokasi berdirinya masjid, warga muslim waktu kurang dari 10 orang.

Dalam memaknai pemahaman membangun relasi, berbeda agama, keyakinan, dan paham betul-betul memaknai *lakum dīnukum waliy al-dīn*. Meskipun yang dirasakan dalam kepengurusan FKUB Minahasa Utara yang mewakili muslim hanya seorang. Ini disayangkan umat Islam di sana. Padahal dalam berbagai kegiatan atau isu-isu yang dihadapi FKUB, tokoh agama Kristen sering meminta pendapat KH Baedowi, Ketua MUI Minahasa Utara. Maksudnya mereka betul-betul ingin pendapat tokoh dari umat Islam, walaupun keanggotaan FKUB muslim kecil namun betul-betul diajak diskusi dan diminta pendapatnya. Para tokoh Kristen sering mengatakan "bagaimana Pak Haji baiknya".

Kasus Masjid Al-Hidayah merupakan salah satu konflik rumah ibadah yang terjadi Minahasa Utara. Masjid ini terletak di Kompleks Perumahan Griya Agape Desa Tumaluntung, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara. Penulis hadir ketika masjid ini diresmikan pada 21 Mei 2021. Kasus ini bermula dari pendirian bangunan dengan izin Balai Pertemuan Umum (BPU), bukan musala. Ketika konflik mencuat pada 2019, penggunaan bangunan itu sudah memasuki usia dua tahun. Karena permohonan musala tidak diizinkan, akhirnya pengelola membuat majelis taklim hingga berdiri bangunan masjid. Mula-mula, bangunan itu tidak berbentuk umumnya

musala atau masjid. Luasnya, 20 x 25 meter. Karena izin dari Kantor Desa Tumaluntung tidak kunjung keluar, pengurus musala dan warga muslim di sana menyatakan bangunan tersebut sebagai musala (Ibnu Hajar, 2021).

Di bangunan yang disebut musala itu berbagai kegiatan seperti kajian-kajian keagamaan dan salat lima waktu tidak mendapat penentangan dari warga sekitar. Masalah timbul ketika Jamaah Tabligh hadir. Beberapa tokoh umat Islam kecewa dengan perusakan bangunan akibat salah paham. Warga mengira bangunan itu hanya balai pertemuan umum bukan tempat ibadah, sedang warga muslim menyebutnya sebagai musala.

Warga penentang menyatakan Ketua MUI Baedowe Ibnu Hajar munafik karena mendukung sikap KH Wahab, tokoh umat Islam di Agape. Ketua MUI bahkan menyatakan keluar dari komunitas muslim Masjid Agape di mana ia bergabung sebelumnya. Beruntung Kepala Kantor Kemenag Minahasa Utara Anneka M Purukan mendukung proses perizinan masjid. Surat rekomendasi Kemenag dan FKUB keluar sesuai rencana. Banyak pihak bersyukur dengan selesainya konflik tersebut. Setiap pihak berhasil menahan diri sehingga konflik tidak berakhir dengan konflik kekerasan. Tokoh agama, pemerintah, dan aparat kepolisian memainkan peran penting, terutama langkah-langkah mediasi. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh semangat mempertahankan Sulawesi Utara sebagai miniatur kerukunan umat beragama.

Bupati Minahasa, Vonnie Anneke Panambunan, salah seorang aktor penting dalam penyelesaian kasus. Keberhasilannya mengatasi konflik akan meningkatkan kepercayaan publik akan kemampuannya mengelola daerah. Ketika peristiwa terjadi, Vonnie disebut-sebut akan maju sebagai kandidat gubernur Sulawesi Utara. Ia menghubungi Kapolres Minahasa Utara, Grace Rahakbau, untuk membantu mendampingi proses permintaan dukungan 60 tanda tangan warga sekitar dan 90 warga pengguna. Kapolres mengirim dua anggota kepolisian untuk mendampingi proses permintaan tanda tangan dari pintu ke pintu. Meski begitu, prosesnya tidak semudah yang diperkirakan. Sebab sebagian warga ditahan aparat dengan dugaan perusakan bangunan. Ini yang membuat sebagian warga sekitar enggan memberi tanda tangan.

Keluarnya IMB juga berliku. Rapat Bupati dengan pejabat terkait, perwakilan MUI, dan FKUB. Di hadapan dua 23 peserta yang hadir, Bupati meminta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Minaha-

sa Utara menyelesaikan secepatnya IMB Masjid Al-Hidayah. Bupati bahkan mengancam, jika tidak selesai, Kepala Dinas akan diberhentikan.

Usai rapat Ketua MUI dan Kepala Dinas bekerja untuk tahap selanjutnya: menghubungi BPN, notaris, dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Minahasa Utara. Bakda isya, rancangan IMB masjid rampung. Informasi ini disampaikan ke Bupati. Atas permintaan Bupati, menjelang pukul 12 malam, Ketua MUI bersama Kepala Dinas Perkim dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Minahasa Utara, dua orang panitia pembangunan masjid mendatangi rumah pribadi Bupati. Di sana terima IMB Masjid Al-Hidayah Agape dilakukan dan diliput teve swasta.

## Pentingnya Moderasi Beragama

Pemahaman radikal dan ekstremisme di Minahasa Utara masih ada meskipun gaungnya tidak kuat. Tokoh agama dan lembaga terkait selalu menyampaikan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan umat beragama. Di berbagai kesempatan tokoh MUI, pendeta, maupun tokoh agama lain selalu mengingatkan berkembangnya gerakan Wahabi, Salafi, Takfiri, Jihadis.

Kepolisian Minahasa Utara memberikan informasi kepada tokoh agama mengenai berkembangnya ceramah-ceramah yang berpotensi melahirkan ketegangan di masyarakat. Di berbagai kesempatan, narasi dalam ceramah-ceramah tersebut cenderung mengabaikan kebijakan pemerintah. Contohnya kebijakan penanganan Virus Korona 19. Bagi beberapa tokoh, kebijakan itu merupakan bagian rekayasa. Narasi negatif tidak hanya ada di kalangan muslim, tapi juga Kristen.

Pemahaman dan kebijakan moderasi beragama dapat menjadi penawar bagi kasus-kasus konflik. Misalnya dalam kasus pendirian Musala Al-Ihsan dan Nurul Ikhlas di Kompleks Perumahan Kawangkoan Baru, Desa Kawangkoan Baru, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara.

Tokoh agama Islam dan Kristen memiliki ikatan yang kuat. Situasi ini diperkuat oleh tradisi lokal yang disebut *butusidu* (guyonan). Ini yang membuat berkembangnya sikap saling pengertian di antara mereka. Ketika umat Islam berencana mendirikan masjid dan mengajukan izin, bahkan tokoh Kristen membantu mencarikan tanda tangan dukungan.

Menurut Ibnu Hajar, tantangan moderasi bisa datang dari pelayanan publik yang diskriminatif. Bantuan-bantuan pemerintah untuk komunitas

muslim diterima lebih lama dan berbelit-belit ketimbang bantuan untuk komunitas Kristen. Seperti sejumlah kasus di Pulau Jawa, tidak sedikit gereja di Minahasa Utara berdiri tanpa IMB. Meski demikian, gereja-gereja tersebut tetap diminta melengkapi data seperti jumlah jemaah. Banyaknya denominasi gereja dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik internal. Di tengah tantangan itu, muslim di Minahasa Utara sudah memiliki 66 masjid dan 6 musala.

Sudah seharusnya masyarakat Minahasa Utara berkomitmen terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Eka. Para tokoh agama selalu menyampaikan, berdirinya negara Indonesia bukan umat Islam saja yang mendirikan, melainkan berbagai suku bangsa dan agama.

Kita takut ada narasi yang berkaitan dengan Islam Nusantara disalahpahami pemaknaannya. Islam Nusantara yang selalu kita sampaikan bahwa Islam yang diadopsi menyesuaikan dengan budaya Indonesia, itu yang penting sekali disampaikan bahwa bukan serta merta dikatakan Islam Nusantara beda dengan di Arab Saudi tapi terkait dengan budaya, contoh ringan di Arab Saudi tidak ada songkok (peci hitam) sedangkan di Indonesia ada songkok maka itulah dikatakan Islam Nusantara. Kita menyadari kalau berkaitan dengan pemahaman agama masing-masing, kalau pemahaman negara pemahaman bersama.

Selama tinggal di Minahasa Utara, penulis belum pernah mendapati komunitas eksklusif yang membangun pemahaman yang keluar dari nusantara. Memang pernah muncul kasus kelompok-kelompok yang dianggap bermasalah. Namun setelah ditelusuri, yang terjadi hanya perbedaan cara dan ritual. Misalnya, kasus Aliran Tasawuf Laduna Ilma Nurul Ihsan (LINI) di Kotamobagu dan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf (MPTT) di Kecamatan Likupang. Kedua komunitas ini terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Majelis ini dianggap eksklusif.

## Pranata Baru Pendorong Moderasi Beragama

Pelembagaan moderasi beragama di Minahasa Utara salah satunya terjadi melalui pendirian Badan Kerja Sama Antarumat Beragama (BKSAUA) dan Badan Musyawarah Antar Gereja (Bamag). Lembaga yang menjangkau hingga tingkat desa ini berperan dalam merespons berbagai isu sosial keagamaan di Sulawesi Utara. BKSAUA beranggotakan 50 orang asal Sulawesi Utara

dan 7 orang dari Minahasa Utara. Kebanyakan mereka tokoh lintas agama dan tokoh budaya. Peran mereka tidak jauh berbeda FKUB.

Mayoritas berpenduduk Minahasa Utara beragama Kristen (78,08%). Islam agama terbesar kedua (14,19%). Kemajemukan dan keberagaman masyarakat Minahasa Utara menjadi salah satu modal membangun moderasi beragama. "*Torang samua basudara*" merupakan filosofi kultural yang memperkuat ikatan warga lokal dan para pendatang. Filosofi ini membangun pemahaman perbedaan agama dan segala bentuk identitas primordial tidak menjadi penghalang untuk tumbuh berkembang bersama.

Filosofi kultural lainnya dikenal dengan "*sitou timou tumou tou*", rasa saling terbuka dan menerima perbedaan. Konsep ini membuat masyarakat Jawa yang tinggal dalam pembuangan, sekalipun beragama Islam melabeli diri mereka dengan sebutan "*niyaku toudano*" (aku orang Tondano) (Sis, MT, 2003; Sandiah, N, & Ulaen, A J, 2003). Dalam kerja sama dikenal nilai budaya *mapalus* (kerja sama), yaitu yang dilakukan sebagai usaha saling membantu dalam mengerjakan ladang. Saat ini, pemerintah kota Manado mengadopsinya terutama aktivitas BKSAUA dan Bamag.

Budaya demokrasi yang berusaha dipraktikkan di Minahasa Utara memiliki akar kultur di masa lampau. Tiap kelompok masyarakat, dipimpin oleh kepala walak yang merupakan perpanjangan lidah dari warganya. Dalam pengambilan keputusan strategis, seperti pembagian wilayah, para kepala walak melaksanakan musyawarah sebagai model berdemokrasi ideal dan forum yang dihargai masyarakat Minahasa.

Budaya nondiskriminasi tecermin dari praktik penghormatan terhadap perempuan. Sejak masa lalu, perempuan mendapat tempat, peran, dan peluang yang sama dengan laki-laki. Begitu juga tiap kelompok etnis berbeda latar belakang budaya yang ada. Masyarakat Manado tidak terlalu memperhitungkan masalah mayoritas-minoritas agama. Orang lokal dan pendatang mendapatkan posisi dan peluang yang sama untuk berkembang dan berekspresi. Tidak dapat dilupakan pula adalah nilai budaya silaturahmi yaitu salah satu perekat kerukunan hidup dalam perbedaan. Tiap orang merasa dihormati dan diakui keberadaannya sebagai manusia. Nilai dan tradisi ini mematahkan eksklusivitas religius (Suleman, 2017)

## Penutup

Berdasarkan pembahasan, dalam hal ini terlihat bahwa masyarakat memahami tentang moderasi beragama sebenarnya erat kaitannya toleransi beragama namun ada pemutakhiran istilah sekarang. Minahasa Utara secara umum Sulawesi Utara sebenarnya ada kearifan lokal yang mereka katakan bentuk dari aktualisasi pengejawantahan moderasi beragama adalah BKSAUA dan Bamag. Alasan moderasi beragama dipandang penting bahwa pemahaman radikal dan ekstremisme di Minahasa Utara tentu masih ada namun gaungnya tidak terlalu terasa karena tokoh agama dan lembaga terkait selalu sampaikan untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat beragama. Di berbagai kesempatan MUI, pendeta, maupun tokoh agama lainnya selalu diingatkan pemahaman yang diterima dari luar harus lebih berhati-hati berkaitan pemahaman Wahabi, Salafi, Takfiri, Jihadi, selalu mereka sampaikan.

Implementasi moderasi beragama di masyarakat, terkait komitmen kebangsaan dengan ketentuan Pancasila Dasar Negara, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Eka tentu saja bagi umat Islam dan Kristen di Minahasa Utara sudah sepantasnya dan sewajarnya bahwa mereka berkomitmen dengan NKRI karena itu dasar utama kita dalam hidup berbangsa dan beragama. Para tokoh agama selalu menyampaikan bahwa berdirinya negara Indonesia bukan umat Islam saja yang mendirikan, melainkan berbagai suku bangsa dan agama.

Pranata yang dipilih untuk melembagakan moderasi beragama, budaya lokal orang Minahasa yang melembaga untuk merespons berbagai agama dan suku adalah BKSAUA dan Bamag membawahi semua lembaga, mereka yang merespons permasalahan berkaitan persoalan keumatan bahkan di budaya juga yang menjadi kearifan lokal di Sulawesi Utara. Peran kedua lembaga ini perlu diperkuat, salah satunya melalui dukungan fasilitas dan pendanaan dari pemerintah daerah. Kementerian Agama menjadikan kedua lembaga ini mitra strategis dalam mencegah kasus-kasus konflik keagamaan dan memperkuat moderasi beragama.

## Daftar Pustaka

Bartels, D (2017). Di Bawah Naungan Gunung Nunusaku Jilid I: Kebudayaan. Terj. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

BPS Minahasa Utara (2021). Kabupaten Minahasa Utara Dalam Angka 2021", CV. Bahu Bahtera Indah.

Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Utara. (2020). Laporan Tahunan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara 2020".

Kaunang Fian (2017). Sejarah Asal Usul Suku Minahasa, 28 Juni 2017.

Kemenag RI (2019). Moderasi Beragama, Jakarta: Kemenag RI.

Kemenag RI (2021). Roadmap Moderasi Beragama, Penerbit Kementerian Agama.

Suleman, F (2017). Keberagaman Budaya dan Agama di Kota Manado, Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi, 2599-1078.

Tim Peneliti Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan. (2017). Peta Penyiaran Agama Islam di Masjid di berbagai wilayah Indonesia.

Sandiah, N, & Ulaen, A J (2003). Niyaku Toudano: Maulud Tumenggung Sis dan Orang Jaton. Manado: BKSNT dan Laboratorium Antropologi FISIP Unsrat.

Sis, M T (2003). Tradisi Ba'do Ketupat Masyarakat Jaton Di Sulawesi Utara. BKSNT dan Laboratorium Antropologi Fisip Unsrat.

Sugiyarto, W (2019). Dinamika Moderasi Beragama di Kota Makasar. Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan.

Tim Peneliti Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, 2020. Masjid sebagai Pusat Pendidikan Moderasi Beragama di Era Pandemi di berbagai daerah.

Wenas, J (2007). Sejarah dan kebudayaan Minahasa. Institut Seni Budaya Sulawesi Utara.

# Moderasi di Lereng Merapi

Anik Farida

## Pendahuluan

Pandangan bahwa Indonesia tempat terbaik bagi kemajemukan tidak berlebihan dan tidak mengada-ada. Keragaman budaya, agama, etnis dan bahasa di Indonesia merupakan fakta sosiologis. Konsep majemuk atau multikultural dapat diartikan sebagai konsep harmoni yang tumbuh dalam perbedaan budaya, termasuk agama, dan setiap orang menghargai kebudayaan orang lain dalam komunitasnya.

Kemajemukan ini masih akan dijumpai di masing-masing identitas ini, termasuk identitas agama. Pada masing-masing agama, kemajemukan akan dijumpai pada area tafsir agama. Berkembangnya mazhab, sekte, atau aliran dalam agama mana pun fakta internal yang tidak dapat dihindari. Semua ini akibat perbedaan kapasitas dan kemampuan berpikir, perspektif, ataupun pendekatan yang dipilih masing-masing orang. Selain itu, teks-teks keagamaan memang terbuka terhadap aneka penafsiran, faktor yang mendorong lahirnya aliran dan kelompok keagamaan yang beragam, bahkan bertentangan. Kemajemukan agama dan penafsiran di dalamnya adalah keniscayaan. Ia kehendak Tuhan agar manusia saling menyapa, mengenal, berkomunikasi, dan bersolidaritas.

Jika tidak dikelola, kemajemukan harus diakui potensial menciptakan konflik berlatar isu keagamaan. Kerawanan terjadi karena agama umumnya menyediakan klaim kebenaran bagi para pemeluknya. Masing-masing me-

mahami dan mengklaim agama dan keyakinan merekalah yang paling benar, sedang lainnya salah. Fanatisme "buta" tanpa disertai sikap toleransi, penghargaan, dan penghormatan terhadap agama lain justru pemicu konflik (Udin, 2016).

Faktor pemicu konflik salah satunya berpangkal dari ekstremisme beragama. Fenomena yang lahir dari keberagamaan berlebihan ini semakin masif di Indonesia. Meski jumlahnya sangat kecil dibanding penganut agama yang mayoritas moderat, tapi indoktrinasi paham keagamaan ekstrem membuat kita harus ekstra waspada. Lengah sedikit, maka paham-paham intoleransi dan radikalisme akan terus bermetamorfosis menjadi aksi terorisme.

Secara konseptual, pandangan dan praktik keagamaan ekstrem sering muncul dari cara pandang teosentris ekstrem dan mengabaikan dimensi antroposentrisme. Pandangan teosentris mendoktrin penganutnya untuk memaknai ibadah sebagai upaya "membahagiakan" Tuhan melalui sejumlah ritual ibadah dalam pengertiannya yang sempit. Imajinasi "demi membela Tuhan" yang tertanam dalam cara berpikir membuat kelompok garis keras memaknai ibadah dan agama hanya dalam perspektif "memuaskan hasrat ketuhanan" sembari mengabaikan nilai dan fungsi agama bagi kemanusiaan (Hilmy, 2019). Jika cara pandang, cara berpikir atau paradigma ekstrem dalam beragama menjelma ideologi yang bersifat sosial politik, disebutlah sebagai radikalisme. Fenomena ekstremisme beragama mengganggu harmonisasi umat beragama. Kerukunan umat beragama yang merupakan cita-cita hampir semua penganut agama akan terkoyak jika dalam masyarakat masih bersemayam cara pandang ekstrem.

Di ujung ekstrem lainnya, muncul pandangan keagamaan liberal. Cara pandang ini mencirikan penolakan terhadap hal-hal ilahiah atau ketuhanan. Corak khas pandangan ini mendewakan akal dan mengabaikan ritual hingga hukum-hukum Tuhan. Kekhasan ini sangat berbahaya jika merasuki sistem politik dan sistem ekonomi Indonesia karena akan menciptakan ketidakadilan sosial. Menghadapi situasi sosial keagamaan seperti ini, keberagamaan moderat harus dipromosikan.

Secara operasional moderasi beragama bukan konsep. Ia ada, tumbuh, dan menjadi praktik keberagamaan di masyarakat sejak lama. Praktik itu berupa sikap menghormati kelompok lain dan tidak mempertentangkan

masalah keagamaan dengan persoalan kebangsaan. Hanya saja tidak seluruh komponen masyarakat mudah mencerna konsep moderasi beragama. Selalu ada juga pihak-pihak tertentu di masyarakat yang kritis dan bahkan menolaknya. Studi Farida dan Silvita (2020) memperlihatkan penolakan terhadap konsepsi moderasi beragama menyisakan pekerjaan rumah cukup berat dalam mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat. Keberagamaan ekstrem masih diperparah dengan minimnya ruang dan aktivitas perjumpaan yang melibatkan ragam identitas keagamaan. Artinya, semakin sedikit berinteraksi, semakin tinggi tingkat kecurigaan dan salah paham antarumat beragama. Studi tersebut juga menemukan bahwa konsep keadilan (dalam moderasi beragama) harus berbasis pada demokrasi liberal, dalam arti demokrasi harus mempertimbangkan hak-hak komunal. Dengan demikian konsepsi moderasi beragama seperti ini belum sepenuhnya dapat mengakomodasi keadilan dan keseimbangan pada kelompok minoritas.

Studi di atas memperlihatkan konsep dan definisi moderasi beragama belum dipahami komprehensif. Alih-alih dipahami, sebaliknya masyarakat mencampuradukkannya dengan konsep moderasi agama. Ini definisi keliru karena secara esensial agama hadir di muka bumi sudah dalam corak moderat. Buktinya, agama yang diturunkan di muka bumi selalu berisikan pesan-pesan kebajikan demi menjaga harkat kemanusiaan. Inilah moderasi agama. Dengan demikian problem yang dihadapi adalah cara beragama para pemeluknya yang belum atau tidak moderat. Konsep moderasi beragama di masyarakat penting diketahui oleh penyelenggara negara (pemerintah) terutama para pengambil kebijakan di bidang keagamaan agar mereka menghasilkan model kebijakan yang tepat.

Berdasarkan argumentasi di atas, studi yang lebih banyak dan dalam untuk mendorong pemahaman moderasi beragama pada semua level dan kelompok di masyarakat penting dilakukan. Penting juga dicatat, meski masyarakat dipandang tidak memahami konsepsi moderasi beragama, namun praktik-praktik beragama moderat sering kali mereka jalankan. Bahkan praktik-praktik tersebut terlembagakan. Ini model moderasi kultural yang memungkinkan direplikasi di tempat lain.

## Berbagai Pandangan Moderasi Beragama

Studi Abror (2019) menegaskan moderasi dalam kerukunan beragama haruslah dilakukan karena modal membangun kerukunan umat antar agama atau keyakinan. Untuk mengelola situasi keagamaan di Indonesia yang sangat beragam, kita membutuhkan visi dan solusi yang menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam menjalankan kehidupan keagamaan: mengedepankan moderasi beragama, menghormati keragaman, serta tidak terjebak pada intoleransi, ekstremisme dan radikalisme.

Toleransi beragama bukan untuk saling melebur dalam keyakinan. Tidak juga untuk saling bertukar keyakinan dengan kelompok agama yang berbeda. Toleransi di sini dimaknai dalam pengertian muamalah (interaksi sosial) yang menyediakan batas-batas bersama yang boleh dan tidak boleh dilanggar. Inilah esensi moderasi dalam bingkai toleransi di mana masing-masing pihak diharapkan bisa mengendalikan diri dan menyediakan ruang untuk saling menghormati keunikan masing-masing tanpa merasa terancam keyakinan maupun hak-haknya.

Fokus kajian Abror belum "menggarap" isu mendasar moderasi beragama yakni pemahaman masyarakat tentang konsepsi tersebut. Selain itu, kajian ini juga belum menggali data tentang strategi masyarakat memperkuat moderasi beragama.

Studi Akhmadi (2019) berusaha memberi perhatian terhadap peran aktor dalam membangun moderasi. Kajiannya menggali lebih jauh bagaimana penyuluh agama menyosialisasikan moderasi beragama di tengah keragaman masyarakat. Studi ini belum memberi perhatian bagaimana masyarakat memahami konsep moderasi beragama.

Sebagai salah satu indikator moderasi beragama, sejumlah studi menjadikan toleransi sebagai fokus. Salah satunya studi Elius dkk., (2019) yang mengkaji ajaran-ajaran Islam tentang toleransi. Studi tersebut menyoroti ajaran-ajaran Islam yang mempromosikan toleransi beragama dan dialog dengan memberikan kebebasan, keadilan dan persamaan hak untuk semua pemeluk tanpa memandang agama, budaya dan peradaban. Meskipun beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi tampak bertentangan dengan prinsip dialog dan toleransi, setelah diteliti dan dikontekstualisasikan, disimpulkan bahwa ajaran Al-Qur'an dan hadis Islam memainkan peran penting dalam mempromosikan toleransi, dialog, dan kerukunan antaragama di masyara-

kat dunia.

Penelitian Puslitbang Bimas Agama Badan Litbang dan Diklat (2019) berhasil menemukan potensi moderasi beragama yang terlembagakan dalam pranata sosial budaya di lokus penelitian: Pulau Bangka (Provinsi Bangka Belitung), Provinsi Jawa Timur, Kota Bekasi (Provinsi Jawa Barat), Kota Denpasar (Provinsi Bali), Kota Makassar (Provinsi Sulawesi Selatan), Kota Ternate (Provinsi Maluku Utara), dan Kota Tual (Provinsi Maluku), Kota Lasem (Provinsi Jawa Tengah).

Studi tersebut bersifat deskriptif dan belum banyak menjelaskan mengapa pranata sosial budaya penting dibangun dan ditumbuhkembangkan. Studi ini juga belum menjawab bagaimana pemahaman masyarakat tentang moderasi beragama dan kebutuhan membangun dan memperkuatnya dalam pranata budaya.

Berbeda dengan studi-studi yang dijelaskan di atas, studi kami menggali lebih dalam aspek pengetahuan masyarakat tentang moderasi beragama. Perbedaan lainnya, studi ini menjelaskan strategi masyarakat dalam menumbuhkembangkan moderasi beragama melalui pranata budaya.

## Magelang dan Moderasi Beragama

### *Profil Lokasi dan Demografi*

Kecamatan Dukun terletak di sebelah timur laut Kecamatan Muntilan, berbatasan dengan Kecamatan Srumbung di sebelah utara, Kecamatan Selo Boyolali di sebelah barat, dan Kecamatan Sawangan di sebelah tenggara. Tanah di Kecamatan Dukun sangat subur. Hasil pertaniannya beraneka ragam: padi, sayur-sayuran, dan umbi-umbian. Untuk menambah kesuburan tanah para petani memberikan pupuk kandang dan sedikit pupuk pabrik di lahan pertaniannya.

Sebanyak 70% rumah warga di kecamatan ini bangunan permanen. Sebagian besar jembatan berkualitas baik, meski masih terdapat beberapa di antaranya kurang memenuhi standar. Jembatan rusak akibat erupsi Merapi pada 2011 dibangun kembali. 19 jalur transportasi cukup baik. Jalur utama terbuat dari aspal. Di perkampungan, sebagian jalan terbuat dari aspal dan beton. Beberapa masih berupa bebatuan dan tanah.

Kecamatan Dukun terdiri dari 15 desa/kelurahan dengan 144 dusun. Ke-

15 desa/kelurahan itu: Ketunggeng, Ngadipuro, Wates, Kalibening, Ngargomulyo, Keningar, Sumber, Dukun, Banyubiru, Banyudono, Mangunsoko, Sewukan, Krinjing, Paten, dan Sengi.

Lokus penelitian ini adalah Ngargomulyo. Desa ini berada di lereng barat Gunung Merapi, berjarak kurang lebih 5,7 kilometer dari puncak Merapi. Di sebelah timur, Desa Ngargomulyo berbatasan dengan Taman Nasional Gunung Merapi di sebelah timur, Desa Keningar di utara, Desa Argosoko di selatan, dan Desa Kalibening di barat.

Menurut catatan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK), Desa Ngargomulyo satu dari desa di Kawasan Rawan Bencana/KRB III. BPPTK membagi KRB dalam tiga zona, yakni KRB I, KRB II dan KRB III. Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi KRB I (zona kuning) merupakan kawasan berpotensi terkena lahar atau banjir lahar serta kemungkinan terdampak perluasan awan panas. Apabila terjadi letusan besar, kawasan KRB I berpotensi tertimpa material jatuhan seperti hujan abu atau lontaran batu (pijar). Kawasan ini terletak di sepanjang sungai, dekat lembah, atau bagian hilir sungai yang berhulu dari puncak Gunung Merapi. Berdasarkan Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi, KRB I meliputi area yang berada di Barat, Barat Daya, dan Selatan Gunung Merapi.

KRB II (zona merah muda) yakni kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, lontaran batu, guguran, hujan abu lebat, serta aliran lahar. Kawasan ini umumnya berada di lereng dan kaki Gunung Merapi. Pada kawasan ini masyarakat diharuskan mengungsi apabila terjadi peningkatan aktivitas Gunung Merapi sesuai arahan pemerintah setempat.

Sementara, KRB III (zona merah) merupakan kawasan yang paling dekat dengan puncak Gunung Merapi dan paling berbahaya jika terjadi erupsi. Area ini berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, guguran batu, lontaran batu (pijar), dan hujan abu lebat. Karena tingkat kerawanannya yang tinggi, KRB III tidak direkomendasikan sebagai hunian tetap.

Berdasarkan data registrasi penduduk desa 2017, penduduk Desa Ngargomulyo berjumlah 2.479 jiwa. Laki-laki 1.182 jiwa dan perempuan 1.297 jiwa dengan total 805 kepala keluarga.

### *Relasi Sosial: Antara Konflik dan Harmoni*

Warga di Kecamatan Dukun memiliki banyak upacara tradisi pening-

galan nenek moyang. Sebagian dilestarikan, sebagian lagi punah. Upacara tradisi tersebut sambatan/gotong royong, *merti dusun*, *nyadran*, dan *ngluari ujar/nadar*. Selain itu, ada upacara pada momen-momen penting dalam daur hidup manusia. Beberapa upacara di momen pernikahan, *mitoni*, *tedhak siten*; upacara memperingati orang meninggal, *telung dina*, *mitung dina*, *matang puluh*, *nyatus*, *mendhak pisan*, dan *mendhak pindho*.

*Sambatan* adalah kegiatan gotong royong yang sering dilakukan di daerah-daerah pedesaan di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta. *Sambatan* sering dilaksanakan ketika warga akan membangun rumah. Biasanya dikerjakan ketika mendirikan tiang penyangga genteng rumah atau biasa disebut dengan kuda-kuda. Kegiatan pendirian kayu penyangga/penopang genteng ini disebut dengan *ngedekne omah* dalam bahasa Jawa.

*Sambatan* biasanya diikuti seluruh warga dalam suatu area atau lingkungan seperti RT atau dusun. Mereka akan diminta mengangkat "kuda-kuda" penyangga rumah. Kegiatan ini dilakukan usai kenduri. Mereka yang mengikuti sambatan tidak mendapatkan bayaran. Tenaga mereka hanya akan dibalas dengan konsumsi atau makan bersama setelah kegiatan selesai.

*Sambatan* di Ngargomulyo tradisi yang masih kuat dipertahankan warga. Warga yang sedang mendirikan rumah tidak perlu membayar tukang batu yang membangun rumah warga. Mulai menggali tanah untuk *baturan* atau fondasi, peletakan batu pertama, membangun dinding, pemasangan atap, dan lainya semua dikerjakan dengan gotong royong tanpa upah. Upah hanya diberikan kepada tukang kayu.

*Sambatan* tidak hanya dilakukan saat membangun rumah. Pengolahan lahan pertanian juga dilakukan bergotong royong. Seseorang yang mempunyai pekerjaan untuk dikerjakan secara bergotong royong tidak harus mengeluarkan uang sebagai upah tetapi hanya menyediakan makanan dan juga rokok. Perbaikan jalan, memperbaiki saluran air, perbaikan fasilitas umum, dan kebersihan desa juga dilakukan bergotong royong.

Menjelang Ramadan, masyarakat Jawa, termasuk desa-desa di Kecamatan Dukun banyak yang berkunjung ke makam-makam. Di sana mereka mendoakan para leluhur, membersihkan makam, menaburkan bunga, dan mengadakan acara kenduri. Di kalangan masyarakat Jawa, tradisi unik itu dikenal dengan sebutan *nyadran*.

Kata *nyadran* berasa dari Sanskerta, *sraddha*, berarti keyakinan. Tradisi *nyadran* oleh sebagian besar masyarakat Jawa menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Begitu juga pada masyarakat Ngargomulyo. Tradisi menyambut Ramadan itu dilakukan warga Ngargomulyo setahun sekali di bulan Ruwah dalam kalender Jawa. Kepercayaan terhadap *nyadran* merupakan wujud syukur kepada Allah SWT. Masyarakat Jawa percaya dengan dilakukannya tradisi *nyadran* dapat membantu kerabat atau keluarga yang sudah meninggal untuk mendapatkan ketenangan dialam kubur.

*Nyadran* sudah ada sejak zaman Hindu dan Buddha. Sejak abad ke-15, para Wali Sanga menggabungkan tradisi tersebut dengan dakwah agar Islam mudah diterima. Waktu itu, para Wali Sanga berusaha meluruskan kepercayaan masyarakat Jawa tentang pemujaan roh yang dalam Islam dinilai musyrik. Namun, agar tidak berbenturan dengan tradisi Jawa, mereka tidak menghapuskannya melainkan menyelaraskan dan mengisinya dengan ajaran Islam seperti membaca Al-Qur'an, tahlil, dan doa. Di Ngargomulyo, *nyadran* tidak hanya diikuti penduduk muslim tetapi juga penduduk Katolik. Saat warga muslim melakukan tahlil, umat Katolik juga melakukan ritual dengan membacakan kidung yang ada di Injil.

Masing-masing daerah di Tanah Jawa memiliki ciri khas dalam menyelenggarakan adat ini. Biasanya masyarakat di beberapa daerah membersihkan makam sambil membawa bungkusan makanan hasil bumi yang disebut *sadranan*. Namun tidak semua masyarakat Jawa selalu membawa *sadranan* ke makam. Di Kecamatan Dukun, masyarakat tidak membawa *sadranan* saat membersihkan makam. Sehari setelah pembersihan makam, mereka baru menyajikan makanan saat doa bersama untuk leluhur yang berjuang di masa lalu.

Masyarakat yang menjalani *nyadran* percaya, membersihkan makam simbol pembersihan diri menjelang bulan suci. Bukan hanya sebagai bentuk hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, namun juga bentuk bakti kepada para pendahulu dan leluhur. Di sisi lain tradisi yang sudah dipelihara selama ratusan tahun selalu menghadirkan rasa hangatnya persaudaraan dan kerukunan.

Tradisi berikutnya adalah *merti* dusun. Sering pula disebut *bersih desa*. Tradisi ini simbol rasa syukur masyarakat atas apa yang diberikan Sang Pencipta. Karunia tersebut dapat berupa rezeki melimpah, keselamatan, keten-

teraman, serta keselarasan hidup di dunia.

Kegiatan semacam itu masih sangat lazim ditemukan di pedesaan maupun pedusunan sebagai ritus dan situs di desa. Masyarakat Jawa percaya ketika menghadapi duka dan musibah mendalam, masih banyak hal yang pantas disyukuri. Banyak cara mengungkapkan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Salah satunya *merti dusun* yang hingga kini dilestarikan warga dusun-dusun di lereng Merapi. *Merti dusun* merupakan tradisi sebagai wujud rasa syukur hidup damai di lereng Merapi. Suasana hening dan semilir angin dari Merapi menerbangkan doa ratusan warga Ngargomulyo. Dalam satu jam semua warga yang duduk bersila di atas tanah tampak larut dalam khidmat.

Secara turun-temurun tradisi *merti dusun* digelar setiap tahun pada Rabu Pon di bulan Rajab kalender Jawa. Dalam tradisi ini, para wanita berkebaya mengusung *ancak* atau tempat makanan dari bambu berisi nasi lauk, jajanan pasar, dan hasil bumi. Itu wujud syukur kepada Tuhan atas rezeki selama ini. Sedangkan kaum pria dewasa dan anak-anak beramai-ramai membawa peralatan ritual seperti gamelan, gong, dan tombak.

Ratusan *ancak* yang juga merupakan simbol kerukunan antarwarga itu akan ditata rapi di tengah-tengah warga yang duduk melingkar dalam balai desa. Secara bergantian umat Islam dan Katolik berdoa dipimpin tokoh agama masing-masing. Usai berdoa, prosesi dilanjutkan dengan *kembul bujono* atau menyantap bersama makanan yang dibawa pada selembar daun pisang oleh warga dan pengunjung yang hadir di lokasi itu. Tumpengan beserta kelengkapan ini berarti bahwa sebuah nasi tumpeng yang dikelilingi macam-macam lauk pauk tetap akan mengerucut di salah satu titik puncak tumpeng. Itu simbol kebersamaan dengan beraneka ragam perbedaan menjadi satu persatuan di puncak (Sardi, 2021). Sebagai rangkaian kegiatan tradisi ini akan digelar seni karawitan (*macapatan*) dan pentas Ketoprak.

Beragam seni tradisi tumbuh berkembang di desa-desa Kecamatan Dukun, termasuk Ngargomulyo. Kelompok kesenian *jatilan* banyak terbentuk di Kecamatan Dukun. Kelompok-kelompok kesenian itu terbentuk sejak dahulu kala atau peninggalan nenek moyang turun temurun. Ada pula kelompok yang baru terbentuk akhir-akhir ini.

Reog merupakan kesenian ari Jawa bagian timur. Namun, kesenian itu juga tumbuh dan berkembang di Jawa bagian tengah. Salah satu tempat

tumbuh dan berkembang kesenian Reog di Jawa Tengah adalah di Kecamatan Dukun. Di kecamatan ini terdapat beberapa kelompok kesenian Reog. Kesenian *ketoprak* di Kecamatan Dukun kini tidak sesemarak dahulu. Jumlah kelompok *ketoprak* merosot dan jarang pentas. Namun, masih ada beberapa yang bertahan dan menyanggupi jika diminta pentas. Salah satu kelompok itu ada di Ngargomulyo.

Kesenian lain yang masih tumbuh, *campursari*, *macapatan*, *gasir ngenthir*, *topeng Ireng*, *angguk*, *hadroh*, kesenian *hadroh*, dan *wayang wong*. Namun, beberapa kelompok kesenian tersebut sudah banyak yang menyelenggarakan pementasan, jika pun ada hanya pentas di dusun masing-masing.

Ngargomulyo terbentang di 11 dusun dengan jumlah penduduk 2.544 orang. Berdasarkan komposisi agama, Islam berjumlah 1.680 orang, Kristen 13 orang, Katolik 850 orang, dan Buddha seorang. Menarik untuk dicermati bahwa komposisi Islam: Katolik, 66%: 34%, sebuah komposisi unik yang berbeda dengan desa-desa lain di Kabupaten Magelang, yang biasanya Islam merupakan mayoritas dengan jumlah mencapai hampir 80% (BPS Magelang, 2021).

Mengapa demikian? Penganut Islam di Ngargomulyo adalah penduduk asli yang memeluk Islam sejak lahir alias karena keturunan. Demikian halnya pada penganut Katolik. Mereka memeluk agama tersebut sejak lahir karena orang tua Katolik. Artinya, mereka tidak melakukan konversi. Dengan demikian relasi yang terbangun di antara dua komunitas agama tersebut terjalin sejak dahulu kala.

Kehadiran Katolik di Dukun, termasuk di Ngargomulyo tidak bisa dilepaskan dari penyebaran Katolik oleh misionaris bernama Franciscus Georgius Josephus, Van Lith atau sering kali disingkat Frans van Lith (lahir 17 Mei 1863 – meninggal 9 Januari 1926 pada usia 62 tahun). Ia imam Yesuit asal Oirschot, Belanda, peletak dasar karya Katolik di Tanah Jawa, khususnya Jawa Tengah. Ia membaptis orang-orang Jawa pertama di Sendangsono (Muntilan), mendirikan sekolah guru di Muntilan, dan memperjuangkan status pendidikan orang pribumi dalam masa pendudukan kolonial Belanda (Haryono, 2009: 22).

Muntilan yang menjadi pusat penyebaran Katolik ini berjarak kurang lebih 8 kilometer dari Dukun. Dekatnya jarak ini memungkinkan penyebaran agama lebih mudah dilakukan. Bisa jadi, van Lith menjadikan Dukun target

penyebaran Katolik. Sebelum mengawali misi, van Lith belajar bahasa dan kebudayaan Jawa. Penguasaan bahasa Jawa dimaksudkan untuk mempermudah komunikasi dan persebaran misi kepada orang Jawa, termasuk di Muntilan dan sekitarnya.

Penguasaan terhadap bahasa Jawa dan adat istiadatnya menyebabkan Van Lith dekat dengan penduduk setempat. Kedekatan tersebut diekspresikan dengan memanggilnya *romo*, sebuah istilah panggilan dalam adat Jawa yang berarti "bapak". Dalam istilah tersebut terkandung makna sebagai sebutan hormat untuk seorang bapak. Bagi murid atau santri, sebutan hormat itu ditujukan untuk seorang guru atau kiai.

Dalam menjalankan misi, Romo Van Lith sangat akomodatif terhadap kearifan lokal, yakni dengan banyak memasukkan adat istiadat Jawa dalam peribadatan umat Katolik. Sebagai contoh, ia menambahkan musik gamelan dalam setiap upacara keagamaan. Corak penyiaran agama Romo Van Lith menunjukkan kalau ia terbuka pada "tradisi sinkretis" di Jawa (Madinier, 2011). Akhirnya ia merumuskan pandangan bahwa agar lebih diterima, Katolik mesti lebih akomodatif pada budaya setempat. Teologi Katolik harus mengalami 'pribumisasi' dengan budaya Jawa.

Upaya Van Lith ini dilatari kegagalan misionaris Protestan Eropa yang memaksakan kekristenan dengan cara yang, disadari atau tidak, menyerabut masyarakat Jawa dari akar tradisi. Van Lith juga sekaligus berupaya memisahkan gerakan misi Katolik dari kepentingan politik kolonial. Bagi van Lith, keduanya tidaklah satu paket. Pada kenyataannya, van Lith mendukung persemaian bibit nasionalisme di kalangan pengikutnya yang di kemudian hari turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Tidak hanya akomodatif terhadap budaya lokal, penyiaran van Lith mengindahkan nilai-nilai toleransi terhadap agama yang sudah dipeluk sebelumnya. Saat itu penduduk Muntilan dan sekitarnya banyak menganut Islam. Madinier (2011) menggambarkan dalam kasus undangan *slametan* oleh penduduk Muslim yang datang kepada van Lith diterima sebagai media efektif agar bisa lebih dekat mengenal tradisi keagamaan orang Jawa.

Corak keberagamaan toleran dan akomodatif terhadap budaya lokal yang sudah tumbuh sejak abad ke-19 ini menjadi warisan nilai yang dipelihara terus menerus. Nilai itu menjadi bingkai relasi umat beragama yang harmonis di Dukun dan desa-desa di sekitarnya. Kehidupan harmonis di an-

tara muslim dan Katolik menjadi pemandangan sehari-hari. Pun saat penelitian ini dilakukan, Dusun Tangkil, yang merupakan salah satu dusun di Desa Ngargomulyo, berpenduduk 850 jiwa. Di antaranya, muslim hanya berjumlah 4 jiwa. Namun hal ini tidak mengurangi penghargaan komunitas Katolik sebagai mayoritas terhadap muslim yang di dusun tersebut dikategorikan sebagai minoritas.

Saat itu, momen Idulfitri belum berakhir. Muslim yang hanya berjumlah dua KK terdiri dari empat jiwa, dapat memeriahkan suasana Idulfitri, karena dikunjungi tetangga kiri kanan yang beragama Katolik. Mereka datang ke rumah tetangga yang muslim dalam tradisi *ujung*. Dalam bahasa Jawa, *ujung* berarti mengunjungi orang tua, keluarga, kerabat, tetangga dan orang-orang yang dihormati lainnya. Mereka bersalaman, meminta maaf, dan memohon doa kebaikan. Tidak jarang air mata keharuan tumpah selama kegiatan ini.

Pada kesempatan lain, Hubertus (31 tahun) aktivis remaja karang taruna Dusun Tangkil, menceritakan. Saat Misa Natal 2019, musik pengiring misa memasukkan unsur hadrah. Ini dikarenakan alat musik piano yang biasanya mengiringi misa atau kebaktian rusak. Karena penguasaan musik hadrah dimiliki oleh pemuda muslim, saat itu alat musik itu dimainkan pemuda muslim. Saat ditanyakan apakah toleransi seperti itu akan mengaburkan akidah, Ridwan yang muslim menjawab semua tergantung niat. Jika niat hanya untuk membangun *paseduluran* tanpa memasukkan unsur keimanan maka kekhawatiran seperti itu tidak akan pernah terjadi (Eko, 2021).

Saat halal bihalal tiba pada setiap Idulfitri, Kiai Nastain (54 tahun) tokoh muslim setempat menjelaskan. Kegiatan itu diikuti hampir semua penduduk tanpa membedakan agama. Hanya saja, mereka yang muslim akan duduk berjajar bersama dengan muslim, sehingga terpisah dengan penganut Katolik yang menempati halaman luar. Alasannya pemisahan ini agar muslim dapat khusyuk dalam menjalankan ritual yang biasanya mengiringi perayaan tersebut, seperti pembacaan Al-Fatihah dan tahlil yang biasanya mengiringi halal bihalal. Setelah selesai ritual, kedua komunitas akan bergabung untuk makan bersama (Nastain, 2021).

Arisan desa merupakan kegiatan komunal yang diikuti berkelompok oleh kaum ibu, bapak, dan remaja karang taruna. Dilakukan bergiliran dari rumah ke rumah, tidak membedakan muslim atau Katolik, sehingga tiap pemilik rumah akan mendapatkan kesempatan *ketempatan* acara tersebut.

Widodo, kepala Desa Ngargomulyo menyebut bahwa kegiatan ini terus dilestarikan sebagai medium silaturahmi tanpa tersekat agama dan kepercayaan. Tujuannya, agar masyarakat yang berbeda tetap guyub dan rukun. Arisan merupakan salah satu ruang dialog dan perjumpaan terus dibangun agar masyarakat bisa terus saling menyapa. Ada kekhawatiran jika perbedaan tersebut tidak dikelola dengan baik melalui fasilitas penyediaan ruang perjumpaan untuk bisa saling mengenal, maka mudah dimanfaatkan oleh pihak luar memecah belah dan mengadu domba.

Keberagamaan Katolik yang "*njawani*" sebagaimana diajarkan Romo Van Lith hingga kini masih menjadi corak warga Dukun. Toleransi yang dikembangkan beserta model akomodasi terhadap budaya lokal menjadi perekat relasi Katolik-muslim. Hal sama juga terjadi di kalangan muslim. Mereka menganggap penganut Katolik di desa tersebut ibarat saudara sekandung yang sejak lama hadir di desa tersebut. Sehingga perbedaan tidak perlu dipersoalkan. Penuturan Sardi (65 tahun), tokoh muslim Ngargomulyo menegaskan hal itu:

> Jika kita terus menerus mempersoalkan perbedaan keyakinan, hanya akan membuat hidup kita tidak *kopen* (terurus). Jika sedikit-sedikit mengatakan mereka kafir, akhirnya kita tidak punya tetangga, akibatnya hidup kita kapiran (sengsara (Sardi, 2021).

Pernyataan di atas dibenarkan Mujiono (45 tahun):

> Yang disampaikan oleh Mbah Sardi benar adanya. Dalam keimanan saya yang Katolik ini ada namanya hukum kasih, di mana di dalamnya umat Katolik wajib mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia tanpa membeda-bedakan (Mujiono, 2021).

Atas hal tersebut, Tarno, Kepala Dusun Sebrang, salah satu dusun di Ngargomulyo mengatakan bahwa prinsip agama adalah kebutuhan pribadi, yakni kebutuhan umat dengan Tuhan. Sedangkan hubungan antarmanusia, salah satunya menjalankan adat istiadat dan kebiasaan desa tetap berjalan dengan baik. Agar kedua hubungan baik pada Tuhan maupun pada sesama manusia bisa berlangsung secara berimbang maka beberapa kegiatan

desa seperti *sambatan*, *merti desa* (bersih desa) atau kegiatan yang sifatnya gotong royong tidak pernah dilakukan pada hari Jumat atau Minggu. Jumat merupakan hari ibadah bagi muslim dan Minggu merupakan hari kebaktian (istilah lokal disebut *sembahyangan*).

Hal menarik selain yang digambarkan di atas, yang bisa disaksikan di Ngargomulyo. Dalam satu keluarga bisa didapatkan tiap anggota keluarga tidak selalu menganut agama yang sama. Bisa jadi dari orang tua muslim, anak-anaknya bisa muslim, Katolik, atau kejawen. Keragaman ini tidak mengurangi rasa *peseduluran* di antara mereka. Justru mereka saling mengingatkan untuk selalu menjadi muslim yang baik atau Katolik yang baik dengan cara mematuhi esensi dari agama masing-masing.

Lanskap keberagamaan di Ngargomulyo memperlihatkan relasi harmonis antarpenganut agama. Namun demikian, lanskap demikian tidak serta merta terbangun begitu saja, melainkan melewati waktu yang panjang dan proses pendewasaan diri dalam beragama. Seperti pengalaman Kiai Nastain. Kiai Nastain adalah seorang santri lulusan sebuah pesantren di Tegalrejo, salah satu kecamatan di kabupaten Magelang. Pesantren berjarak kurang lebih 15 kilometer dari Dukun. Selepas nyantri, kiai Nastain "ditugaskan" kiai pengasuh pesantren tempat ia menuntut ilmu agama agar berdakwah di di dusun Kembang Ngargomulyo. "Penugasan" itu berlangsung pada 1989. Tentu saja sasaran dakwah Kiai Nastain adalah warga muslim, bukan mereka yang beragama selain Islam. Untuk muslim, Kiai Nastain mengajarkan perlunya menjaga akidah. Ia selalu mengingatkan jamaahnya menghilangkan ritual sinkretis yang bisa merusak akidah seperti membakar kemenyan di kuburan dan menyediakan sesajen. Kedua tradisi itu berlawanan dengan inti ajaran Islam, yakni tauhid

Dalam berdakwah, Kiai Nastain selalu mengingatkan bahwa salah satu wujud menjaga akidah tidak kompromistis terhadap ajaran selain Islam. Salah satu contohnya tidak mendoakan nonmuslim. Substansi dakwah seperti di atas telah memicu terjadinya gesekan sosial di masyarakat dan akhirnya menimbulkan ketersinggungan komunitas tertentu.

Gesekan itu berkembang menjadi konflik terbuka. Massa membakar musala tempat ibadah Kiai Nastain dan jemaahnya. Kejadian ini segera dapat diatasi karena Kiai Nastain secara cepat melakukan dialog dengan tokoh masyarakat, kepala dusun, MUI tingkat kecamatan, tokoh Katolik, dan per-

wakilan warga. Usai dialog Kiai Nastain introspeksi dan mengubah model dakwah. Peristiwa ini memberi pelajaran berikut. Dalam penyiaran agama, pendakwah harus hati-hati menerapkan metode dakwah dan menghindari salah paham dan kubersinggungan.

Peristiwa konflik lain terjadi pada 2007 ketika perayaan syukuran seorang warga Katolik. Syukuran mengundang hampir semua kepala keluarga di dusun Kembang Ngargomulya. Sebagaimana sebuah syukuran, pemilik hajat menyediakan aneka rupa hidangan untuk para tamu. Salah satunya ayam bakar. Saat hidangan ayam bakar disajikan, seorang tamu muslim, mengatakan tidak akan mengambilnya disebabkan ayam tersebut pasti haram. Mendengar ucapan tersebut, pemilik hajat merasa tersinggung. Ketersinggungan itu merebak pada tamu lain dari Katolik. Mereka tidak menerima hidangan tersebut diharamkan padahal bukan hasil mencuri. Hampir saja terjadi konflik antara muslim dan Katolik akibat ucapan tersebut.

Untuk mengatasinya, Kiai Nastain akhirnya turun tangan memberikan penjelasan. Kepada pemilik hajat dan warga Katolik lainnya, Kiai Nastain menjelaskan dalam Islam penyembelihan hewan ternak yang akan dikonsumsi wajib disembelih dengan mengucap bismillah. Jika tidak, hal ini dilarang dan diketegorikan haram. Karena itu, Kiai Nastain meminta warga nonmuslim, jika hendak menyembelih hewan dan akan disajikan untuk hidangan para tamu, hendaknya penyembelihan dilakukan oleh orang Islam. Setelah mendapatkan penjelasan seperti ini, warga Katolik memahami, mengerti, dan menghargai hukum agama yang harus dipatuhi muslim.

Belajar dari peristiwa tersebut, masyarakat dua komunitas ini menyadari pentingnya saling kenal dan mengenalkan diri agar mereka saling mengerti dan akhirnya menghargai. Peristiwa tersebut di atas dapat dipastikan bermula dari "tidak saling tahu", "tidak saling kenal dan mengenalkan diri" sehingga mudah salah paham. Tidak saling menyapa, karena tidak saling kenal, dan mengenalkan diri menjadi salah satu potensi konflik yang bisa muncul di masyarakat heterogen. Karenanya, pengelolaan heteroginitas salah satunya bertumpu pada kesadaran masyarakat untuk saling mengenal, yang akhirnya menumbuhkan sikap saling menghargai.

Peristiwa lain lagi yang berpotensi menimbulkan konflik adalah pemilihan kepala desa yang berlangsung lima tahun sekali. Sesungguhnya momen politik ini tidak ada hubungannya dengan agama, namun dalam beberapa

kesempatan kampanye tim sukses para calon sering kali menggunakan isu agama terutama afiliasi agama para calon kepala desa. Jika sentimen agama ini tidak disikapi secara dewasa, potensi konflik mudah membesar.

Terdapat tiga indikator kerukunan umat beragama: toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Toleransi, sikap saling menerima dan saling menghargai antara satu kelompok agama terhadap agama lain. Kesetaraan, maksudnya kemauan saling melindungi serta memberikan hak dan kesempatan satu sama lain. Kerja sama, bersosialisasi serta saling berempati dan bersimpati baik dalam persoalan sosial, ekonomi, budaya, maupun agama.

Ketiganya merupakan tolok ukur untuk mengetahui tingkat kerukunan umat beragama suatu masyarakat (Kementerian Agama, 2021). Beberapa ahli mendefinisikan toleransi dengan titik tekan tertentu. Husin Al-Munawar mendefinisikan toleransi sebagai sikap atau sifat menenggang, yaitu menghargai serta membolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, dan lain-lainnya, yang berbeda dengan pendirian sendiri. Adapun Sutton (2006, h. 53) memaknai toleransi sebagai kemampuan dan kemauan seseorang dan masyarakat umum untuk menghargai dan berhati-hati terhadap hak-hak orang golongan kecil atau minoritas di mana mereka hidup dalam peraturan yang dirumuskan mayoritas.

Berdasarkan sumber historiografi tradisional dijelaskan, kerukunan umat beragama di Indonesia hidup berabad-abad silam. Kemunculan Islam di tengah perkembangan agama yang lebih dulu hadir (Hindu dan Buddha) mendapatkan respons positif dari masyarakat sekitar dan penguasa setempat. Toleransi begitu dijunjung tinggi pada masa itu. Hal sama terjadi pada masyarakat desa Ngargomulya, sebagaimana digambarkan dalam narasi sebelumnya.

Seperti dijelaskan, warga memiliki kesepakatan Jumat dan Minggu tidak digunakan untuk kegiatan desa. Jumat merupakan pelaksanaan ibadah salat Jumat bagi komunitas Islam dan Minggu merupakan hari kebaktian/sembahyang bagi umat Katolik. Kesepakatan ini merupakan wujud atau ekspresi warga dalam menumbuhkan toleransi dan saling menghargai hak warga untuk mengekspresikan keberagamaan.

Bentuk toleransi lain adalah kerendahan diri dari masing-masing komunitas untuk hadir dalam suatu perayaan agama. Tentu saja mereka tidak larut dalam ritual keagamaan yang biasanya mengiringi perayaan tersebut, tetapi kehadiran mereka memberikan peneguhan bahwa toleransi itu dengan

sengaja dibangun dan dihadirkan untuk merawat kerukunan.

Dalam hal kesetaraan, tidak diragukan setiap warga memiliki kesadaran bahwa dalam meyakini kebenaran agamanya mutlak dibutuhkan dalam dirinya, namun ketika ia menghadapi perbedaan di luar dirinya maka mereka menjunjung penghargaan. Mereka memiliki prinsip bahwa hubungan manusia pada Tuhan adalah wilayah pribadi yang tidak dapat diintervensi oleh orang lain. Setiap manusia setara dengan manusia, sehingga ia memiliki hak yang sama dalam hal kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dalam hal kerja sama, tidak diragukan bahwa aktivitas ini telah menjadi kesepakatan bersama seluruh warga. Kerja sama ini dalam bahasa lokal disebut *sambatan*. *Sambatan* adalah istilah yang biasa digunakan masyarakat desa di Jawa Tengah dan Jawa Timur, termasuk Desa Ngargomulyo untuk mendirikan atau memperbaiki rumah warga secara gotong royong. Berasal dari kata dasar dalam bahasa Jawa, *sambat* dan akhiran *-an. Sambat* berarti kalimat pengibaan atau permintaan bantuan, dan *-an* merujuk pada aktivitas/tindakan/perbuatannya. Jika salah satu warga ingin mendirikan/memperbaiki rumah, si empunya rumah akan *"sambat"* meminta bantuan kepada para tetangga sebelum mendirikan rumah. Permintaan bantuan biasanya dilakukan dari rumah ke rumah. Hal itu menunjukkan adab atau sopan santun sekaligus penghormatan kepada tetangga yang dimintai bantuan.

Proses pendirian rumah yang dilakukan secara gotong royong oleh warga menunjukkan semangat kekeluargaan dan kebersamaan, pemandangan yang tidak dapat dijumpai di perkotaan. Pekerjaan berat sekalipun jika dilakukan bersama-sama akan terasa ringan. Satu hal yang menjadi ciri khas utama *sambatan*, warga yang ikut tidak dibayar. Yang dilakukan warga hanyalah bentuk menjaga kerukunan dan kepedulian sosial yang telah diwariskan turun temurun oleh para pendahulu.

***Mozaik Kehidupan Beragama***

Mozaik kerukunan di Ngargomulyo terbangun dalam waktu lama. Kesadaran perlunya mengembangkan cara keberagamaan moderat lahir karena perbedaan sejak warga di desa ini lahir. Nenek moyang mereka memeluk agama yang beragam dan sudah lama terwariskan. Agar kerukunan tetap terjaga dan Ngargomulyo tetap abadi, fanatisme harus dihilangkan. Menurut Wdd, sekretaris desa, fanatisme dibolehkan untuk diri sendiri. Jika di-

tunjukkan kepada orang lain hanya akan mengakibatkan dirinya *ora kopen* (terlantar) (Wdd, 2021).

Pernyataan Wdd sangat masuk akal. Komposisi penduduk berdasarkan agama 60:40. Jika warga setempat mengembangkan fanatisme sambil merendahkan keyakinan orang lain (tetangga desa), mereka akan terkucil dan terlantar dengan sendirinya. Kebanyakan warga desa meyakini semua ajaran yang mereka peluk senantiasa mengajarkan kebaikan dan menghindari permusuhan. Semangat gotong royong dan *sambatan* yang selama ini menjadi praktik hidup bersama sesungguhnya ada di tiap ajaran agama. Demikian dikatakan Fatimah (2021), nama samaran. Adakalanya, menurut pengalaman Irfan, tokoh muda muslim setempat, didapati seseorang yang meyakini tafsir agamanya dan memaksakannya terhadap orang lain. Menurutnya, mereka justru keluar dari inti ajaran Islam yang menganjurkan bahwa setiap manusia harus menebar kebaikan untuk orang lain sebagaimana Islam yang selalu menebarkan *raḥmatan li al-'ālamīn* (Irfan, 2021).

Meski demikian, menurut Irfan masih ada warga yang belum bisa membedakan inti ajaran agama dan tafsir agama. Keduanya sering dirancukan. Toleransi sebagai ciri keberagamaan moderat harus mendapatkan batasan jelas. Sehingga mengucapkan selamat pada hari raya keagamaan tertentu, tidak boleh dilakukan karena akan merusak akidah. Begitu pun dengan ungkapan *minal aidzin wal faizin* oleh nonmuslim kepada muslim pada Idulfitri. Menurut Irfan, tindakan itu tidak diperbolehkan.

Perbedaan pandangan tentang konsepsi cara beragama tidak mengurangi rasa persaudaraan di antara mereka. Justru mereka menjadikan perbedaan sebagai alasan melakukan dialog agar mereka semakin kenal dan mengenali satu sama lain. Seperti yang dilakukan Eko, tokoh pemuda Katolik. Ia senang bertanya kepada Kiai Nastain apa yang boleh dan tidak boleh dimakan muslim. Pengetahuan itu membantunya untuk menyesuaikan diri ketika mengundang warga muslim dalam acara tertentu. Inilah bentuk praktik moderasi beragama yang sesungguhnya. Cara pandang, sikap, dan praktik keberagamaan sangat ditentukan sejauh mana penganut agama memahami ajaran agama.

### *Beragama, Merawat Kebangsaan, dan Kearifan Budaya*

Konstitusi Indonesia, UUD 1945, menempatkan agama sebagai elemen

penting kehidupan bernegara. Negara tidak hanya memberikan ruang akomodatif bagi agama-agama dengan pengakuan terhadap beberapa agama dunia, melainkan juga menjadikan agama sumber hukum dan tata aturan perundangan di negeri ini. Menchik menjelaskan bahwa kesentralan agama dalam ruang politik negara bahkan melahirkan konsep *godly nationalism* yang tidak ditemukan di tempat lain. Dalam konsep *godly nationalism* atau nasionalisme berketuhanan, hak sebagai warga negara hanya akan diterima secara penuh ketika seseorang memeluk agama yang telah diakui oleh negara (Menchik, 2015). Demikian sentralnya peran agama dalam politik kenegaraan Republik Indonesia ini tentu saja menuntut pula manajemen keberagamaan yang tepat dan berkesesuaian dengan fakta sosial keberagaman agama dan aliran keagamaan yang ada. Sehingga penyalahgunaan agama untuk kepentingan politik yang dapat mengancam kehidupan kebinekaan harus dihindari.

Menyadari urgensi manajemen keberagaman ini, Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin (LHS), menegaskan bahwa moderasi akan menjadi kiblat kebijakan Kementerian Agama. Komitmen ini pun diteruskan menteri agama selanjutnya, Fachrul Razi. Berbagai program pengarusutamaan moderasi beragama ini diupayakan, salah satunya dengan mengintegrasikannya dalam kebijakan pembangunan nasional. Upaya ini pun membuahkan hasil yang menggembirakan. Moderasi Beragama pada akhirnya masuk dalam Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam RPJMN 2020 – 2024 ( Kemenag, 2019, h. vi). Komitmen negara ini memperlihatkan, keberagamaan moderat merupakan keniscayaan mengingat fakta sosiologis bangsa memperlihatkan heterogenitas. Cara beragama moderat akan menumbuhkan sikap saling menghargai di atas perbedaan. Selain itu, setiap agama secara kultural membawa misi damai dan harmoni bagi kehidupan umat manusia, khususnya bagi para pemeluknya. Tidak ada satu pun agama mengajarkan umatnya membuat kerusakan, permusuhan, pertengkaran, dan tindakan negatif lainnya. Agama mengajarkan manusia hidup saleh untuk diri sendiri dan lingkungannya. Tidak ada agama yang mengajarkan keburukan, melainkan kebajikan.

Dengan beragama, manusia menjadi insan saleh, welas asih, sabar, peduli, mau berbagi, rendah hati, dan berbuat serba kebajikan yang utama. Agama mengajarkan manusia menjadi hamba Tuhan yang beriman sekaligus

beramal saleh bagi kebaikan semesta. Dengan demikian esensi kehadiran agama adalah moderat, karena agama hadir untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, termasuk menjaga untuk tidak menghilangkan nyawanya. Itu mengapa setiap agama selalu membawa misi damai dan keselamatan.

Untuk mencapai kedamaian dan keselamatan, agama selalu menghadirkan ajaran tentang keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, agama mengajarkan menjaga nyawa manusia harus menjadi prioritas, agama mengajarkan menghilangkan satu nyawa sama artinya dengan menghilangkan nyawa keseluruhan umat manusia. Pada tataran ini, agama memiliki fungsi integrasi sosial (pemersatu). Inilah nilai-nilai universal agama yakni memberikan spirit perdamaian.

Moderasi dan sikap moderat dalam beragama selalu berkontestasi dengan nilai-nilai yang ada di kanan dan kirinya, ekstrem atau liberal. Karena itu, mengukur moderasi beragama harus bisa menggambarkan bagaimana kontestasi dan pergumulan nilai itu terjadi. Kita bisa merumuskan sebanyak mungkin ukuran untuk menentukan apakah sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama tertentu itu tergolong moderat atau sebaliknya, ekstrem.

Dalam laporan penelitian ini, terdapat empat indikator moderasi beragama yang digunakan: komitmen kebangsaan, toleransi, antikekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal (Kemenag, 2019). Komitmen kebangsaan merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang berdampak pada kesetiaan terhadap dasar kebangsaan, terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, sikap terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila dan nasionalisme. Sebagai bagian dari komitmen kebangsaan adalah penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi UUD 1945 dan regulasi di bawahnya.

Komitmen kebangsaan ini penting sebagai indikator moderasi beragama karena, seperti sering disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam perspektif Moderasi Beragama, mengamalkan ajaran agama sama dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara, sebagaimana menunaikan kewajiban sebagai warga negara adalah wujud pengamalan ajaran agama.

Dalam hal komitmen kebangsaan, Romo Darisma berpandangan:

> Agama sebagai wahyu akan "mendarat" bila ia dapat berinteraksi dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat, bangsa, dan negara. Nilai tersebut meliputi kemanusiaan dan budaya. Karena itu, bagi gereja, apa yang baik di masyarakat akan diserap, termasuk nilai-nilai kebangsaan. Dengan demikian, maka seorang Katolik yang berkomitmen pada gereja, harus berkomitmen terhadap negara. Perdebatan agama dan Pancasila pada masa-masa menjelang kemerdekaan di antara para pendiri bangsa mencapai puncak dengan diakuinya Pancasila sebagai landasan bernegara. Artinya, sudah tidak ada lagi pertentangan antara agama dengan Pancasila. Melalui Pancasila, umat Katolik dapat berkontribusi untuk berbakti pada bangsa (Darisman, 2021).

Kiai Nastain yang bersahabat dengan Romo Darisman memiliki pandangan hampir sama. Seorang penganut Islam yang taat akan bersungguh-sungguh dalam mengabdikan dirinya pada negara. Ia mengatakan:

> Dalam Surat Hud ayat 6 dinyatakan "Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu memakmurkannya". Dengan merujuk ayat tersebut kita sebagai bangsa Indonesia memiliki tanah air yakni negara Indonesia. Rasa cinta pada tanah air dilakukan dengan cara menghormati dan patuh pada peraturannya, peduli pada lingkungan, saling menjaga dan menghormati. Semua dilakukan untuk kemajuan bangsa (Nastain, 2021).

Pengalaman dua orang tokoh agama di atas memperlihatkan bahwa antara agama dengan kebangsaan berkelindan. Agama menjadi pendukung semangat kebangsaan. Mengamalkan ajaran agama sama dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara sebagaimana menunaikan kewajiban sebagai warga negara adalah wujud pengamalan ajaran agama.

Keberagamaan yang moderat dicirikan adanya sikap toleran terhadap perbedaan. Di dalam memaknai kata toleran, ada beragam pandangan. Kiai Nastain sangat berhati hati dalam memaknai dan mempraktikkan sikap to-

leransi, dengan pendapatnya sebagai berikut:

> Toleransi beragama tetap harus memiliki batasan antara lain adalah melindungi akidah umat. Umat Islam boleh saja berbeda pendapat dalam perkara-perkara *furū'iyyah*, namun harus akidahnya sama, yaitu ahlusunah waljamaah. Jangan karena toleran, umat Islam mendoakan umat lain. Harus ada batasan dalam hal ini, karena sebagai muslim kita tidak dibolehkan mendoakan umat nonmuslim. Biarlah masing-masing berdoa sendiri dengan tuhannya sendiri. Doa bersama dengan umat lain, hukumnya haram, karena berarti mencampuradukkan akidah. Ritual tidak boleh dicampuradukkan. Yang penting *lakum dīnukum waliyadīn* (Nastain, 2021).

Pandangan Kiai Nastain yang sangat hati-hati tentang toleransi ini memperlihatkan sifat pasif. Batasan sikap toleran yang dikemukakan Kiai Nastain masih memperlihatkan kurang terbuka pada perbedaan. Artinya, mereka memberikan penghargaan pada perbedaan dan sekaligus menerima perbedaan tersebut, tetapi dalam praktik masih ambigu. Sebagai contoh, cara pandang dan sikap Kiai Nastain terhadap nonmuslim. Kiai Nastain berharap bahwa toleransi tidak harus dengan menggunakan kalimat *minal aidin wal faizin* bagi nonmuslim untuk mengucapkan salam dan selamat pada momen Hari Raya Idulfitri. Melainkan cukup dinyatakan dengan "mohon maaf lahir dan batin". Menurut Kiai Nastain, penggunaan bahasa atau frasa agama, dikhawatirkan akan mengganggu akidah.

Mengutip Menchik (2016), fenomena ini umum terjadi sebuah komunitas yang memperlihatkan adanya narasi mayoritas dan minoritas. Kelompok Suni adalah mayoritas dalam Islam di Indonesia, sedangkan Syiah minoritas. Dalam narasi mayoritas dan minoritas seperti ini, terlalu naif memahami kesepakatan yang terjalin antara dua pihak sebagai kesepakatan murni, yang semata didasarkan pada prinsip hak dan kedudukan yang sama, tanpa ada tekanan rasa takut sama sekali.

Narasi mayoritas dan minoritas ini bukan sekadar persoalan kultur, melainkan *mindset*, di mana kedua belah pihak telah sama-sama menginternalisasi pola dominan dan subordinat dalam relasi mereka. Pada praktik interaksi sosial keseharian, meski saling sapa terjadi secara normal seolah tanpa

ada sekat identitas, kedua belah pihak saling menyadari siapa yang pada akhirnya yang lebih berhak "bersuara lantang".

Pandangan berbeda dikemukakan Romo Darisman yang mendasarkan sikap toleransi dengan mengutip Konsili Vatikan 1962 dalam dokumen *Nostra Aetate*. Romo Darisman menyatakan, dalam dokumen tersebut diatur relasi antaragama yang menyebut bahwa gereja Katolik menghargai aliran kepercayaan lain dan berniat membangun dialog dan relasi atas dasar cinta kasih (Darisman, 2021).

Sekretaris Desa Ngargomulyo, Wdd, menyatakan bahwa toleransi di Ngargomulyo praktik kehidupan warga selama berabad-abad dan diwariskan dari generasi ke generasi. Penduduk beragama Islam dan Katolik di Nagrgomulyo merupakan keturunan dari orang tua yang memeluk agama-agama tersebut sejak dahulu. Sehingga, perbedaan tersebut tidak dijadikan sebagai potensi konflik. Justru mereka saling menolong. Sebagai contoh, pada momen Ramadan, masyarakat muslim melaksanakan salat di masjid atau musala, tetangga yang Katolik akan menjaga keamanan rumah yang ditinggalkan ke masjid agar tidak ada maling yang masuk ke rumah tersebut. Beberapa yang lain, menjaga tempat parkir masjid atau musala saat kaum muslim khusyuk menjalankan salat (Darisman, 2021).

Saat penduduk muslim melaksanakan khataman sebagai puncak pengajian desa, umat Katolik juga terlibat sibuk menyumbang aneka kue sebagai jamuan para peserta pengajian. Hal sama terjadi jika umat Katolik merayakan Natal atau Paskah. Umat muslim berduyun-duyun menyumbang aneka makanan untuk jamuan kebaktian. Toleransi tersebut juga ditunjukkan pada aktivitas lain seperti penyelenggaraan gotong royong atau *sambatan* desa yang diadakan pada Sabtu. Jumat menjadi ibadah salat Jumat bagi muslim dan Minggu merupakan hari *sembahyangan* bagi Katolik. *Sembahyang* istilah lokal untuk menyebut hari kebaktian umat Katolik di gereja.

Pandangan, sikap, dan perilaku ekstrem mendorong pemeluk agama menolak pandangan kebenaran orang lain dan bersikukuh dengan tafsir kebenarannya. Dari sinilah muncul term "garis keras" atau "ekstrem" yang dikaitkan dengan praktik beragama. Salah satu ciri awal ekstremisme dalam beragama adalah bahwa pandangan, sikap, dan perilaku yang kaku pada satu tafsir keagamaan saja, seraya menolak pandangan berbeda meski mengetahui pandangan berbeda tersebut. Lebih dari sekadar menolak, seorang

penganut garis keras lebih jauh bahkan akan mengecam dan berusaha melenyapkan kehadiran pandangan berbeda. Baginya, cara pandang hitam putih dalam beragama itu lebih memberikan keyakinan ketimbang menerima keragaman tafsir yang dianggap menimbulkan kegamangan. Itu mengapa meski jumlahnya minoritas seorang ekstremis atau penganut garis keras umumnya lebih "nyaring" dan lebih mampu menarik perhatian ketimbang seorang moderat yang cenderung diam dan reflektif. Kemenangan kaum ekstremis bukan karena jumlahnya yang besar, melainkan karena kaum moderat mayoritas yang diam (*silent majority*).

Warga di Dukun menolak pandangan, sikap, dan perilaku ekstrem dalam beragama. Dalam suatu kejadian, pascabencana erupsi Gunung Merapi pada 2010, mereka "kedatangan" rombongan pendakwah yang menamakan Jamaah Tabligh. Ciri dakwah kelompok ini mengajak dan menganjurkan suatu amalan ibadah serta melarang amalan tertentu. Mereka tinggal di masjid-masjid.

Isi dakwah antara lain melarang tradisi tahlil yang sudah menjadi kebiasaan setempat dengan menyatakannya perbuatan musyrik. Ini menyinggung perasaan beragama sebagian besar komunitas muslim setempat. Merasa ada "keganjilan" dalam metode dakwah dan isi, tokoh agama dan perangkat desa melakukan rapat membahas kehadiran kelompok ini. Hasil rapat menyepakati untuk menegur ketua rombongan dan mempersilakan mereka segera meninggalkan Ngargomulyo. Hasil rapat kemudian disampaikan ke MUI tingkat kecamatan untuk segera ditindaklanjuti. Akhirnya, rombongan tersebut meninggalkan desa tersebut. Peristiwa ini menunjukkan warga desa kebanyakan menjunjung tinggi dialog dan tabayun jika terjadi perselisihan terkait isu keagamaan. Ini menandakan warga memedomani spirit agama yang antikekerasan dalam penyelesaian masalah.

Pascabencana Gunung Merapi pada 2010, Desa Ngargomulyo menjadi rusak parah karena letusan Gunung Merapi. Hal ini bisa dipahami karena status Ngargomulyo berada di Kawasan Rawan Bencana (KRB) tingkat 1. Kerusakan yang dihasilkan meliputi lahan pertanian, peternakan, air bersih, jembatan, akses jalan, dan fasilitas-fasilitas umum. Keadaan semakin parah dengan adanya ancaman lahar dingin yang dapat datang kapan saja apabila musim hujan.

Meski demikian, keberlangsungan hidup harus tetap dijaga. Karena itu

untuk menjaga ketahanan hidup yang salah satunya didapatkan dari tradisi berkesenian. Dari identifikasi di lokasi terdapat beberapa kesenian tradisional yang dikembangkan oleh masyarakat Ngargomulyo. Kesenian yang ada di wilayah Ngargomulyo ini memiliki karakter yang khas. Kekhasan kesenian tersebut adalah difungsikannya kesenian tradisi sebagai sarana ketahanan hidup masyarakat dalam menghadapi kesulitan pascabencana alam Gunung Merapi sekaligus juga menjadi ruang perjumpaan masyarakat agar silaturahmi tetap terjaga. Di samping itu, kesenian tersebut juga berfungsi sebagai tontonan/hiburan dan tuntunan. Sebagaimana digambarkan pada bagian sebelumnya, kesenian itu antara lain meliputi *ketoprak*, *campursari*, *macapatan*, *gasir ngenthir*, *topeng Ireng*, *angguk*, *hadroh*, dan *wayang wong*.

Seni tradisi yang selama ini dianggap sebagai wilayah profan atau sekuler, ternyata dapat diterima dengan sangat baik oleh semua kalangan. Bahkan tokoh agama sekalipun, tidak menganggap bahwa kesenian merupakan aktivitas yang bertentangan dengan agama.

Sejalan hal tersebut Mbah Sardi, tokoh muslim setempat menyatakan:

> *Sakjanipun, wiwit rikolo para wali, wayang sampun kangge alat dakwah. Supados, Islam gampil ditampi amargi gampil anggonipun mahami. Ajaran Islam ingkang adiluhung meniko saumpami dipun aturaken nganggo boso Arab utawi budaya Arab, mboten cocok kaliyan budoyo tiyang Jawi*. Sebenarnya sejak zaman Wali Sanga, kesenian wayang sudah digunakan sebagai alat atau cara untuk berdakwah. Mengapa, supaya agama lebih mudah dipahami. Karena kalau pesan-pesan agama disampaikan dengan cara-cara dari Arab tentunya, masyarakat akan kesulitan untuk memahami dan menerima pesan-pesan agama itu kalau metode Arab itu yang dipakai (Sardi, 2021).

Penuturan itu sejalan dengan pernyataan Widodo, kepala desa setempat. Menurutnya, kesenian merupakan aktivitas yang digemari semua kalangan, tua maupun muda. Mereka tidak alergi dengan tontonan kesenian, *jatilan* atau *ketoprak* misalnya. Sehingga, pada saat-saat tertentu tontonan yang bersifat menghibur itu, pertunjukkannya sangat ditunggu masyarakat. Dengan menonton pertunjukan, masyarakat bisa bertemu dan saling menyapa dan berbaur, tanpa ada sekat perbedaan agama. Selain menghibur, keseni-

an menjadi ajang warga membicarakan pembangunan di desa. Saat pertunjukkan, mereka berbaur, tempat duduk pun tidak diatur sehingga baik yang tua maupun yang muda bisa memilih, apakah di barisan depan atau belakang. Saat menonton pertunjukan, semua penonton konsentrasi pada tontonan tersebut. Setelah pertunjukkan usai, mereka masih duduk-duduk di tempat pertunjukkan dan menikmati hidangan yang biasanya disuguhkan. Hidangan ini berasal dari iuran para warga. Mereka datang dengan membawa aneka makanan dari rumah, dengan tujuan agar bisa dinikmati bersama.

Dalam pandangan Kiai Nastain, ada beberapa budaya yang dianggap sebagai bidah karena tidak ada contohnya dalam ajaran Islam. Ada pula yang diterima karena budaya lokal tersebut berisi pesan-pesan kebaikan atau kearifan lokal secara mutlak. Dalam konteks moderasi beragama dikenal *'urf ghairu syar'i*, tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam. Dikenal pula istilah *'urf syar'i*, yakni tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Salah satu budaya yang bertentangan dengan ajaran agama adalah tradisi *nyadran* (ziarah kubur yang dilakukan secara massal menjelang datangnya bulan Ramadan) yang di dalamnya terdapat ritual membakar kemenyan di kubur. Menurut Kiai Nastain, membakar kemenyan yang diniatkan untuk mengundang roh leluhur bertentangan dengan Islam, sehingga ia berusaha mengubah dan menggantinya dengan beberapa ritual islami, seperti membaca Yasin dan tahlil dalam kegiatan tersebut (Nastain, 2021). Dalam konteks moderasi beragama, tradisi lokal yang bertentangan dengan ajaran Islam maka tidak boleh dipakai. Sementara tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam bisa dipakai, *al-ʿādah muḥakkamah* (adat istiadat bisa dijadikan acuan hukum fikih), mengakomodasi lokalitas budaya, pribumisasi Islam (Yahya, 2020).

## Pelembagaan Moderasi Beragama

Desa dan dusun-dusun di lereng Merapi menghadapi bencana besar pada 2010. Di tahun ini Merapi meletus. Aktivitas gunung ini dimulai akhir September 2010. Ledakan gunung pada Selasa, 26 Oktober 2010 ini menewaskan sedikitnya 353 orang, termasuk Mbah Maridjan. Ledakan menyebabkan kerusakan di seluruh wilayah di lereng Merapi, termasuk Kecamatan Dukun. Ngargomulyo termasuk daerah dengan kerusakan sangat parah. Hampir semua bangunan dipenuhi pasir dan debu. Rumah-rumah pendu-

duk, bangunan sekolah dan juga rumah ibadah (masjid, musala, dan gereja) tidak dapat digunakan. Sawah dan ladang tertimbun pasir sehingga tanaman di lahan tersebut mati terbakar. Hewan ternak yang tidak berhasil diungsikan juga mati terkena lahar panas.

Sepanjang aktivitas erupsi, penduduk diungsikan ke wilayah aman, yakni posko pengungsian di kecamatan Mertoyudan Magelang dan bangunan perguruan van Lith yang berada di kota kecamatan Muntilan. Hampir dua bulan mereka berada di tempat pengungsian. Setelah dirasa aman, berdasarkan perintah aparat pemerintah, para pengungsi diperbolehkan pulang ke Ngargomulyo.

Dalam situasi bencana, seluruh warga bergotong royong memulihkan keadaan. Pada saat itu muncul inisiatif dari para tokoh masyarakat dan agama membentuk sebuah kelompok relawan terdiri beberapa elemen masyarakat, kalangan tua maupun muda, laki-laki dan perempuan, berasal dari berbagai agama dan keyakinan. Muncul kemudian beragam lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam penanganan bencana.

Pager Merapi, merupakan nama salah satu lembaga swadaya yang dibentuk pada September 2010. LSM ini bergerak atas nama kemanusiaan yang membantu kebutuhan warga sejak masih tinggal di rumah masing-masing ketika mulai Merapi beraktivitas, ketika mengungsi, dan saat kembali ke rumah usai kondisi aman atau masa pemulihan. Sebagai kesepakatan warga, nama LSM tidak menunjuk nama dan simbol agama tertentu. Filosofi pembentukannya harus didasarkan pada nilai universal agama, yakni persaudaraan demi kemanusiaan. Sehingga, warga muslim pun tidak mempermasalahkan saat harus mengungsi di bangunan perguruan van Lith. Padahal di bangunan tersebut terdapat banyak simbol-simbol Katolik yang mencirikan sebuah bangunan peribadatan umat Katolik. Suasana di perguruan van Lith yang seperti itu tidak mengganggu aktivitas peribadatan warga muslim terutama saat menjalankan salat lima waktu.

Label agama bahkan simbol agama sekalipun tidak melekat dan tersemat pada nama Pager Merapi. Pemilihan nama tersebut bukan tanpa dasar. Hubertus Eko, sebagai tokoh pemuda Katolik setempat menyatakan jika nama LSM itu menunjuk agama tertentu akan mengakibatkan silang sengketa warga yang terafiliasi dua agama, Islam dan Katolik. Menghilangkan label dan simbol agama diharapkan semakin memperkuat relasi yang sudah

dibangun para leluhur desa selama berabad-abad.

*Pager* dalam bahasa Jawa berarti sebuah pembatas yang berfungsi sebagai pelindung. Secara maknawi *pager* berarti sebuah bangunan imajiner yang berfungsi melindungi dari aktivitas Merapi. Kata *pager* menunjukkan kokohnya bangunan imajiner tersebut yang dijaga oleh semua orang. Informasi ini disampaikan banyak informan peneliti ini seperti Wdd, Kiai Nastain, Mujiono, Eko, dan Irfan. Pager Merapi dibangun bersama oleh masyarakat, sehingga tiap individu merasa memiliki lembaga ini.

Dalam keadaan sulit yang mendera semua warga, Pager Merapi bergerak cepat. Selain membantu pemerintah daerah dalam mendistribusikan kebutuhan warga, LSM ini menggelar beberapa kegiatan seperti menjaga harta benda warga yang ditinggal mengungsi. Pekerjaan berisiko ini dijalankan dengan berkonsultasi ke Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG). BPPTKG yang berlokasi di Yogyakarta ini salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Geologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Salah satu tugas BPPTKG memitigasi bencana.

Tugas lain yang dilakukan relawan Pager Merapi di masa sulit adalah menyampaikan keinginan warga pengungsi pada pengurus Yayasan Perguruan Katolik van Lith perlunya penyediaan ruang salat yang memadai untuk salat. Permintaan ini sulit untuk disampaikan, karena ada perasaan *ewuh pekewuh* terkait rasa keberagamaan. Namun, hal tersebut tetap diutarakan. Akhirnya, keinginan tersebut disanggupi. Pengurus Yayasan membuatkan musala kecil dilengkapi dengan pancuran *padasan*, tempat wudu.

Dalam konteks moderasi beragama, inisiasi kedua pihak ini patut diapresiasi. Penyediaan musala kecil di tengah perguruan Katolik van Lith membutuhkan kedewasaan beragama, sikap menghargai perbedaan, dan toleransi aktif. Toleransi aktif diwujudkan dalam bentuk yang konkret tidak sekadar memiliki pandangan keagamaan yang positif dan sikap persetujuan terhadap perbedaan. Namun, secara aktif mampu mewujudkan secara kongkret cara pandang dan sikap tersebut. Ini tidak mudah dilakukan. Hanya nilai kemanusiaan, esensi ajaran agama-agama, yang dapat menggerakkan kedua aktor.

Inisiasi para relawan yang didominasi kelompok muda membentuk Pa-

ger Merapi didukung para tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. Sinergitas ini menghasilkan kesepahaman semua pihak dan akhirnya memperkukuh relasi umat Islam dan Katolik.

Sebagai ketua MUI Dukun, Kiai Nastain membangun persaudaraan dengan para imam di 11 gereja di Dukun. Ini dilakukannya jauh sebelum erupsi Merapi 2010. Dalam pemahamannya, konsep *litaʿārafū* tidak sekadar kenal tetapi juga mengenalkan, artinya keduanya harus saling mengenalkan. Meskipun dengan sangat hati-hati pandangannya tentang toleransi agar tidak terjebak dalam rusaknya akidah, dalam isu kemanusiaan agama harus memainkan peran. Keberagamaan moderat ini menjadi fondasi kokoh bagi *paseduluran* (persaudaraan) antarumat beragama.

Hal sama ditemukan dalam sikap Mujiono, tokoh Katolik Ngargomulyo, dan Widodo, kepala Dusun Sebrang 2010 dan saat ini kepala Desa Ngargomulyo. Dukungan tokoh Katolik dalam menyampaikan harapan para pengungsi agar menyediakan musala di tengah perguruan Katolik van Lith tidak diragukan lagi. Keduanya berperan sebagai "jembatan" pengungsi muslim dalam berkomunikasi dengan para imam dan tokoh di perguruan tersebut. Mujiono dan Widodo yang menemui Romo untuk menyampaikan kebutuhan akan musala merupakan bentuk tanggung jawab memenuhi kewajiban agama: salat lima waktu. Kedua tokoh ini yang memastikan seluruh makanan yang diolah para ibu yang tergabung dalam majelis persaudaraan perguruan van Lith dijamin kehalalannya. Sehingga, pengungsi Muslim tidak perlu ragu untuk mengonsumsinya.

Upaya-upaya di atas bisa dilakukan jika ada rasa saling percaya di antara kedua pihak. Saling percaya menumbuhkan solidaritas saat musibah menimpa seperti kasus bencana Merapi. Menurut Durkheim (1974), solidaritas sosial adalah kesetiakawanan yang menunjuk pada suatu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama.

Kesamaan moralitas di kalangan warga Ngargomulyo terbangun sejak lama. Perbedaan itu terberi sejak mereka lahir. Memiliki tetangga yang berbeda agama dan keyakinan merupakan keadaan yang dialami turun temurun. Karenanya, perbedaan yang menjadi warisan ini seharusnya diterima sebagai takdir yang *taken for granted.* Di tengah perbedaan itu, mereka

percaya satu sama lain bahwa agamanya selalu menjunjung kebaikan, salah satunya membangun persaudaraan (Durkheim, 1974). Perasaan inilah yang menyatukan mereka sehingga solidaritas sosial lebih mudah terbentuk dan terbangun. Solidaritas sosial ini terbangun karena kesadaran bahwa jika mereka memiliki fanatisme berlebihan terhadap kepercayaan maka yang terjadi adalah "*ora kopen"* atau terlantar karena akan dijauhi warga. Ini merupakan suatu sanksi sosial yang harus diterima.

## Penguatan Moderasi Beragama

Pascaerupsi pada 2010, Merapi mengalami erupsi susulan hampir setiap tahun. Erupsi susulan pada Mei 2018 salah satu yang terbesar. Kategori letusan bersifat freatik, mengeluarkan gas dan asap dengan tinggi kolom mencapai 5.500 dari puncak, menyebabkan hujan abu dan kerikil. Peristiwa ini menyebabkan seluruh desa di Ngargomulyo tertutup pasir dan debu. Pada 29 Januri hingga 7 Februari 2019, Merapi mengeluarkan guguran awan panas dengan jarak luncur 2 kilometer. Meskipun tidak mengenai Ngargomulyo, desa ini ditetapkan sebagai desa waspada sehingga penduduk harus bersiap-siap jika suatu saat dievakuasi.

Pada 27 Maret 2020, erupsi kembali terjadi. Merapi mengeluarkan awan panas disertai hujan abu bercampur pasir yang mengenai 47 desa di seluruh kabupaten Magelang. Hampir semua desa di Kecamatan Dukun terdampak erupsi. Jalan menuju Ngargomulyo desa tertutup pasir tebal. Aktivitas terakhir terjadi pada 4 Januari 2021. Merapi mengeluarkan awan panas dan lava pijar serta mengalami pertumbuhan kubah lava baru. Warga desa diungsikan ke beberapa posko Merapi di kecamatan Mertoyudan kabupaten Magelang (BPPTKG, 2021). Peristiwa erupsi sebelum 2010, tercatat mulai di masa Belanda yakni pada 1768, 1822, 1849, 1872, 1930, 1931, dan 1961.

Aktivitas Merapi yang terus berulang membuat masyarakat dan pemerintah waspada dan mengantisipasi langkah-langkah penyelamatan. Mengantisipasi kerawanan bencana erupsi, masyarakat menyadari kebutuhan terhadap organisasi selain Pager Merapi. Organisasi ini diharapkan mendapatkan berbagai informasi untuk melakukan mitigasi. Warga membentuk organisasi yang diberi nama Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di tingkat desa. Pembentukan FPRB diprakarsai, dibentuk, dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Nagrgomulyo adalah desa pertama yang memi-

liki FRB, disusul tiga desa lain di Kecamatan Dukun: Sumber, Krinjing, dan Sengi (Maryoto, 2018).

Tujuan FPRB membantu pemerintah desa dalam pengurangan risiko bencana seperti menghubungkan PRB desa dengan dinas-dinas terkait kebencanaan dan membantu menyosialisasikan pengurangan risiko bencana kepada masyarakat sehingga dapat mengurangi dampak korban jiwa pada bencana yang akan datang. Pembentukan FPRB disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Ngargomulyo Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Nomor 188.4/02/Kep/II/2013 dengan berlandaskan hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Pembentukan lembaga ini mempertimbangkan Ngargomulyo yang secara geografis masuk dalam KRB III dengan kondisi geologis, hidrologi, demografis, sosiografi yang menjadikannya berpotensi, rawan bencana, baik bencana erupsi gunung, bencana alam, bencana nonalam, maupun bencana sosial yang berpotensi menimbulkan korban jiwa.

Seperti halnya Pager Merapi, FPRB beranggotakan lintas iman. Bekerja atas nama *peseduluran* (persaudaraan) dan kemanusiaan. Sebagai bahan pembelajaran dari erupsi tahun 2010 tersebut, Forum Pengurangan Risiko Bencana bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Magelang dalam melaksanakan program pemerintah Kabupaten Magelang untuk mitigasi bencana. Program yang dicanangkan, pembentukan Desa Bersaudara (*Sister Village)*. Konsep dasar dari Desa Bersaudara ini adalah membangun komunikasi antara desa rawan bencana erupsi sebagai asal pengungsi dengan desa di luar rawan bencana atau tidak terkena dampak erupsi sebagai tempat pengungsian. Program ini dilakukan antara Ngargomulyo dengan Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan.

Aktor yang terlibat program terdiri dari pemerintah yaitu BPBD Kabupa-

ten Magelang, masyarakat terdiri dari relawan yang tergabung dalam FPRB di masing-masing desa, serta masyarakat dari kedua desa tersebut. Hadirnya FPRB dapat berperan dalam melaksanakan mitigasi bencana gunung api untuk masa yang akan datang di Ngargomulyo.

Program Desa Bersaudara menyediakan berbagai kemungkinan terkait latar belakang agama pengungsi dan penerima pengungsi. Bisa jadi keduanya memiliki afiliasi agama berbeda. Pengungsi dapat berasal dari Katolik dan penerima dari Islam atau sebaliknya. Agar proses berjalan lancar, setiap pihak membutuhkan cara pandang beragama moderat. Jika ada salah satu di antara keduanya mengembangkan sikap fanatisme, program tidak bisa berjalan baik.

Dalam mengembangkan moderasi beragama dibutuhkan keikhlasan dan ketulusan di antara kedua pihak. Pandangan setara antar manusia sebagai ciptaan Tuhan adalah hal utama yang harus dimiliki penerima dan pengungsi (Suwarti, 2021). FPRB yang diprakarsai, dibentuk dan dikelola warga secara mandiri dibentuk untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan bersama, memecahkan persoalan bersama dan/atau menyatakan kepedulian bersama dalam rangka pengurangan risiko bencana tingkat desa/kelurahan. FPRB lahir atas dasar kebutuhan masyarakat, dipercaya masyarakat, dan mencerminkan representasi keseluruhan warga desa/kelurahan yang peduli serta memenuhi kriteria kualitas berdasarkan kriteria kemanusiaan, kapasitas dan kemampuan. In sesuai dengan isi Pedoman Pengorganisasian PRB Berbasis Masyarakat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Letak Desa Ngargomulyo yang lebih dekat ke puncak Gunung Merapi. Jaraknya hanya 4,5 kilometer daripada ke pusat keramaian kota yang berjarak 15 kilometer ke kota kecamatan Muntilan atau ke pusat kota Magelang yang berjarak 35 kilometer. Jarang yang cukup jauh ke pusat perkotaan membuat warga membutuhkan hiburan lain. Beruntung, posisi pedalaman ini telah menumbuhkan kreativitas masyarakat untuk merawat seni tradisi yang sudah ada.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terdapat kurang lebih 15 seni tradisi yang berkembang di Ngargomulyo. Anatara lain *ketoprak*, *wayang orang*, *seni hadrah dan marawis*, *jatilan*, dan lain-lain. Beragam seni ini secara kontinu dipertunjukkan dalam panggung hiburan dan biasanya dihadiri

banyak warga. Penonton seni tersebut lintas usia, lintas iman dan agama, lintas dusun, bahkan lintas kelas sosial. Sebagai panggung hiburan, pertunjukkan seni berfungsi hiburan.

Panggung seni yang dipertunjukkan mampu mendatangkan banyak penonton dengan ragam lintas identitas. Mereka hadir dalam area panggung yang sama. Selama pertunjukkan berlangsung para penonton dari beragam latar belakang saling mengobrol, berdiskusi, dan berdialog di sela-sela pertunjukkan. Panggung hiburan menjadi ruang perjumpaan untuk merawat *peseduluran* di kalangan warga yang secara "terberi" berbeda keyakinan.

Dalam pertunjukkan, jika terjadi obrolan di antara penonton, mereka tidak pernah bertanya asal agama melainkan larut dalam obrolan terkait isu-isu sosial di desanya. Misalnya, bagaimana memajukan desa. Pertunjukkan menjadi media sangat strategis memperkuat moderasi beragama. Tidak hanya menjadi ruang dialog dan saling menyapa tetapi juga mengasah kepekaan batin antarmereka.

Masyarakat Ngargomulyo sangat menyadari perbedaan keyakinan di antara mereka hadir sejak mereka lahir. Mereka dilahirkan oleh orang tua dan nenek moyang yang berbeda dalam keberagaman. Karena itu, perbedaan tersebut harus dijaga agar tidak berpotensi sebagai benih-benih konflik sehingga kerukunan di antara mereka dapat dilestarikan. Segala upaya merawat kerukunan harus senantiasa diusahakan dan disepakati menjadi kebutuhan bersama.

Selain menciptakan dan meneguhkan pranata budaya seperti Pagar Merapai dan FPRB, olahraga menjadi media lain memperkuat moderasi beragama. Olahraga salah satu media silaturahmi dan edukasi agar bisa moderat dalam beragama. Bola voli dipilih sebagian besar warga Ngargomulyo. Tiap dusun di desa Ngargomulya memiliki tim bola voli. Tidak jarang pertandingan antardusun digelar.

Menurut Sutrisno, Kepala Urusan Kesejahteraan Desa Ngargomulyo, olahraga merupakan kegiatan silaturahmi yang merupakan bagian dari ibadah. Melalui olahraga manusia berkumpul dan bertemu saling berhadapan pada sebuah kegiatan tersebut. Nilai kejujuran, sportivitas, saling menghormati dan menguatkan ikatan persaudaraan menjadikan olahraga sebagai salah satu kegiatan penting dalam peribadatan (Sutrisno, 2021).

*Sambatan* atau gotong royong, upacara *merti dusun*, *nyadran*, dan *ngluari*

*ujar/nadar*, upacara-upacara daur hidup seperti upacara pernikahan, *mitoni*, *tedhak siten*, upacara memperingati orang meninggal (*telung dina*, *mitung dina*, *matang puluh*, *nyatus*, *mendhak pisan*, *mendhak pindho*, dan lain sebagainya) merupakan budaya yang tetap dipertahankan masyarakat. Bahkan, tradisi-tradisi itu semakin diperkuat karena dapat menjadi ruang perjumpaan memperkuat moderasi beragama.

Ngargomulya masih menjalankan *kembul bujono* atau menyantap bersama makanan yang dibawa pada selembar daun pisang oleh warga dan pengunjung yang hadir saat dilakukan upacara *merti dusun* atau bersih desa. dalam tradisi ini warga membuat nasi tumpengan beserta kelengkapannya, sebuah nasi tumpeng yang dikelilingi macam-macam lauk pauk akan mengerucut di salah satu titik puncak tumpeng. Ini melambangkan kebersamaan dengan aneka ragam perbedaan menjadi satu persatuan di puncak**.**

Sebagai rangkaian kegiatan tradisi ini akan digelar seni karawitan (*macapatan*) dan pentas ketoprak pada upacara *merti dusun*. Inilah contoh pranata budaya yang mampu memperkuat moderasi beragama di desa setempat. Sifatnya diperkuat, karena sejatinya karakter moderat telah ada dan menjadi warisan yang senantiasa dipelihara, namun pranata tersebut selalu *diuri-uri* (dirawat) agar tetap mampu menopang warisan berupa beragama yang moderat.

Pengalaman keberagamaan masyarakat di atas mencerminkan sebuah moderasi beragama yang berakar dari nilai-nilai kebaikan di masyarakat. Praktik ini dapat disebut sebagai kearifan lokal. Model moderasi beragama seperti ini dapat dipromosikan dan dikembangkan di tempat lain dan merupakan sebuah modalitas sosial sebagai temali kerukunan. Inisiasi masyarakat yang dirujuk sebagai kearifan lokal sudah semestinya diterapkan sebagai model di tempat lain. Beberapa model toleransi di atas niscaya mencerminkan perilaku yang berakar pada pandangan keagamaan yang moderat. Menyikapi ini sudah saatnya Negara mengambil peran untuk mempromosikan model-model moderasi beragama sebagai modal sosial membangun negeri ini dalam bingkai keharmonisan.

Budaya yang dipegang dan dipraktikkan manusia dapat berfungsi sebagai pola hidup yang menyeluruh. Ia bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Budaya turut menentukan perilaku komunikasi yang menyebar pada unsur-unsur sosio-budaya dan meliputi banyak kegiatan sosial. Keteraturan

dalam berbudaya antar manusia dalam suatu masyarakat akan sangat dipengaruhi proses komunikasi. Budaya dan kebudayaan itu sendiri telah ada sejak manusia berpikir, berkreasi, dan berkarya sekaligus menunjukkan bagaimana pola berpikir dan interpretasi manusia terhadap lingkungannya. Dalam kebudayaannya, terdapat unsur dan nilai-nilai yang dianut masyarakat setempat dan hal itu memaksa manusia berperilaku sesuai budayanya (Kusumohamidjojo, 2010).

Setelah terbentuk, budaya diwariskan turun temurun. Budaya yang diwariskan ini lambat laun menjadi sebuah tradisi. Tradisi merupakan bagian dari esensial kebutuhan manusia itu sendiri untuk mengkaji dirinya yang kemudian mengembangkannya. Tradisi dapat diartikan dalam sebuah budaya yang secara khusus atau merupakan sebuah pelambangan dari budaya itu sendiri.

Kekayaan budaya yang beragam tersebut pada dasarnya menjadi modal berharga bagi masyarakat untuk tetap tegak berdiri, juga modal dasar menciptakan kehidupan yang selaras, harmonis, dan damai. Sebab tradisi, budaya, dan pelbagai nilai-nilai luhur yang dipegang erat tersebut sarat nilai-nilai persaudaraan, kebersamaan, dan semangat saling menghargai.

Tradisi yang berisi pesan-pesan kebaikan inilah yang disebut dengan kearifan lokal, kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara, dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Kearifan lokal adalah nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama, bahkan melembaga (Mariane, 2014). Kearifan lokal sering kali dipadankan dengan *local genius* atau juga *culture identity*, yakni identitas/kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri (Ayatrohaedi, 1986; Saragih, 2013).

Kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat. Artinya, kearifan lokal adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka dan belum tentu dialami oleh masyarakat yang lain (Rahyono: 2009). Dengan demikian kearifan lokal menjadi bagian penting dalam perjalanan kehidupan suatu kelompok, suku, atau etnis tertentu. Kearifan lokal ini hidup di tengah masyarakat dan menjadi pijakan hidup, termasuk dalam berinteraksi dengan kelompok lain.

Dalam kearifan lokal, pesan yang dikandung salah satunya berupa tuntutan beragama yang moderat agar tercipta harmoni sosial. Hampir semua entitas budaya di nusantara mengajarkan nilai perdamaian yang aplikatif. Budaya Jawa, seperti yang ditemukan dalam penelitian sangat menekankan harmoni sosial. Harmoni tersebut terefleksi dalam citra hubungan sosial yang ideal, yaitu *guyub rukun*, ditandai dengan hubungan sosial yang erat dan akrab dengan suasana yang damai atau tanpa konflik.

Nilai-nilai budaya damai Jawa juga dibuktikan dalam ungkapan-ungkapan yang ditemukan penelitian ini. Ungkapan itu menjadi pijakan bertindak dalam hidup keseharian warga. Ungkapan pertama, *tetanggan sing guyub rukun supaya urip tansah kopen*. Ungkapan ini mengandung pesan agar seseorang selalu menjaga kerukunan di tengah masyarakat agar hidupnya tidak telantar. Jika manusia tidak menjalankan hubungan baik dengan orang lain, hidupnya sengsara karena dikucilkan masyarakat.

Ungkapan kedua *menang tanpa ngasorake*. Ungkapan ini dikenalkan oleh Panembahan Senopati atau Raja Mataram I. Artinya, memenangkan sesuatu tanpa mempermalukan pihak lawan. Ungkapan ini menunjukkan adanya prinsip hormat dan rukun bahkan dalam suasana perang sekalipun.

Ungkapan lainnya rukun *agawe santosa*, *crah agawe bubrah*. Artinya rukun membuat sejahtera, bertengkar membawa perpecahan. Ungkapan tersebut mengajarkan pentingnya hidup rukun dalam masyarakat. Ungkapan *lain yen ono rembug*, *yo dirembug*, juga menjadi ungkapan kedamaian. Artinya, kalau ada persoalan, sebaiknya dibicarakan. Ungkapan ini menegaskan urgensi dialog dan negosiasi dalam menyelesaikan masalah atau konflik. Selain ungkapan dalam bentuk lisan, terdapat kearifan lokal berupa praktik atau perbuatan nyata, seperti termanifestasi dalam tradisi sambatan atau gotong royong. Bentuk-bentuk kearifan lokal di atas hanyalah sedikit contoh di antara ribuan kearifan lokal yang ada di bumi Nusantara. Kearifan lokal ini mengajarkan gotong royong, toleransi, dan etos kerja yang gilirannya memperkuat perdamaian.

Umumnya etika dan nilai moral dalam kearifan lokal diajarkan turun-temurun, diwariskan dari generasi ke generasi melalui sastra lisan, antara lain dalam bentuk pepatah dan peribahasa, cerita rakyat (*folklore)*, dan manuskrip.

Walaupun ada upaya pewarisan kearifan lokal dari generasi ke generasi,

tidak ada jaminan kearifan lokal tetap kukuh menghadapi globalisasi yang menawarkan gaya hidup yang makin pragmatis dan konsumtif. Seperti disaksikan hari ini, kearifan lokal yang sarat kebijakan dan filosofi hidup sulit terimplementasi dalam praktik hidup yang semakin pragmatis. Karena itu diperlukan upaya-upaya serius merevitalisasi kearifan lokal. Ini strategi menghidupkan tradisi dan falsafah hidup yang lama bersemayam di masyarakat.

Gerakan revitalisasi ini bisa dilakukan dengan memaksimalkan peran tokoh adat dan tokoh agama. Pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama di tingkat lokal bisa mencegah, setidaknya mengurangi, konflik sosial. Mengapa penting? Selama ini kerja-kerja pengelolaan konflik lebih banyak bersifat sentralistis dan struktural dengan prosedur yang ketat. Padahal, di tingkat lokal, peran tokoh adat dan tokoh agama ternyata sangat fungsional.

Studi ini memperlihatkan penduduk Ngargomulyo yang menganut Islam dan Katolik meyakini ajaran agama berisikan pesan-pesan kemanusiaan. Jika diterapkan dengan *paseduluran*, pesan itu dapat memakmurkan masyarakat. Ketulusan dan rendah diri harus melandasi *peseduluran* dan bukan karena kesamaan agama, suku, kelas sosial, dan sebagainya, melainkan karena ketulusan. Di sisi lain, sikap fanatisme beragama hanya akan melahirkan eksklusi sosial. Dalam ungkapan lokal disebut *ora kopen* atau terlantar, semata karena dijauhi tetangga.

Masyarakat umumnya berprinsip bahwa orang lain berhak berpendapat walaupun didasarkan keyakinan agama. Meski demikian, tokoh muslim berpendapat, dalam mengembangkan toleransi warga perlu berhati-hati terutama dalam penggunaan frasa agama. Pengucapan kata *minal aidin wal faizin* saat Idulfitri, misalnya, hanya boleh dilakukan sesama muslim.

Tradisi, budaya, olahraga, dan pranata relawan bencana Merapi merupakan media yang dapat memperkuat pengalaman beragama yang moderat. Seluruh medium tersebut terlembagakan dalam banyak paguyuban dan kumpulan (tim) olahraga, terutama bola voli. Seni pertunjukkan dipilih warga sebagai ruang perjumpaan sebab seni merupakan bahasa universal, tidak mengenal usia, kelas sosial, dan agama. Seni pertunjukkan tidak hanya bersifat menghibur, melainkan interaksi antarpengunjung. Penonton bisa saling berbaur sebab tempat duduk pun tidak diatur. Sembari menonton pertunjukkan, penonton bisa saling menyapa dan mengobrol banyak hal tanpa

harus mengemukakan identitas dirinya.

*Sambatan* (gotong royong), *ujung* (silaturahmi atau berkunjung ke tetangga muslim pada Idulfitri), dan upacara keagamaan lainnya (misal, Natal dan Paskah) menjadi pranata efektif meneguhkan cara beragama moderat. Tampak dalam kegiatan tersebut, adanya kebersamaan dan kerukunan antarumat beragama.

Khusus dalam kegiatan keagamaan Katolik, warga muslim diundang tetapi tidak terlibat dalam ritual keagamaan. Saat peribadatan berlangsung, mereka duduk secara terpisah Setelah selesai peribadatan, warga Muslim dan Katolik berbaur dengan cara duduk bersama. Dengan demikian kekhawatiran kemungkinan terjadinya "perusakan akidah" tidak terjadi. Jamuan yang dihidangkan pun terjamin kehalalannya karena proses penyembelihan hewan (ayam atau sapi) dan menyajikannya sebagai hidangan melibatkan warga muslim.

Pascaletusan Merapi 2010, kebutuhan untuk mengembangkan *pasedu-luran* yang dilandasi sikap anti-fanatisme beragama memperoleh momentum. Gotong royong memulihkan desa dan mengurangi dampak bencana mendorong warga desa membentuk Pager Merapi dan FPRB. Kelembagaan ini bersifat lintas iman dan kelas sosial. Peneguhan Moderasi Beragama semakin terlihat dengan program *sister village*. Di tempat tersebut mereka tinggal atau menginap dan hidup bersama. Pengungsi dan pihak yang menerima pengungsi biasanya berbeda agama, namun kebutuhan menjalankan kewajiban agama tetap terjamin. Meskipun penerima pengungsi beragama Katolik, tetapi kesadaran menyediakan tempat ibadah bagi pengungsi muslim dilakukan. Tidak hanya itu, sepanjang tinggal di posko, konsumsi bagi pengungsi muslim terjamin kehalalannya.

Saling percaya menumbuhkan solidaritas saat musibah menimpa, termasuk bencana Merapi. Menurut Durkheim (1974), solidaritas sosial pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. situasi ini tecermin dalam praktik di desa yang menjadi area penelitian.

Kebijakan Moderasi Beragama dapat dipahami sebagai respons bangsa akan arah perjalanan keberagamaan di masa depan. Sangat serius, karena kita sepakat menjadikan seluruh warganegara Indonesia sebagai warganegara yang beragama. Di tengah kemajemukannya, kehidupan beragama per-

lu mendapatkan fondasi kebijakan yang sesuai.

Corak moderasi beragama di Ngargomulyo menjadi model yang bisa direplikasi di berbagai tempat berdasarkan konteks daerah masing-masing. Sebuah corak moderasi beragama tidak dapat dipaksakan tumbuh dan dikembangkan pada konteks yang berbeda. Setiap masyarakat memiliki potensi sosial budaya dan mungkin juga konteks alam yang akan mewarnai corak tersebut. Karenanya, kebijakan Moderasi Beragama harus tumbuh mengakar dalam penyelarasan budaya.

Setiap kelompok masyarakat memiliki budaya yang mendukung moderasi beragama. Karena memiliki fungsi yang mendukung, budaya tersebut dapat dikembangkan dan dilembagakan masyarakat. Kebijakan penguatan Moderasi Beragama hendaknya memperhatikan model-model yang sudah ada di masyarakat. Kebijakan dari bawah ke atas (*bottom up*) seperti ini diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat.

Temuan penelitian ini menunjukkan cara beragama yang moderat berhasil menyatukan semua kelompok agama (Islam dan Katolik), kelas sosial, kelompok usia, dan budaya. Dengan demikian penguatan moderasi beragama sangat penting dan relevan merawat kerukunan masyarakat Indonesia. Berdasarkan temuan, penelitian ini merekomendasikan program-program kerukunan yang difasilitasi pemerintah diprioritaskan pada penguatan cara beragama moderat di kalangan umat beragama. Artinya, program kerukunan harus dimulai dari hulu: memoderasi kehidupan beragama di masyarakat.

Realitas memperlihatkan kearifan lokal acap kali dikalahkan sikap masyarakat yang semakin pragmatis dan lebih berpihak pada tuntutan ekonomi semata. Kampanye nilai-nilai damai, harmoni, dan toleransi perlu melibatkan tokoh agama dan tokoh adat. Keduanya ibarat dua sisi koin mata uang, tak bisa dipisahkan. Masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, kalau tidak mengatakan seluruhnya, terlebih dahulu diselesaikan dengan kerja-kerja kekeluargaan bersifat lokal nan arif, sebelum masuk ke institusi formal. Peran strategis ini, bisa dimaksimalkan.

Selain itu, memaksimalkan fungsi lembaga-lembaga masyarakat dan menghidupkan ritual di tingkat lokal sangat ampuh dalam merawat perdamaian. Lembaga masyarakat baik berbentuk artefak seperti rumah adat, ruang-ruang kumpul, maupun bersifat nonfisik, seperti ikatan kesukuan, mar-

ga, dan sistem kekeluargaan memiliki fungsi dalam menangkal konflik sosial keagamaan.

Penguatan Moderasi Beragama, upaya menghadirkan jalan tengah di antara dua kelompok ekstrem: liberalisasi dan konservatisme dalam memahami agama. Moderasi Beragama bertujuan menghadirkan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. penguatan Moderasi Beragama bagian dari strategi Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Karenanya, agen Moderasi Beragama tidak hanya para tokoh formal tetapi juga tokoh nonformal. Mereka dapat menjadi agen perubahan dan para pemengaruh (*influencer)* di masyarakat.

Kementerian Agama sebagai pemimpin dalam Program Nasional Moderasi Beragama hendaknya terus mengidentifikasi tokoh-tokoh nonformal di masyarakat. Sebagai unit layanan terdekat di masyarakat, KUA dapat mengoptimalkan program Moderasi Beragama melalui kegiatan bersama dengan para tokoh tersebut. Dengan dukungan pranata desa, program ini diharapkan memiliki akar kuat di masyarakat dan hasilnya dapat memperkuat ketahanan desa.

## Daftar Pustaka

Abror, M (2020). Moderasi Beragama dalam Bingkai Toleransi. *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam*, *1*(2), 143-155.

Aasland, E (2016). *Peaceful lifestyle or innocuous image: Islamic branding using kazakh proverbs on youtube. Folklore (*Estonia), 63, 107-120. doi:10.7592/FEJF2016.63. aasland

Abdullah, M, & Anggraeni, M (2020). Conservation Of Javanese Cultural Haritage As Strategy To Strengthen The Nation Characterand Maintain The Local Wisdom (Case Study Lagu Dolanan Anak). In *E3S Web of Conferences* (Vol. 202, p. 07058). EDP Sciences.

Azra, A (2020). *Relevansi Islam Wasathiyah: Dari Melindungi Kampus Hingga Mengaktualisasi Kesalehan*. Jakarta: Kompas.

_____ (2020). *Moderasi Islam di Indonesia: Dari Ajaran*, *Ibadah*, *Hingga Perilaku.* Jakarta: Penerbit Kencana.

Durkheim, E (1974). *The Devision of Labour in Society*, translate by Geoge Simpton, New York: The Free Press

Farida, A & Sivita, M (2020). *Masjid dan Moderasi Beragama di Masa Pandemi: Stu-*

*di Kasus Masjid Nurul Islam dan Al-Barkah Kota Bekasi*, Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Balitbang dan Diklat Kementerian Agama

Kementerian Agama RI, 2019. *Moderasi Beragama*, Jakarta: Kemenag RI.

Madinier, R & Picard, M (2011). The Catholic politics of inclusiveness: A Jesuit epic in Central Java in the early twentieth century and its memory dalam *The Politics of Religion in Indonesia: Syncretism*, *Orthodoxy*, *and Religious Contention in Java and Bali. England: Routledge*

Menchik, J (2016). *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalisme*, Cambridge University

Prasetyo, M F & Wisnu (2018). *Sekolah Katolik Pribuni van Lith di Muntilan. Jurnal Avatara-e journal Pendidikan Sejarah* Volume 6 No 1 Maret 2018. Universitas Negeri Surabaya.

# Moderasi Beragama di Purwakarta

Asnawati dan Kustini

## Pendahuluan

Pada 2019 Kementerian Agama meluncurkan satu gagasan tentang pentingnya bersikap moderat dalam beragama. Gagasan tersebut diluncurkan untuk merespons fenomena di masyarakat terkait dengan sikap keberagamaan yang dikategorikan ekstrem. Kelompok tersebut meyakini bahwa pendapat atau pandangannya yang paling tepat, sehingga mereka yang berbeda pandangan dianggap salah. Tidak hanya menganggap salah atau keliru, pada posisi tertentu, ketika ada yang berbeda pandangan dianggap harus disingkirkan bahkan jika perlu melalui jalan kekerasan yang kemudian disebut dengan kekerasan ekstremisme. Ekstremisme dapat dijelaskan sebagai aktivitas-aktivitas berupa keyakinan, sikap, perasaan, tindakan, dan strategi-strategi, dari satu karakter yang melampaui batas kelumrahan (Mudzakkir, dkk., 2018)

Semangat moderasi beragama berupaya mencari titik temu dua kutub ekstrem dalam beragama. Di satu sisi, ada pemeluk agama yang ekstrem meyakini mutlak kebenaran satu tafsir teks agama, seraya menganggap sesat penafsir selainnya. Kelompok ini biasa disebut ultrakonservatif. Di sisi lain, ada juga umat beragama yang ekstrem mendewakan akal hingga mengabaikan kesucian agama, atau mengorbankan kepercayaan dasar ajaran agama-

nya demi toleransi yang tidak pada tempatnya kepada pemeluk agama lain. Mereka biasa disebut ekstrem liberal. Keduanya perlu dimoderasi. Moderasi beragama (Agama, 2019, h 7). Dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata *wasaṭ* atau *wasaṭiyyah* (wasatiah), yang memiliki padanan makna dengan kata *tawāsuṭ* (tawasut, tengah), *i'tidal* (iktidal, adil), dan *tawāzun* (tawazun, berimbang). Orang yang menerapkan prinsip wasatiah bisa disebut *wasiṭ*. Dalam bahasa Arab pula, kata wasatiah diartikan sebagai "pilihan terbaik" (Kementerian Agama, 2019).

Agar moderasi beragama tersebut tersosialisasi dengan cepat, Kementerian Agama kemudian menerbitkan dua dokumen pendukung yaitu *Moderasi Beragama* dan *Buku Saku Tanya Jawab Moderasi Beragama*. *Moderasi Beragama* secara ringkas berisi penjelasan tentang: (1) kajian konseptual moderasi beragama, (2) argumen mengapa moderasi beragama penting bagi bangsa Indonesia, dan (3) strategi implementasi moderasi beragama. Buku ini dapat dianggap sebagai naskah akademik menuju penguatan dan pengarusutamaan moderasi beragama di Indonesia. Sementara itu, buku saku Tanya Jawab Moderasi Beragama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari buku induknya. Berdasarkan pada argumen-argumen yang dibangun terkait dengan urgensi dan signifikansi moderasi beragama dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang harmonis, rukun, dan damai tersebut, penguatan moderasi beragama kemudian disepakati sebagai bagian penting dari arah kebijakan pembangunan nasional di bidang pembangunan sumber daya manusia, sehingga masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 (TKKMB, 2020).

Salah satu wilayah yang dijadikan lokus studi ini adalah Kabupaten Purwakarta. Sejak Dedi Mulyadi memimpin Purwakarta (2008 – 2018), terbaca kuat upaya untuk menghidupkan kembali nilai-nilai seni dan budaya dalam bentuk mendirikan patung, baik patung tokoh pewayangan, tokoh atau pahlawan nasional ataupun patung berbagai jenis binatang yang dianggap memiliki makna tertentu. Di mata Dedi Mulyadi, patung-patung yang sampai sekarang menghiasi Kota Purwakarta merupakan karya seni yang dipercaya memiliki energi inspiratif, sehingga jika tidak diberikan ruang, maka secara otomatis akan mempersempit ruang inspirasi bagi sebuah komunitas masyarakat. Jika ruang seni dipersempit maka energi inspiratif tidak akan ter-

transendensi kepada manusia. Akhirnya, manusia tidak lagi imajinatif, tidak memiliki ide dan imajinasinya akan dibentuk dengan impor imajinasi dari luar. Karena itulah, sebut Dedi, anak-anak lebih mengenal super hero tokoh imajinasi dari luar seperti Batman atau Superman (Merdeka.com, 2017).

Dalam penataan kota seperti ini, apa yang dilakukan Pemerintah Daerah Purwakarta di era Dedi Mulyadi dapat dibaca dalam perspektif yang lain sebagai upaya realisasi konsep pembangunan kota berkelanjutan (*sustaible development*). Akan tetapi, pemikiran dan tindakannya dalam memajukan budaya (Sunda) itu bukan tanpa hambatan. Konsep-konsep moderasi yang diusungnya lewat penguatan kebudayaan sempat mendapat penentangan dari sebagian masyarakat di wilayahnya. Artikel ini ingin menggali gagasan dan tindakan yang diambil Pemerintah Daerah Purwakarta di era kepemimpinan Deddy Mulyadi, serta tantangan yang dihadapi untuk mengubah Kabupaten Purwakarta menjadi wilayah yang lekat dengan nuansa kulturalnya.

Dalam tulisan ini, sikap moderasi beragama dikaitkan dengan isu pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Ide utama dari pembangunan berkelanjutan adalah dalam rangka menjaga lingkungan. Karena itu pembangunan berkelanjutan dapat dimaknai sebagai satu upaya untuk menciptakan satu kondisi, berbagai kemungkinan, dan peluang dari tiap anggota atau kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup tanpa menimbulkan dampak negatif bagi alam (Syahyuti, 2006). Sementara itu menurut Budimanta (2005), pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya. Dalam bidang pertanian misalnya, agropolitan yang merupakan program pemerintah yang berdasarkan pada sistem pertanian tradisional yang dipadukan dengan sistem perkotaan modern. Kawasan agropolitan terdiri dari kota pertanian dan desa-desa sentra produk pertanian yang ada di sekitarnya. Agropolitan merupakan pendekatan perencanaan pembangunan tipe *bottom-up* yang berkeinginan mencapai kesejahteraan dan pemerataan pendapatan lebih cepat dibanding strategi *growth pole* (Rozikin, 2012: 221).

Menurut Nurse (2006), gagasan inti dari *sustainable development* adalah bahwa kegiatan manusia dan pembuatan kebijakan perlu mengacu pada pertimbangan lingkungan, sosial dan isu-isu lingkungan secara terintegrasi. Koneksi ketiganya dalam berbagai tingkatan pemikiran sehingga langkah tersebut dapat diraih. Ide ini telah diakomodasi oleh ISO 26000. Ketiga dimensi itu, sosial, ekonomi dan lingkungan, pada umumnya dipandang sebagai tiga pilar *sustainable development*. Ditambah berikutnya yaitu *governance* sebagai pilar keempat untuk menopang pembangunan berkelanjutan. Adapun sebagian lain malah menempatkan budaya sebagai pilar keempat (Ward, 2012).

Sayangnya dalam konsep *Sustainable Development Goals* (seperti halnya *Millennium Development Goals*) tampak mengesampingkan dimensi budaya dalam pembangunan. Kebudayaan tidak dilibatkan dalam tujuan besar dari pembangunan berkelanjutan dan juga *sustainable development goals.* Istilah ini hanya disebutkan lima kali dalam poin sasaran, yang artinya sangat jauh dari tujuan yang lain. Dengan kata lain, kebudayaan hanya dimanfaatkan sebagai sarana untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial dan dimensi lingkungan. Kebudayaan dan para pemilik serat pelaku kebudayaan tidak dipandang keberadaannya. Padahal banyak diyakini bahwa kebudayaan merupakan bagian penting dalam pengembangan dan penghargaan terhadap kehidupan (Watene & Yap, 2015).

## Antisipasi Konflik Komunal di Purwakarta: Cerita Wanayasa

Dalam penelitian ini, fokus area yang dituju adalah salah satu kecamatan di Wanayasa yang dianggap memiliki ciri khas keindahan alam dan pernah menjadi sasaran perusakan simbol kebudayaan, yaitu patung Arjuna Memanah yang berada di Situ Wanayasa. Di Kecamatan Wanayasa yang terkenal dengan Situ Wanayasanya ini tidak ditemukan rumah ibadah selain Islam. Walaupun dijumpa bangunan milik umat Buddha, laporannya ia merupakan tempat peristirahatan, tempat meditasi, yang berada di Desa Babakan. Tempat peristirahatan ini, menurut informasi dari Camat Wanayasa Herdi (2021), didirikan tanpa menggunakan persyaratan sesuai dengan PBM 9 dan 8 Tahun 2006.

Wanayasa dan Purwakarta sebagai salah satu kabupaten di Jawa Barat diam-diam terus berbenah. Dedi Mulyadi, tokoh Purwakarta yang pernah

menjabat sebagai bupati Purwakarta selama dua periode, sudah terkenal beberapa kali mendapatkan penghargaan ketika dirinya menjabat. Dahulu, Purwakarta dikenal sebagai kota pensiun, sekarang beda. Menurut Pendeta Kristen dan Anggota FKUB Purwakarta, Evory Gulo (2021), orang luar melihat Purwakarta hebat dengan terobosan Bupati Dedi, ditambah lagi ramainya kuliner, terutama sate *maranggi*-nya.

Menurut Camat Wanayasa, Herdi, masalah perbedaan yang sering muncul di masyarakat Wanayasa dan juga Purwakarta lebih pada masalah perbedaan terkait dengan keyakinan misalnya ucapan selamat Natal, ataupun perbedaan tentang rakaat tarawih. Dalam kehidupan keseharian, masyarakat yang demikian homogen dari sisi etnis dan agama itu hampir tidak terjadi gesekan yang disebabkan perbedaan paham maupun kelompok, begitu pula jika di tataran lintas antartokoh agama juga tidak pernah lagi menjadi masalah walaupun Purwakarta pernah diramaikan dengan keberadaan FPI yang memanggungkan ceramah Habib Rizieq Shihab pada 2015.

Di mata Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanayasa, Baden Ismatullah, Kecamatan Wanayasa dan juga Purwakarta secara umum sampai sekarang nyaman-nyaman saja. Bukan berarti tanpa konflik. Menurutnya, apa yang namanya barang baru, tidak biasa, pasti akan terjadi pertentangan dan penentangan. Hanya di sini perlu diapresiasi peran ustaz dan kiai, dan kedua peran NU yang kuat.

> Kita *kan* tahu NU hidup dari kultur ya. Dengan NU tahlil *no problem*, *marhabanan no problem*. Padahal itu kultur, bukan syariat. Berarti patung itu kultur bukan syariat. Memang awal-awal terjadi konflik sampai korban satu Patung Bima dirobohkan. Cuma memang betul, kiai itu lebih baik diam. Untuk menghadapi pemerintah daerah waktu itu lebih baik diam, tetapi menangkap suara masyarakat. *Oke lah* Bupati seperti itu, tetapi yang diberesi yang ini saja. Menenangkan. (Ismatullah, 2021).

Di saat bersamaan, kebijakan Pemerintah Daerah Purwakarta dalam memberikan perhatian pada pembangunan fisik daerah juga terlihat. Jalan-jalan diperbaiki. Bahkan sampai pohon saja dikasih sarung, yang merupakan implementasi idenya Bupati Dedi Mulyadi dalam memperkuat bu-

daya. Masyarakat tidak merasa keberatan, lanjutnya, selama hal itu tidak menyembah sesuatu dan tidak ada ritual tertentu yang dijalankan. Hanya memasang sarung dan selesai, begitu pula patung didirikan dan selesai. Berikutnya tidak ada ritual sesajen setelah itu. Waktu itu Abun Bunyani, Ketua MUI, dan Jhon Dien Ketua PCNU dilihat memilih sikap cenderung mendiamkan dan moderat. Abun Bunyani adalah tokoh karismatik yang merupakan pengasuh pesantren besar di Kecamatan Wanayasa dan menunjukkan sikap diam saja terhadap kebijakan pemerintah daerah yang menonjolkan aspek budaya tersebut.

Ini hanya hiasan. Itu pun waktu terjadi pembakaran patung, itu bukan masyarakat NU *sih*. Ada juga orang NU yang ruh jihadnya masih tinggi, ada juga yang terbawa (Ismatullah, 2021).

Kota Purwakarta disebut kota santri itu sebenarnya terpusat pada dua kecamatan, yakni Kecamatan Plered dengan tokohnya Mama Sempur yang oleh banyak orang Purwakarta dianggapnya wali. Tokoh ini telah meninggal sekian tahun lalu. Kedua, Kecamatan Wanayasa dengan Cipulus Wanayasa dengan tokohnya almarhum KH Adang Badrudin. Menjadi ciri khas Purwakarta disebut daerah santri itu, sebenarnya bertumpu pada dua kecamatan itu. Adapun daerah lainnya termasuk daerah industri. Dalam hal ini, peran kiai terhadap adat itu sangat penting. Memang pernah terjadi hari jadi hari lahirnya Purwakarta, di dalamnya disajikan tumpeng, tapi bukan untuk simbol-simbol itu. Di Wanayasa dan Purwakarta pada umumnya, perbedaan golongan antara NU dan Muhammadiyah hampir tidak pernah menjadi isu. Belakangan masyarakat lebih cenderung melihat berbeda itu dengan Jamaah Tabligh (JT). Masyarakat justru apriori dengan Jamaah Tabligh ketimbang pertentangan antara NU dan Muhammadiyah yang tidak seberapa. Masyarakat kebanyakan beranggapan, karena mungkin tidak sesuai dengan gurunya di kampung, mereka keberatan dengan keberadaan JT. Apalagi, anggota JT kebanyakan merupakan pendatang.

> Pernah terjadi kemelut di masjid sini (Masjid Jami Attaqwa, Desa Wanayasa). Cuma di sini ditolak dengan alasan keamanan. Kalau di sini ada kehilangan, mau tanggung jawab tidak. Mana lihat KTP-nya. Kalau ibadah urusan dengan Tuhan, tetapi kalau keamanan dengan dusun. Kalau dihantam ibadahnya, pasti ramai. Tapi kalau dari keaman-

an itu biasa. Dusun melarang demi keamanan itu (Ismatullah, 2021).

Meski di berbagai daerah, termasuk daerah perbatasan, peran kelompok Jamaah Tabligh sangat membantu gerakan dakwah bahkan sampai lintas negara (Putro & Kustini, 2018), tidak demikian dengan penerimaan masyarakat Wanayasa. Ada kekhawatiran jika masyarakat belum sepenuhnya memahami cara dakwah Jamaah Tabligh, maka ketika Jamaah Tabligh itu pergi, akan meninggalkan konflik di masyarakat. Mereka sudah tidak ada, masyarakat masih berkonflik. Doktrin-doktrin yang dibawa Jamaah Tabligh itu bisa memecah belah masyarakat. Bukan masalah benar atau tidaknya, tetapi masalah yang ditinggalkannya. Karena di masjidnya itu ada yang kunut dan tidak kunut. Kalau tidak marhaban berarti tidak kunut. Karena itu, Baden Ismatullah sebagai aparat Kementerian Agama yang ada di KUA mencoba meredam potensi konflik dengan membatasi aktivitas Jamaah Tabligh. Dalam perspektif moderasi beragama, apa yang dilakukan Baden Ismatullah dalam posisinya sebagai kepala KUA, merupakan implementasi nilai-nilai moderasi di KUA (Natardi, 2019).

Di Wanayasa, terdapat khusus masjid Persis di desa Babakan, tapi aktivitas kosong. Paling diisi waktu Jumatan saja. Praktik keagamaan dan organisasi Persis ini cenderung dibawa pendatang, terutama dari daerah selatan, Garut, Tasikmalaya, Ciamis. Di Wanayasa, umumnya tidak terjadi perselisihan terkait kegiatan keagamaan. Misalnya saja bagi umat Islam yang melakukan salat tarawih delapan rakaat dipersilakan. Di masjidnya itu, tarawih berlangsung 20 rakaat, akan tetapi pelaksanaan delapan rakaat dan pulang terlebih dahulu tidak menjadi masalah. Terdapat pula organisasi atau kelompok PUI yang tidak terlalu mempermasalahkan perbedaan ritual seperti kunut dan tidak kunut. Ditambahkan lagi bahwa khusus Wanayasa tidak terdapat kampung adat. Di Wanayasa baru-baru ini ada seremoni *Mapag Cai Pohaci*, menjelang hari jadi Purwakarta.

Program-program Dedy Mulyadi itu mendapat dukungan juga dari masyarakat, misalnya ketika dalam *event* budaya masyarakat diundang ke pusat kota tidak dipungut biaya. Dari desa datang sebanyak enam mobil untuk menuju *event* budaya tersebut. Mungkin bekal juga diberikan. Lama-lama patung jadi ikon juga. Akan halnya keberadaan patung-patung itu hanya berupa hiasan saja. Tidak lebih dari itu. Termasuk di Wanayasa juga pernah

ada patung Arjuna Memanah yang dibakar. Peristiwa ini terjadi menjelang pemilihan bupati Dedi Mulyadi yang kedua.

> Bukan masalah agama karena tidak pernah ada keributan. Sampai sekarang pihak yang membakar tidak diketahui (Ismatullah, 2021).

Di Era Lily Hambali, kebijakan di Purwakarta sangat agamis. Dedi melakukan pembaharuan. Pemikirannya kadang dianggap nyeleneh, namun tidak berarti ia jauh dari ulama. Masyarakat merasakan pembangunan yang dijalankan Dedi. Jalan-jalan utama hingga gang-gang dibuat bagus. Masyarakat tidak bicara lagi soal patung.

> Sekarang itu kantor KUA dan kuburan bagus. PAD cukup besar. Kecamatan industri itu Campaka, Cibatu, Bungursari, Jatiluhur, Babakan, dan Plered. Diakui atau tidak, perubahan oleh Bupati Dedi kelihatan. Terlepas pro atau kontra. Ada peningkatan sampai Situ Wanayasa. Dulu Situ Wanayasa itu angker. Orang cuci kaki tidak berani. Tapi oleh Bupati Dedi dibuat *track* untuk joging. Sebagai masyarakat turut menikmati. Saya pun juga menikmati (Ismatullah, 2021).

Justru untuk urusan agama, di mata Baden, Dedi Mulyadi kurang perhatian ketimbang zaman Lily Hambali. Pada Era Lily, para kiai se-Purwakarta diberikan sarung BHS dan aneka kebutuhan makanan pokok. Guru madrasah per Oktober dapat tunjangan. Akan tetapi sejak 2010, setela dua tahun menjabat, tidak ada lagi bantuan kepada para kiai dan guru madrasah. Pada zaman Lily memimpin, untuk membangun masjid dibantu 2 juta. Zaman Dedi, proposal dikembalikan ke kecamatan. Mungkin, dalam pandangan Baden, dana tersedot ke pembangunan. Hal yang berbeda, Dedi memperhatikan keindahan dan tata kota. Di sini, hal apa yang baik atau tidak, tergantung orang menilai. Di sekolah juga dibuat program budaya, *nyunda*. Anak-anak dikenalkan dengan budaya Sunda.

> Sejauh saya hidup di Purwakarta, saya lahir di Purwakarta belum pernah terjadi konflik antaragama. Di Purwakarta yang agamanya bukan Islam itu rata-rata pendatang, *Chinese*. Tapi karena jumlah umat aga-

ma lain sangat kecil, mungkin ini yang tidak pernah menarik perhatian masyarakat untuk berkonflik (Ismatullah, 2021).

## Perhatian Pemda Terhadap Toleransi

Selama menjabat sebagai bupati, Dedi Mulyadi adalah bupati yang unik. Ia ingin membuat Purwakarta menjadi ikon budaya Sunda yang kuat di Indonesia, dan untuk mewujudkan mimpinya, ia menggunakan simbol-simbol budaya pra- atau nonislami, seperti mendirikan patung-patung pewayangan di sudut-sudut kota dan memberikan sarung penutup di pepohonan dengan pola hitam-putih, mirip dengan yang ada di Bali (Pribadi, 2016). Menurut Wita Sasmita (2021), kepala Subbagian TU Kantor Kemenag Purwakarta, sejak masa jabatan Bupati Dedi Mulyadi memang dikenal banyak memiliki ide-ide yang inspiratif kepada kebudayaan (kesenian), dengan banyaknya simbol-simbol yang terpasang di lingkungan kota baik berupa patung-patung atau banyak hiasan lain berupa lampion-lampion yang di pasang pada gapura-gapura, dengan maksud untuk memajukan wisata.

Meski memiliki rasionalisasi yang kuat dalam rangka melestarikan budaya lokal, pendirian patung-patung tersebut ternyata bagi sekelompok umat Islam dianggap dapat mencederai akidah umat Islam dan menjurus kepada syirik. Reaksi kelompok umat Islam itu ditunjukkan dengan hujatan kepada Dedi khususnya di media sosial. Lebih lanjut, hujatan itu ditunjukkan dengan penghancuran atau pembakaran beberapa patung antara lain Patung Arjuna Memanah di lokasi obyek wisata Situ Wanayasa. Menyadari reaksi masyarakat tersebut Dedi menyadari bahwa potensi konflik dan intoleransi di Purwakarta cukup tinggi. Meski sejak lama Purwakarta dikenal dengan istilah kota santri, tapi bagi Dedi cara mengaktualisasikan nilai-ilai agama dalam bersikap dan berperilaku belum dianggap dewasa. Konflik sewaktu-waktu dapat muncul jika tidak dikendalikan. Karena itu diperlukan media untuk menjaga toleransi dan keharmonisan, dan menghindari tindakan intoleran. Karena itu kemudian dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) Toleransi. Dalam observasi langsung tim peneliti, nuansa seperti disebutkan oleh Pribadi tersebut dapat ditemukan di kantor Kecamatan Wanayasa. Di halaman kantor, dibangun ruang terbuka seperti balai. kemudian tiang penyangga teras dilingkari dengan kain sarung warna hitam dan putih, layak-

nya pemandangan di Bali.

Pribadi juga menyebutkan dalam artikel tertanggal 13 November 2015, Habib Rizieq berceramah di Purwakarta. Ceramahnya kemudian menjadi sebuah kontroversi dan berkembang menjadi perselisihan yang dipicu oleh kata-kata Habib Rizieq yang dianggap menghina budaya Sunda melalui pelesetan ucapan salam masyarakat Sunda '*sampurasun*' (saya mohon dimaafkan/sempurnakan diri Anda) menjadi '*campur racun*'. Angkatan Muda Siliwangi (AMS) merasa bahwa ceramah Habib Rizieq menghina masyarakat Sunda dan menuntut Habib Rizieq untuk meminta maaf kepada masyarakat Sunda. Perselisihan tersebut kemudian berkembang menjadi isu yang lebih besar seperti demoralisasi, kemusyrikan, dan kekafiran yang melibatkan Dedi Mulyadi sebagai Bupati Purwakarta (Pribadi, 2016).

Dalam menyikapi terobosan Bupati Dedi Mulyadi ketika menjabat yang menonjolkan budaya kesundaan, hal demikian juga menjadi masalah yang dihadapi para penyuluh agama di Purwakarta. Ruhani (2021), penyuluh agama PNS Kecamatan Wanayasa, menyampaikan bahwa setiap kebijakan selalu ada plus dan minus. Kebijakan Bupati Dedi Mulyadi tentang penguatan budaya Sunda banyak diprotes karena mengkhawatirkan kalangan Islam, misalnya dikaitkan kemusyrikan. Di lapangan, para penyuluh agama sempat kesulitan mengimbangi kebijakan itu, sebab Purwakarta banyak dihuni para ulama. Menyikapi hal itu menyinggung hal prinsip. Budaya Sunda, seperti membuat patung saja, bagaimana hukumnya membuat patung. Itu luar biasa menyikapinya, yang diakuinya serbasalah. Apalagi di satu sisi pemimpin harus dihormati. Di sisi lain ulama juga punya pendapat harus didengar. Namun seiring waktu permasalahan mereda. Selama ikon budaya itu tidak disembah dan dijadikan Tuhan, itu tidak termasuk musyrik. "Kalau mendekati syirik, dijadikan Tuhan, kami pun berontak," kata Ruhani.

Di tingkat pimpinan umat Islam lokal waktu ada penolakan saat itu, cara menyelesaikannya di antara diadakanlah musyawarah, antara pihak pemerintah, MUI dan ormas. Pandangan tokoh dari NU sangat bijaksana, dipimpin Abun Bunyamin.

> Saya juga NU Syuriah Kecamatan Wanayasa. Alhamdulillah karena ada kebijaksanaan-kebijaksanaan ulama NU saat itu, maka protes warga itu bisa diminimalisasi. Kalau hilang *sih* tidak, Bu, sampai hari

> ini. Banyak ulama yang fanatiknya luar biasa, tetapi mereka berpandangan lebih baik diam daripada berbicara mudarat sehingga berjalan dengan sendirinya (Ruhani, 2021).

Namun, nuansa budaya Sunda juga tetap berjalan walaupun sempat terjadi penolakan dari FPI dan Rizieq Shihab. Untuk peninggalan ucapan salam Sunda yang dipopulerkan, *sampurasun*, sampai sekarang masih dipertahankan. Bahkan ada kiai yang mengucapkannya setelah salam. Mendampingi salam *assalamualaikum*. *Sampurasun* ungkapan bahasa Sunda, artinya salam hormat ala Sunda. Kalau bukan orang Sunda, susah memaknai salam *sampurasun* (Ismatullah, 2021).

## Masalah Umat Minoritas dalam Struktur Masyarakat Purwakarta

Di tingkat akar rumput Purwakarta bukan tanpa masalah, dan riskan terjadi gesekan walaupun tidak terlalu kelihatan. Umat Kristen yang memiliki porsi tidak cukup besar di wilayah ini melihat kondisi Purwakarta bukan berarti tanpa adanya ancaman yang harus diwaspadai. Namun, salah satu tokoh umat Kristen di Purwakarta mengakui, gesekan itu dapat diredam karena pemerintah juga tegas menindak kelompok intoleran untuk tidak mengganggu ruang kebersamaan yang telah dibangun. Khotbah-khotbah ustaz juga membuat segar, sehingga umat merasa tidak keberatan. "Di Purwakarta saya lihat tidak ada ustaz-ustaz yang mencoba memprovokasi. Pemerintah dan tokoh-tokoh agama turut mendukung" (Gulo, 2021).

Bahkan seingat Evory, sejak Bupati Lily Hambali, Dedi Mulyadi dan sekarang Anne Ratna Mustika, yang tidak lain adanya istri Dedi Mulyadi, pada kegiatan gereja, pemerintah daerah juga turut menyumbang misalnya dalam acara perayaan.

> Walaupun tidak besar, namun bagi kita itu bentuk perhatian. Para pendeta juga diberi piagam penghargaan yang tentu saja cukup menyenangkan bagi para pendeta. Memang jamannya Bupati Dedi itu yang heboh, dengan program air mancur, patung, dan sebagainya. Memang sangat revolusioner. Sebagian belum siap, sehingga terjadi demo juga. Tetapi setelah terbiasa, jadi dingin kembali. (Muaranya pada) seni (Gulo, 2021).

Pemda Purwakarta juga pernah memberi baju seragam untuk para pendeta dan majelis dalam sebuah perayaan Natal, sehingga baju yang dikenakan sama dengan baju Dedi Mulyadi. Jumlah bantuan itu berkisar 40an baju. Tidak lupa, papar Evory, dalam sambutannya Dedi menyebut ini pendeta yang Kristen Nusantara. Artinya, tidak perlu pakai jas. Seragam itu dibantu oleh Dedy Mulyadi dengan besaran setiap baju seharga Rp40.000. Evori Gulo, pria asal Nias ini, memulai bertugas sebagai pendeta di gerejanya di Purwakarta pada 2002. Ia ingat sewaktu datang pertama kali ia tidak lupa memperkenalkan diri kepada gereja maupun masyarakat di mana gereja berada. Dirinya juga mengenalkan diri kepada RT dan RW.

Di Purwakarta lembaga yang menaungi gereja-gereja hanya satu, BKSG yang menaungi 16 gereja. Badan Kerja Sama Gereja-Gereja (BKSG), dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) belum masuk di Purwakarta saat itu. Dalam BKSG, semua gereja masuk, sementara PGI terbatas waktu itu. Berbeda sekarang, PGI lebih terbuka. Termasuk Advent, Pantekosta juga dibolehkan masuk PGI. BKSG didirikan sejak tahun 1981 dan telah dikenal oleh pemerintah.

Saat ini di Purwakarta, jumlah umat Kristen sekitar 7 - 8 ribu. Informasi tersebut diperoleh tahun 2018. Denominasi dengan jumlah umat cukup besar yaitu Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dan Gereja Kristen Pasundan (GKP). Gereja Isa Almasih (GIA) yang berdiri sejak 1999, tempat Evory Gulo bernaung, sebesar 100 lebih jiwa. Mereka ini dari berbagai penjuru nusantara yang datang ke Purwakarta umumnya untuk bekerja. Banyak yang belum berkeluarga. Gereja ini anggota majelisnya masih muda-muda dan banyak yang belum berkeluarga.

Untuk beradaptasi dengan masyarakat Purwakarta secara keseluruhan, konsep Tri Kerukunan itu dijadikan acuan oleh gereja. Kerukunan internal gereja, misalnya dalam pemilihan badan pengurus dan majelis dalam BKSG dilaksanakan Mei 2021 kemarin. Semua pendeta hadir. Masalah di dalam gereja relatif tidak dijumpai. Paskah bersama dan Natal bersama dapat berjalan sebagaimana rencana. Lalu juga dihadiri perwakilan pemerintah, bupati, dandim, maupun kapolres dan FKUB juga Satgas Toleransi. Mereka hadir selesai acara ritual hanya dalam perayaannya saja. Gereja sendiri rukun, tidak ada konflik antardenominasi. Antar pendeta di Purwakarta bisa saling berkunjung.

Termasuk di dalamnya, persaingan dalam mencari domba itu sudah disepakati karena tidak saling memaksa.

> Tergantung jemaatnya, jika mau datang ke gereja lain, ia harus membawa surat. Atau bisa telepon karena antarpendeta memiliki grup WA. Dalam BKSG hanya 16 gereja dan pendeta juga tidak sampai seratus orang. Jadi komunikasi gampang. Apabila ada jemaat baru, pemuda atau pemudi saya tanya apakah sungguh-sungguh atau simpatisan. Saya tanya selama ini gerejanya di mana. Dijawab dari HKBP, saya kenal dengan pendetamu dan saya bisa telepon. Ternyata baru datang dari Medan. Oh, kalau begitu ya *nggak* apa-apa. Kalau ke gereja HKBP di sini lebih jauh, sementara ke gereja GIA tempat saya lebih dekat. Karena kerjanya di Pabrik Bata, tinggal menyeberang saja, sementara ke HKBP adanya di Sadang. Tapi saya sampaikan juga ke pendeta HKBP bahwa ada jemaat HKBP dari Medan yang baru datang masuk ke GIA. Oleh pendeta HKBP dikatakan belum terdata di gerejanya, dan menyatakan silakan dibina saja (Gulo, 2021).

Hal berbeda apabila, ditemukan perpindahan gereja karena terjadi satu kasus misalnya pihak perempuan hamil, maka jika di gereja sebelumnya dikeluarkan, di GIA bersedia menampung asalkan mengakui perbuatan dosanya. Lalu disampaikan kepada pendeta dari denominasi asal, bahwa ada jemaat dengan kasus tersebut. Pihak gereja sebelumnya pun menerima.

Kerukunan berikutnya dengan pihak pemerintah itu juga dipelihara dan telah dilalui oleh Evory paling tidak, berlangsung sejak Bupati Lily Hambali Hasan. Ia ingat berpindah dari Bandung ke Purwakarta waktu Bupati Lily Hambali Hasan menjabat. Hubungan pemerintah dengan gereja sangat baik di eranya. Lalu dilanjutkan oleh Dedi Mulyadi selama dua periode hingga sekarang istrinya, Anne Ratna Mustika. Apalagi sekarang ini, untuk urusan dengan umat Kristen, bupati Anne sering melalui dirinya menyangkut permasalahan umat Kristiani, termasuk permohonan pendirian gereja. Masalah yang rumit diselesaikan di internal sebelum dibawa ke Bupati. Apalagi menyangkut masalah lahan. Tidak ketinggalan pula kerukunan dengan umat agama lain. kedekatannya dengan tokoh-tokoh agama lain membuatnya duduk di kepengurusan FKUB dan Satgas Toleransi. Bahkan, pada saat pera-

yaan Natal 2019, Jhon Dien datang ke perayaan Natal di gerejanya (Gulo, 2021).

Evory pernah dua periode menjadi ketua umum BKSG. Sekarang salah satu ketua. Sampai sekarang BKSG belum memiliki kantor. Waktu menjabat sebagai ketua umum, maka kantor BKSG di gerejanya. Untuk pertemuan-pertemuan lebih sering di gedung HKBP Sadang karena banyak ruangannya dan besar. Kadang juga di gedung Gereja Kristen Pasundan (GKP).

Sejak 2002 pindah ke Purwakarta, ia telah memulai membangun relasi dengan tokoh-tokoh lintas agama. Waktu itu MUI diketuai Abun Bunyamin, ia datang ke MUI memperkenalkan diri.

> Saya juga datang ke sekolahnya, Al Muhajirin. Saya juga disambut. Terjadilah relasi. Apalagi waktu itu saya menjabat Ketua BKSG, saya ajak beberapa pendeta datang menemuinya (Gulo, 2020).

Adapun di gerejanya sendiri, GIA, baru sekali kebaktian yaitu pukul 09.00. kebaktian *online* hanya waktu tiga bulan pertama pandemi. Setelah itu diberlakukan giliran, 50% hadir minggu ini, 50% hadir minggu berikutnya. Untuk kebaktian ini diatur melalui pendaftaran, sehingga jemaat yang hadir yang mendaftar dan mendapatkan nomor. Hal ini sesuai dengan protokol kesehatan gereja di kala pandemi.

Dirinya juga menjadi salah satu anggota FKUB Purwakarta. Posisinya itu membuatnya leluasa untuk membangun jaringan dengan tokoh MUI, termasuk juga dengan pimpinan MUI Purwakarta selepas Abun Bunyamin, yakni Jhon Dien. Responsnya sangat senang dan dikasih kurma. Selain di FKUB, bersama Jhon Dien juga masuk dalam kepengurusan Satgas Toleransi. Hal ini karena ia telah mengakrabi tokoh-tokoh agama lain. waktu dirinya dirawat, ketua MUI juga menjenguknya di rumah sakit dengan membawa mobil MUI. Waktu kejadian demo Bupati Dedi yang dituduh syirik oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan ormas Islam, sempat juga waswas dirasakan oleh Evory, karena bisa jadi merembet ke gereja.

Namun kami ditenangkan oleh pihak keamanan, karena memang pelakunya yang merobohkan patung itu ditangkap dan diadili. Jadi umat Kristiani tidak terbawa-bawa ke ranah itu. Jemaat memang yang waswas. Namun pada akhirnya gereja aman-aman saja. Bahkan ketua FPI-nya Asep, pernah

bertemu dan berbicara dengan saya. Saya sampaikan kepada Asep, jika ada masalah internasional, jangan dibawa-bawa ke sini. Itu urusan mereka. Kita sampaikan begitu. Makanya aman di sini (Gulo, 2021).

Sebenarnya ditemukan juga riak-riak kecil tentang hubungan antaragama di wilayah Purwakarta yang jika tidak tepat penanganannya, bukan mustahil akan berubah menjadi masalah sosial yang mencemarkan nama Purwakarta. Hal demikian ini tidak jauh dari fakta terjadinya penolakan sekelompok orang terhadap penggunaan gedung TK untuk kebaktian. Penyelesaian tentang TK yang sempat dipermasalahkan. Sebenarnya, penggunaan gedung TK untuk ibadah itu berawal dari adannya surat edaran dari Bupati Dedi, yang mempersilakan beribadah dengan catatan tidak mengganggu ketertiban umum. Sejak saat itu di setiap sekolah diadakan ibadah dan tersedia tempat ibadah. Sebelumnya muncul laporan, di beberapa sekolah SD dan SMP tidak diperbolehkan untuk ibadah.

Setelah muncul edaran itu, semua kepala sekolah membolehkan. Di sekolah Katolik tersedia ruangannya. Kalau yang Kristen berkumpul bersama di satu ruang. Lalu juga disediakan guru pendalaman Alkitab yang disediakan honor per bulan Rp satu juta. Bahkan waktu itu peresmiannya dihadiri oleh Ma'ruf Amin. Hal itu juga bentuk perhatian Bupati Dedi setelah mendengar kecilnya honorarium guru pendalaman Alkitab. Untuk menjadi guru itu dites terlebih dahulu.

> Saya yang membuat soal untuk Kristen, sebanyak 100 soal. Selain ujian tulis, juga ada ujian lisan. Diselenggarakan di Kantor Dinas Pendidikan Purwakarta. Sampai sekarang masih berjalan walaupun tinggal beberapa orang. Kendalanya karena program ini tidak termasuk dalam kurikulum sekolah (Gulo, 2021).

Pada kejadian Minggu, TK itu sempat didemo dan para pendemo hampir saja masuk menerobos jika tidak dihalau aparat. Gedung TK itu memang sekaligus menjadi tempat kebaktian. Pada saat demo itu, di TK sedang diadakan kebaktian. Pendetanya menelepon dirinya dan melaporkan peristiwanya. Para jemaah juga merekam. Dia mengatakan, akan memberikan solusi, akan tetapi meminta supaya tidak menyebarkan peristiwa itu. Dijawablah tidak akan.

Lantas Evory datang ke Jhon Dien. Lalu disepakati untuk mengundang pendeta Hatorangan Situmorang, pendeta di tempat kebaktian TK itu, ke pertemuan FKUB dan juga pernah diundang di Kesbangpol untuk mencari solusi. Ternyata terdapat kesalahpahaman pada masyarakat di situ. RT dan masyarakat setempat tidak keberatan. Justru masyarakat yang jauh dari tempat itu justru keberatan.

> Akhirnya kita katakan untuk gereja lebih aktif bergiat secara sosial. Ketika memberi dalam bentuk barang, ternyata terjadi kecemburuan dari pihak lain. Kiai Jhon Dien mengenal ustaz yang keberatan itu. Jhon Dien juga menyanggupi untuk memediasi dan mendekati ustaz yang keberatan ini. Lama setelah peristiwa itu terjadi pandemi, tidak bisa ibadah (Gulo, 2021).

Dalam kesempatan pertemuan dengan Bupati Anne, Evory juga ajukan permasalahan empat gereja bermasalah dan belum memiliki tempat ibadah. Untuk gereja Situmorang (Gereja Kristen Perjanjian Baru, jemaat Huria Pengharapan) lebih terasa. Yang belum memiliki gereja itu ibadahnya berpindah-pindah. Ada tempat tetapi ditolak perijinannya oleh warga dan tidak dapat memenuhi ketentuan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Disampaikan kepada bupati, dan disampaikan bupati tidak dapat menganulir peraturan bersama tersebut, kecuali kalau ada peraturan bupati.

Sebagai salah satu solusi, diagendakan akan dibangun gereja bersama, namun belum sempat terealisasi. Rencana lokasi yaitu di Cikao Park, atau di Yon Armed atau di tempat lain. Namun belum terealisasi, karena baru dua bulan. Selain gereja juga tempat pemakaman yang masih menjadi ganjalan bagi umat Kristen. Hal ini juga disampaikan Evory ke bupati dan hal itu karena mereka tidak mampu menyelesaikannya secara internal.

## Kreasi Pelembagaan Moderasi Beragama

Bagian ini menjelaskan tentang pelembagaan moderasi beragama, dalam arti bagaimana bentuk moderasi beragama yang diimplementasikan ke dalam institusi, lembaga, struktur, unit yang secara khusus memikirkan strategi implementasi konsep ini agar mengejawantah menjadi program dan kegiatan yang terukur dan berkesinambungan (Kemenag RI, 2019). Da-

lam kaitannya dengan nilai-nilai budaya lokal, pelembagaan moderasi juga ditunjukkan bagaimana budaya tersebut kemudian secara formal ditetapkan melalui sebuah peraturan perundangan. Pada masyarakat Purwakarta, dapat disebutkan beberapa bentuk pelembagaan moderasi beragama. Tetapi dalam bagian ini hanya akan membahas tiga jenis pelembagaan moderasi beragama yaitu: (1) Satuan Tugas Toleransi; (2) Tujuh *Poe Atikan*; dan (3) Kebun Persahabatan.

***Satuan Tugas Toleransi***

Perkembangan menarik di Purwakarta, karena selain telah berdiri Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), juga didirikan oleh pemerintah daerah setempat yaitu Satuan Tugas (Satgas) Toleransi. Pembentukannya berdasarkan instruksi presiden. Namun sebenarnya di Purwakarta dibentuk Satgas Toleransi. Dibentuk karena situasi di Purwakarta waktu itu tidak kondusif berkenaan dengan isu SARA, khususnya keberatan pihak FPI terhadap keberadaan patung-patung saat itu. Dibandingkan dengan Satgas Toleransi, FKUB lebih bersifat administratif.

> Namanya juga forum, tidak banyak mengurusi masalah teknis. Kalau satgas mengarah pada teknis dan tindakan. Forum lebih banyak pada sosialisasi-sosialisasi (Herdi, 2021).

Untuk penguatan kelembagaan Satgas Toleransi, Bupati Purwakarta mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 300.05/Kep-103-Kesbangpol/2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Toleransi Kehidupan Beragama/Kepercayaan di Kabupaten Purwakarta. Dalam Surat Keputusan tersebut dijelaskan tugas pokok Satgas Toleransi adalah melaksanakan pembinaan, memfasilitasi dan melakukan upaya penyelesaian berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan toleransi dalam kehidupan beragama, berbudaya, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai peraturan perundangan; mengoordinasikan dan mengonsultasikan dengan lembaga atau instansi terkait berhubungan dengan permasalahan toleransi kehidupan beragama/kepercayaan di masyarakat; melaporkan kepada Bupati setiap kejadian atau permasalahan yang berkaitan dengan toleransi kehidupan beragama/kepercayaan disertai upaya penyelesaiannya.

Sebagai konsekuensi dari pembentukan Satgas Toleransi ini adalah Bupati memberikan honor yang cukup untuk pengurus Satgas Toleransi. Melalui Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 67 Tahun 2020 ditetapkan honor Satgas Toleransi untuk setiap bulannya berkisar antara Rp650.000 yang paling rendah untuk staf bagian sekretariat, dan yang tertinggi yaitu ketua, diberi honor Rp1.500.000 per bulan.

Adapun tujuan dari dibentuknya Satgas Toleransi yaitu untuk menjaga kerukunan hidup antarumat beragama dan umat seagama. Bingkai yang baru dibangun Satgas Toleransi dalam menjalankan fungsinya. Seirama dengan moderasi beragama, menjalankan kehidupan beragama tersebut harus dalam konteks berbangsa dan bernegara. Satgas Toleransi, menurut Dedi, bertujuan memberikan rekomendasi serta pemahaman kepada pemerintah daerah ketika menghadapi gerakan yang dianggap radikal dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Satgas Toleransi harus sudah memiliki kriteria yang membedakan mana gerakan radikal dan mana yang tidak (Tempo.co, 2016).

Sebagai sebuah satgas, kegiatannya terfokus pada hal-hal praktik yang dianggap dapat meningkatkan toleransi. Kegiatan dimaksud antara lain Botram Kerukunan**.** Botram (Sunda) adalah tradisi makan bersama di ruang terbuka, misalnya di pinggir sawah, pinggir kolam, atau di kebun. Makan bersama biasanya dilaksanakan dengan menggelar tikar dan saling bertukar jenis makanan. Tradisi masyarakat Sunda ini kemudian dihidupkan kembali di Satgas Toleransi untuk meningkatkan keakraban antar kelompok masyarakat yang berbeda agama maupun berbeda kelompok.

Kegiatan Botram kerukunan tidak hanya melibatkan peserta dari tokoh agama dan tokoh masyarakat, tetapi juga dilaksanakan dengan melibatkan anak-anak sekolah. Disadari betul bahwa anak-anak adalah generasi penerus karena itu mereka harus memiliki pandangan dan wawasan yang luas tentang relasi antara agama. Salah satu kegiatan Botram kerukunan dilaksanakan tanggal 3 November 2016 dengan melibatkan pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA dari berbagai latar belakang agama. Dalam acara dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Purwakarta ini para pelajar terlihat saling berbaur meski mereka mengenakan atribut keagamaan masing-masing. Ketua Satgas Toleransi Purwakarta Jhon Dien di lokasi acara menjelaskan, menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama adalah penting. Nilai-nilai to-

leransi ini harus ditanamkan sejak dini kepada para pelajar di Purwakarta ataupun daerah lain di Indonesia. Dengan media Botram ini acaranya terlihat santai, tetapi substansinya bisa kita tekankan untuk pendidikan toleransi berbangsa dan bernegara juga bermasyarakat (Kompas.com, 2016).

***Tujuh Poe Atikan***

Selain pembentukan Satgas Toleransi, di Purwakarta juga dirintis apa yang disebut Tujuh Poe Atikan. Program *Tujuh Poe Atikan* (Sunda) jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kira-kira berarti tujuh hari belajar. Program ini merupakan spirit dalam pelaksanaan pendidikan karakter yang didesain melalui lembaga pendidikan bagi anak di sekolah dasar dan sekolah menengah. Program ini kemudian dikuatkan melalui Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter. Dalam Pasal 4 Peraturan Bupati tersebut dijelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan berkarakter di Kabupaten Purwakarta meliputi rangkaian kegiatan pembinaan dan pengasuhan peserta didik di dalam dan di luar sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Purwakarta untuk mengembangkan potensi diri, mental, spiritual, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya.

Bagaimana pelaksanaan pendidikan berkarakter bagi siswa di Purwakarta, dijelaskan dalam Pasal 5 Peraturan Bupati tersebut. Disebutkan bahwa pendidikan berkarakter diselenggarakan dengan berpedoman kepada nilai kesundaan, *7 (tujuh) Poe Atikan Pendidikan Purwakarta Istimewa*, atau 7 (tujuh) Hari Ajaran Pendidikan Purwakarta Istimewa. meliputi nilai sebagai berikut: (1) Senin, *ajeg nusantara*, mengandung makna menumbuhkan rasa kebangsaan atau cinta tanah air; (2) Selasa, *mapag di buana*, mengandung makna memperluas wawasan terhadap dunia; (3) Rabu, *maneuh di Sunda*, mengandung makna kembali pada jati diri sebagai orang Sunda; (4) Kamis, *nyanding wawangi*, mengandung makna memberikan ruang untuk kebebasan berekspresi; (5) Jumat, *nyucikeun diri*, mengandung makna mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa; (6 dan 7) Sabtu dan Minggu, *betah di imah*, mengandung makna mencintai rumah sebagai tempat bernaung keluarga.

Sesuai namanya yaitu pendidikan karakter, maka program Tujuh Poe Atikan Pendidikan Purwakarta Istimewa ditujukan untuk anak—anak sekolah.

Papan bertuliskan Tujuh *Poe Atikan* Purwakarta Istimewa terpampang di pintu masuk kelas-kelas. Seorang guru PAUD di Purwakarta menjelaskan program dimaksud sebagai berikut:

> *Atikan* itu artinya pendidikan, jadi Kang Dedi membuat semacam pola untuk pendidikan di jenjang TK sampai SMA. Kemudian ini dimaknai bahwa setiap hari dilakukan pendidikan karakter bernilai Sunda. Tapi setelah saya telusuri itu adalah sari atau sintesis dari 18 pendidikan karakter. Kalau kata saya *sih* bagus, hanya saja memang persoalannya implementasi yang masih kurang. Implementasi menurut saya masih di tataran kedinasan, untuk guru pun masih berproses lama. Dalam implementasinya ada beberapa sekolah yang jalan, ada yang jalan tapi tidak sepenuhnya (Wulandari, 2021).

Dalam implementasinya di sekolah, *Tujuh Poe Atikan* Purwakarta dapat digambarkan bahwa dengan sangat baik. Senin yaitu bahwa *Ajeg Nusantara* yang dalam bahasa Indonesia artinya tegak, sehingga konsep pembelajaran mengenai *Ajeg* Nusantara memiliki pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini yang tegak dan kokoh, tidak tergoyahkan. Untuk menguatkan nilai-nilai kebangsaan ini setiap hari Senin anak-anak diajak untuk mengikuti upacara bendera serta menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kemudian Selasa disebut *Mapag Buana. Mapag* artinya menjemput, buana artinya dunia. Secara harfiah, *mapag buana* berarti menyiapkan diri kita dari berbagai hal untuk menjemput datangnya peradaban dunia yang semakin modern. Anak-anak diperkenalkan pembelajaran menggunakan komputer dan penggunaan in fokus dalam pembelajarannya. Anak-anak dibawa ke dalam informasi yang luas melalui internet hingga pada akhirnya anak-anak dapat memahami apa saja yang terjadi di dunia luar.

Kemudian hari Rabu yaitu *Maneuh* di Sunda. *Maneuh* berarti diam atau tinggal, Sunda tentu adat budaya yang mendiami tanah Pajajaran, sebagai wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten, termasuk di dalamnya Kabupaten Purwakarta. *Maneuh* di Sunda berarti menegaskan kita yang tinggal di Purwakarta harus mengenal jati dirinya, budaya leluhurnya, yang dengan budaya Sunda itu, kita menjadi bangsa sebagai bangsa Indonesia yang majemuk.

Kemudian ada hari Kamis, yaitu *Nyanding Wawangi* (hari Estetis). Kamis dijadikan hari berkarya, anak-anak diberikan kebebasan dalam menentukan imajinasinya dalam menggambar, menulis puisi menyanyi, menggunakan alat musik ataupun menari. Setiap kegiatan harus disesuaikan dengan tema yang akan dilakukan pada pembelajaran saat itu. Kebebasan imajinasi anak-anak tetap dalam arahan dan bimbingan guru.

Kemudian Jumat, yaitu *Nyucikeun Diri* (menyucikan diri) berarti *ngantekeun diri* (mengantarkan diri) kita pada kesucian. Kesucian yang dimaksud adalah kesucian hati, jiwa dan pikiran kita agar tetap terjaga, selalu dekat dengan Tuhannya. Terakhir adalah hari Sabtu dan Minggu, yaitu *Betah di Imah.* Hari Sabtu dan Minggu siswa melakukan pembelajaran di rumah. Sabtu dan Minggu *betah di imah* dan para guru tidak memberikan tugas apa pun kepada siswa. Siswa betah bersama orang tuanya di rumah (Wulandari, 2017).

Jika Tujuh Poe Atikan itu diterapkan kepada setiap anak didik, sesungguhnya setiap hari anak-anak diberi banyak pelajaran secara bergantian. Ada pelajaran penanaman nilai-nilai wawasan kebangsaan setiap Senin, memperdalam ilmu pengetahuan dan teknologi setiap hari Selasa, penanaman nilai budaya lokal setiap hari Rabu, Sabtu dan Minggu, inovasi menghadapi kehidupan yang terus berkembang melalui pembelajaran ilmu pengetahuan setiap hari kamis penguatan nilai-nilai ajaran agama setiap hari Jumat, maupun.

> Dalam Satgas Toleransi diprogramkan secara rutin yaitu kegiatan Botram harmoni. Konkretnya, dalam setiap bulan makan bersama-sama dengan berbagai elemen agama yang berbeda. Ada pula kegiatan membantu umat berbeda agama dalam merayakan hari besar keagamaan, misalnya membersihkan masjid dan juga membersihkan gereja, walaupun yang terakhir ini sempat ramai dipermasalahkan. Namun Satgas Toleransi berangkatnya dari realitas keberagaman yang ada di Purwakarta. Sulit juga masyarakat menerima semua kebijakan pemerintah, seperti sekarang masalah vaksin Covid-19 walaupun telah dijamin kehalalannya oleh MUI, namun masih saja ditemukan protes dari masyarakat (Herdi, 2021).

Selain Botram harmoni, Satgas toleransi pernah melaksanakan pawai Pancasila di tahun 2017 di saat Hari Jadi Purwakarta. Selain itu, selama puasa juga berbagi takjil yang dilakukan oleh umat agama lain. Satgas Toleransi juga pernah memfasilitasi kasus rumah dijadikan tempat ibadah. Dibandingkan dengan FKUB, kegiatannya sebenarnya hampir sama dan malah anggotanya juga sama. Anggota FKUB juga sekaligus anggota Satgas Toleransi. Lebih-lebih, Ketua FKUB dan Ketua Satgas Toleransi merupakan orang yang sama, yaitu Jhon Dien. Apabila FKUB anggarannya dobel, dari Kementerian Agama dan dari daerah, maka Satgas Toleransi didukung penuh oleh anggaran pemerintah daerah. Untuk kegiatan FKUB sendiri, paling banyak untuk kegiatan sosialisasi dan tidak mengurusi masalah teknis. Dengan begitu, adanya Satgas Toleransi melengkapi peran FKUB (Wawancara dengan Herdi, Ibid).

Keterangan di atas, juga diperkuat informasi dari Evory Gulo, seorang tokoh Kristen yang juga aktif di FKUB dan Satgas Toleransi. Menurutnya, Satgas Toleransi dan FKUB berjalan bersamaan, tidak berjalan sendiri-sendiri. FKUB berjalan, dan ditopang oleh Satgas Toleransi. "Kami sosialisasikan, kami FKUB di dalamnya juga Satgas Toleransi, jadi tidak dibedakan. Sesuai format SK, untuk kepentingan kebersamaan di Purwakarta" (Gulo, 2021).

Selain memperkuat toleransi lewat FKUB dan Satgas Toleransi, Pemerintah Daerah Purwakarta juga meluncurkan program sekolah ideologi yang salah satu pembicaranya adalah para mantan narapidana teroris. Kegiatan ini berlangsung beberapa kali sebelum pandemi melanda.

***Kebun Persahabatan***

Kebun persahabatan adalah sebuah tempat yang terletak di Jalan Kapten Halim, Desa Salam Mulya, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta. Berjarak sekitar 14 km dari pusat Kota Purwakarta dan dapat ditempuh dalam waktu sekitar 25 menit saja. Memasuki kebun persahabatan seluas 10 hektare, terasa sejuk karena dipenuhi berbagai pepohonan besar dan kecil, yang tertata rapi. Gemercik air di beberapa sudut taman membuat suasana semakin sejuk. Adalah Banthe Kamsai Sumano Mahathera (lahir di Thailand, 26 November 1971) yang berinisiatif untuk membangun kebun persahabatan. Meski dibangun oleh seorang tokoh agama Buddha, tetapi Kebun Persahabatan tidak menunjukkan simbol-simbol agama Bud-

dha. Yang terlihat adalah pepohonan rindang, ruang-ruang pertemuan terbuka yang biasa digunakan Banthe memimpin ibadat dan untuk melayani umatnya, beberapa patung binatang juga kursi dan meja panjang di bawah pohon, dengan pemandangan ke arah waduk Jatiluhur yang biasa digunakan untuk menjamu makan para tamu.

Penamaan Kebun Persahabatan menunjukkan bahwa area ini digunakan untuk menjalin persahabatan. Siapa pun boleh datang ke kebun ini, tentu harus memberi tahu lebih dahulu. Pengunjung dapat menikmati makanan dan buah-buahan yang tumbuh di sekitar kebun ini. Menurut Banthe, tidak hanya manusia yang bersahabat, tanaman pun saling bersahabat, karena itu mereka harus dijaga dan dipelihara dengan baik.

Sebagai tokoh agama Buddha, Banthe Kamsai telah menunjukkan keteladanan bagi masyarakat. Ia tidak hanya bersembahyang atau bermeditasi, ia juga turun tangan untuk menanam pohon, menyapu, dan membersihkan areal kebun. Ia juga memasak langsung untuk menjamu tamu-tamu tertentu. Selain itu, Banthe sangat dekat dengan masyarakat sekitar. Sering kali ia berjalan ke perkampungan, menemui ibu-ibu di dapur, membawa bantuan makanan dan melihat apakah mereka sudah makan atau belum. Tak segan Banthe langsung ke dapur untuk memasak dengan bahan makanan yang dibawanya. Jika ada yang sakit dan tidak bisa diobati di puskesmas terdekat, Banthe mengantar ke rumah sakit di Purwakarta, atau telepon beberapa sahabat yang berprofesi sebagai dokter untuk bisa mengobati.

Kebun Persahabatan dan cara Banthe Kamsai berrelasi dengan masyarakat sekitar, menunjukkan bahwa ia menyayangi sesama, sikap toleransi aktif untuk memahami kesulitan masyarakat dan mencarikan solusi, cara yang humanis dan tidak menimbulkan sikap kebencian, menjadi beberapa indikator moderasi beragama yang dijalankan Banthe. Sesuai dengan doa dan moto pengabdiannya "*Sabba Satta Bhavantu Sukhihata*", yang berarti semoga semua makhluk hidup berbahagia, Banthe selalu ingin berbagi kebahagiaan dengan sesama, dengan sebanyak-banyak orang.

## Pendukung dan Penghambat Penguatan Moderasi Beragama

Penguatan moderasi beragama merupakan satu aktivitas dinamis yang tidak terlepas dari konteks sosial budaya masyarakat sekelilingnya. Karena itu proses penguatan moderasi beragama di satu tempat bisa saja tidak

sama dengan di tempat lain. Meski penguatan moderasi dapat dilakukan melalui berbagai aspek, misal aspek budaya, politik, sosial maupun ekonomi, tapi satu hal yang harus diperhatikan bahwa penguatan moderasi beragama haruslah berbasis pemahaman keagamaan yang substantif, tidak harfiah atau formalistis. Internalisasi nilai esensial agama menjadi satu keniscayaan sehingga dapat membedakan moderasi beragama dengan gerakan deradikalisasi yang parsial. Karena itu, sekali lagi komitmen pada esensi ajaran agama sangat penting (Kemenag RI, 2019).

Dalam konteks penguatan moderasi beragama di Kabupaten Purwakarta, dapat diidentifikasi beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat. Kebijakan pimpinan daerah setempat khususnya pada masa Bupati Dedi Mulyadi. Masa kepemimpinan Dedi selama dua periode (2008 – 2018) meninggalkan banyak jejak positif baik dalam bentuk fisik infrastruktur maupun mental dan perilaku masyarakat. Jika dikaitkan dengan empat indikator moderasi beragama, Dedi telah mencanangkan penguatan moderasi di semua indikator.

Indikator toleransi ditunjukkan secara nyata dengan pembentukan Satuan Tugas Toleransi yang dikukuhkan melalui Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 300.05/Kep-103-Kesbangpol/2016. Indikator penguatan wawasan kebangsaan dan budaya local ditunjukkan Dedi dengan mencanangkan *Tujuh Poe Atikan* khususnya bagi anak didik. Faktor budaya lokal juga sangat kental dengan kebijakan Dedi menghidupkan kembali budaya Sunda baik melalui bahasa, tokoh atau patung, maupun penamaan gedung. Sementara indikator antikekerasan ditunjukkan Dedi melalui pembentukan Satgas Toleransi dengan kegiatan Botram bersama ataupun keberpihakan kepada Forum Kerukunan Umat Beragama.

Keteladanan para tokoh agama dalam meredam dan melokalisasi konflik. Kondisi Purwakarta yang saat ini terlihat damai tanpa konflik, sesungguhnya bukan terjadi dengan tiba-tiba. Bukan juga karena tidak ada potensi konflik. Tetapi para tokoh agama telah secara proaktif menciptakan kerukunan. Mereka yang dari segi jumlah merupakan minoritas, misalnya Kristen atau Buddha, tidak segan untuk mendatangi tokoh agama Islam, atau mendatangi pejabat pemerintah daerah sekaligus memperkenalkan diri.

Ketika konflik mulai mengemuka, maka para tokoh agama segera menenangkan umatnya dan memberikan contoh bahwa hal yang tidak me-

nyenangkan tidak harus direspons secara emosional. Dalam kasus patung misalnya, ketika ada sebagian kelompok Islam yang mempermasalahkan bahkan beberapa patung diruntuhkan karena dianggap merusak akidah Islam, para tokoh agama lokal tidak ikut larut dalam perseteruan tersebut. Para tokoh agama bahkan memberikan penjelasan bahwa sejauh tidak bertentangan dengan ajaran Islam, serta tidak mengganti sesuatu yang diajarkan dalam ajaran Islam, maka hal itu masih bisa diterima. Respons para tokoh agama tersebut menjadi contoh bagi umat bahwa soal patung tidak harus disikapi secara emosional.

Apresiasi dunia luar terhadap Purwakarta sebagai wilayah toleran. Hasil kerja nyata Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi banyak diapresiasi pihak luar. Karena itu berbagai penghargaan telah diraih Dedi antara lain penghargaan dari Kementerian Agama. Pada 2016, Dedi berhasil meraih penghargaan dari Sukarno Center sebagai pemimpin teladan demokrasi. Penghargaan tersebut diberikan, lantaran Dedi dinilai sebagai pemimpin yang berani melindungi hak-hak kaum minoritas, melakukan perlindungan terhadap masyarakat adat dan mampu menerapkan nilai-nilai kebinekaan dalam setiap programnya sebagai kepala daerah.

Tahun 2016 Purwakarta memperoleh Harmony Award dari Kementerian Agama. Dedi dinilai berhasil menciptakan kerukunan dan toleransi antara lain melalui penyediaan tempat ibadah berbagai agama di sekolah-sekolah serta menyediakan guru agama sesuai agama murid-muridnya. Aspek penilaiannya ada tiga, yakni aspek dukungan pemerintah, hasil kerja kualitas dan aspek perawatan pelayanan kerukunan beragama.

Tahun 2016 memperoleh penghargaan Dwidja Praja Nugraha dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy atas keberhasilannya menciptakan konsep pendidikan berkarakter yang diterapkan di Kabupaten Purwakarta. Konsep pendidikan berkarakter yang diterapkan Dedi Mulyadi diterjemahkan ke dalam aneka program teknis. Konsep itu tidak lagi berfokus pada kemampuan akademik pelajar, tetapi lebih pada membangun pola aplikatif sehingga memicu para pelajar lebih produktif. Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, meraih penghargaan sebagai Maestro Seni Tradisi 2016 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud). Dedi disematkan penghargaan karena dianggap konsisten menjaga kebudayaan masyarakat Sunda.

Masa pandemi Covid-19 membuat interaksi antar kelompok masyarakat berkurang serta penerapan nilai-nilai moderasi di sekolah terhenti seiring dengan berhentinya aktivitas sekolah, Demikian juga interaksi antara kelompok masyarakat melalui Botram kerukunan misalnya, saat ini terhenti seiring dengan pemberlakuan protokol kesehatan.

Perbedaan pemahaman terhadap satu fenomena tertentu, termasuk masalah khilafiah. Hal ini terlihat misalnya dalam kasus konflik patung sebagai simbol budaya. Sebagian masyarakat (khususnya muslim) menganggap patung sebagai bentuk pengingkaran terhadap ajaran agama Islam. Sementara kelompok muslim lain yang cenderung moderat, menganggap patung sebatas simbol budaya yang tidak mengganggu rasa keimanan seseorang. Mobilitas masyarakat khususnya migrasi masuk atau migrasi ke luar Purwakarta, diduga membawa budaya tertentu yang kurang sesuai dengan budaya Purwakarta atau mereduksi budaya Sunda masyarakat Purwakarta. Berakhirnya masa jabatan Bupati Dedi Mulyadi sehingga kebijakan yang telah dibuat kurang dapat dikontrol dengan baik. Harus diakui bahwa masa kepemimpinan Dedi Mulyadi menancapkan momentum yang kuat terkait dengan penguatan bahasa Sunda. Ketika masa jabatan berakhir, beberapa program tidak selalu dapat dilanjutkan.

## Penutup

Pemahaman masyarakat Purwakarta tentang moderasi beragama, terlihat pada interaksi sosial dan keagamaan antarumat beragama masyarakat Purwakarta dan secara khusus di Kecamatan Wanayasa. Meski demikian, masyarakat tidak terbiasa menggunakan terminologi "moderasi beragama" melainkan lebih mengerti ketika disebut istilah "toleransi". Masyarakat yang berbeda suku dan agama, relasi sosialnya terjalin, toleransi menjadi penting, kedua belah pihak bisa saling menekan egonya untuk menerima perbedaan. Keadaan rukun dan toleransi di Purwakarta sudah terjalin jauh sebelum bupati Dedy. Paling tidak sepuluh tahun terakhir Purwakarta perkembangannya sangat menarik, berbeda dengan kepemimpinan daerah lainnya.

Moderasi Beragama dipandang penting oleh Bupati Purwakarta, untuk membangun rasa memiliki budaya Sunda yang mesti dilestarikan. Dengan adat istiadat dapat menata sikap untuk berperilaku saling menjaga untuk kebaikan bersama. Dedy Mulyadi banyak menerapkan kebijakan melestari-

kan kearifan lokal budaya Sunda, untuk lebih mengenal dan cinta kebudayaan di kampung sendiri. Dengan mencintai seni maka penguatan moderasi beragama bisa berjalan tanpa menyakiti satu sama lain. Moderasi beragama di sini sudah cukup terbangun, oleh masing-masing pranata umat beragama. Dan ormas-ormas Islam relatif terbangun dengan baik. Salah satu contoh NU (mayoritas), bersama-sama membangun Purwakarta. Hubungan dengan tokoh agama nonmuslim juga terjalin dengan baik. Sehingga bisa terpantau kegiatan mereka.

Implementasi Moderasi Beragama di masyarakat Purwakarta setidaknya dapat dilihat dari tiga hal. Pertama, terbentuknya Satuan Tugas Toleransi, dengan beberapa kegiatan antara lain menciptakan Botram Harmoni yaitu bertukar makanan untuk dimakan bersama. Kemudian, membuat acara *gempungan* memberikan kesempatan untuk warga nikah massal. Interaksi antarumat sangat harmonis, saling kunjung bila ada yang terkena musibah atau saat hajatan, gotong royong membersihkan lingkungan dan saling menghargai menjaga rasa toleransi antarumat beragama. Kedua, melalui pendidikan moral *Tujuh Poe Atikan* (Tujuh Hari Mendidik), yang memberikan pedoman bagaimana pendidikan dilaksanakan setiap hari dengan mengedepankan nilai-nilai budaya lokal. Ketiga, Kebun Persahabatan, sebuah tempat bertemu bagi kelompok masyarakat mana pun yang ingin menjalin persahabatan tanpa membedakan identitas agama maupun etnik.

Pranata Satgas Toleransi dipilih karena lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat. Lahirnya Satgas Toleransi banyak memberikan kepercayaan masyarakat dalam membangun toleransi di tengah iklim intoleransi. Dengan lahirnya Satgas Toleransi, mengubah wajah yang sunyi sepi sebagai kota santri, kini bermetamorfosis menjadi Kota Toleransi. Satgas Toleransi untuk mengatasi dari berbagai dinamika pro dan kontra yang timbul di masyarakat. Meski yang kontra melakukan perusakan, karena dianggapnya dengan patung-patung itu berlawanan dengan ajaran Islam, sebagian bisa menerimanya.

Purwakarta dapat dijadikan salah satu model Pemerintah daerah dalam implementasi moderasi beragama. Karena itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, maupun Pemerintah Pusat dapat menyosialisasikan nilai-nilai moderasi beragama di Purwakarta dan pelembagaannya untuk dijadikan contoh bagi pemerintah daerah lainnya.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta hendaknya bersinergi dengan Pemerintah Daerah Jawa Barat serta ormas keagamaan setempat hendaknya aktif menjaga nilai-nilai moderasi beragama agar tetap menjadi bagian dari cara pandang kehidupan sehari-hari masyarakat. Di lingkungan internal Kankemenag, moderasi beragama hendaknya menjiwai seluruh kegiatan termasuk kegiatan di kantor urusan agama. KUA sebagai UPT Kementerian Agama dapat menonjolkan moderasi beragama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kasus-kasus unik dan berharga di Purwakarta sebagai contoh pelembagaan moderasi beragama seperti satgas toleransi, kebun persahabatan, atau *tujuh poe atikan* hendaknya dibuatkan deskripsinya dan menjadi lampiran dari Buku *Peta Jalan Moderasi Beragama*. Dengan demikian, akan menjadi penguat agar sosialisasi moderasi beragama lebih efektif.

## Daftar Pustaka


Agama, TPK (2019). *Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Mudzakkir, A, dkk, (2018). *Menghalau Ekstremisme: Konsep & Strategi Mengatasi Ekstremisme Kekerasan di Indonesia.* Wahid Foundation.

Natardi (2019). Moderasi Layanan Nikah di KUA Kecamatan Kumun Debai. *Jurnal Bimas Islam*, *12*(1), 349–380.

Pribadi, Y (2016). Budaya Lokal versus Islam: Perseteruan antara Bupati Purwakarta dan FPI dalam Kerangka Demokratisasi dan Desentralisasi. *Harmoni*, *15*(3), 75–86.

Putro, M, & Kustini (2018). Membuka keran kemajuan dan jaringan gerakan dakwah lintas negara:(RI-PNG). *Harmoni Jurnal Multikultural & Multireligius*, *17*, 109–122.

Rozikin, M (2012). Analisis Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Batu. *JRP (Jurnal Review Politik)*, *2* (2), 219-243.

Syahyuti (2006). *30 Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian*. PT Bina Rena Pariwara.

Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama. (2020). *Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024*. Kementerian Agama RI.

Ward, H. (2012). *Key concepts : sustainable development and governance*. 37–51.

Watene, K, & Yap, M (2015). Culture and sustainable development: Indigenous con-

tributions. *Journal of Global Ethics*, *11*(1), 51–55.

Wulandari, H. (2017). Menumbuhkan Pendidikan Karakter melalui Atikan Purwakarta pada Pendidikan Anak Usia Dini. *Metodik Didaktik*. https://doi.org/10.17509/md.v13i1.7688.

# Moderasi di Kota Seribu Masjid

Azis Awaluddin

## Pendahuluan

Moderasi beragama sangat dibutuhkan, utamanya, oleh masyarakat yang heterogen. Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama yang nyaris tiada tandingannya di dunia. Bagi bangsa Indonesia, keragaman diyakini sebagai takdir. Keragaman dalam banyak aspek kehidupan tidak diminta, melainkan pemberian Allah Swt. Perbedaan-perbedaan tersebut bukan untuk ditawar tapi untuk diterima (*taken for granted*). Allah Swt. berfirman dalam QS Al-Hujurat ayat 13.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa perbedaan adalah sunatullah. Allah taala menciptakan manusia berupa laki-laki dan perempuan, menjadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, tidak lain adalah untuk saling mengenal. Syekh Musthafa al-Maraghi (1881 – 1945) dalam Tafsir *Al-Maraghi* menjelaskan bahwa hikmah dari keragaman penciptaan di atas adalah supaya manusia dapat saling mengenal. Kemudian bekerja sama untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Keragaman Indonesia harus dikelola dengan baik. Dijadikan sebagai modal sosial untuk saling menopang dan menguatkan.

Pengetahuan atas keragaman dan keberagamaan tersebut memungkinkan seorang pemeluk agama bisa mengambil jalan tengah (moderat) jika satu pilihan kebenaran tafsir yang tersedia tidak memungkinkan dijalankan. Sikap ekstrem biasanya akan muncul jika seorang pemeluk agama tidak me-

ngetahui adanya alternatif kebenaran tafsir lain yang bisa ditempuh. Dalam konteks inilah moderasi beragama menjadi sangat penting untuk dijadikan sebagai sebuah cara pandang (perspektif) dalam beragama.

Dalam tradisi Islam, perbedaan bukan perkara baru. Munculnya empat mazhab fikih menjadi bukti sahih betapa dunia Islam sangat menghargai perbedaan pemikiran. Mazhab al-Hanafiyah didirikan oleh Imam Abu Hanifah (80-150 H) di Baghdad. Mazhab al-Malikiyah didirikan oleh Imam Malik bin Anas (93-179 H) di Madinah. Mazhab al-Syafi'iyah didirikan oleh Imam al-Syafi'i (150-204 H) di Baghdad dan Mesir. Mazhab al-Hanabilah didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal (164-241 H) di Baghdad. Meski berbeda, empat imam mazhab tersebut tidak pernah saling menyalahkan apalagi saling mengkafirkan. Justru perbedaan membuat mereka saling melengkapi.

Di satu sisi kita dihadapkan pada pemahaman agama yang keras atau ekstrem. Ekstremisme adalah ibarat sebuah gerak sentrifugal dari sumbu menuju salah satu sisi paling ekstrem. Memahami lanskap ekstremisme, atau keberagamaan garis keras, baik secara konseptual maupun empiris, menjadi penting untuk dapat lebih memahami signifikansi penguatan visi moderasi beragama. Dalam konteks beragama, pandangan, sikap, dan perilaku ekstrem akan mendorong pemeluknya untuk menolak pandangan kebenaran orang lain, dan bersikukuh dengan tafsir kebenarannya sendiri. Dari sinilah muncul term "garis keras", atau ekstremisme, yang dikaitkan dengan praktik beragama.

Salah satu ciri awal ekstremisme seseorang dalam beragama adalah bahwa ia memiliki pandangan, sikap, dan perilaku fanatik terhadap satu tafsir keagamaan saja, seraya menolak pandangan lain yang berbeda, meski ia mengetahui adanya pandangan tersebut. Lebih dari sekadar menolak, seorang penganut garis keras lebih jauh bahkan akan mengecam dan berusaha melenyapkan kehadiran pandangan orang lain yang berbeda tersebut. Baginya, cara pandang hitam putih dalam beragama itu lebih memberikan keyakinan ketimbang menerima keragaman tafsir yang dianggap menimbulkan kegamangan. Itu mengapa, meski jumlahnya minoritas, seorang ekstremis atau penganut garis keras umumnya lebih 'nyaring' dan lebih mampu menarik perhatian publik, ketimbang seorang moderat, yang cenderung diam dan reflektif. Kemenangan kaum ekstremis bukan karena jumlahnya yang besar, melainkan karena kaum moderat mayoritas yang diam (*silent majority*).

Secara konseptual, pandangan dan praktik keagamaan seorang yang ekstrem sering muncul dari cara pandang teosentris secara ekstrem dalam beragama, dan mengabaikan dimensi antroposentrismenya. Pandangan teosentris mendoktrin penganutnya untuk memaknai ibadah sebagai upaya "membahagiakan" Tuhan, melalui sejumlah ritual ibadah, dalam pengertiannya yang sempit. Imajinasi "demi membela Tuhan" yang tertanam dalam cara berpikirnya, membuat kelompok garis keras memaknai ibadah dan agama hanya dalam perspektif "memuaskan hasrat ketuhanan" sembari mengabaikan nilai dan fungsi agama bagi kemanusiaan (Hilmy, Kompas 4/7/2019). Jika cara pandang, cara berpikir atau paradigma ekstrem dalam beragama menjelma menjadi sebuah ideologi yang bersifat sosial politik, maka disebutlah sebagai radikalisme. Fenomena ekstremisme beragama akan mengganggu harmonisasi umat beragama. Kerukunan umat beragama yang merupakan cita-cita hampir semua penganut agama akan terkoyak jika dalam masyarakat masih bersemayam cara pandang yang ekstrem.

Di ujung ekstrem lainnya, muncul pandangan keagamaan yang liberal. Cara pandang ini mencirikan adanya penolakan terhadap hal-hal yang bersifat ilahiah atau ketuhanan. Corak khas pandangan ini adalah mendewakan akal dan mengabaikan ritual hingga hukum-hukum Tuhan. Kekhasan ini sangat berbahaya jika telah merasuki sistem politik dan sistem ekonomi Indonesia. Karena akan berakibat sistem politik dan ekonomi di Indonesia tidak menciptakan keadilan sosial. Menghadapi situasi sosial keagamaan seperti ini maka dibutuhkan keberagamaan yang moderat harus dipromosikan. Namun hal ini bukan perkara yang mudah. Tantangan yang dihadapi tidaklah kecil. Namun, harus diwaspadai bahwa kalau umat beragama gagal mewujudkannya, konflik horizontal antarwarga negara akan mudah tersulut, persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa pun terancam tercabik-cabik. Untuk itulah perlu ada satu formula dan kesepakatan bersama sebagai perekat antara semangat beragama dan komitmen berbangsa. Itulah moderasi beragama, yang bertujuan untuk menyelaraskan relasi beragama dan bernegara.

Sebagai bagian dari warga negara, setiap umat beragama memiliki kewajiban dan komitmen untuk menjaga keindonesiaan, dengan senantiasa memperkuat rasa persatuan dan kesatuan, serta memupuk rasa sebangsa dan setanah air, apa pun agama, suku, dan etnisnya. Misi ini mendapat

tantangan dengan berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu dibutuhkan cara pandang, sikap dan praktik keberagamaan yang moderat.

Tidak jauh dari ibukota negara Jakarta, berjarak kurang lebih 20 kilometer, terdapat Kampung Sawah (sebuah wilayah di Kota Bekasi) memiliki model toleransi yang sangat unik, karena kerukunan telah menjelma menjadi adat istiadat. Masyarakat Kampung Sawah, yang didominasi oleh etnis Betawi, dan biasanya etnis Betawi identik dengan keislamannya, terlatih hidup dalam perbedaan agama satu sama lain. Pelajaran menjaga hidup bersama dapat dipetik dari warga Islam, Kristen Protestan, dan Kristen Katolik di pinggir Jakarta ini. Bagi orang-orang Betawi di sini, toleransi bukan saja slogan tapi sudah menjadi adat. Tiap warga baru yang datang bisa dengan mudah merasakan kerukunan di sini, cukup dengan menerima warna-warni perbedaan sebagai kekayaan bersama.

Di Kampung Sawah, tiga tempat ibadah terletak berdekatan satu sama lain, semuanya berada di Jalan Raya Kampung Sawah, Kelurahan Jatimurni hingga Kelurahan Jatimelati, Bekasi, Jawa Barat. Tiga tempat ibadah itu adalah Masjid Agung Al Jauhar Yayasan Pendidikan Fisabilillah (Yasfi), Gereja Kristen Pasundan (GKP) Jemaat Kampung Sawah, dan Gereja Katolik Santo Servatius. Bila ada potensi konflik antarumat beragama yang terdeteksi, maka potensi itu segera dibicarakan oleh pihak pengurus rumah ibadah yang ada di kampung ini. Konflik pun bisa langsung diredam sejak dini. Saat Natal tiba, warga Muslim akan membantu mengamankan lingkungan. Bila salat Idulfitri atau Idul Adha, warga Kristiani juga turut mengamankan. Bila ada acara di gereja namun jemaat kurang lahan parkir, maka jemaat dipersilakan parkir di halaman masjid. Untuk menjaga ketenteraman bersama, takmir masjid maupun pengurus gereja akan melarang ceramah-ceramah agama yang menyulut suasana permusuhan antarumat beragama.

Beberapa model di atas merupakan sebuah contoh, tentu model yang hampir sama banyak ditemukan di berbagai belahan Indonesia. Seluruh model moderasi beragama yang berbasis kearifan lokal tersebut merupakan sebuah ikhtiar masyarakat agar harmoni tetap terjadi. Upaya-upaya ini menarik untuk dikaji. Kajian difokuskan pada konsepsi moderasi beragama di masyarakat, pentingnya moderasi beragama dan implementasi di lapangan.

Berdasarkan narasi di atas, studi tentang pemahaman masyarakat tentang moderasi beragama penting dilakukan. Studi ini mengidentifikasi model-model moderasi beragama yang sudah ada dan tumbuh berkembang di masyarakat. Pertanyaan penting yang ingin dijawab dalam studi ini adalah bagaimana pemahaman masyarakat tentang moderasi beragama? Mengapa moderasi beragama dipandang penting untuk dikembangkan? Bagaimana implementasi moderasi beragama di masyarakat? Apa pranata yang dipilih untuk melembagakan moderasi beragama? Mengapa pranata tersebut dipilih? Hasil dari studi ini diharapkan dapat menjadi bahan dalam merumuskan kebijakan moderasi beragama yang berbasis pada kebutuhan masyarakat. Manfaat secara praksis terletak pada upaya penelitian ini untuk menyusun sebuah model dan formula yang berguna untuk mengidentifikasi berbagai bentuk kebijakan moderasi beragama. Harapannya, model yang ditawarkan dapat mengurangi berkembangnya keberagamaan yang ekstrem dan liberal.

Moderasi mengutamakan keadilan dan keseimbangan di mana seorang muslim menjadikan wahyu sebagai pegangan hidup dan juga memanfaatkan akal budi yang telah dikaruniakan oleh Allah SWT. dalam menjalankan ajaran agama. Dalam buku Moderasi Beragama (2019) yang diterbitkan Kementerian Agama RI, dijelaskan bahwa kata *moderasi* berasal dari bahasa Latin, *moderâtio*, yang berarti kesedangan atau tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Sedangkan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) mendefinisikan moderasi sebagai pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstreman. Dalam bahasa Arab, kata *moderasi* dikenal dengan kata *wasaṭ* atau wasatiah, yang memiliki padanan makna dengan kata tawasuṭ (tengah-tengah), iktidal (adil), dan tawazun (berimbang). Moderasi beragama berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan, atau menghindari keekstreman, baik kiri (liberal) atau kanan (ultrakonservatif) dalam praktik beragama masyarakat multikultur Indonesia.

Dalam *Moderasi Beragama* (2019), ada tiga alasan utama mengapa moderasi beragama diperlukan: 1) moderasi beragama penting untuk mengembalikan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya dan berfungsi menjaga harkat dan martabat manusia; 2) moderasi beragama penting untuk meredam konflik yang disebabkan fanatisme dan yang menyebabkan musnahnya peradaban manusia; dan 3) moderasi beragama penting sebagai

strategi kebudayaan dalam merawat keindonesiaan dengan memadukan nilai-nilai agama dan kearifan lokal.

Profesor Mohammad Hashim Kamali dalam bukunya yang sangat fenomenal berjudul *The Middle Path of Moderation in Islam: The Quranic Principle of Al-Wasatiyya* (2015) menjelaskan dengan sangat komprehensif akan paham atau konsep moderasi (*al-wasaṭhiyah*) dalam tradisi Islam. Dalam masyarakat yang beragama ide moderasi menjadi sangat penting karena *ikhtilāf* atau perbedaan pandangan dalam agama merupakan salah satu keniscayaan. Profesor Kamali menjadikan QS Al-Baqarah ayat 143 dalam Al-Qur'an sebagai rujukan utama dalam memahami konsepsi moderasi dalam Islam. Ayat yang berbunyi "*Dan yang demikian itu kami jadikan kalian (umat Islam) sebagai umat pertengahan*" ini mengajarkan manusia untuk berlaku adil, bukan saja, dalam menjalankan ritual agama, tapi juga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Syaikh Ahmad Mustafa al-Maraghi (1883-1952) dalam *Tafsīr Al-Marāgi* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan umat pertengahan dalam ayat di atas adalah umat yang memiliki sikap tengah-tengah di antara dua kutub ekstrem. Berlebihan dalam beragama, ketat dan kaku, ataupun sebaliknya, berlebihan menggampangkan ajaran agama. Profesor Quraish Shihab menambahkan keterangan bahwa untuk dapat bersikap tengah-tengah, seseorang membutuhkan pemahaman yang tepat terhadap agamanya. Dengan bekal ini, seseorang akan dapat mencapai keadilan dan kebaikan. Tidak terseret oleh salah satu ujung sikap ekstrem. Bersikap adil dan menebar kebaikan adalah salah satu ajaran dasar dalam Islam. Keadilan dan kebaikan ini tidak hanya bagi sesama muslim, namun juga kepada non-muslim. Dalam *Tafsīr al-Bagāwi*, dikisahkan bahwa di era Nabi Muhammad, ada sebagian kelompok yang belum masuk Islam, satu di antaranya adalah Bani Khuza'ah. Suku ini menjalin perjanjian damai dengan Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Moderasi beragama bukanlah hal yang baru di Indonesia. Praktiknya telah lama diamalkan oleh masyarakat Nusantara yang multikultural.

Sebagai sebuah konsep yang seringnya bersifat abstrak, moderasi beragama memiliki ukuran atau indikator dalam melihat tingkat pengamalan ajaran agama yang berlandaskan moderasi. Untuk konteks Indonesia, moderasi beragama dapat dicirikan ke dalam beberapa indikator terukur. Indikator moderasi beragama mencakup empat hal, yaitu: (1) komitmen ke-

bangsaan, (2) toleransi, (3) antikekerasan, dan (4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Keempat indikator ini dapat digunakan untuk mengenali seberapa kuat atau rentan tingkat moderasi beragama yang dipahami dan dipraktikkan oleh seseorang.

Komitmen kebangsaan merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang berdampak pada penerimaan terhadap konsensus dasar kebangsaan. Penerimaan ini mencakup kesepakatan akan Pancasila sebagai ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai perekat bangsa yang majemuk. Komitmen kebangsaan ini penting untuk dijadikan sebagai indikator moderasi beragama karena, dalam perspektif moderasi beragama, mengamalkan ajaran agama adalah sama dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Begitu juga sebaliknya, menunaikan kewajiban sebagai warga negara adalah wujud pengamalan ajaran agama. Toleransi adalah sikap untuk memberi ruang untuk tidak mengganggu hak orang lain dalam berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang diyakini. Dengan demikian, toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Toleransi selalu disertai dengan sikap hormat, menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri kita, dan berpikir positif.

Antikekerasan artinya menolak radikalisme atau ekstremisme yang mengajak pada perusakan, baik diri (*nafs*) ataupun tatanan sosial. Radikalisme atau kekerasan dalam konteks moderasi beragama ini dipahami sebagai suatu ideologi tertutup yang bertujuan untuk perubahan pada sistem sosial dan politik. Ini merupakan upaya untuk memaksakan kehendak yang sering kali menabrak norma atau kesepakatan yang ada di suatu masyarakat. Cara seperti ini juga tak lepas dari aksi-aksi kekerasan atau ekstrem melawan hukum dan mengatasnamakan agama. Tentunya, cara-cara ekstrem ini bertentangan dengan ajaran agama apa pun.

Akomodatif terhadap kebudayaan lokal berarti penerimaan terhadap unsur kultural yang tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Praktik dan sikap beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana kesediaan seseorang menerima prak-

tik amaliah keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi. Prinsip dasarnya adalah bahwa tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran dasar agama.

## Kota Lombok: Geografi, Demografi, Tradisi, dan Kondisi Sosial Keagamaan

Mataram adalah sebuah kota dan ibu kota provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Kota ini dikelilingi di semua sisi daratan oleh (tetapi secara administratif tidak termasuk dalam) Kabupaten Lombok Barat dan terletak di sisi barat pulau Lombok, Indonesia. Ini juga merupakan kota terbesar di provinsi ini. Kota ini merupakan pusat ekonomi, budaya, dan pendidikan provinsi. Ini menampung semua universitas negeri di provinsi tersebut, bandara utama serta satu-satunya bandara internasional di provinsi tersebut, dan juga kantor-kantor pemerintah utama. Wilayah Mataram Raya atau kadang juga disebut Wilayah Metropolitan Rinjani adalah wilayah yang mengelilingi kota menjadikannya salah satu yang terbesar di Kepulauan Sunda Kecil bersama dengan Denpasar di Bali.

Orang Sasak adalah penduduk asli Lombok dan merupakan mayoritas penduduk Mataram. Mataram juga merupakan rumah bagi orang-orang Bali, Jawa, Tionghoa, dan sejumlah kecil orang Arab Indonesia, terutama keturunan Yaman. Meskipun penduduk kota, orang Sasak Mataram masih mengidentifikasi kuat dengan asal-usul mereka dan budaya Sasak. Salah satu tokoh masyarakat muslim Kota Mataram, Tuan Guru H. Sya'ban, menegaskan bahwa jalinan sosial umat muslim Pulau Lombok dan umat Hindu sangat erat, selain karena aspek historis dan kultural yang telah dibangun berabad-abad lalu. Ini diperkuat oleh pernyataan dari salah satu petugas Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB, Nizhomi, yang mengatakan bahwa warga Puyung, Lombok Tengah NTB, sangat dihormati oleh orang-orang Hindu karena sejarah mereka yang dulu kala menyelamatkan pasukan Hindu yang diserang dalam perang. Sejarah ini rupanya yang kemudian menguatkan jalinan sosial di antara masyarakat Lombok, khususnya antara pemeluk agama Islam dan Hindu.

Islam adalah agama yang paling banyak dianut warga Mataram dengan persentase lebih dari 80%. Hindu memiliki populasi terbesar kedua. Agama lain yang dianut di Mataram adalah Kristen, Buddha, dan Konghucu. Masya-

rakat Mataram biasanya menggunakan bahasa Sasak yang merupakan bahasa asli penduduk asli Lombok. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang paling banyak digunakan dalam konteks bisnis, pendidikan, dan pemerintahan formal. Saat berada di rumah atau tempat rekreasi, warga Mataram cenderung menggunakan bahasa Sasak Mataram.

Kepala Badan Wakaf Indonesian (BWI) yang juga merupakan mantan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB, H. Usman, mengatakan di Kota Lombok banyak rumah ibadah yang dibangun di tempat strategis kota seperti pura, gereja, dan, belakangan saja, Islamic Center. Pernyataannya diaminkan Sekretaris Lurah Babakan (salah satu kecamatan di Mataram) yang juga menegaskan bahwa di Lombok terdapat tiga agama berbeda (Islam, Hindu, Kristen) yang hidup saling rukun dan berdampingan. Untuk menelusuri ini, dilakukan observasi dengan mengunjungi Masjid Nurul Falah yang letaknya bersebelahan dengan pura. Ja'far Usman, salah seorang pengurus masjid, mengungkapkan bahwa masjid tersebut dibangun sudah lebih dari 100 tahun lalu. Dia mengatakan, "Tidak pernah ada gesekan atau konflik selama ini. Intinya, saling menghormati dan menghargai. Malah kalo ada apa-apa, orang Hindu yang jagain kita." Ini menjadi salah satu praktik baik yang patut ditiru.

## Komitmen, Kebangsaan, Toleransi, Antikekerasan, dan Kearifan Lokal

Dalam rangka mengeksplorasi pandangan narasumber tentang konsep dan praktik moderasi beragama, peneliti mencoba melakukan wawancara dengan berbagai pemeluk agama-agama yang ada di Lombok. Akhirnya, peneliti dapat mengumpulkan perwakilan dari agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Masing-masing dari mereka memiliki peran di masyarakat; ada yang berperan sebagai ustazah, ada juga penyuluh agama, dan ada juga yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil. Semua memiliki aktivitas khusus terkait sosial dan keagamaan di lingkungannya masing-masing. Pertanyaan utama yang diajukan "menurut Bapak/Ibu apa itu moderasi beragama?"

Salah seorang penyuluh agama Islam mengatakan, moderasi agama adalah sikap tidak berlebih-lebihan. Ia menegaskan bahwa seorang muslim yang moderat adalah orang yang dapat menjalankan ajaran agamanya dengan sungguh-sungguh, tapi tidak sampai mengganggu hak-hak orang lain.

Tapi, ada hal menarik yang dikemukakannya, "Kadang, paham moderasi ini sudah baik dari atas. Tapi, di bawah, masih ada beberapa orang-orang yang bersikap ekstrem, berlebih-lebihan." Ia mencoba mengatakan bahwa moderasi beragama ini masih menjadi isu elite yang terkadang praktiknya di lapangan masih jauh dari ideal, masih ada orang-orang yang memaksakan kehendaknya.

Kemudian, pertanyaan yang sama juga ditujukan untuk perwakilan dari Kristen. Studi ini menemui Tiur Sihombing, seorang penyuluh agama Kristen di Kota Mataram. Ibu Tiur menekankan pada batasan yang ada ketika seorang penganut agama melaksanakan kewajiban peribadatannya. Dia mengatakan:

> Moderasi beragama bagi saya adalah ketika saya dapat menjalankan ibadah dalam agama saya dan tidak mengganggu kebebasan penganut agama lain.

Ia menunjukkan pada relasi hak dan kewajiban yang sering kali dilanggar atas nama agama dan Tuhan. Ini menjadi perhatiannya yang sangat besar ketika menjelaskan moderasi beragama yang dipahaminya.

Michael yang juga beragama Kristen menambahkan bahwa, "Moderasi beragama artinya tidak membatasi kita dalam mengamalkan agama kita. Silakan kita belajar agama seekstrem apa pun, tapi ada batasan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Kalau ada sesuatu yang halal bagi saya, belum tentu halal bagi pemeluk agama lain." Secara tegas dia mengungkapkan mempelajari agama harus secara sungguh-sungguh, ekstrem, jangan setengah-setengah. Tapi ketika berbicara masalah hubungan antar manusia, ia membuat batasan bahwa harus ada upaya saling menghormati—Michael memberikan contoh tentang makanan halal.

Dari pihak Hindu, I Made bersedia untuk diwawancara. Dia merupakan salah satu tokoh muda di masyarakat Hindu. I Made mengatakan:

> Moderasi beragama itu bagi saya ketika kita menjalankan agama kita masing-masing dengan bangga. Jangan hanya kata-kata tapi juga praktiknya.

Ia lebih mengutamakan tingkah laku yang perlu ditonjolkan seorang penganut agama, bukan hanya pidato-pidato yang kadang-kadang tidak dipraktikkan dengan baik ketika bersosialisasi dengan sesama warga negara.

Terakhir, penelitian ini juga melibatkan perwakilan dari pemeluk agama Buddha. Peneliti berhasil menemui Dedi. Ia pegawai negeri sipil yang bekerja untuk Pemerintah Kota Mataram. Ketika ditanya tentang makna moderasi beragama, dia menjelaskan pemahamannya.

> Kita tidak boleh ekstrem kiri atau ekstrem kanan. Kita harus di tengah-tengah. Terutama dalam hubungan sosial di masyarakat ada batasan; jangan sampai menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Mengetahui berbagai perspektif dari berbagai agama ini sangat menarik. Dari satu pertanyaan "menurut Bapak/Ibu apa itu moderasi beragama?" studi ini mendapatkan variasi pertanyaan yang menjadi temuan menarik dalam studi kali ini.

Selanjutnya, studi ini menggali lebih jauh tentang aspek-aspek atau indikator moderasi beragama. Temuan dari tiap indikator ini disarikan dari berbagai wawancara yang dilakukan dengan beragam tokoh dan penganut agama di Lombok. Secara eksplisit penelitian ini mencoba meraba pemahaman moderasi beragama yang kaitannya dengan komitmen kebangsaan. Ketua BWI, H. Usman, menegaskan bahwa, "Kita ini negara majemuk dan moderat. Buktinya, piagam Jakarta direvisi kita menerima; ini menunjukkan sebagai jalan tengah. Umat Islam memahami kalau tidak ada Pancasila, mungkin negara kita akan terpisah." Ketua BWI ini menegaskan komitmen umat Islam dalam menerima konsensus negara dengan berkompromi dalam pembuatan Pancasila pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia. Dia menganggapnya ini sebagai bentuk moderasi.

Selanjutnya, Sekretaris Lurah Babakan, Kota Mataram menyampaikan bahwa:

> Pancasila juga dicetuskan oleh ulama. Itu harga mati (buat saya). Sejak sekolah dulu saya suka menghafal Pancasila. Tapi, kok sekarang kayaknya tidak ada ya?

Ia mempertanyakan model pendidikan Pancasila yang berbeda pada masa ini. tapi, di lain sisi, dia juga mempertanyakan terkait isu penghapusan pendidikan agama. Sepertinya, dia mendengar rumor itu dari sumber-sumber yang tidak kredibel, tidak dapat dipercaya. Peneliti juga menemui salah satu penyuluh agama Kristen, Tiur Sihombing, di Kota Mataram. Ia mengatakan:

> Ada ketakutan ketika berbicara moderasi beragama. Kok saya seperti dibatasi dalam menjalankan ajaran agama saya. Moderasi beragama sudah bagian dari pembangunan nasional dan harusnya ini bisa dimanfaatkan lebih jauh lagi.

Tiur menegaskan, karena moderasi beragama ini bagian dari negara, sudah seharusnya negara menjamin keamanan dan kenyamanan semua pemeluk agama dalam menjalankan ajaran agamanya tanpa rasa takut. Terakhir, peneliti juga menemui sekelompok pemuda hijrah. Anak-anak muda ini ditanya tentang hubungan agama dan negara. Mereka pun menjawab, "(dalam menyikapi perbedaan) selama warga negara ya biasa saja. Agama *kan* pilihan masing-masing. Negara ini *kan* kesepakatan bersama." Mereka sudah mengerti bahwa kebebasan sipil dan individu merupakan hak dan kewajiban yang harus dijalankan seorang warga negara yang baik.

Terkait toleransi, studi ini juga menjaring banyak opini dari narasumber. H. Usman memberikan praktik yang menarik di lingkungannya. Pernah satu ketiak dia mengadakan acara tahlilan dan bahkan acara tersebut diikuti oleh orang non-muslim. Ia menjelaskan, "Acara tahlilan di sini diikuti (umat) agama lain. Dia diam saja waktu tahlilan, hanya ingin menghormati yang berduka." Ini bentuk toleransi dari pemeluk agama non-muslim. Di sisi lain, H. Usman juga membandingkan sikap toleransi umat muslim. Ia mengatakan bahwa umat Islam juga sangat toleran, terutama ketika ada ritual keagamaan agama lain. "Kalau ada arak-arakan Ogoh-ogoh Umat Hindu itu *kan* menutup jalan, tapi muslim menghormati. Malah yang *nonton* kebanyakan orang Islam."

Para pemuda hijrah juga mengemukakan pandangan yang toleran. "Perbedaan pandangan itu biasa. Kalo semuanya sama malah bosan. Kalau imamnya kunut, saya kunut. Kalau *nggak* kunut ya *nggak* ada." Ini menunjukkan

keluwesan dalam hal-hal yang sifatnya khilafiah. Mereka tidak mempermasalahkan perbedaan; mereka menganggap itu merupakan hal yang positif. Yang sangat menarik juga, ada satu narasumber yang merupakan pengurus Masjid Nurul Falah yang terletak bersebelahan dengan pura, namanya Jafar Usman. Dia menjelaskan ketika ada acara nyepi kegiatan di masjid persingkat. "Misalnya, tidak ada pengajian dan selawat. Kita biasanya langsung azan." Karena aktivitas di kedua tempat ibadah itu sama-sama berdekatan. Jafar mengatakan sikap toleransi ini sudah turun-temurun. Mereka tidak mau menyakiti saudara sebangsanya. "(Kita harus) saling menghargai," ujarnya. Tapi, dari banyak respons positif, ada juga hal negatif yang masih ditemukan di masyarakat. Sebagai contoh, Ibu Tiur menceritakan, "(Moderasi beragama ini) jika dilihat dari atas (kaum elite) seperti tidak ada apa-apa, tapi kalau kita lihat di akar rumput masih ada ketidakharmonisan." Dari perwakilan Hindu, I Made, menambahkan, "Masih ada istilah minoritas dan mayoritas. Ada oknum yang mencari keuntungan. Ini yang merugikan banyak hal."

Sekretaris Lurah Babakan menambahkan bahwa kadang ada stigma dan intoleransi terhadap kelompok tertentu. "Orang berjenggot dianggap teroris. Untuk apa orang menampakkan dirinya teroris." Ini seperti stereotip yang dia alami karena dia sendiri berjenggot. Sambil mengutip sebuah ayat dalam Al-Qur'an, dia mengatakan, "Bagimu agamamu, bagiku agamaku." Ini untuk menunjukkan pandangan umat Islam dan agama-agama lain harus bertoleransi.

Kejadian kekerasan yang banyak dirujuk oleh narasumber adalah terkait pembakaran gereja di Kota Mataram pada 17 Januari 2001. Ini menjadi isu nasional karena kejadian ini merupakan respons dari tragedi kemanusiaan yang terjadi di Ambon. H. Usman mengatakan, Peristiwa 171 (17 Januari) adalah kerusuhan pembakaran gereja sebagai solidaritas atas kejadian di Ambon. Katanya, saat pembakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa atau luka-luka, tapi menyebabkan hancurnya sebuah gereja. Sekretaris Lurah Babakan juga mengonfirmasi peristiwa tersebut. Saat itu, Ia mahasiswa S1.

Tiur menambahkan. Ia mengalami aksi ekstrem yang dilakukan sekelompok orang tidak bertanggung jawab. Peristiwa itu meninggalkan trauma bagi anak-anak binaannya.

> Ketika saya melakukan aktivitas pembinaan iman bersama anak-anak kecil di bekas gereja yang dibakar itu, saya dibubarkan secara paksa oleh sebuah kelompok. Ini hanya kelompok pembinaan iman *lho* yang mana itu tugas saya sebagai penyuluh agama....Saya kecewa dengan aparat dan pemerintah karena kita tidak bisa bebas beribadah.

Gurat wajah Tiur menunjukkan rasa kekecewaan yang mendalam. Sekretaris Lurah Babakan juga mengungkapkan bahwa baru-baru ini ada kejadian pembubaran aktivitas keagamaan Kristen di wilayahnya. Ia mengatakan:

> Ini hanya izin domisili lembaga tapi malah jadi tempat ibadah. Mereka nyanyi dan ada misi misionaris. (Sehingga) masyarakat menolak. Akhirnya, FKUB mengambil peran untuk mendamaikan; menghindari provokasi.

Tiur menyayangkan terjadinya peristiwa tersebut. Kasus ini tidak terkait degan tempat ibadah, namun kegiatan perkumpulan yang dibubarkan warga yang salam paham. Tidak ada solusi hingga harus dibubarkan.

H. Usman menyatakan, agama sudah bercampur dengan budaya. "Dulu kalau dibilang tak beradab marah, tapi kalau dibilang tidak beragama ya biasa saja." Dia berguyon merujuk pada masa lalu di mana memiliki adab dan sopan santun kelokalan itu sangat penting. "Sekarang kita *talqin* atau tidak itu masalah. Baca Al-Qur'an di kuburan sekarang sudah tidak diperkarakan." H. Usman menegaskan bahwa masyarakat sekarang lebih menerima unsur-unsur khilafiah yang dulu pernah dipertentangkan. Selanjutnya, sebagai perwakilan dari agama Hindu, I Made menjelaskan, "Hindu di Indonesia beda dengan Hindu di India. Kita harus bangga dengan kultur budaya kita." Dia menceritakan bahwa agama Hindu Indonesia itu sangat unik, bahkan berbeda dengan agama Hindu di negara asalnya, yaitu India. Ini menunjukkan telah adanya akulturasi agama yang prosesnya berjalan damai.

Para tokoh agama memainkan peran sangat penting di masyarakat, terutama terkait sosialisasi protokol kesehatan di masa Pandemi Virus Korona 19. Sosialisasi itu merupakan kebijakan nasional. H. Usman menyampaikan bahwa dirinya aktif mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. "Peran dalam menjaga kesehat-

an di masa pandemi, ketika khotbah disampaikan di masjid. Saya juga menghimbau bahwa kita jangan sampai salah mengerti arti tawakal. (Tawakkal itu setelah kita ikhtiar). Makanya saya anjurkan jemaah pakai masker," ujarnya dalam wawancara bersama peneliti.

Juga, Tuan Guru H. Sya'ban mengatakan dirinya aktif menyampaikan khotbah di Islamic Center tak bosan-bosan mengajak masyarakat untuk memakai masker. Di Islamic Center juga protokol kesehatannya sangat ketat; menjaga jarak, menggunakan sajadah sekali pakai, dan harus mencuci tangan. Sekretaris Lurah Babakan menambahkan bahwa "Saya kalau keluar pakai masker tapi saya tidak memaksa orang untuk ikut karena takut tersinggung." Peran yang dijalankan bersifat mengajak, tidak melalui paksaan.

## Pelembagaan dan Filosofinya

Dalam studi ini, peneliti berhasil melakukan wawancara dan observasi terhadap beberapa lembaga, yaitu: Dewan Wakaf Indonesia, Pemuda Hijrah, dan Forum Kerukunan Umat Beragama. Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Mataram menjunjung tinggi keharmonisan masyarakat beragama di Lombok. Berusaha semaksimal mungkin dalam menjaga perdamaian dan keutuhan sosial warga. Asas negara seperti Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan dalam forum-forum diskusi atau kegiatan yang dilakukan FKUB. Badan Wakaf Indonesia berpegang pada Undang-undang Perwakafan dalam menjalankan kegiatannya. BWI mengurus banyak tanah terlantar dan tetap bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintahan lain. Selanjutnya, kelompok keagamaan anak muda, Pemuda Hijrah, juga sangat menarik. Mereka menjunjung tinggi kemajemukan sosial dan saling tolong-menolong. Mereka berpegang pada prinsip, "Jika kita melakukan sebuah kebijakan, itu untuk kebaikan bersama. Tapi, kalau ibadah hanya untuk diri sendiri." Rasa sosial mereka sangat tinggi dalam rangka membantu orang-orang yang membutuhkan.

Keanggotaan FKUB terdiri dari berbagai tokoh dan figur masyarakat yang terkemuka, seperti tuan guru, pendeta, biksu, dan lainnya. Anggotanya berasal dari berbagai agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sedangkan, BWI memiliki struktur baku, seperti ketua, sekretaris, bendahara dan sebagainya. Bentuk organisasi BWI cenderung lebih ramping. Selanjutnya, kelompok Pemuda Hijrah telah memiliki lebih dari 50

anggota dari berbagai daerah di Lombok. FKUB memiliki peran sentral dalam upaya menjaga kerukunan dan perdamaian di Kota Mataram. Kegiatan syiar agama dilakukan di tempat-tempat ibadah, masjid, gereja, pura, wihara, dan lain sebagainya.

Pertemuan rutin dengan tokoh-tokoh agama setempat rutin dilakukan. Sebagai contoh adalah kegiatan mediasi guna mencari solusi dan jalan tengah di kasus-kasus konflik, seperti yang terjadi di Babakan terkait pembubaran kegiatan keagamaan. Kegiatan utama BWI adalah kegiatan wakaf. Kegiatan wakaf ini sebelumnya dilakukan oleh Kanwil Kemenag di daerah. Sekarang, mereka yang melakukan kegiatan ini guna menjalankan Undang-undang Wakaf yang telah disahkan. Tujuannya adalah agar tanah atau barang yang diwakafkan masyarakat dapat dimanfaatkan secara maksimal, misalnya untuk keperluan ibadah, sosial, atau bahkan pendidikan.

Kelompok Pemuda Hijrah melakukan banyak sekali kegiatan keagamaan dan juga sosial. Mereka mengadakan pengajian untuk pemuda, membuat acara dengan mendatangkan ustaz atau penceramah, bahkan yang berasal dari luar Pulau Lombok, membuat kajian rutin di Islamic Center NTB, melakukan kunjungan ke anak yatim, membuat acara di sekolah pelosok, mengajar iqra, cara baca Al-Qur'an, dan bahkan melakukan *fundraising* untuk orang-orang yang membutuhkan. Sudah sangat jelas kegiatan-kegiatan yang dilakukan tiga lembaga di atas memiliki misi moderasi. Kegiatan FKUB dan Pemuda Hijrah memiliki unsur moderasi yang sangat tinggi di mana mereka ingin menyebarkan semangat toleransi, kerukunan, dan saling memahami antarumat beragama.

Hal menarik datang dari BWI. Praktik baik, yang dilakukan BWI, misalnya, meski mereka mengurusi wakaf untuk urusan Islam, tapi BWI juga membuka jalan bagi penganut agama lain untuk menjadi *wākif* atau pemberi wakaf. Jadi, *wākif* bisa siapa saja, tidak harus muslim. Juga, dalam ikrar wakaf (apa pun bentuk wakaf dan siapa pun pewakafnya) BWI mendorong agar bunyi ikrarnya dibuat umum. Ini sebagai jalan moderasi agar barang atau tanah wakafnya dapat dipergunakan untuk kemaslahatan masyarakat berdasarkan kebutuhan mereka. "Untuk kemaslahatan umat," ujar H. Usman, ketua BWI. Ini merupakan semangat moderasi di mana kesejahteraan dan kemaslahatan umat menjadi salah satu tujuannya.

## Hambatan dan Peluang Pengembangan Moderasi Beragama

Dengan disahkannya Undang-undang Wakaf, BWI memiliki legitimasi dalam menjalankan semua kegiatannya. Mereka juga mendapatkan dana APBND yang dikucurkan langsung oleh Pemerintah Provinsi NTB. Namun, pendanaan rupanya juga menjadi masalah utama mereka karena sejak masa Pandemi, anggaran BWI dibatasi dan dialokasikan untuk lembaga lain. Akibatnya, sumber daya manusia juga menjadi salah satu hambatan dalam menjalankan kegiatan wakaf. Kemudian, Pemuda Hijrah sebagai organisasi pemuda kemasyarakatan menghadapi permasalahan pendanaan. Mereka bergantung pada donasi di acara kajian dari peserta. Karena Pandemi, kegiatan mereka berkurang dan otomatis pendanaan pun berkurang. Namun, mereka tidak habis akal, mereka gencar melakukan donasi daring yang disebarkan ke berbagai platform media sosial. Faktor pendukung yang sangat Pemuda Hijrah rasakan adalah dukungan moral dan materi dari berbagai lembaga lain, seperti Islamic Center, Dewan Masjid Indonesia NTB, dan Majelis Ulama Indonesia BTB.

Dari berbagai data yang berhasil dikumpulkan, baik dari metode wawancara maupun observasi lapangan. Peneliti melihat aspek potensi dan tantangan moderasi beragama sangat penting untuk dibahas. Potensi merupakan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Sedangkan, tantangan adalah sesuatu yang relatif rumit/sulit, tapi jika dapat dilewati, maka sesuatu yang baik akan muncul.

## Potensi Kerukunan, Pendukung, dan Penghambat Moderasi Beragama

Temuan dari studi ini menunjukkan masyarakat Kota Mataram menjunjung tinggi sikap moderat dan toleransi. Ini merupakan modal sosial yang sangat berharga bagi keberlangsungan berbangsa dan bernegara. Pada bagian ini, peneliti mencoba menjabarkan poin utama dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan. Ada tiga hal yang menarik untuk dikaji, yaitu konsensus bernegara sebagai perekat, relasi agama dan budaya yang semakin harmonis, dan peran tokoh bagi kalangan umat beragama.

Pertama, semua responden wawancara sepakat bahwa dasar Negara Republik Indonesia adalah final. Pancasila, Undang-undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI adalah dasar negara yang tidak bisa diganggu-gugat

lagi. Mereka melihat diskusi tentang apakah dasar bernegara harus sesuai dengan agama tertentu sudah selesai karena negara harus hadir bagi semua dan menjamin kebinekaan. Ini menandakan bahwa konsensus bernegara telah berperan sebagai perekat bagi semuanya.

Kedua, isu tentang relasi agama dan budaya rupanya juga mendapatkan respons positif dari semua narasumber. Di kalangan muslim contohnya, meskipun mereka sadar bahwa dulu ada hal-hal yang dipertentangkan antara agama dan budaya, sekarang mereka menganggap hal itu bukan permasalahan lagi. Mereka sudah menerima hal-hal furuk atau cabang yang diadopsi dari adat istiadat tertentu ke dalam praktik keagamaan mereka, seperti ziarah kubur, tahlil, dan lain sebagainya.

Di kalangan umat Hindu yang diwawancara, hubungan agama dan budaya malah lebih kuat lagi. Malah responden dari agama Hindu mengakui bahwa agama Hindu Indonesia sangat jauh berbeda dengan agama Hindu di India. Mungkin bisa dikatakan bahwa umat Hindu di Indonesia menjadi pemeluk agama yang paling banyak (jika bisa dikuantifikasikan) dalam mengadopsi unsur budaya ke dalam ritual agama mereka.

Ketiga, peran tokoh juga menjadi kunci dalam menjaga ekosistem sosial keagamaan di Kota Mataram tetap harmonis, rukun, dan moderat. Masih banyak sekali pengikut agama yang *manut* terhadap tokoh agama. Contohnya, gelar "Tuan Guru" menjadi hal yang sangat disegani di masyarakat Nusa Tenggara Barat secara umum, bukan hanya di Kota Mataram. Ketokohan di kultur NTB memiliki potensi dalam upaya bina damai dan harus dimaksimalkan untuk mengurangi potensi konflik yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Ketiga potensi utama ini harus dikapitalisasi demi mencapai tujuan moderasi beragama. Komitmen terhadap kebangsaan, kompromi antara budaya dan agama, dan peran tokoh di kalangan masyarakat Kota Mataram harus menjadi bagian strategi sosialisasi narasi moderasi beragama.

Namun, dari semua potensi yang ditemukan dalam penelitian ini, beberapa tantangan besar moderasi beragama perlu menjadi perhatian yang cukup serius. Paling tidak ada tiga isu utama yang terkait langsung dengan moderasi beragama. Isu-isu tersebut adalah elitisme narasi moderasi beragama di masyarakat, jaminan menjalankan ibadah (terutama bagi minoritas), dan terakhir kemampuan berpikir kritis umat beragama. Berikut adalah pemba-

hasan detail tentang ketiga isu tantangan utama dalam mengamalkan moderasi beragama dalam konteks masyarakat Kota Mataram NTB. Yang pertama terkait isu elitisme narasi moderasi beragama. Diskusi tentang isu ini cukup mengemuka di banyak wawancara yang dilakukan bersama narasumber. Narasi moderasi beragama masih dianggap isu 'orang kalangan atas' saja dan dirasa belum menjadi 'obrolan warung kopi' masyarakat di akar rumput. Ini menandakan bahwa strategi moderasi beragama masih dijalankan sebatas *top-down*, dari atas ke bawah. Sehingga, kesadaran masyarakat dalam menjalankannya menjadi sangat terbatas karena rasa memiliki (*sense of belongin*) dan pengetahuannya masih sangat terbatas.

Hal ini dapat dipahami mengingat ide moderasi beragama dan ide-ide terdahulunya datang dari level pejabat pemerintahan yang paling tinggi atau figur terkemuka nasional yang berada di atas. Akibatnya, efektivitas ketercapaian program moderasi beragama masih sangat kurang. Di satu sisi, jika sebuah program atau ide datangnya dari atas, sumber daya yang tersedia akan mendukung implementasi program tersebut. Tapi, di sisi lain, jika program tersebut tidak hidup di masyarakat, maka orang-orang akar rumput pun akan sulit menjalankannya.

Kedua, masalah yang sepertinya tidak pernah usai adalah tentang kebebasan beribadah, khususnya bagi penganut agama minoritas. Kebebasan beribadah hak semua warga negara Indonesia. Namun, dari berbagai data yang dikumpulkan bahwa kasus-kasus pembubaran paksa kegiatan keagamaan masih saja terjadi di negeri ini, khususnya di Kota Mataram. Ini biasanya terjadi pada masyarakat beragama minoritas di lingkungan tertentu di mana mereka sering dibenturkan dengan peraturan terkait pembangunan rumah ibadah. Apakah dalam melakukan ibadah yang sifatnya personal kita perlu izin?

Hal ini diperparah dengan respons aparat atau pengawal keamanan yang justru tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Mereka cenderung memihak pada kelompok mayoritas yang lebih banyak karena, mungkin, takut atau tidak berani menjalankan tugasnya sebagai pelindung masyarakat. Masalah ini terjadi sangat terstruktur dan seperti sulit dituntaskan karena diperlukan *political will* yang sangat kuat dari pemangku kebijakan dalam membenahi kebijakan dan sistem yang ada. Sering kali, hal-hal seperti ini tidak popular di mata masyarakat sehingga isu ini sering dihindari pemang-

ku kebijakan.

Terakhir, sering kali potensi konflik atau gesekan di masyarakat dipicu oleh adanya berita atau asumsi yang dipertanyakan kebenaran dan keabsahannya. Untuk itu, isu *critical thinking* atau kemampuan berpikir kritis menjadi hal yang sangat mendasar dalam rangka mencerdaskan masyarakat beragama di Indonesia. Kemampuan berpikir kritis adalah cara berpikir manusia untuk merespons seseorang dengan menganalisis fakta untuk membentuk penilaian. Subjeknya kompleks, dan ada beberapa definisi yang berbeda mengenai konsep ini, yang umumnya mencakup analisis rasional, skeptis, tidak bias, atau evaluasi bukti faktual. Pada dasarnya, bentuk berpikir kritis adalah pemikiran mandiri, pendisiplinan diri, pemantauan diri, dan koreksi diri. Berpikir kritis mengandaikan persetujuan terhadap standar keunggulan yang ketat dan penggunaan yang benar. Ini memerlukan komunikasi yang efektif dan kemampuan pemecahan masalah.

Dari wawancara yang dilakukan, ada beberapa contoh konkret yang bisa dijadikan pelajaran. Misalnya, pembakaran gereja di Kota Mataram adalah hasil dari masyarakat yang tidak bisa mencerna informasi dengan kritis. Aksi pembakaran tersebut dipicu oleh propaganda isu konflik yang terjadi di Ambon. Dengan ada media sosial seperti sekarang tentunya ancaman serupa bisa terjadi kapan saja dan di mana saja.

## Penutup

Penguatan Moderasi Beragama di Indonesia dewasa ini menjadi sangat penting dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Untuk itu konsep moderasi beragama harus dipahami dengan baik. Bagian pertama dalam buku ini telah dengan sangat gamblang menjelaskan pengertian moderasi beragama sebagai sebuah ide. Moderasi beragama sebagai cara pandang, sikap dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah mewajibkan seorang insan yang moderat selalu bertindak adil, berimbang, dan tidak ekstrem dalam praktik beragama sehari-hari. Norma umum yang dipegang mengacu pada keyakinan bahwa setiap individu pemeluk agama, apa pun suku, etnis, budaya, keyakinan, dan pilihan politiknya harus mau saling mendengarkan satu sama lain.

Sebagai Program Prioritas 3 dalam RPJMN dan salah satu misi utama Kementerian Agama dalam Renstra untuk periode 2020 – 2024, Penguatan

Moderasi Beragama memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional. RPJMN merupakan rujukan utama bagi setiap kementerian dan lembaga dalam perancangan Rencana Strategis (Renstra) untuk, kemudian, menciptakan pembangunan Indonesia yang berkesinambungan. Dengan dasar dan kesadaran ini semua, penguatan moderasi beragama dapat mendukung dan mempercepat capaian target-target pembangunan nasional yang dicanangkan oleh Pemerintah.

Rekomendasi dari studi ini, antara lain pembuatan kebijakan dalam menyusun program moderasi beragama, diperlukan "PMA Moderasi Beragama" yang berbasis bukti (*evidence based*) yang khusus dan berkualitas sehingga moderasi beragama dapat diimplementasikan secara konkret dan dapat berjalan secara tepat dan efektif. Juga, perlu ada harmonisasi kebijakan yang berkaitan dengan keberagamaan agar mendukung realisasi moderasi di masyarakat Indonesia. Terkait kelompok kerja (Pokja), PP3 Moderasi Beragama harus dikawal secara terus-menerus oleh petugas yang secara khusus menyupervisi, mengimplementasi, dan melaporkan setiap kegiatan terkait moderasi beragama.

Terkait sosial kemasyarakatan, perlu adanya pembukaan ruang-ruang perjumpaan lintas iman dan kepercayaan yang seluas-luasnya. Tujuannya adalah untuk membangun pemahaman antarumat beragama dan mencari titik temu—dari pada mempertajam perbedaan. Ini dapat dilakukan di berbagai kalangan (sekolah, karang taruna, ASN, dan target lainnya) dengan mengadakan, misalnya, perkemahan, dialog, diskusi, kunjungan rumah ibadah, dan lain sebagainya.

Terkait internalisasi narasi moderasi beragama sejak dini, dunia pendidikan bisa menjadi pintu masuknya. KI-KD kurikulum pendidikan agama dikuatkan dengan substansi kerukunan lintas agama dan kepercayaan dengan cara memperbanyak kegiatan perjumpaan lintas iman di sekolah-sekolah. Begitu juga dalam buku teks, sebagaimana amanat PMA 9/2019 tentang Buku Pendidikan Agama, Kemenag perlu menyesuaikan syarat isi semua buku pendidikan agama (pasal 8 ayat 3), memperkuat pengawasan (pasal 14 ayat 1), dan penilaian semua buku yang diproduksi (pasal 9 ayat 1-3). Tentang kurikulum dan buku teks, Kemenag membangun koordinasi dengan Kemendikbud.

Terkait keluarga, Kemenag berkoodinasi dengan BKKBN dan K/L terka-

it lainnya untuk memastikan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam mengembangkan hidup harmonis di lingkungan keluarga sesuai amanat UU 52/2009, pasal 1 ayat 11. Terkait relasi sosial, perlu ada kajian ulang terhadap beberapa poin dalam UU 1/65 PNPS dan SKB 9/2006 dan 8/2006. Pemerintah harus memastikan nilai-nilai demokrasi dalam kedua kebijakan tersebut sehingga tidak mencederai rasa kemanusiaan dan keadilan di masyarakat dan tidak membangun superioritas agama atau kelompok tertentu dalam kehidupan sosial di Indonesia yang beragam ini.

## Daftar Pustaka

Barriball, K, L, & While, A (1994). Collecting data using a semi-structured interview: A discussion paper. *Journal of advanced nursing*, *19*(2), 328-335. doi:10.1111/j.1365-2648.1994.tb01088.x

Bassey, M (1999). What is case study? In *Case study research in educational settings* (pp. 22-36). New York, USA: McGraw-Hill Education.

Bryman, A (2016). *Social research methods*. Oxford, UK: Oxford University Press.

Hammersley, M, & Atkinson, P (2007). Ethics. In *Ethnography: Principles in practice* (pp. 209-229). London: Routledge

Hancock, D R, & Algozzine, B (2006). *Doing case study research: A practical guide for beginning researchers*. New York, USA: Teachers College Press.

Hatch, J A (2002). Deciding to Do a Qualitative Study. In *Doing qualitative research in education settings* (pp. 1-35). New York, USA: Suny Press.

Kamali, M. H. (2015). *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic principle of wasatiyyah*. Oxford: Oxford University Press.

RPJMN: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024: Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan [National Medium-Term Development Plan 2020 – 2024: Indonesia with Prosperous, Fair and Sustainable Middle-High Income] (2019). Bappenas [National Planning Agency].

Yin, R K (1981). The case study crisis: Some answers. *Administrative science quarterly*, *26*(1), 58-65. doi:10.2307/2392599

# Ikhtiar Moderasi dari Makassar

Edi Junaedi

## Pendahuluan

Peluncuran buku *Moderasi Beragama* pada 18 Oktober 2019 oleh Kementerian Agama, tepatnya Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama merupakan sebuah kejutan sekaligus kado istimewa bagi masyarakat Indonesia. Kejutan karena dianggap "aneh" ide ini lahir pada masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai *smiling people* (masyarakat yang murah senyum) yang mengindikasikan kuat akan cinta kedamaian dan hidup rukun.

Bagi bangsa Indonesia, substansi moderasi beragama bukanlah hal baru dalam sejarahnya yang panjang. Dalam sejarah Islam Indonesia misalnya, karakter Islam Moderat—yang kerap disebut Azyumardi Azra sebagai karakter asli dari keberagamaan Muslim di Nusantara—bisa merujuk pada sejarah awal masuknya Islam ke bumi nusantara. Wali Sanga merupakan arsitek yang andal dalam pembumian Islam awal di Indonesia dengan cara damai, tidak memaksa pemeluk lain untuk masuk agama Islam, menghargai budaya yang tengah berjalan, dan bahkan mengakomodasikannya ke dalam kebudayaan lokal tanpa kehilangan identitasnya (Miftahuddin, 2010, h 42 – 43). Menurut catatan Abdurrahman Mas'ud, Wali Sanga merupakan agen-agen unik Jawa pada abad XV – XVI yang mampu memadukan aspek-aspek

spiritual dan sekuler dalam menyiarkan Islam (Mas'ud, 2006, h 54 – 58).

Sekali lagi, karakter atau jati diri Islam Nusantara—kini lebih tepat disebut Islam Indonesia—adalah wasatiah yang bersifat tawasut, tawazun, dan *ta'adul*. Dalam terminologi kajian Islam di dunia internasional, Islam wasatiah sering diterjemahkan sebagai '*justly-balanced Islam*'—'Islam berkeseimbangan secara adil'—atau juga '*middle path Islam*' atau 'Islam jalan tengah'.

Penegasan di atas menjadi penting, karena ada hal yang menarik dari analisis Azyumardi Azra yang membandingkan karakter sosial keagamaan Indonesia dan Timur Tengah terkait moderasi beragama. Dengan latar belakang yang sama akan hadirnya semangat moderasi (wasatiah) di Indonesia dan Timur Tengah, namun ada perbedaan pada praktiknya.

Menurut Azra, berkembangnya wacana tentang *ummatan wasaṭan* dan Islam wasatiah di Timur Tengah merupakan respons intelektual terhadap kecenderungan meningkatnya ekstremisme di kalangan Muslim di kawasan ini. Hanya saja, dalam praktiknya mengalami kesulitan, meskipun pada tingkat intelektual keislaman konsep itu diterima (Azra, 2017).

Dalam pandangannya, kuatnya eksklusivisme dan sektarianisme keagamaan, kabilah, sosial, budaya dan politik menjadi faktor sulitnya penerapan paradigma Islam wasatiah dan *ummatan wasaṭan* di berbagai kawasan Muslim di Timur Tengah atau Asia Selatan. Sikap eksklusif dan sektarian di kawasan itu berlapis-lapis, baik di ranah intra-umat Islam sendiri maupun antarumat Islam dengan umat agama lain. Keadaan tersebut berbeda dengan umat Islam Indonesia yang umumnya menerapkan Islam wasatiah. Perjalanan sejarah panjang sebagai *ummatan wasaṭan* telah mematangkan kedewasaan umat Islam Indonesia dalam beragama.

Kejutan itu akhirnya bisa diterima sebagai "kado istimewa" bila melihat konteks kehidupan sosial keagamaan masyarakat Indonesia dua dekade terakhir yang terkoyak oleh berbagai aksi ekstremisme yang melukai jati diri bangsa. Peristiwa Bom Bali 1, pada 12 Oktober 2002, yang diyakini aparat kepolisian RI dilakukan oleh Kelompok Jaringan Islamiyah hingga Peledakan Bom di depan Gereja Katedral Makassar pada 28 Maret 2021, yang sementara diduga aparat Kepolisian pelakunya merupakan teroris jaringan Jemaah Ansharud Daulah (JAD), telah melukai jati diri bangsa Indonesia yang moderat (Kompas.com, 2020). Karena itu, buku yang menawarkan konsep moderasi beragama perspektif Kementerian Agama ini memiliki arti pen-

ting.

Warisan di akhir masa jabatan Lukman Hakim Saifuddin (LHS) ini kehadirannya bagaikan oase bagi umat beragama di tengah kebingungan menguatnya politik identitas yang terbelah pada sisi ekstrem yang berseberangan. Satu sisi cenderung ke kiri, sedangkan sisi lain cenderung ke kanan. Dua sisi ekstrem ini juga terjadi dalam sikap keberagamaan masyarakat. Bagi umat Islam misalnya, ini menjadi tantangan tersendiri secara internal. Umat Islam terkotak menjadi dua golongan yang memiliki pemahaman keagamaan yang berbeda. Sebagian kalangan umat Islam bersikap ketat dalam memahami agama dan cenderung memaksakan pemahamannya tersebut di tengah masyarakat muslim, bahkan dalam beberapa hal dengan menggunakan kekerasan (ekstrem kanan/fanatik). Sebagian lain bersikap longgar dalam beragama dan tunduk pada perilaku serta pemikiran negatif yang berasal dari budaya dan peradaban lain (ekstrem kiri/sekuler). Dalam ajaran Islam, menurut Achmad Satori Ismail dkk, (2007, h 13 – 14), hal tersebut disebabkan keduanya keliru memahami beberapa aspek ajaran Islam, yang akibatnya melahirkan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan spirit Islam yang *raḥmatan li al-ʿālamīn*

Hanya saja, konsep moderasi beragama ala Kementerian Agama ini masih bersifat elitis, diproduksi oleh Pusat. Bagaimana masyarakat daerah (baca: Pinggir) melihat dan menerimanya adalah hal yang menarik. Inilah yang menjadi latar belakang penelitian yang menjadi basis tulisan ini. Namun di sisi lain, tulisan ini juga ingin memotret dinamika moderasi beragama di daerah (lokus penelitian), yang bisa jadi ada praktik-praktik terbaik yang telah berjalan di beberapa wilayah. Khusus Kota Makassar, tulisan ini menjadi signifikan bila melihat kasus terakhir peledakan bom di depan Gereja Katedral Makassar pada 28 Maret 2021 di atas.

Bagi penulis, tulisan ini ingin melihat bagaimana unsur lokal di Kota Makassar mewarnai cara pandang tokoh agama setempat terhadap konsep moderasi beragama yang dilahirkan dari Pusat, baik secara konsep maupun praktik. Lokalitas tokoh agama ini dilihat sebagai "pinggir" (*edge atau periphery*, Bulliet 1995)—yang ditempatkan berhadapan dengan konsep moderasi beragama perspektif "pusat", yang dalam hal ini direpresentasikan oleh Kementerian Agama Pusat.

Studi ini berusaha menjawab tiga pertanyaan kunci: apa moderasi bera-

gama dalam kacamata tokoh masyarakat Kota Makassar? Bagaimana implementasi moderasi beragama di Kota Makassar? Apa saja modal sosial (*social capital*) dan tantangan dalam mewujudkan moderasi beragama di Kota Makassar?

Tulisan ini merujuk pada hasil penelitian yang bertujuan untuk merumuskan sebuah kebijakan moderasi beragama yang berbasis pada kebutuhan masyarakat. Manfaat secara praksis terletak pada upaya penelitian ini untuk menyusun sebuah model dan formula yang berguna untuk mengidentifikasi berbagai bentuk kebijakan moderasi beragama. Harapannya, model yang ditawarkan dapat meminimalisasi berkembangnya keberagamaan yang ekstrem, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri.

## Studi-Studi Moderasi Beragama

Penelitian dan kajian tentang moderasi beragama telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, baik oleh Puslitbang Bimas Agama Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama ataupun peneliti lain di luar institusi tersebut. Puslitbang Bimas Agama pada tahun 2018 melakukan penelitian tentang "Peta Penyiaran Keagamaan Islam berbasis Masjid" di berbagai daerah tahun 2018. Dari penelitian itu dapat dijelaskan bahwa di masjid-masjid yang diteliti itu moderat dan jarang memperdebatkan persoalan khilafiah yang memang sudah basi. Begitu pun dengan ujaran-ujaran kebencian (*hate speech*) juga tidak ada yang melakukannya (TPPBALK, 2017). Hal ini mungkin karena masjid yang menjadi sasaran adalah masjid yang dikelola pemerintah atau semi pemerintah, sehingga memang aneh jika ada yang melakukan ceramah dengan ujaran kebencian dan bertentangan dengan komitmen kebangsaan.

Pada 2019, Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan melakukan penelitian "Dinamika Moderasi Beragama di Indonesia". Penelitian itu menggali dan mengidentifikasi budaya lokal agama lainnya. Ditemukan bahwa terdapat banyak sekali kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat sebagai hasil inisiasi masyarakat berisikan pesan-pesan keagamaan yang moderat (Sugiyarto, 2019).

Setahun berikutnya, dilakukan penelitian dengan tema "Masjid sebagai Pusat Pendidikan Moderasi Beragama di Era Pandemi" dengan lokasi penelitian di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian ini menghasilkan pemetaan

paham keagamaan ekstrem hingga moderat. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa pengurus masjid tidak seluruhnya dapat memahami konsepsi moderasi beragama, meskipun dalam cara pandang, sikap dan praktik beragama menunjukkan moderasi. Pengurus masjid dan basis jemaah masjid memiliki definisi sendiri terkait konsep moderasi beragama yang berbeda dengan konsep yang diusung oleh Kementerian Agama, sebagai *leading sector* program moderasi beragama. Di beberapa wilayah penelitian menunjukkan bahwa konsep moderasi beragama belum sepenuhnya dapat diterima, bahkan ditolak. (TPPBALK, 2020).

Studi ini menunjukkan beberapa perbedaan fokus kajian. Meskipun masih berupaya menggali pemahaman moderasi beragama di masyarakat, namun juga mencakup tentang pelembagaan moderasi beragama tersebut. Tentu pelembagaan tersebut dirasa bahwa kehadiran moderasi beragama penting dalam upaya mengelola keragaman di masyarakat, mengurangi konflik yang terjadi akibat gesekan sosial, serta mampu menjadi suatu pranata untuk mengembangkan kehidupan harmoni di masyarakat. Inilah letak perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

## Moderasi Beragama: Kacamata Pinggir

Sebagaimana dijelaskan dalam pendahuluan, pembacaan tentang dinamika moderasi beragama di tingkat lokal (baca: Makassar) dalam penelitian ini sesungguhnya ingin melihat bagaimana unsur lokal di sejumlah kota di Indonesia mewarnai cara pandang tokoh agama tentang konsep moderasi beragama yang ditawarkan oleh pusat. Lokalitas tokoh agama dalam konteks penjelasan di atas dilihat sebagai "pinggir", *edge atau periphery* (Bulliet, 1995) yang ditempatkan berhadapan dengan "pusat", yang dalam hal ini direpresentasikan oleh Kementerian Agama Pusat yang menjadi *leading sector* penerbitan buku moderasi beragama tersebut.

Konsep pinggir dalam tulisan ini tidak bermakna terbelakang (*backwardness*) atau kelas dua (*secondary*), melainkan dimaknai sebagai sebuah indikasi negosiasi ruang abstrak antara kepentingan-kepentingan identitas lokal dan pusat (c*enter*) yang diimajinasikan sebagai kekuatan (*power*) yang membangun narasi utama dan praktik moderasi beragama. Negosiasi tersebut menempatkan kekhasan dan sejarah lokal di pinggir sebagai unsur pembentuk kepentingan dan identitas yang membangun cara pandang lokal

dalam merespons pusat. Dalam membangun relasi dengan pusat, pinggir lazim menggunakan penanda pusat dengan muatan kepentingan pinggir (Bulliet, 1994; Appadurai, 1996).

Negosiasi yang dimaksud di sini berefek pada munculnya ragam sikap tokoh agama lokal, khususnya di Kota Makassar, terhadap konsep moderasi beragama di Indonesia. Tulisan ini mengurai ragam sikap tersebut dalam subbahasan tentang lokalitas dan reservasi. Yang dimaksud dengan lokalitas adalah sikap tokoh agama terhadap konsep moderasi beragama yang berkelindan dengan pelbagai pertimbangan yang berpijak pada konteks sosial, budaya, dan sejarah masyarakat lokal. Ekspresi sikap tokoh agama lokal tersebut dapat berwujud penerimaan dengan persyaratan, di samping mungkin saja memiliki muatan resistensi atau bahkan penolakan sebagai bentuk reservasi.

Adapun reservasi di sini dimaknai sebagai penerimaan yang tidak utuh terhadap konsep moderasi beragama yang ditawarkan pusat, baik karena jarak dalam pemahaman konseptual maupun kepentingan politik yang melatarinya. Jarak tersebut dipengaruhi relasi pinggir dan pusat di atas. Namun demikian, aspek lokalitas dan reservasi dari pinggir justru menyediakan ruang pemahaman yang dinamis pada sikap menerima atau menolak konsep moderasi beragama.

Yang menarik, sebagai argumentasi lain yang mungkin ditemukan dalam tulisan ini adalah bahwa bentuk moderasi tokoh agama berupa sikap menerima empat indikator moderasi beragama yang disepakati makin kuat dan bermakna bila unsur lokalitas dapat menopang pertimbangan sikap tokoh agama, entah berupa adat, budaya, maupun identitas lokal. Empat indikator tersebut komitmen kebangsaan, toleransi, antikekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal yang akan dijelaskan lebih detail pada subbahasan berikutnya.

## Persepsi Moderasi Beragama dari Kacamata Pinggir

Sebelum pemaparan tentang praktik-praktik yang terbaik, serta modal sosial dan tantangan implementasi moderasi beragama di tingkat lokal, khususnya di Kota Makassar, perlu mengungkap bagaimana persepsi tokoh agama lokal tentang moderasi beragama.

Sebagaimana termaktub dalam bukunya, sikap moderat dalam beraga-

ma menyaratkan empat hal sebagai indikatornya, yaitu: (1) komitmen kebangsaan, (2) toleransi, (3). antikekerasan, dan (4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Sebagai indikator moderasi beragama yang paling penting, komitmen kebangsaan ingin melihat sejauh mana praktik beragama seseorang selaras dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 1945 juga regulasi di bawahnya (Kementerian Agama, 2019, h. 43).

Toleransi sebagai indikator moderasi beragama ingin melihat sejauh mana seorang yang beragama bisa menerima orang lain yang berbeda paham dan keyakinan dalam beragama, sekaligus tidak mengganggu orang lain yang berbeda tersebut untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinan, juga menyampaikan pendapatnya (Kementerian Agama, 2019, h. 44).

Antikekerasan sebagai indikator ingin melihat sejauh mana seorang yang beragama mengekspresikan paham dan keyakinannya secara damai tanpa kekerasan (radikalisme), baik di tingkat verbal, fisik, maupun pikiran. Sikap ini tampak terlihat saat ada keinginan untuk melakukan perubahan sosial yang dikehendaki sesuai ideologi keagamaannya. Indikator kekerasan ini terbuka kemungkinan terjadi pada semua agama, bukan hanya agama tertentu (Kementerian Agama, 2019, h. 45).

Sikap dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal ingin melihat sejauh mana seorang yang beragama bersedia menerima praktik keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan dan tradisi lokal. Menurut buku ini, orang yang moderat mampu mencerminkan sikap ramah dalam menerima tradisi dan budaya lokal dalam keberagamaannya, sejauh hal tersebut tidak bertentangan dengan pokok ajaran agamanya (Kementerian Agama, 2019, h. 46).

Bagi sebagian tokoh agama di Makassar, moderasi beragama cukup dimaknai dengan "keadilan". Makna ini selaras dengan pendapat Mohammad Hashim Kamali, yang menjelaskan bahwa prinsip dasar moderasi beragama adalah keseimbangan (*balance*) dan keadilan (*justice*). Dalam kerangka ini, seorang beragama tidak boleh ekstrem pada pandangannya, melainkan harus selalu mencari titik temu. Bagi Kamali, konsep dasar ini (moderasi/wasatiah) merupakan esensi ajaran Islam yang sering kali dilupakan oleh umatnya (Kementerian Agama, 2019, h 19-21). Namun demikian, menurut Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Makassar, yang di-

tunggu oleh masyarakat bawah adalah komitmen dan implementasi prinsip keadilan dari pemerintah pusat (AA, 2021).

Apa yang dikhawatirkan oleh para penulis buku *Moderasi Beragama* juga terjadi di Makassar, masih ada kesalahpahaman tentang moderasi beragama. Setidaknya, ada tiga fakta kesalahpahaman terhadap orang yang bersikap moderat, yaitu dianggap tidak punya pendirian (*plin-plan*), dicap tidak paripurna (*kāffah*) dalam beragama, dan dianggap mengabaikan nilai-nilai dasar keagamaan (*liberal*). Di antara tokoh agama di Makassar memang masih belum menerima dan membaca buku *Moderasi Beragama* yang diluncurkan pada 2019 tersebut. Padahal, terhadap kesalahpahaman itu, buku tersebut sudah menjawab dan menegaskan sebagai berikut:

> Jawabannya tentu saja tidak! Moderat dalam beragama sama sekali bukan berarti mengompromikan prinsip-prinsip dasar atau ritual pokok agama demi untuk menyenangkan orang lain yang berbeda paham keagamaan atau berbeda agamanya. Moderasi beragama juga bukan alasan bagi seseorang untuk tidak menjalankan ajaran agamanya secara serius. Sebaliknya, moderat dalam beragama berarti percaya diri dengan esensi ajaran agama yang dipeluknya, yang mengajarkan prinsip adil dan berimbang, tetapi berbagi kebenaran sejauh menyangkut tafsir agama (Kementerian Agama, 2019, h 13 – 14).

## Implementasi Empat Indikator Moderasi Beragama di Makassar

Sebagaimana dijelaskan di atas, ada empat indikator dari sikap moderat dalam beragama, yaitu: (1) Komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan; (2) bersikap toleran terhadap kelompok yang berbeda, (3) memiliki cara pandang yang cenderung anti- terhadap kekerasan, dan (4) bersikap akomodatif terhadap kebudayaan lokal.

### Indikator Komitmen Kebangsaan

Secara prinsip semua tokoh agama di Makassar komit terhadap bangsa dan negara beserta nilai-nilai yang dibangunnya, NKRI, UUD 1945, dan Pancasila. Hanya saja memang, sebagian di antaranya masih merasakan "luka lama" yang mengarah pada ketidakpuasan pada pemerintah pusat, teruta-

ma terkait dengan Gerakan Kelompok Kahar Muzakar.

Kelompok ini menjelma menjadi beberapa organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang cenderung *puritan*—istilah Abou el-Fadhl untuk memperhadapkannya dengan istilah *moderat*—seperti Wahdah Islamiyah dan Hidayatullah. Bahkan, sebagian di antaranya mengambil panggung politik sebagai pilihan artikulasi dan ekspresi keagamaannya. Pada saat menjadi kepala daerah di salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan misalnya, mereka menerbitkan Perda Syariah, yang oleh sebagian kalangan dianggap sebagai "noda" bagi demokrasi di Indonesia (SR, 2021).

**Indikator Toleransi**

Secara demografis dan kultural, masyarakat Makassar atau Sulawesi Selatan pada umumnya sudah terbiasa dengan kehidupan yang multikultural, multietnik dan heterogen dalam beragama. Salah seorang Kyai yang juga dipercaya sebagai Ketua MUI yang mengajarkan tarekat di Kota Makassar mengakui bahwa dirinya terbiasa bertetangga dengan umat Kristiani dan umat lainnya sejak kecil hingga sekarang (BR, 2021). Hal itu juga diakui aktivis perdamaian dan kerukunan di Kota Angin Mamiri ini (SR, 2021).

Soal toleransi sesungguhnya sudah menjadi bagian dari falsafah hidup masyarakat Makassar. Di Makassar dikenal beberapa kearifan lokal yang mencerminkan watak dan pandangan hidup masyarakatnya, antara lain: *sipakatau* (memanusiakan orang), *sipakalebi* (saling mendukung), dan *sipakainge'* (saling mengingatkan). Prinsip-prinsip hidup masyarakat Makassar ini positif dan menjadi modal sosial yang sangat mendukung upaya untuk mewujudkan moderasi beragama.

***Indikator Antikekerasan***

Bicara kekerasan jika dikaitkan dengan masyarakat Makassar memang seakan "setali tiga uang". Kekerasan seakan sudah menjadi budaya di benak orang luar Makassar terhadap mereka. Aneh memang, tapi itulah kenyataannya, seakan tidak mencerminkan falsafah hidup yang sangat luhur di atas. Seakan mengafirmasi pemahaman tersebut, penulis melihat berita pada 14 September 2021 di salah satu stasiun televisi yang memberitakan soal tawuran antarkampung di Kota Makassar.

Karenanya, tidak heran bila tema tentang kekerasan di tengah masya-

rakat Makassar telah menjadi fokus penelitian tersendiri, setidaknya oleh M. Saiful (2017). Menurutnya, terciptanya kekerasan budaya yang terdiri dari sumber struktural dan sumber kultural. Sumber struktural berasal dari kelas perantara, yaitu peran kapital dan aparat birokrasi yang secara tidak langsung memapankan kekerasan kolektif yang terjadi. Sementara itu, sumber kultural berasal dari penyalahartian nilai budaya *siri'* dan *pacce* yang dilakukan oleh sebagian masyarakat sebagai upaya pembenaran terjadinya kekerasan demi menjaga keberlangsungan statusnya (Saiful, 2017). Lama sebelum tulisan ini, Galtung (1999, h. 11) juga menegaskan bahwa ketika berbicara tentang kekerasan, maka pembicaraan yang dimaksud adalah penggunaan kekerasan dalam masyarakat dan legitimasi terhadap penggunaan kekerasan itu.

Fakta sosial di atas menunjukkan bahwa nilai *siri'* dan *pacce* yang dipahami oleh sebagian warga Makassar kerap diidentikkan dengan kekerasan, meskipun sesungguhnya tidaklah demikian. Nilai *siri'* dan *pacce* dalam budaya Makassar sangat erat kaitannya dengan harga diri dan martabat yang seharusnya dijaga oleh setiap anggota masyarakat. Akan tetapi, faktanya warga Makassar yang sering terlibat kekerasan kolektif telah menjadikan nilai budaya *siri'* dan *pacce* sebagai alasan dari sejumlah tindakan kekerasan yang mereka lakukan. Ini juga diakui Profesor Halilintar Latief (2021), salah seorang sejarawan senior sekaligus dosen di Universitas Negeri Makassar. Dalam pandangannya, pemahaman terhadap nilai *siri'* dan *pacce* telah mengalami reduksi, sehingga praktiknya sering kali bertentangan dengan hakikat yang sebenarnya. Yang memprihatinkan, menurutnya, nilai luhur ini sudah mulai luntur dan jarang diajarkan kepada generasi muda Kota Makassar, begitu pula di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.

Fakta lain yang menjadi isu nasional adalah peristiwa peledakan bom di depan Gereja Katedral pada 28 Maret 2021 kemarin masih cukup hangat di dalam ingatan kita. Sampai hari ini, sesuai berita dalam link yang dilampirkan penulis di atas, pelakunya diduga teroris jaringan Jemaah Ansharud Daulah (JAD). Namun info yang penulis dapat di lapangan, pelakunya ternyata penduduk yang tinggalnya tidak jauh dari tempat kejadian perkara. Bagi para aktivis perdamaian dan kerukunan di Kota Makassar, seperti Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR), kejadian ini tidak mengangetkan dan menganggap sebenarnya sudah diingatkan lewat hasil

penelitian Balai Litbang Agama (BLA) Makassar yang kemudian dijadikan rujukan oleh Syamsurijal (2017).

Artikel Syamsurijal tersebut menjelaskan bahwa radikalisme mulai membayangi pemikiran dan perilaku keagamaan kalangan muda muslim terdidik di Makassar, yakni para mahasiswa dan siswa. Diakuinya, meski radikalisme agama belum secara masif menjadi cara berpikir kelompok mahasiswa dan siswa, namun bayangannya telah menyungkupi kaum muda itu. Dalam penelitiannya, ada beberapa hal yang dapat dikemukakan. Pertama, radikalisme kalangan muda Islam, khususnya kelompok terdidik di Makassar bukanlah hal baru. Sejarah telah mencatatkan beberapa gerakan radikal kaum muda Islam terpelajar di Sulawesi Selatan, terutama Makassar, di antaranya adalah sikap dan pikiran yang setuju dengan perjuangan Kahar Muzakkar untuk mendirikan Negara Islam Indonesia. Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) adalah di antara yang memengaruhi nalar radikalisme kaum muda Islam terpelajar ini. Radikalisme di kalangan kaum muda Islam terpelajar ini sempat redup pada masa Orde Baru, karena ketatnya aturan rezim saat itu yang membatasi kebebasan berkumpul dan berserikat.

Kedua, pascareformasi, radikalisme kaum muda Islam terpelajar ini kembali mekar. Bibit yang sempat layu pada masa Orde Baru kembali bersemi, karena terbukanya ruang kebebasan dalam demokrasi. Di saat yang sama, globalisasi yang memberikan kesempatan paham-paham keagamaan baru berinfiltrasi ke negara kita membuat radikalisme di kalangan muda Islam terdidik ini mekar dengan cepat. Di Makassar, kelompok-kelompok Islam baru berkembang pesat, sebutlah di antaranya Salafi-Wahabi, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan kelompok-kelompok tarbiah dari Ikhwanul Muslimin. Kelompok-kelompok inilah yang melakukan pengaderan, perekrutan sekaligus mendidik kaum muda Islam terpelajar ini, sehingga sikap keagamaan mereka cenderung puritan dan tidak toleran.

Ketiga, beberapa data yang ditemukan, kalangan mahasiswa, siswa dan yang dianggap mewakili kaum muda terpelajar Makassar ini, terlihat kecenderungan untuk memahami teks agama secara tekstual dan literalis, menyetujui tindakan kekerasan atas nama agama, cen-

derung menganggap aksi terorisme sebagai bagian dari jihad, dan kurang bisa menerima kelompok yang berbeda, khususnya kelompok minoritas. Ciri-ciri yang ditunjukkan ini sudah mengarah ke beberapa ciri dan karakter kaum radikal-puritan yang selama ini diungkapkan para ahli.

Keempat, selain ada penetrasi kelompok radikal terhadap kaum muda Islam terpelajar melalui diskusi dan berbagai pengaderan, sikap radikal yang ditunjukkan kaum muda ini juga banyak dipengaruhi oleh informasi dari media sosial, situs-situs media *online* dan juga dari media massa, khususnya TV.

***Indikator Akomodatif terhadap Kebudayaan Lokal***

Indikator ini sebenarnya yang paling riskan untuk diperbincangkan bila dikaitkan dengan doktrin keagamaan, terutama Islam. Tidak lain, karena tidak sedikit budaya hidup di nusantara ini dekat dengan apa yang diistilahkan dengan doktrin agama sebagai "syirik". Karenanya, bagi sebagian tokoh agama yang puritan, aspek ini mengalami reservasi—penerimaan yang tidak utuh—terhadap konsep moderasi beragama yang ditawarkan oleh pusat.

Namun demikian, dalam perjalanan sejarahnya, di Makassar ternyata dalam banyak kasus terjadi akulturasi budaya, baik di kalangan umat Islam maupun umat lainnya. Sebagaimana diceritakan Prof. Ghalib, Guru Besar UIN Alauddin Makassar yang juga menjabat sebagai Ketua FKUB Provinsi Sulawesi Selatan, tradisi "main domino" di tengah masyarakat Makassar dulu secara perlahan hingga sekarang diganti menjadi "mengaji" (baca Al-Qur'an) saat ada warga yang meninggal dunia. Tradisi berpakaian adat Makassar, yang dulu menggunakan bahan yang transparan dan minim, sekarang semakin tertutup dan tebal sehingga tidak lagi menampakkan aurat (MG, 2021). Proses akulturasi juga terjadi di kalangan umat Katolik dan umat Buddha seperti diungkapkan seorang pastor muda Katolik (ASR, 2021) dan Ketua Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudi) ~~PHDI Provinsi Sulawesi Selatan~~ (Ygs, 2021).

## Inisiatif Membangun Moderasi Beragama

Pada bagian ini, penulis ingin mengemukakan tentang modal sosial yang

bisa diandalkan bagi upaya untuk mewujudkan moderasi beragama di tengah masyarakat Makassar. Beberapa modal sosial dimaksud, antara lain, pertama, komunitas tarekat yang telah berjalan lama di tengah Makassar, setidaknya tampak terlihat dari Komunitas Tarekat Al-Muhammadiyah Al-Sanusiyah Al-Idrisiyah dengan KH. Baharuddin, yang pengajiannya rutin berjalan di tengah Kota Makassar, dengan jemaah sampai ratusan orang setiap pertemuan (Brd, 2021).

Lewat komunitas tarekatnya, KH. Baharuddin menguatkan pemahaman keislaman yang substantif, komprehensif dan santun dalam bersikap. Beliau menekankan kepada jamaahnya tentang hakikat konsep Ihsan, bukannya hanya konsep Iman dan Islam. Dengan konsep Ihsan, menurutnya, umat Islam sejatinya mengedepankan akhlak dalam beragama, bukan hanya soal keyakinan yang bersifat hitam-putih bila direlasikan dengan keyakinan orang lain. Kasus pengeboman Gereja Katedral di Kota Makassar, dalam pandangan beliau, menjelaskan akan hilangnya nilai Ihsan pada pelakunya (BR, 2021).

Kedua, kebijakan komunitas lorong yang digalakkan oleh Pemkot Makassar. Sebuah kebijakan yang eksentrik dalam kacamata penulis, yang tidak ditemukan di daerah lain. Komunitas ini oleh Pemkot dijadikan sebagai basis pemberdayaan masyarakat dan sosialisasi kebijakan di masyarakat tingkat bawah (*grassroot*). Sebuah langkah strategis dan sangat efektif untuk upaya mengimplementasikan nilai-nilai yang menguatkan moderasi beragama masyarakat Makassar.

Ketiga, Kemenag Kota Makassar telah berinisiatif membentuk sebuah forum lintas agama di kalangan penyuluh agama, yaitu Forum Penyuluh Lintas Agama. Kepala Kemenag (AAT, 2021) menegaskan bahwa inisiatif ini dilatari oleh kenyataan kurangnya perjumpaan penyuluh antar agama, di mana sebelumnya hanya berkutat pada internal agama penyuluh itu sendiri. Karenanya, diharapkan dari forum ini kesepahaman dalam membangun umat beragama di Makassar bisa terbangun dan kesalahpahaman bisa dihindarkan di tengah umat beragama Makassar.

Keempat, rancangan Khaironi Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan untuk menerjemahkan konsep moderasi beragama di wilayah Sulawesi Selatan. Dalam perbincangannya dengan penulis, Khaironi menjelaskan tahapan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Dalam jangka

pendek, program yang akan dilakukan adalah Bimtek Wawasan Kebangsaan bagi kalangan Penyuluh Agama, Penghulu, dan Guru Agama. Dalam jangka menengah, program *assessment* terhadap Penyuluh Agama, Penghulu, dan Guru Agama sebagai pilihan program untuk membersihkan pegawai Kemenag dari aktor-aktor antimoderasi beragama. Dan, dalam jangka panjang, Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan menawarkan untuk sebanyak mungkin mendirikan madrasah di wilayah Sulawesi Selatan dalam rangka menanam lebih banyak nilai-nilai moderasi beragama terhadap generasi penerus bangsa. Ini langkah yang sangat strategis, menurutnya (Khoironi, 2021).

## Daftar Pustaka

Apadurai, A (1986). "Theory in Anthropology: Center and Periphery." *Comparative Studies in Society and History.* 28 (2).

Azra, A (2017). *Islam Indonesia Inklusif Vs Eksklusif: Dinamika Keberagamaan Umat Muslimin*. Makalah untuk Pengajian Ramadhan PP Muhammadiyah, Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta, 6 Juni 2017.

Bulliet, R W (1995). *Islam: The View from the Edge.* New York: Columbia University Press.

Junaedi, E (2019). *Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kementerian Agama.* Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan. *Harmoni*, vol 18 nomor 2.

Saiful, M (2017(. *Kekerasan Kolektif di perkotaan: Kosntruksi dan Representasi Maskulinitas dalam Budaya Masyarakat Makassar. ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia*, vol 2, Edisi 1.

Mas'ud, A (2006). *Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*. Jakarta: Penerbit Kencana.

Miftahuddin (2010). Islam Moderat Konteks Indonesia Dalam Perspektif Historis. *Mozaik*, vol V, nomor 1 Januari 2010.

Shihab, M Q (2000). Tafsir Al-Mishbah, Cet.1 vol 1. Ciputat: Lentera Hati

Syamsurijal (2017). *Radikalisme Kaum Muda Islam Terdidik di Makassar. Jurnal Al-Qalam* vol 23 nomor 2.

Kementerian Agama RI (2019). *Moderasi Beragama*, Cet. Kedua. Jakarta: Kementerian Agama RI.

# Kontak Sosial dan Keberagamaan di Jembrana

Raudatul Ulum

## Perjumpaan Antarpemeluk Agama

Di Loloan, orang akan disajikan simbol toleransi dengan berdirinya dua rumah ibadah yang berdekatan: Pura Majapahit dan Masjid Nurul Iman. Di Desa Medewi, pengelolaan kelompok Subak Air Satang dipimpin muslim. Biasanya dipimpin dari warga Hindu. Dua kasus ini menggambarkan bagaimana moderasi beragama hidup di Jembrana.

Moderasi Beragama menjadi elemen utama di dalam RPJMN 2020 – 2024. Dengan demikian semua unsur di dalam instansi pemerintahan diarahkan untuk mewujudkan kehidupan keagamaan masyarakat yang menjunjung tinggi harmoni, tanpa diskriminasi dan berwawasan keadilan. Sejatinya gagasan moderasi adalah nilai yang tidak dilepaskan dari ajaran agama itu sendiri, terutama dalam hal ini Islam, memiliki semangat wasatiah di dalam semua hal, hendaknya umat itu tidak melakukan sesuatu secara berlebihan.

Moderasi sendiri merupakan sifat bawaan dari manusia nusantara, berlaku seimbang sejak dari memahami hubungan dengan tuhan (*parahyangan*); harmoni dengan alam (*palemahan*); dan harmoni dengan umat manusia (*pawongan*). Demikian konsepsi *trihita karana* menjadi poros dalam ajaran Hindu Bali, tidak hanya mengisyaratkan tentang pentingnya menja-

ga tiga hal tersebut namun berlaku seimbang di dalam semua aspek. Relasi antarpemeluk menjadi konteks yang vital bagi gagasan moderasi beragama, karena kerukunan tercipta setidaknya harus memiliki syarat moderasi bagi pemeluk masing-masing agama.

Relasi antara pemeluk Hindu dengan Muslim di Bali, terutama Jembrana berlangsung pada periode ratusan tahun. Masyarakat Bali, beragama Hindu diyakini merupakan realitas sejarah bergesernya ajaran Hindu dari Jawa dan bertahan berkembang dengan baik di Bali. Meskipun begitu, kontak dengan pemeluk Islam pun tidak bisa dihindarkan, para pemukim muslim di kabupaten Jembarana yang tersebar di Loloan, Banyubiru, Air Kuning, Medewi dan beberapa titik signifikan dari hal jumlah dan kebudayaan secara relatif. Pemukim muslim berdasarkan sejarah berasal dari Sulawesi, sejak mendaratnya skuadron sultan Wajo, dengan peralatan perang lengkap berusaha mendapatkan tempat yang cukup layak, terhindar dari pasukan Belanda pascaperjanjian Bongaya.

Seperti halnya pembentukan komunitas Muslim di bagian lain di pulau Bali, kehadiran pemukim muslim menyimpan catatan yang mendalam tentang hubungan bermakna antarpemeluk agama Hindu dan Islam. Di masa kerajaan-kerajaan Bali, pemukim muslim dari Sulawesi mendapat tempat berarti karena latar belakang mereka membantu kerajaan menahan serangan dari kerajaan lain. Meskipun di era modern, komunitas muslim di Serangan mengalami kehilangan tanah yang diperoleh leluhurnya di masa lalu.

Jembrana sendiri memiliki nuansa antarpemeluk harmonik, suara azan di masjid menggunakan pelantang suara satu hal yang jamak. Begitu juga dengan pura menggunakan pelantang suara, di tengah hari mereka dua rumah ibadah bergantian menyampaikan informasi peribadatan. Seperti tidak tampak antaragama berpotensi memiliki ketegangan identitas, jarang letupan terjadi, meskipun bukan berarti tidak memiliki masalah.

## Kemanfaatan

Tulisan yang disajikan menyampaikan bentuk penerapan moderasi beragama yang hidup berkembang di beberapa titik di Kabupaten Jembrana, nilai tersebut melekat secara konseptual tidak dapat dilepaskan dari ajaran agama. Implementasi sikap moderat dan kesadaran dalam keberagamaan terjadi Desa Loloan Timur dan Loloan Barat, Banyu Biru, Air Kuning dan

Desa Medewi serta dua titik pemukiman khusus pemeluk Kristen dan Katolik pada dua desa segregatif. Tindakan dan praktik keagamaan moderasi sedemikian signifikan dalam kehidupan Bersama antarpemeluk agama di Kabupaten Jembrana. Manfaat secara praksis terletak pada menyajikan satu bahan model dan formula yang berguna untuk mengidentifikasi berbagai bentuk kebijakan moderasi beragama. Harapannya, model yang ditawarkan dapat meminimalisasi perkembangkannya keberagamaan yang konservatif atau tidak kondusif bagi kehidupan bersama.

## Deskripsi Keagamaan dan Adat di Jembrana

Di ujung barat Bali, Jembrana berada. Kabupaten beribukota Negara itu berbatasan dengan Kabupaten Tabanan di timur, Kabupaten Buleleng di utara, Selat Bali di barat dan Samudera Hindia di Selatan. Kabupaten berpenduduk 317.064 orang (2020) ini mayoritas memeluk Hindu (234,242 orang). Agama terbesar kedua ditempati Islam (86,251 orang), disusul Kristen, Katolik, Buddha. Pemeluk Konghucu dan aliran kepercayaan tidak melewati angka 15.

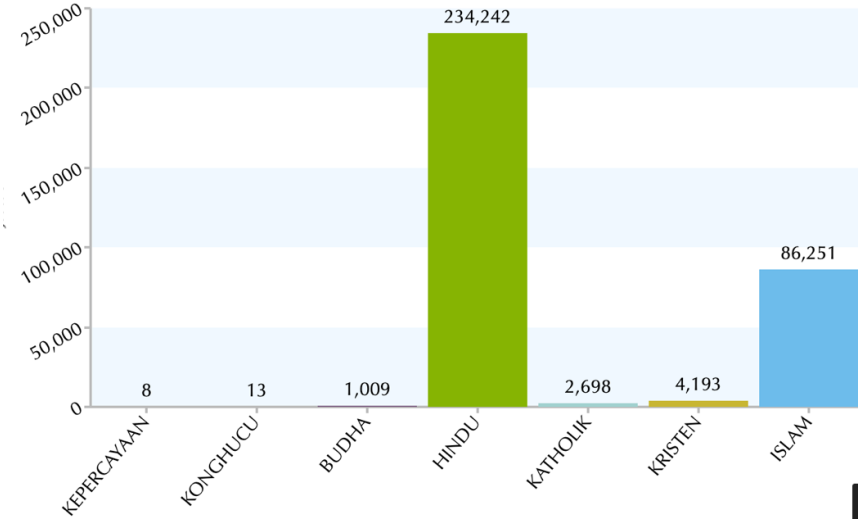


**Grafik 1: Jumlah penganut Agama di Kabupaten Jembrana 2018**
**(sumber: statistik https://statistiksektoral.jembranakab.go.id/)**

Jembrana yang dibagi dalam lima kecamatan memiliki 64 desa pakraman, 51 desa dan kelurahan, 285 banjar pakraman dan 245 banjar dinas/lingkungan. Jumlah desa adat mencapai 64 desa, banjar adat berjumlah 285 desa, subak yeh 67, dan subak abian 87 desa.

**Tabel 1: Komposisi desa adat dan desa dinas**

| No | Kecamatan | Desa Pakraman | Desa Dinas | Banjar Pakraman | Banjar Dinas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melaya | 13 | 10 | 69 | 61 |
| 2 | Negara | 10 | 12 | 46 | 46 |
| 3 | Jembrana | 9 | 10 | 44 | 46 |
| 4 | Mendoyo | 19 | 11 | 88 | 64 |
| 5 | Pekutatan | 13 | 8 | 38 | 28 |
| | **Jumlah** | **64** | **51** | **285** | **245** |

**Tabel 2: Perincian jumlah lembaga tradisional setiap kecamatan**

| No | Kecamatan | Desa Adat | Banjar Adat | Subak Yeh | Subak Abian |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melaya | 13 | 69 | 19 | 32 |
| 2 | Negara | 10 | 46 | 19 | 15 |
| 3 | Jembrana | 9 | 44 | 8 | 6 |
| 4 | Mendoyo | 19 | 88 | 9 | 14 |
| 5 | Pekutatan | 13 | 38 | 12 | 20 |
| | **Jumlah** | **64** | **285** | **67** | **87** |

### *Nyama Baraya dan Moderasi Beragama*

Bali di antara budaya dan agama sering kali sulit diurai secara terpisah, meskipun juga diakui memiliki ruang diskursus sendiri-sendiri. Adat atau krama, dalam praktiknya tidak dapat dipisahkan dari agama, satu sama lain menguatkan dan menghidupkan di setiap penjuru Bali. Begitu juga dengan masyarakat Jembrana, nilai-nilai hidup yang melekat pada keberagamaan di kalangan umat beragama di kabupaten paling barat ini juga memiliki keunikan tersendiri, bahkan bagi kalangan masyarakat Bali dianggap satu dari

sekian yang paling kental relasi antara Muslim dengan pemeluk Hindu. Kelekatan pada masa lalu, sejarah kehidupan antaragama Islam dan Hindu di mulai sejak awal mula, setua dari peradaban Hindu Bali dimulai (Ahmad, 2020). Istilah *nyama beraya*, sangat popular di seantero Bali sebagai konsep penyatuan sosial dan batin masyarakat, rasa memiliki satu sama lain antara pemeluk Islam dan Hindu, di beberapa tempat terutama Jembrana sekaligus sebagai citra diri menyatu secara komunal, kohesivitas di beberapa lokasi misalnya Loloan[1], Banyu Binyu dibentuk dengan latar belakang berbeda namun memiliki keeratan yang sama kuat.

Menurut Bagenda Ali (2021), penulis *Sejarah Muslim Bali Mula*, latar belakang pemeluk Islam di Loloan berasal dari diaspora prajurit Makassar, Bugis yang Sebagian kemudian bertransformasi menjadi pedagang. Menurutnya model diaspora Bugis tidak hanya terjadi di Loloan, karena di Denpasar, Badung dan Buleleng juga terdapat kampung Bugis. Sedangkan yang di Banyu Biru, pemukim muslim awal memiliki kekerabatan dengan pemeluk Hindu, terdiri atas 40 orang laki dan perempuan sejak 1764 menetap, berangkat sebagai pengiring raja Blambangan yang menghadap Raja Mengwi karena satu kesalahan membunuh perwakilannya. Akhirnya Raja Blambangan tersebut dibunuh, pengikutnya berangkat pulang ke Banyuwangi tetapi sampai di Negara memutuskan untuk tinggal lebih lama.

I Gusti Made Ngurah, Wakil Ketua FKUB Bali (2021) menyatakan, jika konsep seimbang, keadilan, toleransi, dan tenggang rasa itu adalah indikator dari moderasi beragama, itu semua sudah ada dan dipraktikkan dalam agama Hindu. Bahwa di dalam *Tri Kaya Parisuda* itu menekankan pada tiga perilaku yang disucikan: Tri Kaya Parisudha artinya tiga perbuatan yang disucikan merupakan salah satu kearifan lokal sosial yang dimiliki masyarakat Bali. Berpikir yang benar (*manacika*), berkata yang benar (*wacika*) dan berbuat yang benar (*kayika*) adalah inti dari konsep Tri Kaya Parisudha (Undiksha.ac.id, 2020).

Dalam hal sikap moderat sangat dipengaruhi oleh konsep *tatwan asi*

1 Loloan memiliki dua kelurahan: Kelurahan Loloan Timur dan Loloan Barat. Komposisi pemeluk Hindu dan muslim di dua kelurahan seimbang dan saling memengaruhi. Situasi ini terjalin sejak lama. Diaspora Bugis Makassar, Jawa, kaum migran dari Sumatera juga berkembang menjadi entitas Muslim Loloan.

(kamu adalah dia), sama juga dengan kamu adalah aku, artinya orang lain itu adalah diri kita sendiri (Ngurah, 2021; Arsana, 2021). Antara dua subjek keakuan adalah sama, tidak bisa dipisahkan bahwa orang lain itu adalah aku itu sendiri. Nilai lain *vasudewa kutumbakang* (kita semua adalah saudara), orang Hindu tidak bisa dilepaskan dari nilai ini yang terejawantah pada kehidupan sosial terutama persaudaraan dengan saudara muslim, sebelum dengan pemeluk agama lain. Relasi dengan *nyama selam*, istilah yang sangat popular di Bali terutama di Jembrana karena ikatan sejarah di masa lalu yang masih terpelihara sampai sekarang.

Cara pandang di moderat, atau wasatiah terpelihara di masyarakat muslim Jembrana diakui oleh banyak tokoh yang sangat lekat dengan lingkungan warga Hindu. Penerimaan terhadap entitas keislaman, sebagai muslim Jembrana (Bali) melalui rentetan waktu yang panjang dan catatan sejarah yang diakui. "Jika sekarang moderasi terganggu karena masuknya paham HTI, awalnya dibiarkan tetapi gangguannya terasa juga sampai Bali" (Ali, 2021). Jadi rancangan kehidupan sosial keagamaan di Bali, adalah moderat, sejarah kebersamaan itu dibentuk dengan berbagai cerita, mulai penggunaan laskar Bugis untuk membantu Kerajaan Jembrana melawan Kerajaan Singaraja sehingga mendapat hadiah tanah dan berkembang menjadi komunitas tersendiri (Tafsil, 2021).

Adapun cara pandang moderat di kalangan Kristen di Jembrana, diungkapkan oleh I Nyoman Yohanes (2021), seorang pendeta denominasi Gereja Protestan, Gereja Kristen Protestan di Bali (GKPB), moderasi itu adalah konsepsi mencegah radikalisme dan ekstremisme. Sikap yang moderat dalam beragama tidak berlebih-lebihan, sebagai rohaniwan harus mencari cara untuk menyampaikan yang tidak menimbulkan perpecahan. Ajaran kasih sebagai umat Kristen harus meneladani Yesus seperti ungkapan "jika pipi kanan ditampar berikanlah pipi kiri". Ini bentuk pengorbanan untuk saudara atau orang lain. Menyikapi perbedaan sebagai hal yang tidak bisa dihindari, tidak boleh merasa benar sendiri.

Pendeta Nyoman Yohanes terlahir sebagai Kristen. Orang tuanya dibaptis bersamaan dengan kakeknya di Karang Asem, di lingkungan gereja Kemah Injili. Pembaptisan itu dilakukan mandiri di gereja tersebut karena tidak sistem keorganisasian gereja di Bali tidak mengafiliasi gereja lain di luar Bali. Meski begitu beberapa hal belajar pada pola misi Gereja Kristen Jawi

Wetan (GKJW) Mojowarno di Jombang Jawa Timur. I Nyoman Yohanes kecil bersekolah di Sekolah Alkitab di Malang di mana pengaruh GKJW besar di Malang.

Sikap penganut Kristen di Jembrana cenderung menyesuaikan diri dengan Budaya Bali. Di samping memiliki leluhur Bali dan menyandang nama Bali, sebagian bangunan gereja menggunakan simbol Hindu Bali. Liturgi pada minggu pertama kebaktian menggunakan bahasa pengantar dan nyanyian Bali. Mereka juga menggunakan gamelan Saat Natal acara keagamaan disemarakkan dengan musik yang menggunakan gamelan, kemben, udeng dan kebaya (Yohanes, 2021).

I Nyoman Yohanes generasi kedua atau ketiga, karena ayah dan kakeknya dibaptis bersamaan.Kekerabatan keluarga ayah dan kakek Pendeta Yohanes dengan keluarganya yang nonkristen terjalin erat. Mereka memiliki persekutuan dengan arisan. Saat Natal, keluarga yang beragama Hindu datang mengunjungi. Mereka saling mengundang di acara-cara besar.

GKPB terletak di Desa Blimbing Sari, pemukiman yang sengaja dibuat Belanda untuk menampung pemeluk Kristen Bali. Karena relatif terpencil, warga Kristen kurang bersentuhan langsung dengan penganut agama lain seperti muslim dan Hindu yang berada di desa berbeda. Desa ini dikenal bersih dan tertata. Pada 1982 pernah mendapat penghargaan Desa Terbaik (Yohanes, 2021). Pemerintah Kabupaten Jembrana menyematkannya sebagai Desa Wisata yang dikelilingi desa-desa tetangga dengan warga Hindu dan muslim.

Penganut Katolik yang terkonsentrasi di desa Palasari, proses pembentukan masyarakatnya mirip dengan Kristen Bali di Blimbingsari, menyatukan pemeluk minoritas Katolik pada satu klaster wilayah setingkat desa. Gereja Yesus Kudus Palasari berdiri dengan sangat megah dan indah, pelayanan doa serta adanya gua Maria di area gereja menambah daya tarik desa ini menjadi ramai dengan peziarah. Pencanangan desa wisata terhadap beberapa *enclave* non-Hindu dapat dipandang sebagai cara yang baik pemerintah Jembrana memperlakukan model segregasi sebagai kesempatan untuk menguatkan kabupaten.

I Wayan Swamba (2021), pendeta GKIN dan ketua Musyrawarah Pelayanan Umat Kristen (MPUK) Kabupaten Jembrana berpandangan model segregasi terhadap umat Kristen cukup berbeda dengan bauran pemeluk

Muslim-Hindu di masa kolonial. Meskipun sekarang pemeluk Kristen dan Katolik cukup banyak tersisip di berbagai tempat di Kabupaten Jembrana, khususnya di Kecamatan Negara. Tercatat 38 gereja Protestan, dan beberapa jumlah kecil Pos Pelayanan Doa karena belum dianggap sebagai entitas gereja.

Moderasi di kalangan umat beragama di Kabupaten Jembrana relatif menjadi bagian hidup yang tidak bisa dihindarkan, hidup bersama dengan kuatnya budaya dominan Hindu yang menekankan harmoni, seperti filosofi dasar kesejahteraan pada *tri hita karana*, *parahyangan*, *pawongan*, dan *palehaman*. Hidup dengan filosofi harmoni melebur sebagai konsep hidup bersama, *menyama baraya*. Dengan demikian, bangunan konsep tidak lagi ideal pada nilai dasarnya di setiap agama, misalnya bagi pemeluk Islam, Kristen ataupun Katolik serta agama lainnya, namun tertuangkan, terejawantah pada kehidupan keagamaan.

Beberapa contoh kehidupan berbagi peran signifikan dalam kehidupan sosial keagamaan, terjadi di beberapa tempat: warisan sejarah terhadap berdirinya Pura Majapahit didirikan pada tahun 1964, pertama kali oleh pemukim dari Blambangan, bersamaan dengan Masjid di sebelahnya pada tahun 1966 sebagai karya bersama pemeluk Hindu dan Islam. Mereka pemukim dari Blambangan adalah pengiring Prabu Blambangan yang menghadap atasannya Raja Mengwi karena kesalahan membunuh petinggi kerajaan Mengwi di adu jangkrik. Akhirul kisah, raja bawahan tersebut dibunuh dan pengiringnya Kembali pulang. Di dalam perjalanan menuju Blambangan berhenti di Banyu Biru dan memutuskan menetap, kebetulan para pengiring raja terdiri dari dua pemeluk, Hindu dan Islam, kedua kelompok sepakat membangun rumah ibadah satu sama lain secara bersama-sama (Suarem, 2021).

Sisa keturunan imigran Jawa Blambangan masih terlacak, satu dari sembilan pemangku pura, I Wayan Wenan adalah generasi ke sekian. Mangku Pura bertempat tinggal di sebelah barat Pura, dan menjadi satu pemeluk Hindu yang dikelilingi Muslim. Sebagian besar dari muslim adalah keturunan Blambangan yang populasinya lebih banyak di sebelah barat Pura, sedangkan pemukim Hindu berada berkembang di sebelah selatan. Sedangkan di sebelah timur pura juga mayoritas dihuni oleh pemeluk Islam. Memori tentang pembangunan Pura dan Mesjid masih terpelihara dengan baik, uta-

manya di kalangan Hindu, pengurus Pura Majapahit, kalau di kalangan Muslim terbatas mereka yang telah berumur, seperti Haji Husni berumur (80 tahun). Haji Husni sendiri bukanlah keturunan langsung kaum Using pengiring raja, beliau adalah keturunan keempat dari seorang Arya, tangan kanan Raja Jembrana yang masuk Islam, namun membantu pendirian Pura Majapahit.

Keunikan warga Desa Banyu Biru di mana Pura Majapahit dan Mesjid tua berdiri, sebagian dari mereka yang telah lama, pemukim kuno berbahasa Melayu, meskipun bukan warga desa Loloan. Perbedaan cerita penutur Bahasa Melayu antara muslim Banyu Biru dengan Loloan adalah jika di Loloan dipengaruhi oleh guru agama yang mengajarkan dalam Bahasa Melayu, sedangkan di Banyubiru karena perjumpaan dalam perkawinan dengan warga Loloan. Arya (*ngumpi*[2] *nyuling*), kawin dengan orang Loloan yang beragama Islam yang berbahasa Melayu. Meskipun begitu, dalam interaksi di ruang terbuka mereka semua dapat menggunakan bahasa Bali dengan baik.

## Keseimbangan sebagai Kunci Kehidupan Bersama

Konsep adil dan berimbang dapat ditelusuri pada cara pandang masing-masing pemeluk, terutama sehubungan dengan relasi antarumat. Tetapi tantangannya justru muncul secara internal. Tantangan serius dialami oleh Hindu di Bali selama dua tahun ini (2020-2021). Polemik tradisionalisme Hindu dengan spiritualisme atau *sampradaya* mengemuka sedemikian hebat. Rentetan peristiwa sejak Juli 2020-Mei 2021, penutupan Ashram milik Hare Krishna terus terjadi. Meskipun aksi penutupan lebih terlihat sebagai unjuk rasa tidak sampai dengan perusakan fasilitas secara serius, sampai dengan Mei 2021 satu plang Krishna Balaram Asram dipotong oleh sekelompok massa menamakan diri Bendesa Desa Adat Kesiman, Denpasar.

Secara konseptual, ajaran Hindu terletak pada *tattwa-susila-acara* (upacara), keseimbangan dimulai dari Panca Shrada dan Bhakti, kemudian pada Trikaya Parisuda, sampai dengan keseimbangan dalam hal kesejahteraan Trihita Karana (Ngurah, 2021). Dengan demikian dalam pembelajaran tiga aspek *tatwa-susila* dan upacara menekankan moderasi sejak mengenalkannya pada setiap umur.

---

2 Sebutan dalam bahasa Bali untuk orang tua setingkat kakeknya kakek, buyut.

Bagaimana sikap moderat itu tumbuh dari sejak menjawab pertanyaan, muslim itu siapa, Islam itu apa? hal tersebut sering kali muncul di kalangan anak didik. Terutama juga saat perayaan Idulfitri, sering kali perilaku keagamaan berbeda juga memancing anak-anak untuk bertanya. Dengan modal persaudaraan, pemahaman sejak awal itu gampang disampaikan, tata upacara yang berbeda, bagaimana bisa terselenggara tanpa saling melecehkan (Ngurah, 2021). Sejak dulu Bali mengenal tradisi *ngejod*, yaitu saling memberi makanan saat satu pihak merayakan hari besar, biasanya berupa makanan yang dapat dimakan jika umat Islam, kalau bagi umat Hindu tidak terlalu banyak masalah. Kini tantangannya dalam hal saling memberi adalah makanan yang diberikan pada umat muslim dapat dikonsumsi, misalnya daging pun tetap perlu dikomunikasikan.

Keseimbangan dalam hal membangun kehidupan bersama, gangguannya dapat muncul dari urusan politik, banyak hal yang sejatinya di luar urusan sosial keagamaan mengganggu komunikasi. Polemik terkini kelompok tradisional Hindu Bali harus berhadapan dengan *sampradaya*. Berbagai pihak dari kelompok tradisional menolak kehadiran Hare Krishna di dalam *dresta* Bali. *Dresta* Bali adalah konsepsi adat, agama menjadi bagian dari kultur tanpa dapat dipisah, sering kali dua hal di antaranya sulit dibedakan oleh pemeluk Hindu, Bali (Ahmad, 2021). Tuntutan terhadap Hare Krishna sepertinya akan bulat dikeluarkan dari Hindu karena berbeda sejak dari *tatwa*, teologi apalagi upacara (Arsana, 2021).

## Merawat Nilai Kebangsaan

Pengalaman Jembrana atas nilai-nilai kebangsaan tidak lahir tiba-tiba. Nilai-nilai itu terwariskan lewat proses sejarah panjang. Konsepsi Pancasila muncul di berbagai lontar dan hingga kini dirawat. Konsep NKRI pengejawantahan wawasan nusantara sejak Majapahit. I Ketut Sumiarta, seorang mangku dan penyuluh Hindu, mengatakan Bali, Majapahit, dan Hindu tiga bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam memahami konsep NKRI yang terbentang sepanjang Sabang-Merauke. Bagi masyarakat Bali, Indonesia adalah semangat bersama (Sumiarta, 2021).

Menurut I Komang Arsana (2021), lima sila dalam Pancasila hidup dalam keyakinan dan praktik kehidupan pemeluk Hindu. Sila pertama dapat dimaknai sebagai kewajiban menyembah dan meyakini Sang Hyang Widi; sila

kedua sebagai penghormatan pada institusi keluarga, manusia, *soroh* dan adat; sila ketiga sebagai persatuan juga dalam berbagai entitas; sila keempat sebagai ajaran tentang penyelesaian dengan musyawarah seperti *sangkep*; dan sila kelima sebagai keadilan sosial adalah muara dari empat sila. Agama dan nilai apa pun harus bermuara pada keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh manusia di Indonesia. Menurut Arsana (2021), Ketua PHDI dan Ketua FKUB Jembrana, mencintai nusantara merupakan sikap yang semestinya dan menjadi cara pandang hidup. Bagi umat Hindu, komitmen kebangsaan menjadi hal penting dan menyatu dengan mentalitas (keindonesiaan).

Kebinekaan bagian penting dalam ajaran Hindu dan hidup sejak era Majapahit. Melalui kebinekaan akan tercipta harmoni. Dalam tradisi kesenian Bali, harmoni tecermin dalam lima hal: kesenian sebagai media pemujaan; menghibur manusia dan memanusiakan manusia; penyatuan sebagai tahapan penting membentuk harmoni (banyaknya alat musik yang berbeda bunyi dan jenisnya jika dimainkan dengan baik akan menyampaikan keindahan); musyawarah dalam kesenian adalah kesepakatan sejak dari awal mula pementasan; dan bermuara pada keadilan (kebahagiaan).

Di Jembrana, terdapat sejumlah organisasi yang diharapkan memperkuat kebinekaan. Di antaranya FKUB yang diharapkan berperan memelihara hubungan antarpemeluk agama dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). Organisasi yang disebut terakhir merupakan wadah komunikasi berbagai etnis untuk membangun kesepahaman dan mengurangi gesekan antaretnis (Gede, 2021).

## Relasi Agama dan Negara

Salah satu ajaran Hindu menekankan darma negara, pengabdian dan kesetiaan pada negara bagian dari jalan darma. Seperti kisah Bisma dan Karna, kesatria yang tegak berdiri di jalan pengabdian secara total, mereka berperang melawan kubu Pandawa yang secara norma berada di pihak yang benar. Seperti halnya pasukan Pandawa yang berjuang menegakkan kebenaran serta kesetiaan pada negara, Bisma dan Karna memilih setia pada negara yang diperangi para ksatria yang dicintai mereka. Pemeluk Hindu berada di jalur kesetiaan pada negara sebagai bagian dari ajaran. Sedangkan para pemeluk agama lain di Kabupaten Jembrana terbiasa dengan komitmen pada kesepakatan sebagai satu bangsa dan menerima negara republik.

Bagi kalangan Islam di Jembrana, agama dengan negara tidak dapat dipisahkan, perannya satu sama lain saling menguatkan. Muslim yang ada di Jembrana, sebagian besar memiliki asal-usul dari luar Bali, terutama Jawa dan Sulawesi beretnis Bugis. Entitas budaya, agama dan negara saling melengkapi satu sama lain, kehadiran negara menjadi penengah dan pelindung atas keberadaan manusia budaya dan agama yang dijalankan sebagai jalan spiritualitas.

## Hidup Beragama dengan Toleransi

Umumnya pemeluk Hindu dapat menerima kehadiran pemeluk agama lain, bahkan merasa menyatu hidup bersama (Arsana, 2021). Kehidupan antarpemeluk di Desa Loloan Timur dan Loloan Barat terbentuk sejak awal kehadiran diaspora Bugis. Mereka datang sebagai sisa pasukan, skuadron kesultanan Wajo. Daeng Nachoda, satu di antaranya (Sabara, 2018).[3] Sisa pasukan kesultanan Wajo menerima tanah karena berhasil membantu kerajaan Jembrana menahan serangan kerajaan Singaraja. Setelah itu terbentuklah perkampungan muslim di tengah masyarakat yang memeluk Hindu (Ali, 2021).

Desa Air Kuning diyakini sebagai poros pertama relasi antara muslim dengan Hindu di Jembrana. Selain Air Kuning, Desa Loloan menjadi pemukim kedua warga Bugis. Tokoh yang berperan Daeng Barewa yang memimpin pasukan Kesultanan Wajo untuk menghindari kejaran Belanda pascaperang dengan kerajaan di Sulawesi.

Bukti kedekatan hubungan Islam dan Hindu di Loloan disimbolkan dengan keberadaan Pura Majapahit dan Masjid Nurul Iman yang berdekatan. Kedekatan dan akulturasi budaya juga terlihat dengan penguasaan bahasa Melayu dan Bali serta tradisi *ngejod* yang masih dirawat hingga sekarang. Haji Husni mengatakan keduanya anaknya berbahasa Melayu dan berbahasa Bali. Haji Husni keturunan langsung Arya Kuta Waringin yang memutuskan masuk Islam dikenal dengan *kumpi nyuling*.[4] Tokoh ini beristri dengan

---

3 Eka Sabara, Daeng Nachoda: terdamparnya Skuadron Pasukan Kesultanan Wajodi Jembraa na pada Abad 17. Program Studi Sastra Inggris, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Tahun 2018.

4 Haji Husni meyakinkan bahwa tradisi *ngejod* yang dikenal di seluruh Bali, masih terpeliha-

perempuan Loloan.

Di Desa Medewi, pengelolaan Subak Air Satang menunjukkan wajah toleransi dan kerja sama antarumat Hindu dan Muslim. Subak di Bali, kelompok tani di Bali, diasosiasikan sebagai milik Bali Hindu. Tapi, menurut Masirin (2021), Ketua Subak Air Satang di Jembrana, empat subak dipimpin muslim. Masirin baru menggantikan Holirurahman yang juga muslim. Biasanya, jika ketua dipimpin muslim, wakilnya berasal dari Hindu. Ketua disebut *kelian* dalam Bahasa Bali, *petajuh* untuk wakil; *penyarikan* untuk sekretaris; *pentengan* untuk bendahara. Para anggota subak adalah para penggarap.

Tanah pada Subak Air Satang sebagian besar dimiliki bukan oleh penggarap. Dalam tradisi subak, ketika menanam padi penganut muslim biasa melakukan ritual-ritual penting bulanan, dua bulanan, dan tiga bulanan dalam bentuk selamatan. Ritual di bukan ketiga, tradisi subak biasa dilakukan dengan memotong ayam.

Pemerintah Kabupaten Jembrana memberikan subsidi pupuk dan bantuan *peodalan*, tepatnya bantuan BKK dapat dipakai untuk kegiatan yang disepakati subak, dalam hal distribusi dibagi secara adil dan merata pada seluruh petani, bantuan *peodalan* dapat digunakan oleh penganut Hindu sehingga tidak perlu menarik iuran khusus. Anggota Subak Air Satang sejumlah 100 orang dengan luas sawah 76 hektare, didirikan sejak 1963, di dalam subak yang anggotanya mayoritas Islam dibuatkan musala sebagaimana tradisi di subak yang keseluruhan anggotanya Hindu dibuatkan pura.

## Nilai Kehidupan lokal dan Antikekerasan

Penelitian ini menemukan nama FKUB sering disebut informan ketika membicarakan penyelesaian kasus-kasus keagamaan dan isu-isu lokal lain terkait hubungan antaragama dan etnis. Ajaran Ahimsa dalam Hindu menjadi modal penting dalam merespons isu-isu lokal. Ajaran ini termuat dalam kitab suci, dari Bagawat Gita sampai dengan Sarasamuccaya[5]. Dalam kitab suci itu, jalan hidup suci hanya sebatas tidak membunuh, tetapi juga tidak

---

ra sampai hari ini. Haji Husni merupakan takmir masjid Nurul Iman di periode sebelumnya, memiliki banyak kenangan dengan pemeluk Hindu di sekitar pura.

5 Menurut Santika, isi Saramuccaya hampir sama dengan Bagawat Gita. Hanya tokohnya saja tidak secara eksplisit muncul.

menyakiti atau mencelakkan, dan tidak menipu orang lain. Jalan Ahimsa bukan sekadar tindakan, tetapi pilihan hidup sejak dari pikiran, prinsip dasar memuliakan jiwa, termasuk di dalamnya tidak marah, tidak berbohong dan selalu berbuat suci (Santika, 2021).[6] Nilai dan tersedianya organisasi ikut memengaruhi pola hidup warga di Jembrana dan memilih jalan tanpa kekerasan. Warga di sini tengah berusaha menjadi pemeluk Islam sekaligus "orang Bali".

Haji Husni merupakan warga desa Banyubiru, tidak seperti Sebagian muslim Banyu Biru yang memiliki memori awal masuk di desa mendirikan Pura Majapahit secara bersama-sama dua pemeluk, kemudian mendirikan masjid Nurul Iman, dirinya berdarah Bali keturunan Arya. Haji Husni menegaskan keberadaan Pura Majapahit sebagai bangunan penting pertama justru saat mengunjungi KH Hamid Pasuruan, seorang ulama yang dikenal luas di Jawa menyampaikan ke Haji Husni bahwa Pura Majapahit adalah yang pertama di Jembrana.

## Praktik Keagamaan dan Kearifan Lokal

Praktik keagamaan muslim di Desa Medewi sangat lekat dengan model ritual masyarakat agraris. Selalu ada ritual dalam proses sejak menanam benih, tanam, perawatan sampai dengan panen dan pascapanen. Pada masa satu bulan padi, petani muslim membuat selamatan dengan menyajikan ketupat saja dan mendoakan padi tumbuh dengan baik, kemudian di bulan kedua dan ketiga, biasanya di ketiga, jika ada hama maka diselenggarakan lagi selamatan dengan membuat bubur merah putih kemudian mengucapkan doa tolak bala (Masirin, 2021).

Menurut Durorudin Mas'ud, peneliti senior di LIPI, Hindu dan adat Bali sering kali sulit dibedakan, bahkan oleh orang Hindu bali sendiri, sehingga apa yang mereka klaim sebagai agama adalah adat itu sendiri. Proses menjadi Hindu khas Bali, melewati sejarah Panjang dari sejak kedatangannya pada abad 4, di Kutai dan Salakanegara di Pulau Jawa bagian barat. Masifnya gerakan menolak *sampradaya* terutama Hare Krishna pada 2020-2021 dengan alasan tidak sesuai *dresta* Bali (adat, tradisi Bali) menunjukkan begitu

6 Sarasanuccaya, Tjok Rai Sidarta, diterbitkan oleh ESBE Buku, Denpasar 2019, halaman 63-67.

kuatnya pemeluk Hindu memegang tradisi sampai sulit memisahkannya dengan ajaran pokok agama.

Semua pemeluk agama yang ada di Jembrana cenderung menerima kebudayaan lokal Bali dan menjadi cara hidup yang kuat di lingkungan, berlaku ke dalam dengan memperlihatkan identitas kultural. Sebagaimana sifat budaya yang menyesuaikan diri dengan perubahan baik karena waktu, pengaruh dari luar maupun perkembangan pengetahuan dari dalam, masing-masing agama yang ada di Jembrana melakukan hal tersebut. Meskipun tidak seperti Hindu yang menyatu dengan adat, di mana sering kali pranata itu kental sekali sebagai adat namun dipahami agama oleh pemeluk Hindu Bali, pemeluk agama lain memperlihatkan kuatnya penyesuaian kultural sampai tercipta khas Jembrana.

Orang Bugis yang pertama kali datang ke Loloan dan Air Kuning berasal dalam perjalanan selanjutnya mentransformasi diri menjadi pedagang. Kehidupan keagamaan mereka dipengaruhi oleh para dai dari kalangan Melayu atau berbahasa Melayu, berkembang secara temurun hingga hari ini berbahasa Melayu. Belakangan bahasa diidentikkan dengan identitas agama. Melayu diidentikkan dengan Islam. Haji Husni dan anaknya, Zaki, yang sehari-hari berbahasa Melayu berlogat Pontianak, mengakui pengaruh dari Syarif Abdullah bin Yahya Alqadri, pendakwah dari Pontianak (Ali, 2021). Syarif Abdullah tiba di Loloan pada 1679 sebagai seorang ulama yang menetap mengajarkan Islam, disusul dengan kehadiran dai lain dari Trenggano.

Proses penyesuaian yang terjadi bagi kalangan Muslim Jembrana secara kultural menjadi penanda betapa budaya itu berkembang mengikuti proses dinamis, namun mengandung nilai yang khas. Pranata hidup masyarakat Loloan lebih kental Bugis, baik itu pada momen kelahiran, khitan, perkawinan sampai dengan kematian cenderung pada kultur Sulawesi, namun berbahasa Melayu karena itulah pengantar pengetahuan sejak kecil (Tafsil, 2021). Begitu pun dengan praktik keagamaan, amaliah pemukim Muslim di Jembrana sebagian besar melaksanakan maulidan, ziarah kubur dan mencerminkan corak keagamaan ala NU. Dengan demikian, cara beragama yang cenderung wasatiah, tawazun, tasamuh menjadi bagian hidup yang membentuk nilai keagamaan berpengaruh terhadap interaksi.

## Menjaga Nilai Moderasi Keberagamaan

I Ketut Sumiarta yang kerap terlibat di dalam kegiatan antarumat, menguatkan FKUB dalam semua aktivitasnya, menyampaikan tentang adanya WAG (*whatsapp group*) yang beranggotakan semua pemeluk agama. Khususnya mereka penyuluh antaragama atau mereka para rohaniwan yang tergabung di FKUB, pola interaksi yang cepat di sosial media cukup ampuh mendeteksi dini kejadian ketegangan yang melibatkan antarpemeluk. Ketegangan antarumat di Jembrana sering kali juga dipicu oleh kejadian di luar, misalnya India, termasuk dalam negeri di Surabaya (Gede, 2021).

Praktik keberagamaan yang toleran, saling berbagi satu sama lain, merupakan konsep luhur *nyama baraya*, relasi lebih spesifik antara pada konsep persaudaraan Hindu dengan muslim yaitu *nyama selam*, begitu juga dengan *nyama kristen*, *nyama china*. Menurut uru besar hukum adat Bali dari Fakultas Hukum Universitas Udayana, Wayan P. Windia seperti dikutip Balisaja.com (2017), meskipun pada konsep asalinya *nyama* merujuk pada persaudaraan karena hubungan darah, tetapi popularitas istilah tersebut berkembang menjadi pengikat perbedaan di Bali. *Nyama baraya* adalah kearifan yang terus dihidupkan sebagai cara hidup bersama dari entitas berbeda di Bali, pelembagaan kearifan ini cukup dikenal. Tidak ada salahnya juga jika *Nyama Slam* juga dikaitkan dengan hubungan darah, karena dari sejak era Mataram, banyak bangsawan beragama Islam yang dijadikan menantu oleh keraton Tabanan kemudian keturunannya membentuk perkampungan Jawa, Tunggul Sari (Ahmad, h. 2007). Faktor adanya pertalian darah dan sebab koneksi kawin mawin itulah yang memberikan kepercayaan diri para pemeluk Islam dari sejak era lama mengidentifikasi dirinya sebagai muslim Bali asli Bali.

Aspek moderasi paling kental terjadi di desa Medewi, Pekutatan Kabupaten Jembrana, seperti umumnya pertanian di Bali mengenal Subak. Moderasi beragama melekat pada kelembagaan Subak Air Tatang, kelompok tani dengan sistim subak selama ini dikenal kental menyatu dalam ritus dan kepercayaan Hindu Bali, namun di Medewi terdapat subak yang diketuai oleh muslim secara turun temurun.

Masirin saat ini menjadi ketua Subak Air Tatang, diangkat pada awal Januari 2020, adalah ketua atau disebut *kelian* ke sekian sejak didirikan pada 1963. Subak sendiri terdiri dari subak kering (ladang) dan subak basah (sa-

wah), medewi memiliki subak paling terkenal karena sawahnya yang bagus. Jumlah anggota subak Air Tatang berjumlah 100 orang dari 76 ha sawah basah. Masirin berbahasa Bali, para pemukim beragama Islam di Medewi berbahasa Bali, berbeda dengan muslim di Loloan, Air Kuning, Banyu Biru di Desa Baluk menggunakan Bahasa Melayu dalam keseharian. Masirin begitu juga dengan Ahmad Sukartawan sebagai orang Bali asli, mereka mengaku memiliki nama depan seperti pada umumnya, misalnya Nyoman, Putu, Nengah dan nama depan lainnya. Ahmad Sukartawan adalah anak dari kelian Subak Air Tatang di masa lalu, dua generasi sebelum Masirin, sekarang menjadi kepala sekolah MIN Jembrana (Masirin, 2021; Sukartawan, 2021).

Tradisi *ngejod* adalah pengikat di dalam kehidupan bersama, meskipun dirasakan oleh para pemeluk Hindu, saudara *Slam* mulai menjaga jarak karena isu makanan halal, saling memberi makanan saat hari raya mulai berkurang. Bagi pemeluk Hindu, apa pun yang diberikan oleh saudara dari muslim akan diterima, namun tidak demikian bagi umat Islam, kehati-hatian terhadap kehalalan kerap menjadi hambatan (Sumiarta, 2021). Namun di kalangan masyarakat Banyu Biru, tradisi *ngejod* tetap berlangsung meskipun makanan yang diberikan pemeluk Hindu terbatas pada kue yang tidak berhubungan dengan daging (Husni, 2021).

Prasangka mulai muncul di kalangan Hindu di beberapa tahun terakhir, kekawatiran pascabom Bali dan maraknya ceramah pedas di media sosial menciptakan kecemasan baru, pun juga terjadi di Jembrana. Untuk menekan pengaruh negatif dari datangnya penceramah keras provokatif dari luar, para pemuka Hindu dan pihak Kementerian Agama melakukan komunikasi dengan kalangan muslim bagaimana menjaga Jembrana dari pengaruh HTI dan gerakan segregasi menggunakan isu agama (Santika, 2021).

## Modal Sosial dan Kesadaran Hidup Bersama

### *Perjumpaan dan Simbolisme*

Menurut Ustaz Tafsil, Ketua MUI Jembrana yang tinggal di Loloan Timur, mengatak Loloaan memiliki komposisi pemeluk Islam dengan Hindu cukup seimbang, bahkan di satu lingkungan mayoritas muslim. Perjumpaan antara dua pemeluk jauh sebelum Indonesia merdeka, membentuk pola hubungan harmoni sejak kedatangan pasukan Bugis dan Makassar, pascaperjanjian

Bongaya Sulawesi Selatan, karena jasanya membantu Raja Jembrana menghadapi kerajaan lain maka diberi tanah kemudian membangun pemukiman. Pemukiman Loloan menjadi area strategis sejak Loloan Barat menjadi pusat perdagangan, pun juga hidup berkembang bersama sejak kecil sampai beranak-pinak di belakang hari tumbuh rasa memiliki satu sama lain. Meskipun begitu, dua entitas Hindu dan Muslim justru berkembang evolutif tanpa banyak memengaruhi satu sama lain. Bahkan, pemukim muslim tidak menggunakan bahasa Bali dalam keseharian namun belajar ketika di sekolah. Tidak berbahasa Bali bukan sengaja menolak, namun hingga generasi Tafsil, bahasa keseharian di lingkungan dan pembelajaran agama menggunakan bahasa Melayu.

Selain Pura Majapahit yang berdampingan dengan masjid Nurul Iman di Banyu Biru, masa kecil para menganut Islam di Loloan mengenal tradisi *Ngampek*, melakukan kegiatan bersama, olahraga menyatu. Menurut Tafsil, proses menurunnya kesemarakan dalam aktivitas bersama bukan karena pengaruh perbedaan agama yang meruncing tetapi karena perkembangan teknologi dengan gawai telah menggantikan banyak sekali kegiatan bersama. Dulu gampang membuat klub bola, olahraga bersama, sekarang sulit, begitu juga dengan kegiatan tontonan biasa joget bersama, tontonan juga berkurang, termasuk *mewarung* yaitu kegiatan nongkrong di warung pun mulai jarang dilakukan (Tafsil, 2021). Bukti belum sepenuhnya hilang terhadap kesadaran hidup bersama dapat dilihat dari keinginan saling membantu masih tinggi, misalnya penggalangan darah lintas agama dilakukan melalui WAG. Hal tersebut menjadi bukti bahwa format kebersamaan saja yang bergeser, tidak dengan kesadaran untuk selalu membantu satu sama lain. Munculnya Komunitas Relawan Jembrana (KRJ) menghimpun dana dan disumbangkan kembali kepada mereka yang tidak mampu tanpa sekat agama, diberikan kepada mereka yang sakit juga.

Kesadaran bersama itu juga dibangun oleh kegiatan yang melibatkan pengamanan dari dua unsur, misalnya Pecalang dengan Barisan Serbaguna Nahdlatul Ulama (Banser NU), baik saat Nyepi maupun kegiatan hari raya keagamaan lainnya. Keterlibatan unsur berbagai agama tergambar pada momen Nyepi di Bale Agung diikuti oleh semua unsur tanpa harus mengikuti ritual keagamaannya. Perimbangan pada kekuasaan itu juga menjadi bagian dari simbol adil dan seimbang di antara masyarakat Bali, mung-

kin juga karena faktor keberuntungan dari dinamika politik. Saat pemilihan DPD RI, suara mayoritas Hindu menumpuk pada Arya Weda Karna, sehingga suara dari umat Islam menyatu pada Bambang maka Bali memiliki perwakilan daerah yang beragama Islam. Secara politik, umat Islam di Jembrana cukup memberi warna, anggota DPRD Jembrana mencapai 6 orang, serta beberapa desa memiliki kepala desa beragama Islam meskipun terjadi kompetisi sengit. Demikian rekatnya antaretnis dan agama di Jembrana, komitmen kebangsaan antarkelompok terpelihara dengan baik. Dulu sempat mau dimasuki oleh penceramah yang memuji HTI, namun muncul penolakan bahkan demonstrasi oleh remaja masjid, takmir penanggung jawab dicopot (Tafsil, 2021). Keteladanan yang ditunjukkan oleh KH. Ali Bafaqih membuat pemeluk Islam di Jembrana menghormati perbedaan dan memelihara kerukunan. Tidak mudah bagi pihak lain dari luar untuk memengaruhi dan merusak kehidupan sosial di Jembrana.

Ketua FKUB Bali menyatakan:

> Jika ada upacara keagamaan yang berpotensi menyinggung agama lain, melalui FKUB kita undang tokoh masing-masing untuk ketemu kita upayakan agar hal-hal buruk tidak tampak (...2021).

Relasi Muslim-Hindu di Loloan sempat merenggang ketika tersiar kabar orang tua di sebagian warga muslim mengajarkan anaknya tidak bergaul dengan orang Hindu. Ketua PHDI sekaligus Ketua FKUB mengecek kebenaran tersebut dan membuat pertemuan untuk mencegah dampak buruk. Pertimbangan para tetua di kabupaten Jembrana yang terbiasa hidup bersama melihat jika kerenggangan terjadi, ke depan dianggap "kurang pas", sehingga urusan (gesekan) pribadi namun melibatkan dua unsur atau entitas berbeda harus diantisipasi agar tidak berkembang menjadi ketegangan kelompok.

Penguatan moderasi dalam konteks lokal jenius, seperti yang dibahas sebelumnya tentang *krama subak* adalah konstruksi budaya dari satu agama kemudian menjadi milik bersama. Keteladanan juga dalam hal ini terjadi, mereka tetap melaksanakan *Ngusaba* semacam upacara tahu ritual tingkat desa membersihkan desa. Dengan doa yang berbeda upacara membersihkan desa dilakukan oleh umat muslim di Medewi dan Banyu Biru. Gerakan

kekinian juga penting, misalnya gerakan Satriya Kita Pancasila, penyatuan pemuda dari berbagai agama di Jembrana mengampanyekan kembali nilai Pancasila dan kerekatan kebangsaan.

## Mengatasi Tantangan Memanfaatkan Peluang

PHDI Jembrana mendapat fasilitas memadai dari pemerintah kabupaten. Rangkap jabatan sering memengaruhi tingkat keaktifan organisasi. Sebagian pengurus memiliki jabatan di institusi pemerintah. Kondisi serupa terjadi di FKUB. Ini dinilai memengaruhi kerja dua organisasi tersebut optimal dalam mendukung pembinaan kerukunan umat. FKUB bahkan belum memiliki staf khusus yang membantu tugas-tugas pengurus (Arsana, 2021).

Di antara tantangan meningkatnya potensi ketegangan berasal dari datangnya warga atau komunitas dari luar Bali. Mereka belum tentu memahami cara hidup warga Jembrana, cara berkomunikasi dan menyikapi perbedaan. Lebih rumit lagi, jika figur yang datang masuk membawa misi keagamaan, atau perilaku keagamaannya bertolak belakang dengan cara pandang masyarakat yang sudah ada. Menurut Arsana, para pendatang seharusnya diberitahu sejarah Jembrana, Bali. Tujuannya mencegah potensi konflik. Dengan demikian, komitmen kebangsaan itu tidak hanya lisan tetapi juga perbuatan, memelajari sejarah Indonesia, Bali dan Jembrana di dalamnya harus hidup dan menjadi bagian *local genius*. Mereka yang hidup di Jembrana harus memahami bahwa semua dipersatukan oleh nasib yang sama, semangat yang sama.

Paradoks kerukunan di internal keagamaan terjadi di internal Hindu, kehadiran gerakan kesadaran Krishna di kalangan pemeluk Hindu bali menjadi masalah serius. Berbagai kejadian di Denpasar, Badung dan daerah lain, berimbas juga di Jembrana, meskipun tidak ada gerakan massa yang menyasar langsung penganut Hare Krishna. Penolakan juga terjadi di kalangan tokoh agama Hindu di Jembrana, seperti kalangan Hindu tradisi lainnya menganggap Hare Krishna berbeda dengan *dresta* Bali. Menurut I Komang Arsana, Hare Krishna sendiri tidak mengajarkan agama Hindu. Hanya sebagai sempalan kecil yang ajarannya tidak sesuai dengan kehinduan (hinduisme). Hare Krishna tidak utuh di dalam memahami dan menjelaskan ajaran Hindu, sedangkan Hindu *dresta* Bali mengajarkan utuh dari tuhan yang satu, dan terhubung sampai dengan leluhur.

Leluhur sendiri dalam perspektif pemahaman Hindu *dresta* Bali, adalah mereka yang berasal dari mahakuasa masuk ke dalam jiwa (*atman*), setelah kembali menjadi Dewa Hyang setelah melalui proses penyucian. *Atman* dan *brahman* itu ada dalam diri manusia, dihalangi badan kasar (fisik), *pancahabutha*.

## Penutup

Masyarakat Kabupaten Jembrana memiliki ragam relasi yang khas mencerminkan cerminan kedamaian dan harmonik dengan berbagai permasalahan yang kerap datang menjadi tantangan di era modern. Nilai hidup bersama dan kesungguhan untuk terus merawat tampak di berbagai sisi masyarakat, moderasi beragama nyata hidup dalam relasi sosial dan keberagamaan. Sedangkan bangunan konseptual mengenai moderasi beragama dapat dipahami di tengah masyarakat Jembrana dengan baik karena mereka telah mengenalnya dalam keseharian dalam istilah yang berbeda. Berikutnya tentang implementasi sikap moderat dan kesadaran lingkup keberagamaan antarpemeluk, menggali tindakan dan praktik keagamaan moderat terus berlangsung dalam berbagai segmen kehidupan. Politik dan penetrasi ideologi sesekali mengganggu, permainan simbol keagamaan kerap muncul mengingat Jembrana adalah pintu gerbang Bali, mereka terus waspada, semua pihak sedia untuk meredam berbagai letupan kecil.

Kelembagaan desa di Bali adalah satu keunikan tersendiri, tidak hanya menjadi identitas namun bagian penting dari pembangunan masyarakat Bali itu sendiri. Intervensi apa pun yang berdampak terhadap berkurangnya otonomi dan independen dari desa adat hanya akan menghilangkan kekuatan masyarakat Bali itu sendiri. Perlu dipertimbangkan untuk menjaga jarak yang cukup terhadap anasir di luar desa adat itu sendiri, kepentingan kekuasaan maupun kepentingan investasi pariwisata ataupun industri. Desa adat harus tetap berada dalam ekosistem yang natural, dan berdaya dengan dirinya sendiri seberapa pun itu terkesan lambat namun itu menjadi tulang punggung kebudayaan Bali.

Adapun FKUB, karena memang sifatnya sebagai penunjang terhadap kepentingan negara, maka relasi dengan pemerintah justru harus diperkuat dengan menawarkan kegiatan yang berkelanjutan. Sifat dari FKUB juga simbol kerukunan, maka kegiatan yang bersifat simbolis juga tetap perlu dila-

kukan, hanya saja perlu ditunjang dengan program berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

Ahuja, R (1993). *Indian Social System*. Rawat Publications: New Delhi India.

Bawono, H. (2017). *Arsip Keagamaan*, *Narasi-Tandingan dan Memori Kolektif Keragaman Agama di Indonesia*. http://jurnalkearsipan.anri.go.id/volume 12 no 1 2017.

Bungin, B (2020). *Post Qualitative Social Research Methods.* Kencana Jakarta.

Coser, A L (1956). *The Functions of Social Conflict.* New York: The Free Press.

Donder, I K (2018). *Keesaan Tuhan dan Peta Wilayah Kognitif Teologi Hindu: Kajian Pustaka tentang Pluralitas Konsep Teologi dalam Hindu*. Jurnal Harmoni Volume 14, Nomor 2, Mei-Agustus 2015;

Drakeley, S (2005). *The history of Indonesia.* London, UK: Greemwood Press.

Gata, I W (2018). *Filosofis Sampradaya Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Hindu di Bali (Studi Kasus di Desa Sidatapa*, *Kabupaten Buleleng)*. Jurnal Genta Hredaya, STHN Mpu Kuturan Vol 2, No 1 (2018).

Halbfass, W (1991). *Tradition and reflection. Explorations in indian thought*. Albany: Suny Press.

Kardika, I N (2019). *Tattwa Siwa Siddhanta Indonesia In Theology Of Hindu.* Jurnal SPHATIKA vol X no 1 2019*;* Lelono, Joko, Martinus (2018). *In the name of existence: Identity politics of the hare Krishna consciousness in Yogyakarta*. Proceeding of the ICSEAS 2017 The 2nd International Conference on South East Asia Studies, UGM Digital Press Social Sciences and Humanities (2018) 1: 69-75.

Kerepun, K M (2007). *Mengurai benang kusut kasta: membedah kiat pengajegan kasta di Bali/Made Kembar Kerepun*. Denpasar: Panakom Publishing.

Klem, B (2007). *Hand-out Terminology*. Wageningen.

Knott, K (1998). *Hinduism: A Very Short Introduction. Oxford University Press*.

Menchik, J (2016). *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism (Cambridge Studies in Social Theory*, *Religion and Politics)*. Cambridge University Press.

Miles, M B & Huberman, A M (2014). *Qualitative Data Analysis: An expanded source book (2nd ed)*. SAGE Publications.

Nagafuchi, Y (2017). *The Grand Rituals at Besakih Temple in Bali and the Historical Moment of Hinduism in Indonesia*. Center for Southeast Asias, Kyoto University. CSEAS Newsletters No 77.

Parson, T (1991). *The Social System*, 2nd edition. Routledge.

Patrick, G (2003). *Religion and Subaltern Agency-A Case-study of Ayya Vali, A Subaltern Religious Phenomenon in South Tiruvitankur*. Department of Christian Studies, University of Madras.

Putra, K (2021). *Pro Kontra Antara Catur Wangsa*, *Kasta*, *dan Catur Warna.* dalam https://www.komangputra.com/pro-dan-kontra-antara-catur-wangsa-kasta-catur-warna.html. Diunduh 12 Januari 2021.

Negara, M J (2018). Teologi Vaiśnavadalam Pustaka Bhagavad-Gītā (Tinjauan Nilai pendidikan Sosio-religius). *Pasupati*, *5*(2), 178-195.

Rahardjo, B, dkk (2004). *Gambaran Keselamatan dalam Agama Hindu*: *Makna Keselamatan Dalam Perspektif Agama-Agama.* Yogyakarta: Universitas Sanata Darma.

Ritzer, G (2004). *Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Saldana, J (2013). *The Coding Manual for Qualitative Researchers*. SAGE Publications.

Samiyono, D (2013). Resistensi Agama dan Budaya Masyarakat. *Wali Sanga: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, *21*(2), 251-270.

Sanuri (2012). *Dinamika Wacana Pluralisme Keagamaan di Indonesia*. Jurnal Religio, UIN Sunan Ampel, Volume 2, Nomor 1, Maret 2012.

Subawa, P I M (2018). Bali dalam Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan di Tengah Perkembangan Pariwisata. *Jurnal Pariwisata Budaya*, vol 3, nomor 1, Tahun 2018.

Scott, J C (2000). *Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sulistyo & Basuki (2006). Metodologi Penelitian. Jakarta: Penerbit Wedatama Widya Sastra Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

Suadnyana, I B P E, & Darmawan, I P A (2020). Nilai Pendidikan Agama Hindu Dalam Lontar Siwa Sasana. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, *3* (2), 371-391.

Suitela Vanny (2013). *Inter-Religious Dialogue Within The Hare Krishna Mandir Community Yogyakarta*. AL ALBAB-Borneo Journal of Religious Studies (BJRS) Volume 2 No 1 Juni.

Segara, I N Y (Ed) (2017). *Dimensi tradisional dan spiritual agama Hindu*. Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI.

Wardhana, M (2007). Karma & Reinkarnasi: Dari Perspektif Vedanta dan Sains. Denpasar: Yayasan Institut Bhaktivedanta Indonesia.

Yanthi, P S W, & Widiasavitri, P N (2018). Hubungan Antara Tingkat Keberagamaan dan Interaksi Sosial Asosiatif Pada Remaja yang Mengikuti Gerakan Kesadaran

Krishna (Hare Krishna) di Bali. *Jurnal Psikologi Udayana*, *5*(1), 110.

Wibawa, I P S, Martha, I W, & Diana, I K D (2020). Menakar Kewenangan Dan Tata Hubungan Kelembagaan Antara Majelis Desa Adat Dengan Desa Adat Di Bali. *Vidya Wertta: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia*, *3* (1), 96-105.

Wijaya, N (2012). "Melawan Ajeg Bali: antara Eksklusifitas dan Komersialisasi," dalam http://metrobali.com/melawan-ajeg-bali-antara-eksklusivitas-dan-komersialisasi/, dunduh 13 Januari 2021.

# Toleransi di Kota Timah

Reslawati dan Eka Gustiana

## Pendahuluan

Fenomena ekstremisme agama yang merupakan salah satu wujud keberagamaan yang berlebihan, memperlihatkan perkembangannya yang semakin masif di Indonesia. Meski jumlahnya sangat kecil dibanding Muslim Indonesia yang mayoritas moderat, tapi indoktrinasi paham keagamaan ekstrem yang sangat militan membuat kita harus ekstra waspada. Lengah sedikit, maka paham-paham intoleransi dan radikalisme akan terus bermetamorfosis menjadi aksi terorisme. Perkembangan ini harus diwaspadai karena dapat menggerus nilai-nilai kebangsaan yang sudah dibangun serta mengancam eksistensi Pancasila. Kehadiran Pancasila pertama-tama justru melindungi dan menjamin keberagaman identitas primordial masyarakat bangsa Indonesia. Dalam arti itu, Pancasila menuntun bangsa ini untuk bersikap inklusif, moderat dalam menampilkan identitas kesukuan dan keagamaan kita, toleran dan gotong royong sebagai kepribadian khas bangsa Indonesia yang takdirnya adalah majemuk. Karena itu fenomena radikalisme agama merupakan tantangan kebangsaan.

Ekstremisme adalah ibarat sebuah gerak sentrifugal dari sumbu menuju salah satu sisi paling ekstrem. Memahami lanskap ekstremisme, atau keberagamaan garis keras, baik secara konseptual maupun empiris, menjadi penting untuk dapat lebih memahami signifikansi penguatan visi moderasi beragama. Dalam konteks beragama, pandangan, sikap, dan perilaku ekstrem

akan mendorong pemeluknya untuk menolak pandangan kebenaran orang lain, dan bersikukuh dengan tafsir kebenarannya sendiri. Dari sinilah muncul term *garis keras*, atau ekstremisme, yang dikaitkan dengan praktik beragama. Salah satu ciri awal ekstremisme seseorang dalam beragama adalah bahwa ia memiliki pandangan, sikap, dan perilaku fanatik terhadap satu tafsir keagamaan saja, seraya menolak pandangan lain yang berbeda, meski ia mengetahui adanya pandangan tersebut.

Lebih dari sekadar menolak, seorang penganut garis keras lebih jauh bahkan akan mengecam dan berusaha melenyapkan kehadiran pandangan orang lain yang berbeda tersebut. Baginya, cara pandang hitam putih dalam beragama itu lebih memberikan keyakinan ketimbang menerima keragaman tafsir yang dianggap menimbulkan kegamangan. Itu mengapa, meski jumlahnya minoritas, seorang ekstremis atau penganut garis keras umumnya lebih 'nyaring' dan lebih mampu menarik perhatian publik, ketimbang seorang moderat, yang cenderung diam dan reflektif. Kemenangan kaum ekstremis bukan karena jumlahnya yang besar, melainkan karena kaum moderat mayoritas yang diam (*silent majority*).

Secara konseptual, pandangan dan praktik keagamaan seorang yang ekstrem sering muncul dari cara pandang teosentris secara ekstrem dalam beragama, dan mengabaikan dimensi antroposentrismenya. Pandangan teosentris mendoktrin penganutnya untuk memaknai ibadah sebagai upaya "membahagiakan" Tuhan, melalui sejumlah ritual ibadah, dalam pengertiannya yang sempit. Imajinasi "demi membela Tuhan" yang tertanam dalam cara berpikir, membuat kelompok garis keras memaknai ibadah dan agama hanya dalam perspektif "memuaskan hasrat ketuhanan" sembari mengabaikan nilai dan fungsi agama bagi kemanusiaan (Hilmy, 2019). Jika cara pandang, cara berpikir atau paradigma ekstrem dalam beragama menjelma menjadi sebuah ideologi yang bersifat sosial politik, maka disebutlah sebagai radikalisme. Fenomena ekstremisme beragama akan mengganggu harmonisasi umat beragama. Kerukunan umat beragama yang merupakan cita-cita hampir semua penganut agama akan terkoyak jika dalam masyarakat masih bersemayam cara pandang yang ekstrem.

Di ujung ekstrem lainnya, muncul pandangan keagamaan yang liberal. Cara pandang ini mencirikan adanya penolakan terhadap hal-hal yang bersifat ilahiah atau ketuhanan. Corak khas pandangan ini adalah mendewakan

akal dan mengabaikan ritual hingga hukum-hukum Tuhan. Kekhasan ini sangat berbahaya jika telah merasuki sistem politik dan sistem ekonomi Indonesia. Karena akan berakibat sistem politik dan ekonomi di Indonesia tidak menciptakan keadilan sosial. Menghadapi situasi sosial keagamaan seperti ini maka dibutuhkan keberagamaan yang moderat harus dipromosikan. Namun hal ini bukan perkara yang mudah. Tantangan yang dihadapi tidaklah kecil. Namun, harus diwaspadai bahwa kalau umat beragama gagal mewujudkannya, konflik horizontal antarwarga negara akan mudah tersulut, persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa pun terancam tercabik-cabik. Untuk itulah perlu ada satu formula dan kesepakatan bersama sebagai perekat antara semangat beragama dan komitmen berbangsa. Itulah moderasi beragama, yang bertujuan untuk menyelaraskan relasi beragama dan bernegara.

Secara operasional konsep moderasi beragama bukanlah sesuatu yang baru, namun sudah ada sejak lama ada di masyarakat, dan menjadi praktik keberagamaan di masyarakat. Yakni sikap terbuka, menghormati kepada kelompok lain, dan tidak mempertentangkan masalah keagamaan dengan persoalan kebangsaan. Hanya saja tidak seluruh komponen masyarakat mudah mencerna konsep moderasi beragama, sehingga selalu saja ada juga pihak-pihak tertentu di masyarakat yang kritis dan bahkan menolaknya. Studi tentang Fungsi Masjid sebagai Pusat Pendidikan Moderasi Beragama (Farida & Silvita, 2020) memperlihatkan penolakan terhadap konsepsi moderasi beragama telah menyisakan pekerjaan rumah yang cukup besar dalam mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat. Bisa jadi inilah yang menjadi penyebab terjadinya berbagai peristiwa kekerasan berbasis agama. Penyebabnya karena keberagamaan yang ekstrem, diperparah dengan minimnya ruang dan aktivitas perjumpaan yang melibatkan ragam identitas keagamaan. Artinya, semakin sedikit berinteraksi maka akan semakin tinggi tingkat kecurigaan dan salah paham antarumat beragama.

Sebagai bagian dari warga negara, setiap umat beragama memiliki kewajiban dan komitmen untuk menjaga keindonesiaan, dengan senantiasa memperkuat rasa persatuan dan kesatuan, serta memupuk rasa sebangsa dan setanah air, apa pun agama, suku, dan etnisnya. Misi ini mendapat tantangan dengan berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras

dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu dibutuhkan cara pandang, sikap dan praktik keberagamaan yang moderat.

Untuk mengurangi konflik yang mungkin terjadi sebagai akibat dari pemahaman agama yang ekstrem ataupun yang liberal dibutuhkan sebuah kebijakan nasional yang berbasis pada model-model moderasi beragama yang sudah lahir dan tumbuh di masyarakat. Gerakan merajut toleransi dan kebinekaan di negeri ini terus tumbuh. Tak hanya dalam wadah dialog yang merupakan ruang perjumpaan masyarakat lintas agama, suku dan ras, melainkan juga dalam aksi solidaritas kemanusiaan. Aksi terkini, di beberapa daerah masyarakat menginisiasi membangun monumen sebagai simbol perdamaian, seperti Monumen Merpati Perdamaian di Kota Padang, Tugu Perdamaian di Kota Sampit, Tugu Cinta Damai di Tanjung Selor Kalimantan Utara, dan lain-lain (Kompas, 31 Desember 2018). Aneka tugu atau monumen perdamaian, bahkan moral, sebagai simbol diam itu sebagai pengingat pentingnya merajut dan menjaga toleransi.

Dari seluruh pelosok negeri, simpul-simpul toleransi mengalir merajut temali kerukunan. Seperti temuan penelitian Subagia (2016), umat Hindu dan Islam di desa Keramas Kecamatan Blahbatu Gianyar Bali hidup rukun berdampingan. Untuk merekatkan kerukunan dibangun toleransi aktif yang wajib dijalankan oleh kedua kelompok. Saat umat Hindu melaksanakan kegiatan keagamaan hari raya Nyepi, umat Islam ikut serta dalam mengarak ogoh-ogoh dan menyumbangkan minuman serta makanan untuk umat Hindu. Sebaliknya, saat kaum Muslim menjalankan ibadah puasa, tetangga Hindu menghormatinya dengan mengeluarkan larangan untuk tidak makan, minum dan merokok di depan umat Islam yang sedang menjalankan ibadah tersebut. Saat umat Islam merayakan Maulid Nabi, umat Hindu akan memberikan sumbangan berupa makanan, dan ketika Idulfitri, umat Hindu datang bersilaturahmi. Ini menandakan bahwa sikap saling menghargai merupakan ruang perjumpaan kerukunan sekaligus menjadi pranata sosial yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang dialog manakala terjadi persoalan sosial yang melibatkan kedua pihak.

Sesungguhnya model moderasi beragama di desa Keramas juga mudah dijumpai di tempat lain. Pada hari-hari raya keagamaan, seperti Idulfitri, di berbagai sudut pelosok desa di Jawa negeri mengenal istilah *ujung*, kegiat-

an silaturahmi beranjang sana ke tetangga dan kerabat sekaligus untuk saling memaafkan, diikuti oleh semua lapisan masyarakat tanpa mengenal batas agama. Begitu juga ronda bersama, saling menjaga tempat ibadah, dan saling melayat jika ada warga yang meninggal. Selanjutnya model lain ditemukan oleh Huda (2015) di Desa Balun Lamongan. Desa Balun adalah desa yang paling unik di Kabupaten Lamongan, bahkan mungkin di Indonesia. Di desa ini terdapat tiga agama yang dipeluk oleh warganya, yaitu: Islam, Hindu, dan Kristen, namun relasi kehidupan sosio-kultur dan sosio-religi relatif damai dan penuh toleransi di tengah perbedaan agama, sehingga desa ini dikenal dengan "Desa Pancasila" atau "Kampung Inklusif". Tentu fenomena ini menarik karena di tengah perbedaan agama mereka dapat membangun tata kehidupan sosio-kultur yang damai dan harmonis. Sementara di daerah lain perbedaan agama atau keyakinan menjadi legitimasi atau pemicu terjadinya konflik dan kekerasan antar kelompok di masyarakat.

Tidak jauh dari ibukota negara Jakarta, berjarak kurang lebih 20 kilometer, terdapat Kampung Sawah ( sebuah wilayah di Kota Bekasi) memiliki model toleransi yang sangat unik, karena kerukunan telah menjelma menjadi adat istiadat. Masyarakat Kampung Sawah, yang didominasi oleh etnis Betawi, dan biasanya etnis Betawi identik dengan keislamannya, terlatih hidup dalam perbedaan agama satu sama lain. Pelajaran menjaga hidup bersama dapat dipetik dari warga Islam, Kristen Protestan, dan Kristen Katolik di pinggir Jakarta ini. Bagi orang-orang Betawi di sini, toleransi bukan saja slogan tapi sudah menjadi adat. Tiap warga baru yang datang bisa dengan mudah merasakan kerukunan di sini, cukup dengan menerima warna-warni perbedaan sebagai kekayaan bersama.

Di Kampung Sawah, tiga tempat ibadah terletak berdekatan satu sama lain, semuanya berada di Jalan Raya Kampung Sawah, Kelurahan Jatimurni hingga Kelurahan Jatimelati, Bekasi, Jawa Barat. Tiga tempat ibadah itu adalah Masjid Agung Al Jauhar Yayasan Pendidikan Fisabilillah (Yasfi), Gereja Kristen Pasundan (GKP) Jemaat Kampung Sawah, dan Gereja Katolik Santo Servatius. Bila ada potensi konflik antarumat beragama yang terdeteksi, maka potensi itu segera dibicarakan oleh pihak pengurus rumah ibadah yang ada di kampung ini. Konflik pun bisa langsung diredam sejak dini. Saat Natal tiba, warga Muslim akan membantu mengamankan lingkungan. Bila salat Idulfitri atau Idul Adha, warga Kristiani juga turut mengamankan. Bila

ada acara di gereja namun jemaat kurang lahan parkir, maka jemaat dipersilakan parkir di halaman masjid. Untuk menjaga ketenteraman bersama, takmir masjid maupun pengurus gereja akan melarang ceramah-ceramah agama yang menyulut suasana permusuhan antarumat beragama.

Beberapa model di atas merupakan sebuah contoh, tentu model yang hampir sama banyak ditemukan di berbagai belahan Indonesia. Seluruh model moderasi beragama yang berbasis kearifan lokal tersebut merupakan sebuah ikhtiar masyarakat agar harmoni tetap terjadi. Upaya-upaya ini menarik untuk dikaji. Kajian difokuskan pada konsepsi moderasi beragama di masyarakat, pentingnya moderasi beragama dan implementasi di lapangan.

Kata *moderasi* berasal dari bahasa Latin *moderâtio*, yang berarti kesedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan), dan seimbang. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), kata *moderasi* didefinisikan sebagai pengurangan kekerasan, atau penghindaran keekstreman. Maka, ketika kata *moderasi* disandingkan dengan kata *beragama*, menjadi *moderasi beragama*, istilah tersebut berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan, atau menghindari keekstreman dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragama. Dalam bahasa Arab, padanan moderasi adalah *wasat* atau wasatiah, yang berarti tengah-tengah. Kata ini mengandung makna iktidal (adil) dan tawazun (berimbang). Orang yang menerapkan prinsip wasatiah bisa disebut *wāsiṭ*. Kata *wāsiṭ* bahkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan tiga pengertian, yaitu: pertama *wasit* berarti penengah, atau perantara (misalnya dalam perdagangan, bisnis); makna kedua adalah *wasit* berarti pelerai (pemisah, pendamai) antara pihak-pihak yang berselisih; dan makna ketiga adalah: *wasit* berarti pemimpin di pertandingan (seperti wasit sepakbola, badminton, atau olahraga lainnya). Adapun lawan kata moderasi adalah *taṭarruf*, yang dalam bahasa Inggris mengandung makna *extreme.* Dalam bahasa Arab, setidaknya ada dua kata yang maknanya sama dengan kata *extreme*, yaitu *al-guluw*, dan *tasyaddud.* Dalam konteks beragama, pengertian "berlebihan" ini dapat diterapkan untuk menyebut orang yang bersikap ekstrem, yaitu melampaui batas dan ketentuan syariat agama. Dengan demikian, tidak ekstrem, adalah salah satu kata kunci paling penting dalam moderasi beragama, karena ekstremitas, dalam berbagai bentuknya, diyakini bertentangan dengan esensi ajaran agama dan cenderung merusak tatanan kehidupan bersama, baik dalam kehidupan beragama maupun bernegara.

Dengan menimbang pengertian kebahasaan dan sejumlah kata kunci tersebut, maka moderasi beragama dapat dirumuskan sebagai: "Cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama, dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama, yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa" (Kemenag RI, 2019). Ada beberapa pesan kunci dalam definisi tersebut. Frasa " dalam kehidupan bersama" mengindikasikan bahwa penguatan cara pandang, sikap dan praktik beragama yang dimaksud dalam penguatan moderasi beragama terutama terkait dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian frasa "mengejawantahkan esensi ajaran agama" juga mengindikasikan bahwa moderasi beragama menekankan adanya pemahaman dan praktik beragama yang substantif, yang selalu mengedepankan esensi setiap ajaran dan ritual agama. Dalam kerangka berpikir urgensi moderasi beragama, maka salah satu esensi ajaran agama yang paling luhur adalah martabat kemanusiaan. Itu mengapa bahwa frasa berikutnya menekankan pentingnya "melindungi martabat kemanusiaan.

Pesan kunci lainnya tecermin dari frasa "membangun kemaslahatan umat". Ini menegaskan bahwa praktik kehidupan beragama harus diproyeksikan untuk menghadirkan kemaslahatan umat. Karena praktik beragama harus melandaskan prinsip adil, seimbang/berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa". Frasa menaati konstitusi menegaskan tidak dibenarkannya adanya cara pandang, sikap dan praktik yang mengatasnamakan agama tapi melanggar ideologi dasar negara, Pancasila, UUD 1945 yang sudah menjadi kesepakatan bangsa.

## Kondisi Masyarakat Pangkal Pinang dan Keberagamaan

Kota Pangkal Pinang merupakan ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki luas wilayah 104,405 $km^2$. Apabila dibandingkan dengan wilayah Provinsi, luas wilayah kota ini hanya sebesar 0,72% dan merupakan wilayah kota/kabupaten terkecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara astronomis Kota Pangkal Pinang terletak antara 02 03'-02 10' Lintang Selatan dan 106 02'-106 12' Bujur Timur. Sedangkan berdasarkan posisi geografis, Kota Pangkal Pinang memiliki batas-batas: Utara dan Barat-Kabupaten Bangka; Selatan-Kabupaten Bangka Tengah; Timur-Laut

Cina Selatan. Temperatur udara rata-rata wilayah Pangkal Pinang pada tahun 2020 adalah sekitar 27,10 C. Kelembaban udara rata-rata sebesar 83. Lama penyinaran matahari pada tahun 2020 sebesar 47,4%. Tekanan udara rata-rata yaitu 1005,6 milibar. Rata-rata kecepatan angin pada tahun 2020 yaitu 2,5 m/s.

Kota Pangkal Pinang memiliki banyak etnis, terdiri dari etnis Melayu dan Tionghoa suku Hakka yang datang dari Guangzhou, serta ditambah sejumlah suku pendatang seperti Batak, Minangkabau, Palembang, Sunda, Jawa, Madura, Banjar, Bugis, Manado, Flores, dan Ambon. Di Kota Pangkal Pinang suku paling dominan adalah suku melayu. Suku lainnya tersebar di wilayah Kota Pangkal Pinang lainnya, seperti Kampung Melayu, Kampung Cina, dan Kampung Jawa. Orang melayu kebanyakan bermukim di Kampung Dalam, Kampung Opas dan Jalan Balai. Pemukiman orang Cina di Kampung Bintang dan Gang Singapur. Pemukiman orang Jawa di sekitar Kompleks Kantor Gubernur. Pemukiman orang Bugis kebanyakan di tepi pantai. Namun saat ini sudah ada percampurbauran antara suku bangsa tersebut, dan terjadi pembauran di antara mereka, bahkan terjadi perkawinan di antara mereka.

Pada 1779, Sultan Palembang Darussalam Mahmud Badaruddin II (1768 – 1852) mendatangkan besar-besaran pekerja-pekerja Cina untuk bekerja di tambang timah demi meningkatkan produksi timah di Pulau Bangka. Mereka didatangkan dari Siam, Malaka, Malaysia dan Cina Selatan. Pada awalnya pekerja yang datang adalah laki-laki saja, kemudian kedatangan berikutnya ada yang membawa keluarga (anak dan istri). Orang-orang Cina ini bergaul dan membaur dengan penduduk Melayu dan banyak yang menikah dengan perempuan Melayu dengan pendatang dari Cina. Namun saat ini yang tinggal di Kota Pangkal Pinang, merupakan anak turunan mereka hasil dari perkawinan antara nenek moyang suku melayunya dengan pendatang Cita tersebut. Setelah itu baru mulai berdatangan suku-suku lainnya di Kota Pangkal Pinang. Selain beragamnya etnis, beragam pula agama yang dianut penduduk Pangkal Pinang, yaitu Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari keenam agam tersebut, yang paling dominan agama Islam. Masyarakat Pangkal Pinang merupakan bagian dari masyarakat Melayu Bangka. Entitas melayu yang dimaksud adalah sebagai salah suku bangsa sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang majemuk (Elvian, dkk., 2008).

Kata Melayu pertama kali diketahui dari berita Cina tahun 644 M yang menunjukkan adanya Kerajaan Melayu Nusantara. Pada prinsipnya, Melayu dapat dibagi ke dalam tiga pengertian, yaitu: (1) satu ras di antara ras lainnya dan memiliki kulit coklat yang merupakan hasil pencampuran antara ras Mongol berkulit kuning, Dravida berkulit hitam, dan Aria berkulit putih; (2) suku bangsa seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, dan Madagaskar sebagaimana tafsiran UNESCO tahun 1972; dan (3) suku atau etnis (Lutfi, 1986).

Pandangan lainnya menjelaskan bahwa seseorang dianggap sebagai Melayu apabila telah memenuhi syarat beragama Islam, berbicara Bahasa Melayu, mempergunakan adat istiadat Melayu, dan menetap di kawasan Melayu (Sinar, 1987). Suku Melayu bermukim di sebagian besar wilayah Malaysia, pesisir timur Sumatera, sekeliling pesisir Kalimantan, Thailand Selatan, serta pulau-pulau kecil yang terbentang sepanjang Selat Malaka dan Selat Karimata. Di Indonesia, jumlah suku Melayu sekitar 15% dari seluruh populasi yang sebagian besar mendiami daerah-daerah di Provinsi Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat (Suryadinata dkk., 2003).

Wilayah Kota Pangkal Pinang berada di kawasan khatulistiwa, berhujan lebat sepanjang tahun dalam dua musim angin serta ditumbuhi hutan yang hijau. Mempunyai pantai yang sangat indah, terutama di muara sungai sebagai pelabuhan kapal perdagangan tempat perputaran kegiatan ekonomi dimasa lampau. Juga menjadi pusat kesultanan kerajaan melayu dan kegiatan politik kala itu. Sehingga keterbukaan dengan pihak luar telah menjadi bagian dari peradaban masyarakat pesisir Pulau Bangka sejak dulu kala. Kebudayaan peradaban melayu menjadi sangat terbuka bagi orang luar maupun orang asing, sehingga membaur menjadi satu dengan masyarakat sehingga menjadi budaya melayu yang dinamis. Perpaduan berbagai unsur ini menjelma menjadi kesatuan budaya dan menjadi warna serta wajah Melayu saat ini (Kling, 2013).

Masyarakat Kota Pangkal Pinang sebagai orang Melayu sangat terbuka dengan orang luar dalam hal hubungan kemasyarakatan. Mereka menerima perbedaan sosial dan dapat berbaur dengan komunitas atau kelompok masyarakat lain. Menurut Alvian (2021), seorang sejarawan Bangka Belitung dan Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Pangkal Pinang, interaksi itu menye-

babkan terjadi asimilasi dan akulturasi budaya masyarakat luar dengan Melayu. Proses ini membentuk dan memperkuat aturan-aturan yang memengaruhi masyarakat menata tindakan-tindakan sosial dan budaya mereka.

Ciri kepribadian orang Melayu pada umumnya tidak lepas dari cara orang Melayu melihat dunia sekelilingnya, melihat dirinya sendiri, kesadaran agamanya, kesadaran terhadap kebutuhan hidup sehari-hari, kesadarannya di tengah orang lain dan orang asing, dan sebagainya. Semua itu mencetuskan sikap dan tingkah-laku orang Melayu dalam hal ini masyarakat Kota Pangkal Pinang dalam menghormati orang lain sesuai dengan tuntutan adat-istiadatnya. Suku bangsa yang terdapat di Kota Pangkal Pinang dalam catatan Kesbangpol Kota Pangkal Pinang membentuk paguyuban, yaitu Paguyuban Bangka, Paguyuban Palembang, Paguyuban Belitung, Paguyuban Minang, Paguyuban Sunda, Paguyuban Jawa, Paguyuban Batak, Paguyuban Sulawesi, Paguyuban Batu Raja, paguyuban Tionghoa, Paguyuban Aceh, Paguyuban Musi Rawas, Paguyuban Lampung, Paguyuban Musi Rawas. Paguyuban ini bertujuan mempererat persaudaraan, meringankan beban di antara mereka jika ada musibah, mengadakan kegiatan sosial yang harmonis.

## Sikap dan Pemahaman Keagamaan

Moderasi beragama meniscayakan umat beragama untuk tidak mengurung diri, tidak eksklusif (tertutup), melainkan inklusif (terbuka), melebur, beradaptasi, bergaul dengan berbagai komunitas, serta selalu belajar di samping memberi pelajaran. Dengan demikian, moderasi beragama akan mendorong masing-masing umat beragama untuk tidak bersifat ekstrem dan berlebihan dalam menyikapi keragaman, termasuk keragaman agama dan tafsir agama, melainkan selalu bersikap adil dan berimbang sehingga dapat hidup dalam sebuah kesepakatan Bersama (Kemenag RI, 2019). Hal ini juga tecermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kota Pangkal Pinang, di mana sejak zaman dahulu kala masyarakat Kota Pangkal Pinang sudah hidup terbuka terhadap orang luar, hidup berdampingan dengan rukun dan damai, walaupun tidak dipungkiri saat ini ada riak-riak di masyarakat, namun tidak terlalu berarti. Mereka saling tolong menolong, bahu membahu sekalipun berbeda etnis dan agama. Mereka tidak pernah mempermasalahkan soal simbol-simbol keagamaan dalam hubungan kehidupan mereka di masyarakat.

Romo Marcel (2021), Ketua Badan Kerja sama gereja (BKSG) menyatakan masyarakat dan tokoh agama bersikap terbuka terhadap perbedaan agama, aliran, dan mazhab yang mereka anggap masih terkait dengan relasi sosial. Namun, mereka menolak hal-hal yang dianggap akan menggerogoti keyakinan mereka, yang umumnya justru banyak muncul di internal umat beragama. Komunitas Kristen Kota Pangkal Pinang belum menerima aliran Saksi Yehova yang dianggap berbeda.

Begitu juga dengan aliran Ahmadiyah dan Syiah dalam Islam. Menurut Syamsuni Soleh (2021), Ketua MUI Kota Pangkal Pinang, umat Islam belum menerima kedua aliran tersebut. Menurut Nengah, tokoh Hindu, di kalangan umat Hindu, aliran Krisnha dianggap keluar dari ajaran Hindu (Nengah, 2021). Hingga saat ini, ketegangan dan konflik tidak muncul sebab aliran-aliran tersebut tidak membuat gaduh. Dalam urusan sosial, masyarakat masih berinteraksi seperti biasa. Mereka tidak membenci ataupun mengusir mereka dari kehidupan masyarakat.

Menurut Alvian, lain hal jika masyarakat menganggap aliran-aliran tersebut "berbuat ulah" atau membuat masalah. Dalam prinsip masyarakat Pangkal Pinang, jangan membuat ulah atau mengganggu mereka, mengusik-ngusik kehidupan pribadi mereka. Jika hal ini terjadi maka mereka akan berurusan panjang dengannya. Karena masyarakat Pangkal Pinang yang cuek dan tidak suka mengurusi persoalan orang lain, bisa murka jika hal itu terjadi (Alvian, 2021). Namun mereka sangat ramah dan suka menolong orang lain, baik diminta atau tidak, jika orang dalam kesulitan, karena masyarakat Pulau Bangka Belitung pada umumnya dan Kota Pangkal Pinang khususnya suka tolong menolong dan sangat toleran kepada orang lain.

Dalam kehidupan sehari-hari, sudah hal biasa di Kota Pangkal Pinang berdiri rumah ibadah berdampingan dengan rumah ibadah lainnya, mereka hidup rukun dan damai, namun bukan berarti tidak ada persoalan. Menurut Cholil Mahfud (2021), Ketua FKUB, Kota Pangkal Pinang riak-riak yang muncul di masyarakat ada, namun tidak sampai terjadi konflik, semuanya dapat diatasi.

Masyarakat Kota Pangkal Pinang yang cinta damai, sangat menolak adanya kekerasan dalam bentuk apa pun, terutama kekerasan atas nama agama. Utamanya terhadap radikalisme, teroris, mereka menentang sikap-sikap yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila dan nasionalisme. Mereka

beranggapan Pancasila sudah sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Di dalamnya mencakup keragaman masyarakat Indonesia yang religius. Mereka pun beranggapan bahwa jika ada yang ingin mengubah NKRI menjadi yang lain harus ditentang, karena NKRI merupakan hasil kesepakatan para *founding father* yang harus dijaga sampai titik darah penghabisan.

Selain itu materi tentang kebangsaan, budi pekerti, Pancasila, UUD perlu diperjuangkan kembali disekolah-sekolah. Agar anak-anak sekolah lebih cinta lagi pada tanah airnya Idonesia. Sebagai suatu keluarga, umat Hindu Kota Pangkal Pinang sudah mengingatkan di rumah masing-masing dan memberikan pemahaman kepada anak-anak untuk tidak terlena dengan isu-isu ingin di leburnya Pancasila menjadi Ekasila atau diubah dengan ideologi lain, karena Pancasila dan UUD 45 sudah sesuai dengan ajaran agama mereka. Pandangan itu disampaikan Tety, Ketua Wanita Hindu Dharma (WHDI) Kota Pangkal Pinang.

Hal senada diungkapkan oleh Romo Marcel dari Keuskupan Katolik, Maryanto (Ketua Makin), Syamsuni Soleh (Ketua MUI), Cholil Mahfud (Ketua FKUB), Ratna Purnamasari (Kabid Kebudayaan Disbud), Andi S (Ketua Lembaga Adat Melayu) Kota Pangkal Pinang, Pendeta Sanema A Zanggato (PGI Wilayah Babel), Husein Karim (Ketua Forum Kebangsaan Provinsi Bangka Belitung), dan beberapa masyarakat Kota Pangkal Pinang yang diwawancarai.

Dalam pandangan dan pemahaman mereka, Sekalipun negara Indonesia bukan negara agama, namun masyarakatnya memeluk agama. Hal ini sesuai dengan sila pertama Pancasila tentang Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu artinya masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang berketuhanan, sehingga nilai-nilai keagamaan itu lahir dalam kehidupan masyarakat Indonesia, begitu juga di kota Pangkal Pinang. Semakin mereka memahami ajaran agama mereka, maka sikap mereka makin toleran terhadap orang lain, Sikap toleransi umat beragama terhadap agama orang lain ini merupakan sikap moderasi dalam beragama.

Lebih lanjut Tety mengatakan bahwa penyebutan Tuhan dalam agama Hindu itu banyak dengan sebutan nama lain, seperti brahma, dewa, tapi sesungguhnya tetap satu Tuhan, yang di atas sana, Tuhan yang maha kuasa, Sanghiyang Widi Wesa, itulah inti ketuhanan yang ada dalam Agama Hindu, sesuai dengan Sila pertama dalam Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha

Esa. Dalam hal sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, pemerintah harus mewujudkannya. Persatuan Indonesia sudah terwujud, Permusyawaratan ditingkat negara sudah berjalan. Keadilan sosial belum berjalan, pemerintah harus menjabarkannya, supaya adil dan merata, karena tidak semua merata di masyarakat. Minimal tidak ada lagi kemiskinan. Masih ada orang-orang tidur di jalanan. Pemerintah pusat harus berjuang keras untuk itu. Jangan sampai karena ketidakadilan ini masyarakat berontak, ungkap Tety Bersemangat.

Kembali menyoroti pemahaman masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat Kota Pangkal Pinang tentang apa itu konsep moderasi beragama yang didengungkan oleh Kementerian Agama. Mereka belum memahaminya. Namun setelah peneliti menjelaskan apa itu moderasi beragama, para tokoh agama, tokoh masyarakat maupun masyarakat yang diwawancarai baru menyadari, jika selama ini tanpa mereka sadari praktik-praktik moderasi beragama yang dimaksud sudah dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari selama ini oleh masyarakat Kota Pangalpinang.

Dalam pemahaman tokoh-tokoh agama di Kota Pangkal Pinang, nilai-nilai moderat ini lahir dari ajaran agama yang mereka anut. Misalnya dalam Islam dikenal dengan sikap wasatiah, itu artinya umat Islam itu tidak boleh berlebihan dalam segala hal, terutama menyikapi keragaman dalam beragama. Kita tidak boleh terlalu radikal terhadap pemahaman orang lain yang tidak sejalan dengan kita, jika itu menyangkut masalah furuk, namun untuk masalah akidah, ya tidak boleh ditoleransi, demikian disampaikan Ketua fatwa MUI Kota Pangkal Pinang. Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa Pancasila dengan ajaran Islam sudah pas, tidak perlu diubah-ubah, karena sudah sejalan dengan ajaran Islam dan nilai-nilai ajaran Islam menopang Pancasila. Di Kota Pangkal Pinang kebersamaan masyarakat, telah melahirkan istilah Tong Ngin Fan Jit Jong, artinya Tionghoa, Melayu sama saja, Tionghoa dan Melayu setara). Istilah ini terus berkembang sehingga tidak ada pengotakan antara etnis Tionghoa dan Melayu. Mereka bersatu, hidup rukun dalam perbedaan, seperti dalam sila kesatu dalam Pancasila.

Menurut I Nengah Dana, Ketua PHDI Kota Pangkal Pinang, dalam ajaran Hindu, umat Hindu diajarkan untuk bersikap toleransi terhadap orang lain. Dalam ajaran Hindu ada yang disebut *sradha* dan *bakhti* serta *tatwan asi*. Dimana *sradha* dan *bhakti* meliputi *tri hita karana* artinya tiga penyebab keba-

hagiaan yang meliputi *parahyangan* (hubungan harmonis manusia dengan sang pencipta), *pawongan* (hubungan harmonis manusia dengan manusia) dan *palemahan* (Hubungan Harmonis manusia dengan alam lingkungannya serta *tatwa asi* yang artinya Engkau adalah aku dan aku adalah Engkau yang maknanya adalah umat Hindu menghormati semua ciptaan Tuhan tanpa melihat perbedaan agama dan ras.

Sementara dalam ajaran Konghucu, menurut Maryanto, Ketua Mjelis Agama Konghucu Indonesia (MAKIN) dan Maren, Wasekjen MAKIN Kota Pangkal Pinang, diajarkan nilai-nilai moderat ersebut berupa ungkapan *zhong* (*chung*) artinya tengah, umat harus berada di tengah-tengah dalam bersikap, tidak dibolehkan terlalu keras dan terlalu lunak kepada orang lain. Menyikapi yang berbeda pemahaman dengan mereka harus dihadapi dengan kepala dingin, penuh kesabaran dan tidak dengan emosi. Karena semua persoalan ada jalan keluarnya, karena agama mengajarkan tentang kebaikan dan kasih sayang kepada keluarga, kepada sesama dan kepada orang lain. Mereka berpendapat sila dalam Pancasila sudah sesuai dengan ajaran Konghucu. Dalam ajaran Konghucu dikenal dengan lima sila yaitu: *ren* (cinta kasih), *yi* (kebenaran), *li* (kesusilaan), *zi* (kebijaksanaan), *sin* (dapat dipercaya). Dari lima sila ini, berkembang 8 kebajikan atau disebut *bade* yaitu: *xioo* (Berbakti), *ti* (rendah hati), *zhong* (setia), *xin* (dapat dipercaya), *li* (susila), *yi* (bijaksana), *lian* (suci hati), dan *che* (tahu malu). Juga dalam tradisi Konghucu tecermin dalam filosofi *Yin* dan *Yang*, sikap tengah dan keseimbangan.

Terkait masalah kebebasan berekspresi, semua informan berpendapat bahwa boleh berekspresi asal tidak melanggar batas-batas kebebasan orang lain. Dilarang melakukan ujaran kebencian terhadap orang lain. Jika terjadi penghujatan terhadap agama orang lain ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu dengan pendekatan persuasif, dilakukan dialog dan pembinaan. Namun jika sudah dilakukan hal-hal tersebut masih tetap melakukan ujaran kebencian, yang bersangkutan harus dilaporkan ke polisi untuk diproses secara hukum.

Sebagian informan berpendapat LGBT harus dilarang dan itu bukan bagian dari kebebasan berekspresi. LGBT bertentangan dengan ajaran agama dan ini merupakan penyakit yang harus diobati, agar tidak menularkan kepada orang lain, sedangkan yang bersangkutan harus diobati, dibawa ke psikiater atau ahli yang dapat menangani kasus LGBT ini. Karena LGBT ini beda

dengan orang yang mempunyai dua kelamin seperti dalam Islam disebutkan. Itu pun untuk menentukan yang bersangkutan berjenis kelamin apa, harus memalui pemeriksaan medis dan keputusan Pengadilan. Pendeta Sanema A Zanggoto (2021), meski tidak setuju dengan LGBT yang dianggapnya sebagai penyimpangan, namun hak-hak kewarganegaraan mereka harus diberikan. Keberadaan mereka sebuah fakta yang tidak bias dipungkiri. Mereka ada di muka bumi terlepas kontroversinya.

## Urgensi Moderasi Beragama dan Implementasinya

Bangsa Indonesia yang sangat plural dengan beragam agama, suku dan ras sangat dibutuhkan sikap moderat bagi masyarakatnya. Masyarakat butuh diedukasi terus menerus tentang sikap terbuka satu sama lain dan saling menerima dalam keragaman perbedaan, meningkatkan kerja sama dari masing-masing sekalipun berbeda. Masyarakat juga penting diedukasi untuk tidak memaksakan kehendaknya sendiri, juga keyakinannya kepada orang lain, agar terjadi harmonisasi dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Dengan bersikap moderat dalam beragama, sama halnya sudah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai hamba Tuhan. Juga dapat mencegah konflik satu sama lainnya, serta sekaligus melestarikan budaya bangsa yang sejak dahulu kala mempunyai sifat ketimuran suka bergotong royong, saling membantu dan kerja sama, sebagai warisan nilai-nilai luhur bangsa.

Nilai-nilai moderasi agama harus terus dikampanyekan dalam masyarakat, pemerintah baik pusat dan daerah, bahkan di semua aspek kehidupan, agar masyarakat tetap saling toleransi dan menjaga kerukunan, kedamaian satu sama lainnya. Moderasi beragam ini juga penting untuk membangun kebinekaan. Jika ini gagal dilakukan maka akan menjadi masalah dalam kehidupan dalam masyarakat. Menurut Deny yang beragama Katolik, kondisi itu tidak bisa dihindari karena masing-masing akan merasa ajarannya yang paling benar. Jika ajaran agama merasa benar sendiri seharusnya dilakukan diruang privat dan itu bersifat keharusan. Namun untuk publik, sebaiknya tidak perlu dilakukan, karena akan menjadi sumber perpecahan dan konflik. Merasa paling benar ada di hampir setiap umat beragama.

Agar moderasi beragama ini tetap dapat dipertahankan, maka perlu di sosialisasi ke masyarakat secara terus menerus, melalui banyak media, se-

perti sosialisasi di tingkat lembaga-lembaga yang dibentuk masyarakat, kelompok-kelompok pemuda lintas agama, melalui para penyuluh agama, sarasehan, diskusi publik, pengajian, dialog kebangsaan, kampanye lewat duta-duta moderasi beragama yang didaulat dari kalangan milenial, kelompok PKK, RT, RW, Ormas Keagamaan, dll. Muatan moderasi beragama berupa sikap toleran kepada sesama, menolak tindak kekerasan atas nama agama baik secara fisik maupun verbal dan menghargai tradisi dan budaya masyarakat yang beragam harus terus didengungkan, agar tercipta harmonisasi, persatuan yang kuat di dalam masyarakat. Selain itu kampanye melalui pendidikan, perlu digalakkan melalui muatan kurikulum, pengembangan wawasan multikultur dan multireligius melalui pendekatan *bottom-up*. Usaha ini juga perlu dilakukan dengan memperkuat dialog antarumat beragama berbasis komunitas *(community based)* dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Dapat juga melalui berbagai *workshop* dan seminar yang mengundang berbagai pihak (Zanggota, 2021).

Tugas menyadarkan masyarakat tentang multikulturlah ini tidak gampang. Begitu juga membangun kesadaran masyarakat akan kebinekaan. Usaha-usaha menanamkan sikap adil senantiasa berimpitan dengan kepentingan sosial, ekonomi, dan politik. Usaha ini semakin berat ketika dihadapkan pada kenyataan sikap individu dan kelompok yang merasa ajarannya agam mereka paling benar. Dibutuhkan kerja sama berbagai pihak agar dan kemampuan komunikasi. Menurut Curtis (1998), kemampuan untuk berinteraksi dengan masyarakat membutuhkan tiga hal: kerja sama *(affiliation)*, kerja sama dan penyelesaian konflik *(cooperation and resolution conflict);* keramahan, perhatian, dan kasih sayang *(kidness*, *care and affection/emhati skill).*

Hal lain lagi, organisasi-organisasi keagamaan harus mempunyai komitmen kebangsaan untuk menolak tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun, menghargai tradisi dan budaya lokal masyarakat yang sangat beragam, ramah dan terbuka terhadap seni dan budaya. Keberagaman tradisi yang merupakan warisan leluhur dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika sebagai bangsa Indonesia. Jangan sampai justru organisasi keagamaan yang menyesatkan kelompok atau individu lain.

Moderasi beragama bukan barang baru bagi masyarakat Indonesia yang religius. Pada dasarnya semua agama mengajarkan nilai-nilai kerukunan,

menolak kekerasan dan intoleran. Apalagi watak bangsa Indonesia yang terkenal ramah, suka tolong menolong, dan bergotong royong. Dalam beberapa kasus ada pemahaman yang menolak kearifan lokal secara terang-terangan, ada juga yang menerima.

Di Kota Pangkal Pinang, masyarakat sudah terbiasa saling mengunjungi satu sama lain jika ada anggota keluarga yang sakit, saling berkunjung saat Idulfitri atau hari besar agama lainnya, mengunjungi yang meninggal, sekalipun mereka berbeda agama. Selain itu, kerja sama dalam masyarakat yang berbeda etnis dan agama. Adanya kerja sama antara tokoh agama dan masyarakat, antar tokoh agama, tokoh agama dan pemerintah, serta kerja sama pemerintah dan masyarakat, makin memperkuat kondisi kerukunan di dalam kehidupan Kota Pangkal Pinang. Setiap unsur dalam masyarakat mampu bergerak dan menggerakkan nilai-nilai sosial dalam masyarakat melalui berbagai kegiatan yang mereka buat, di antaranya perayaan *nganggung*, yang biasa dilaksanakan pada hari-hari besar Islam seperti saat maulid Nabi Muhammad SAW, Idulfitri, Idul Adha, Nisfu Syaban, dan Muharam. Dilakukan di masjid, surau, atau di langgar, bahkan di gedung pemerintah.

*Nganggung* tradisi lokal turun temurun masyarakat Kota Pangkal Pinang dan Pulau Bangka. Setiap rumah membuat makanan lengkap dan makanan tersebut diletakan dalam tudung saji berwarna merah oleh setiap rumah penduduk. Setelah itu makanan dibawa ke tempat pertemuan besar untuk disantap bersama. *Nganggung* sering juga disebut *sepintu sedulang*, yang memiliki arti satu rumah (satu pintu) membawa *sedulang* (satu dulang). Dulang adalah wadah seng atau kuningan digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk-pauk, kue, buah-buahan dan ditutup dengan tudung saji, biasanya berwarna merah dan bermotif. Sekalipun acara ini adalah acara umat Islam, namun yang menghadiri juga ada yang non-Islam.

*Nganggung* merupakan wujud semangat gotong royong di antara warga masyarakat, dengan tujuan mempererat silaturahmi sesama warga, agar tercipta kerukunan dan kedamaian. Ini diungkapkan Ratna Purnamasari, Kepala Bidang Kebudayaan Kota Pangkal Pinang. Menurutnya, pembuat tudung dulang atau tudung saji yang unik adalah orang Tionghoa, namun yang memakai orang Melayu. Itu bukti betapa kuatnya rasa persaudaraan dan kerja sama ekonomi antara orang Tionghoa dan Melayu yang ada di Kota Pangkal Pinang (Purnamasari, 2021).

Menurut Ratna, ada perbedaan antara tudung saji dan tudung dulang. Tudung Saji diletakkan di atas meja makan setiap hari, tidak berwarna, dari daun pandan hutan dengan bentuk tudung yang berbeda, ada kaki lima di tudung saji. Sementara tudung dulang hanya dikeluarkan pada acara kehormatan saja, seperti maulid nabi, Idulfitri, Idul Adha, bahkan acara-acara kesultanan saat itu. Tudung dulang berwarna-warni, biasanya berwarna merah, kuning, hijau dan putih.

Ratna Purnamasari biasa dipanggil Bunda Tudung Saji (BTS). Ia menjadi ikon tudung dulang karena mampu berkreasi membuat beragam karya tudung dulang atau tudung saji dalam bentuk boneka perempuan yang memakai tudung dulang atau saji di kepalanya, dan membuat gantungan kunci tudung saji. Pemkot Pangkal Pinang aktif mempromosikan ragam suvenir lokal itu di berbagai acara bazar.

Selain tradisi *nanggung* yang menggunakan tudung saji atau tudung dulang, banyak lagi tradisi lokal di Kota Pangkal Pinang yang cair dalam kehidupan di masyarakat. Kearifan lokal di Kota Pangkal Pinang merupakan tradisi lokal, adat istiadat atau nilai-nilai budaya masyarakat, yang merupakan bukti harmonisnya hubungan antara masyarakat dilingkungan tersebut. Karena kearifan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai, saling menghormati, toleran, bersikap adil dan bijaksana, dengan mengedepankan persatuan yang tertanam dan dilakukan oleh masyarakat setempat, dalam praktik sosial.

Masyarakat Kota Pangkal Pinang juga suka saling mengunjungi ketika ada musibah atau hajatan seperti acara sunatan, 3 dan 40 hari meninggal umat muslim, umat agama Hindu datang ke rumahnya, begitu juga sebaliknya. Saat perayaan nyepi, saat sakit umat Hindu, umat Islam juga mendatangi. Namun saat Korona ini, hal tersebut tidak lakukan karena menjaga agar jangan sampai saling menulari jika salah satu pihak terpapar Virus Korona 19. Mereka saling hadir saat acara perkawinan, Idulfitri. Umat Hindu memberikan ucapan selamat, begitu juga saat Natal, *ceng beng* dan kegiatan keagamaan lainnya, dan saling menghadiri.

Masyarakat Kota Pangkal Pinang sekalipun belum memahami konsep moderasi beragama, namun sikap moderat tecermin dari sikap dan perilaku yang cair dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Seperti budaya *nganggung* tersebut. Selain itu, sikap moderasi yang tumbuh dalam masyarakat

Kota Pangkal Pinang dapat kita temui dalam beberapa bangunan keagamaan. Di Kota Pangkal Pinang, bangunan rumah ibadah yang berdiri secara berdampingan merupakan pemandangan yang lazim. Bahkan di Kota Pangkal Pinang berdiri tiga bangunan rumah ibadah yang akan dijadikan lokasi wisata religi oleh pemerintah setempat, di daerah Pantai Tanjung Bunga yang terdiri dari kelenteng She Mu Mew persis menghadap Pantai Tanjung Bunga. Kelenteng ini tempat pemujaan Dewi laut (Thian Hou Shen Mu alias Ma Cho) menurut kepercayaan orang Cina. Bangunannya di dominasi warna merah arsitektur cina, seperti kebanyakan Kelenteng pada umumnya. Kelenteng ini dibangun pada 2011.

Tidak jauh dari Kelenteng, berjarak 50 meter terdapat Pura Jagadnathan Surya Kencana, dikelola oleh Yayasan Bhakti Kerti Hindu Dharma. Pura ini terbesar di Kota Pangkal Pinang. Di samping Pura masih ada tanah kosong yang akan di bangun, namun dana tersebut belum mencukupi, demikian disampaikan tokoh umat Hindu Kota Pangkal Pinang. Tak jauh dari Pura tersebut berdiri sebuah Wihara. Dan berikutnya akan di bangun rumah ibadah berupa masjid, Gereja Kristen dan Gereja Katolik. Sehingga kawasan ini akan mencerminkan kerukunan umat beragama di kawasan Pangkal Pinang. Kawasan wisata riligius tersebut merupakan Hibah tanah dari Yayasan Untaian Kasih Enam, kepada umat beragama untuk dibangun vihara, musala/masjid, gereja Katolik, gereja Kristen, dan kelenteng. Sedangkan untuk dana pembangunan rumah-rumah ibadah tersebut diserahkan kepada umat beragama masing-masing, demikian diungkapkan Johan, dari yayasan Untaian Kasih 6. Johan adalah salah satu dari 6 orang yang mewakafkan tanah 19,5 hektare untuk ke 6 agama agar dibangun rumah ibadah diperuntukkan untuk keenam agama tersebut, di Pantai tanjung Bunga, yang akhirnya direncanakan untuk wisata religi di Kota Pangkal Pinang. Adapun 6 orang tersebut adalah Afik Rosidi beragama Islam. Dodot/Weli Abdullah (muslim), Ernawan Redwin (muslim), Awiswitogunawan (Konhuchu) dan Tamron ahon (Konghucu) dan Johan (Konghucu). Saat itu, Johan masih berusia 38, dan paling muda di antara keenam orang tersebut.

Di Kota Pangkal Pinang selain tempat wisata yang Indah, hal lain yang dapat mempersatukan masyarakat adanya tradisi Tionghoa di Kota Pangkal Pinang seperti Cheng Beng atau sembahyang kubur yang biasa dihadiri peziarah umat Konghucu di seluruh penjuru dunia, terutama dari Asia Tenggara.

Para peziarah tersebut membawa sesaji ke makam tertua di dan terbesar di Asia Tenggara yang ada di Kota Pangkal Pinang, yaitu makam Sam Sang, Sam Kuo, Chai Choi. Pada makam leluhur mereka itu diletakan lilin dan uang kertas palsu yang biasa disebut *kim cin*. Banyak lagi tradisi-tradisi Tionghoa lainnya di Kepulauan Bangka Belitung, seperti tradisi *peh cun* untuk memperingati Dinasti Chouw 340 sebelum Masehi. Tradisi perang ketupat, tradisi Buang Jung di mana hasil bumi dilarungkan ke laut karena rasa syukur masyarakat di sana, tradisi sembahyang rebut, di mana setelah umat Tionghoa tersebut sembahyang, kantong yang berisi sembako, uang dan lain-lainya biasanya di lemparkan ke masyarakat, dan masyarakat berebut untuk mengambilnya. Namun saat ini sudah tidak berebut lagi, tetapi diantarkan ke rumah-rumah penduduk. Ini lebih simpel lagi, juga menjaga agar tidak terjadi tabrakan antarwarga yang berebut tersebut. Semua tradisi ini dilaksanakan oleh pemerintah setempat setiap tahunnya untuk menarik wisatawan asing.

Dalam perayaan acara tradisi-tradisi tersebut semua masyarakat tanpa melihat suku, ras dan agama berbaur jadi satu menghadiri perayaan tanpa peduli apakah itu perayaan umat Tionghoa atau bukan. Itulah bentuk toleransi masyarakat Kota Pangkal Pinang terhadap tradisi lokal yang sifatnya turun temurun, sampai hari ini masih berlangsung. Ini menunjukkan bahwa begitu moderatnya masyarakat Kota Pangkal Pinang dalam mengapresiasi tradisi lokal, tanpa harus mempermasalahkannya.

Hal menarik lagi di Kota Pangkal Pinang ada satu daerah bernama Kampung Bintang. Di daerah ini 92% penduduknya beretnis Tionghoa dan beragam agamanya, ada agama Konghucu, Budhha, Kristen, Katolik dan 8% beragama Islam. Dengan presentasi tersebut, menunjukkan posisi umat Islam adalah minoritas, sekalipun secara umum masyarakat Kota Pangkal Pinang Agama Islam mayoritas penduduknya. Di kampung ini masyarakatnya hidup rukun dan damai, mulai Pengurus RW dan RT-RT di sana di pegang warga yang beragama Kristen, Konghucu dan Buddha. Sementara umat Islamnya menjadi warga biasa. Namun untuk semua kegiatan mereka terlibat secara bersama-sama dan mengerjakannya secara gotong royong. Mereka mengadakan arisan warga, kegiatan 17 Agustusan, dll, agar terjalin silaturahmi di antara warga Kampung Bintang.

Daerah Kampung Bintang yang penuh dengan lampu lampion ini nantinya akan dijadikan pusat kuliner di Kota Pangkal Pinang, persisnya ter-

letak di Jalan Yang Zubaidah, akan dijadikan kawasan Kuliner China Town, di kawasan ini juga akan dibangun tugu Hoklopan atau martabak, sebagai makanan khas masyarakat Kota Pangkal Pinang khususnya, Bangka pada umumnya. Di sini siapa pun boleh berjualan tanpa melihat etnis dan agamanya. Dibuatnya kawasan *China Town* atas keinginan masyarakat, sehingga pihak kelurahan menyampaikan kepada Wali kota Pangkal Pinang dan disambut secara baik. Dalam hal waktu berjualan akan diatur kemudian, sekarang kawasan China Town masih dalam penataan dan sifatnya bertahap karena terkendala pendanaan. Imam Firdaus (Lurah Kampung Bintang), tetap berharap menjadi Hongkongnya Kota Pangkal Pinang.

Soal moderasi beragama, di Kampung Bintang hal biasa satu keluarga beragama agama, misalnya Tionghoa nikah dengan muslim, Muslim nikah dengan Buddha, atau Buddha dengan Konghucu, Islam dengan Kristen. Ada Islam dengan Katolik. Ini tidak dipersoalkan dalam masyarakat Kota Pangkal Pinang. Hal ini juga terjadi hampir di beberapa rumah penduduk yang ada di Bangka Belitung. Semua masyarakat Kampung Bintang selalu mengadakan sebulan dua kali kegiatan gotong royong.

Untuk memfasilitasi adanya perjumpaan publik masyarakat, diadakan permainan sepak bola, sehingga masyarakat dapat berkumpul, berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lainnya. Selain itu ada Lembaga Pemberdayaan (LPM), PKK tempat ibu-ibu berkumpul, disediakan sekretariat untuk membahas banyak hal. Menariknya di Kampung Bintang ini Ketua RT 008 RW 003 yang merangkap sebagai ketua posyandu dan PKK-nya seorang pria bernama Ameo Yonhanes Bunandar beragama Kristen. Beliau diminta Lurah Kampung Bintang merangkap jabatan itu karena dalam pengadministrasian organisasi tersebut sangat rapi dan dapat dipertanggung jawabkan, bahkan pernah menjadi juara dalam administrasi tingkat kelurahan. Dari keterlibatan warga masyarakat Kampung Bintang tersebut yang mayoritas Tionghoa dalam hal komitmen keindonesiaan tidak perlu diragukan lagi, karena mereka semua sudah menjadi warga negara Indonesia.

## Moderasi Beragama

*Institution* (pranata) merupakan sistem norma atau aturan yang menyangkut suatu kegiatan masyarakat yang bersifat khusus. Sedangkan *institute* (lembaga) merupakan badan atau organisasi yang melaksanakannya.

Sedangkan lembaga sosial merupakan wadah/tempat dari aturan-aturan khusus, wujudnya berupa organisasi atau asosiasi. Seperti KUA, FKUB, Masjid, Sekolah, partai, perusahaan, dll. Sedangkan pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan yang mengatur perilaku dan hubungan antara masyarakat agar hidup aman, tenteram dan harmonis. Dengan Bahasa sehari-hari aturan main atau cara main. Pranata sosial adalah aturan atau kesepakatan yang tidak tertulis, namun diakui sebagai aturan tata perilaku dan sopan santun pergaulan. Jadi pranata sosial yang melembaga adalah sebagai aturan tata perilaku yang dipedomani agar terjadi keseimbangan sosial atau keseimbangan masyarakat yang dilaksanakan secara kelembagaan, dan diikuti oleh orang lain, kelompok atau masyarakat di suatu tempat, agar tercipta masyarakat yang hidup aman, tenteram dan harmonis.

Di Kota Pangkal Pinang, ada beragam pranata sosial, terutama terkait dengan masalah kelompok masyarakat, berupa paguyuban-paguyuban, lembaga adat yang ada di Kota Pangkal Pinang. Paguyuban hanya menghimpun dari asal daerah masing-masing, seperti Paguyuban Palembang, Paguyuban Bugis, Paguyuban Jawa, Paguyuban Musirawas, dll. Sementara lembaga adat mengurusi tentang adat setempat, misalnya Lembaga Adat Melayu yang identik dengan muslim. Sementara lembaga yang mengurusi terkait dengan agama adalah Badan Kerja sama Gereja (BKSG), di dalamnya terdiri dari Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Gereja Pentakosta, Gereja Bethel Indonesia (GBI), dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). Selain itu ada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang mengurusi tentang Kerukunan Umat Beragama tingkat Kota Pangkal Pinang.

FKUB dibentuk oleh masyarakat, namun difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama sebagaimana disebut pada pasal 8-12 PBM 9 dan 8 Tahun 2016. FKUB merupakan partisipasi umat beragama dalam menjaga kerukunan di masyarakat dan bentuk kerja sama antarumat beragama dengan pemerintah. FKUB melakukan tugas dialog dengan pemuka agama dan masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat beragama dan atau ormas keagamaan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, melalui program kegiatan yang direncanakan sebelumnya dengan anggaran dana kegiatan dari Pemerintah Kota Pangkal

Pinang dan Stimulus dari Kementerian Agama

Namun dalam konteks masyarakat yang cinta damai di Kota Pangkal Pinang tersebut, uniknya, bukan berarti tidak ada penolakan atas hadirnya tempat ibadah orang lain di sana, misalnya terjadi penolakan masyarakat terhadap pembangunan Gereja Kalam Kudus di daerah Sriwijaya. Penolakan didasarkan atas pembangunan gereja ditengah-tengah masyarakat muslim dan tidak ada umat Kristen yang berdomisili di sana. Jika diperuntukkan untuk umat Kristen yang tinggal daerah tersebut, masyarakat tidak menolaknya. Selain itu pembangunan gereja tersebut tidak memenuhi unsur-unsur yang ada dalam PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2016 tentang pendirian rumah ibadah. Sehingga dalam musyawarah yang dilakukan berbagai pihak (perwakilan pihak gereja, masyarakat, tokoh agama, FKUB, Camat), yang di fasilitasi oleh Pemkot Pangkal Pinang, diputuskan dibatalkan. Namun pembangunan gereja dipindahkan ke daerah Muntok, di sini tidak ada penolakan oleh masyarakat. Selain penolakan gereja, ada juga penolakan pembangunan rumah duka (Krematorium) oleh masyarakat.

Penolakan tersebut dengan alasan rumah duka di bangun ditengah-tengah pemukiman penduduk, suara aktivitasnya dianggap mengganggu dan diduga bau olahan kremasi akan menyebar ke mana-mana, masyarakat menganggap akan berjangkit penyakit baru dari bau tempat rumah duka tersebut. Selain itu, masyarakat merasa tanah di sekitar akan murah harganya jika dijual, karena ada rumah duka (krematorium). Setelah ditelusuri FKUB, ternyata ada provokasi bahwa kelompok etnis tertentu yang bisnis serupa. Jika didirikan Krematorium di sana, akan merugikan pendapatan yang sudah ada sebelumnya di sekitar sana, sekalipun alasan yang lainnya menjadi alasan untuk penolakan berdirinya Krematorium. Jadi persoalannya utama adalah persaingan ekonomi, yang tidak ada kaitannya dengan agama.

Menurut Cholil, Ketua FKUB Kota Pangkal Pinang, selama ini di Kota Pangkal Pinang tidak ada gejolak yang berarti dan aman-aman saja di masyarakat, antarumat beragama, namun justru yang bermasalah intern umat beragama. Kalaupun ada persoalan antarumat beragama, hanya kesalahpahaman semata. Namun dapat diselesaikan secara baik dengan ada solusinya, karena dapat diatasi dengan cara dialog dan musyawarah, misalnya kasus intern umat Islam yang melaksanakan salat Jumat antara masjid Baitul Arif-

ah dan Masjid Al Muhajirin di Kompleks Perumahan Graha Loka Jalan Sudirman yang jaraknya berdekatan yaitu 400 meter. Sehingga jemaah yang salat di salah satu masjid tersebut dilarang, karena masih dalam satu wilayah berdekatan dan masih cukup untuk menampung jemaah yang ada di masjid satunya, sehingga di masjid satunya tidak perlu ada salat jimat. Menurut Ketua FKUB, hal itu terjadi karena ego jemaah agar uang infak jangan berkurang kalo jemaah masjid terpecah dua. Keributan tersebut yang sama-sama ingin melaksanakan ibadah jangan sampai divonis ibadah menjadi tidak sah.

Menurut Cholil Mahfud (Ketua FKUB), solusinya adalah, kedua belah pihak dipanggil di Kantor Camat dan di Kemenag, dilakukan musyawarah, sehingga didapati kesepakatan boleh melakukan salat Jumat selama tidak ada ribut yang bersifat fisik dan tidak terjadi gontokan. Setelah diberikan pengertian, sama-sama ingin melaksanakan ibadah, ingin memakmurkan masjid, sehingga kedua belah pihak dapat saling memahami. Ada hikmahnya atas kejadian tersebut, orang yang tidak pernah ke masjid akhirnya jadi sering ke masjid. Sekarang kedua mesjid di pakai untuk salat Jumat.

Kasus lainnya, ada yang ingin mendirikan musala, tapi ditolak oleh warga perumahan itu. Yang menarik adalah, yang akan mendirikan musala adalah pegawai Kemenag dan yang menolaknya juga adalah pegawai Kemenag, yang sama-sama tinggal di Perumahan tersebut. Alasa penolakan tidak boleh mendirikan musala karena tanah fasilitas umum, kejadian ini sempat menghebohkan Kota Pangkal Pinang, sampai Ombudsman, Kepolisian Kota Pangkal Pinang turun tangan. Sekarang persoalannya sudah selesai, musala tidak jadi didirikan.

Dalam rangka meningkatkan kerukunan umat beragama di Kota Pangkal Pinang, FKUB, melakukan dialog antara pemuka agama dan pemuka masyarakat, melakukan kunjungan ke tempat-tempat ibadah agama masing-masing. Melakukan pertemuan antara pemuka agama setiap bulan untuk membahas banyak hal oleh pemuka enam agama tersebut di kafe-kafe, karena FKUB belum punya kantor maka kumpul dan rapatnya di kafe-kafe, sehingga FKUB disebut FKUB Café. Sementara untuk administrasi surat menyurat menggunakan alamat Kantor Kemenag. Rapat-rapat juga sering dilakukan di rumah Ketua FKUB. Untuk jalannya roda organisasi, Kemenag memberikan bantuan uang 50 juta kepada FKUB. Dengan uang 50 juta itu. Dari pemda rencananya 250 juta, tapi belum cair. Selama ini yang pegang

uang Kesbangpol sekaligus mereka yang melaporkan. untuk yang sekarang rencananya diberikan langsung kepada FKUB. Dengan uang tersebut di susun program Kemah lintas Agama, Studi Banding, namun uangnya belum cair. Sebelumnya FKUB ikut studi banding Keluar negeri.

Dari berbagai deskripsi diatasi dan berbagai alasan kenapa pranata yang dipilih adalah FKUB. Padahal ada beberapa pranata di Kota Pangkal Pinang seperti paguyuban, Lembaga Adat Melayu, Badan Kerja sama Gereja (BKSG), Forum Pembauran Kebangsaan. Alasan yang dapat diberikan adalah pertama, FKUB merupakan forum kerukunan bagi umat beragama yang di dalamnya sangat mewakili dari unsur beragam umat beragama, mencerminkan keragaman agama di Indonesia. Hal terpenting adalah problem-problem dan aspirasi umat beragama dapat di sampaikan melalui forum ini, agar dapat dicarikan solusinya, selain itu FKUB mitra pemerintah dalam menjaga kerukunan umat beragama dimasyarakat, juga dapat memberdayakan masyarakat melalui berbagai program kegiatan yang melibatkan kelompok lintas agama.

Kedua, kenapa tidak memilih paguyuban-paguyuban, Lembaga Adat Melayu, dan BKSG? Dikarenakan pranata tersebut tidak cukup mewakili aspirasi keragaman dari masyarakat Kota Pangkal Pinang, dan juga lebih bersifat homogenitas internal kesukuan dan internal keagamaan Kristen dan Katolik saja untuk BKSG, karena ada perwakilan umat Islam di lembaga tersebut. Sedangkan kenapa tidak memilih Forum Pembauran Kebangsaan, di mana di dalamnya beragam suku, ras dan agama. Hal ini dikarenakan forum tersebut hanya berada ditingkat Provinsi Bangka Belitung saja, tidak ada di tingkat kota, selain itu forum ini lebih banyak menengahi konflik antar suku pendatang, misalnya terjadi keributan tentang penambang timah ilegal masuk ke wilayah tambang pemerintah, maka yang dilihat kepala suku atau ketua paguyubannya saja yang dipanggil, nanti mereka inilah yang akan menertibkan anak buahnya. Serta forum ini tidak mengurusi tentang konflik antar agama atau yang berbau keagamaan, seperti dijelaskan Husein Karim, Ketua Forum pembauran Kebangsaan Provinsi Bangka Belitung.

## Penutup

Masyarakat Kota Pangkal Pinang belum memahami apa itu konsep tentang moderasi beragama yang didengungkan oleh Kementerian Agama da-

lam beberapa tahun belakangan ini. Namun nilai-nilai moderasi beragama yang dimaksud sudah berjalan dalam kehidupan sehari-hari. Di mana sikap sangat terbuka, toleran, kerja sama, gotong royong masyarakat Kota Pangkal Pinang tanpa mempersoalkan perbedaan suku, ras adan agama. Sikap moderat tersebut sudah ada, tumbuh dan berkembang sejak dahulu hingga hari ini. Dalam pandangan mereka, nilai-nilai moderat tersebut lahir dari ajaran agama yang mereka anut. Sehingga di Kota Pangkal Pinang kebersamaan masyarakat, telah melahirkan istilah *Tong Ngin Fan Jit Jong* artinya Cina, Melayu sama saja, Cina, Melayu setara). Istilah ini terus berkembang sehingga tidak ada pengotakan antara etnis Cina dan Melayu.

Moderasi beragama penting untuk dikembangkan agar tercipta harmonisasi, persatuan yang kuat di dalam masyarakat, memperkuat kebinekaan, menanamkan nilai-nilai keadilan, memperkuat komitmen kebangsaan, menolak tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun, menghargai tradisi dan budaya lokal masyarakat yang sangat beragam, dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama di masyarakat, agar tidak timbul konflik dan perpecahan antarumat beragama, yang dapat mengganggu stabilitas nasional bangsa Indonesia.

Implementasi moderasi beragama di masyarakat Kota Pangkal Pinang tergambar dari terjadinya akulturasi budaya dan pembauran dimasyarakat antara etnis Cina dan Melayu serta suku-suku lainnya dengan tidak melihat perbedaan agama. Adanya perkawinan satu sama lain antar etnis, berbagai tradisi lokal warisan leluhur mereka tetap hidup dan berkembang di masyarakat sampai saat ini, dalam berbagai acara di masyarakat, yang dihadiri oleh semua masyarakat tanpa melihat suku dan agama mereka apa. Seperti budaya nanggung yang dilaksanakan pada acara-acara besar Islam, Ceng Beng, sembahyang rebut, berdampingannya rumah ibadah, dll.

Pranata yang dipilih untuk melembagakan moderasi beragama adalah Forum FKUB. Ini dipilih karena FKUB cukup mewakili berbagai unsur keagamaan dalam kepengurusannya, mampu menjadi penengah sekaligus mampu memberikan solusi jika ada konflik antarumat beragama, walaupun keputusan tersebut tidak dapat memuaskan semua pihak.

Dalam rangka memperkuat Moderasi Beragama di masyarakat Kota Pangkal Pinang yang belum begitu memahami apa itu moderasi beragama, maka perlu terus dikampanyekan moderasi beragama melalui berbagai

media seperti *workshop*, sosialisasi, kemah pemuda lintas agama, duta moderasi beragama di kalangan generasi milenial, kerja sama dengan pranata sosial yang terlembaga seperti FKUB, Paguyuban, Lembaga Adat Melayu, Forum Pembauran Kebangsaan, BKSG, dan lembaga-lembaga lainnya yang ada di Kota Pangkal Pinang, difasilitasi pemerintah daerah dan Kementerian Agama sebagai *leading sector*, dan memasukkan materi Moderasi Beragama dalam kurikulum pendidikan.

## Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik Kota Pangkal Pinang (2020). *Pangkal Pinang Dalam Angka Tahun 2020.*

Farida, Anik dan Silvita (2021). *Fungsi Masjid sebagai Pusat Pendidikan Moderas Beragama dalam Buku Fungsi Masjid Sebagai Pusat Pendidikan Moderasi*. Jakarta: Litbangdiklat Press Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Hilmy (2019). "Fungsi dan Peran Penting Agama Bagi Kehidupan Manusia." Kompas, 2021. Diakses 8 November 2021.

Hudah, Sholihul (2015). "Kampung Inklusif: Model Toleransi Antar Agama di Balun Lamongan," *Jurnal Al Hikmah: Jurnal Studi-studi Agama*. Vol 1. nomor 1.

Huda, Sholihul (2015). "Kampung Inklusif: Model Toleransi Antar Agama di Balun Lamongan."

Kementerian Agama (2021). *Roadmap Moderasi Beragama.* Jakarta: Kementerian Agama RI.

Kementerian Agama (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Kompas (2018). "Merefleksikan Momen HUT Kemerdekaan RI dari Tugu Perdamaian." 31 Desember 2018.

Puslitbang Kemenag (2017). *Peta Penyiaran Agama Islam di Masjid di berbagai wilayah Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kemenag.

Riadi, Muchlisin (2021). "Kompetensi Sosial-Aspek, Ciri, Unsur dan Faktor Mempengaruhi." 9 April 2021 Kajian Pustaka.com.

Subagia, I Nyoman (2016). "Partisipasi Umat Hindu dan Islam dalam Kegiatan keagamaan di Desa Keramas Kecamatan BlahBatuh Kabupaten Gianyar." *Jurnal Harmoni*, *vol* 15. nomor 3.

Sugiyarto, W (2019). *Dinamika Moderasi Beragama di Kota Makassar*. Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan.

Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan (2021). "Masjid sebagai Pusat

Pendidikan Moderasi Bergaama di Era Pandemi."
http://melayuonline.com/ind/about/dig/2/pertanggungjawabanakademis-mela-yuinline/.

# Menyibak Moderasi di Lebak

Suhanah

## Jalan Tengah dalam Beragama

Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam perbedaan seperti suku, budaya, agama, adat istiadat dan kepercayaan. Perbedaan dalam masyarakat merupakan keberagaman Indonesia yang dapat dirangkai dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu.

Agama di Indonesia memiliki peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila, pada sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa". Agama di Indonesia yang dilayani ada enam macamnya dan memiliki perbedaan pemahaman tersendiri dan memiliki keyakinan terhadap Tuhan yang berbeda. Perbedaan dan pemahaman agama serta keyakinan yang ada dapat diatasi dengan adanya sikap moderasi beragama. Moderasi beragama merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pilihan pada moderasi menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah kunci keseimbangan, demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. (Kementerian Agama, 2019, h. 18).

Moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan

ajaran agama secara adil dan seimbang agar terhindar dari perilaku ekstrem atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya. Karena itu, setiap umat beragama dalam menjalankan ajaran agamanya, tidak boleh radikal dan tidak boleh liberal melainkan harus tengah-tengah yaitu adil dan seimbang (Kemenag, 2019 h. iii).

Sikap moderat selalu menghindari perilaku yang ekstrem atau radikal memiliki kecenderungan ke arah jalan tengah. Menurut Menteri Agama 2014-2009 Lukman Hakim Saifuddin, Moderasi Beragama dapat dimaknai sebagai cara pandang, sikap dan perilaku yang selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, seimbang dan tidak ekstrem dalam praktik beragama. Pandangan itu dinyatakannya pada Webinar Moderasi Beragama Islam Wasatiyah dan Kerukunan Bangsa, 11 Juni 2020.

Norma umum yang ingin dikembangkan dalam moderasi beragama adalah sikap untuk saling mendengarkan, saling belajar dan melatih kemampuan, mengelola dan mengatasi beragam perbedaan agama, suku, etnis, kultur, maupun pilihan. Berbeda dengan cara pandang individu atau kelompok ekstrem. Mereka bersikap fanatik terhadap satu pemahaman keagamaan saja dan menolak yang berbeda. Menurut Azyumardi Azra seperti dikutip Mubarak (2008: 203), kelompok radikal –istilah yang bermiripan dengan ekstremisme—biasanya memiliki dua arah gerakan. Pertama, memberantas kemaksiatan yang biasanya diiringi dengan kata-kata "amar makruf nahi munkar". Kedua, aktualisasi ukhuwah Islamiah yang bisa direfleksikan di antaranya aksi pembelaan terhadap umat Islam. Kelompok ini tidak jarang mengecam dan menjauhi orang-orang yang berbeda pemahaman walaupun orang tua yang melahirkan, mendidik, dan memberikan kasih sayang kepada mereka. Setidaknya orang garis keras menjaga jarak dengan orang yang berbeda pemahaman keagamaannya.

Orang-orang yang bersikap moderat akan mengambil jalan tengah, tidak paling benar, saling menjaga kerukunan, tolong menolong, harga menghargai dan hormat menghormati sesama manusia. Moderasi beragama ditandai, di antaranya, pandangan yang kembali pada nilai-nilai dasar Islam dan menaati kesepakatan bersama serta tidak saling menyalahi. Islam yang sebenarnya adalah Islam yang wasatiyyah atau moderat Islam yang *rahmatan lil alamin*. Nilai-nilai Islam memiliki rasa kasih sayang terhadap sesamanya, hidup rukun, saling menghormati dan menghargai perbedaan.

Menurut Nurcholis Madjid, Islam moderat merupakan corak keislaman yang menjunjung nilai-nilai inklusivisme dan pluralisme (Bakti, 2005). Sedangkan menurut KH. Abdurahman Wahid, Islam moderat dimaknai sebagai sebuah pemahaman yang mengedepankan demokrasi, menjamin kemurnian ideologi nasional (Pancasila) dan kesatuan konstitusi. Karakteristik moderasi mengacu pada nilai-nilai kebudayaan dan agama, yang mendukung pembangunan (Wahid, 1985). Dalam konsep Lukmanul Hakim Saifuddin, moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem (Kementerian Agama RI, 2019).

Dari uraian di atas, dapat dikatakan moderasi beragama adalah pemahaman dan sikap yang tidak fanatik terhadap satu pandangan tertentu, tidak merasa paling benar dan menganggap pemahaman keagamaan orang lain salah. Sikap moderat saling memahami pendapat orang lain dan saling mengharga perbedaan itu. Moderasi dalam arti memilih jalan tengah (wasatiah) ditunjukkan dengan sikap yang mampu menempatkan pada posisi sewajarnya dan tidak berlebihan. Contoh sikap moderat dalam komunitas Islam misalnya menerima perbedaan dalam berbagai masalah-masalah furuk (cabang).

## Banten dan Kondisi Keberagamaan

Kabupaten Lebak salah satu kabupaten provinsi Banten dengan pemeluk mayoritas muslim. Umat Islam mencapai 1.185.077 jiwa, Kristen 1.328 jiwa, Katolik 704 jiwa, Hindu 12 jiwa, Buddha 1.496 jiwa, Konghucu 23 jiwa dan agama lainnya 3.998 jiwa. (Kemenag Lebak, 2021). Desa Narimbang Mulia merupakan wilayah pemekaran pada 2008 dari Desa Jatimulya, adapun Desa Jatimulya merupakan hasil pemekaran dari Kelurahan Cijoro Pasir pada 1979. Desa Narimbang Mulia dimekarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupeten Lebak Nomor 1 pada 30 Mei 2008 tentang pembentukan, Penataan dan Perubahan Nama Desa-Desa di Wilayah Kabupaten Lebak.

## Sikap Jalan Tengah

Tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Lebak mempraktikkan moderasi beragama. KH. Khudori sudah paham betul apa arti dari moderasi beragama. Wakil Ketua MUI, Sekretaris FKUB, dan Pengawas di Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Lebak ini mengatakan bahwa kata moderasi dalam Islam disebut *wasathan* dalam arti tengah-tengah, tidak ke kanan dan tidak ke kiri, tidak hitam dan tidak putih. Moderasi beragama mencerminkan perilaku adil dan seimbang, tidak ekstrem dan liberal. Sikap tokoh agama atau penceramah yang tidak menjelek-jelekkan atau mencaci pemahaman orang lain berbeda pemahaman adalah contoh moderasi beragama. Perbedaan pemahaman justru harus dihargai dan hormati. Pemahaman KH. Khudori ini selaras dengan pengertian moderasi beragama dalam *Tanya Jawab Moderasi Beragama* Kementerian Agama RI. Di sini, moderasi beragama didefinisikan sebagai proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrem atau berlebihan saat mengimplementasikannya.

KH. Khudori berpandangan Negara Indonesia mempunyai penduduk yang heterogen, dari agama, kultur, etnis, maupun bahasa. Bukan hanya agama yang beragam, aliran di masing-masing agama juga realitas yang tidak dapat dihindari. Islam memiliki beragam aliran atau mazhab atau pemikiran agama. Begitu pula dengan Kristen dengan tidak kurang dari 320 aliran.

Dalam menghadapi keberagaman agama dan pemahaman keyakinan yang berbeda, para tokoh agama dan masyarakat yang ada di wilayah ini menyatakan bahwa perbedaan-perbedaan tersebut sudah ada sejak dahulu seperti dalam Al-Qur'an disebutkan terdapat perbedaan dalam beragama, sebagaimana Allah berfirman bahwa Allah berkuasa *ummatan waḥidah* tetapi Allah tidak menghendaki demikian. Allah berkehendak *ummatan wasaṭan* (tengah). Karenanya, menurut KH. Khudhori orang yang berbeda agama tidak boleh dianggap sebagai musuh, karena Allah yang menghendaki adanya. Allah berfirman, perbedaan itu rahmat bagi sekalian alam. Perbedaan itu indah karena berwarna-warni cara ibadatnya. Namun begitu, dalam Islam terdapat panduannya dalam hal ibadat. Allah berfirman, *lakum dīnukum waliyadīn*.

Dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, umat beragama saling membutuhkan dan karena itu menuntut sikap saling menghargai dan menghormati, termasuk penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Saling membutuhkan ini dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari di pasar. Penjual bisa datang dari beragam suku seperti China, Batak, Jawa, Sunda, atau Betawi. Begitu pula pembelinya. Mereka berkumpul tanpa mempertimbang

agama atau asal masing-masing (KH. Khudhori, 29 Mei 2021).

Moderasi beragama diklaim juga sudah dipraktikkan dalam kehidupan di Desa Narimbang Mulia Kabupaten Lebak Banten. Kepala Desa Narimbang Oong Iza Fuzaemi mengatakan, hubungan antarumat beragama berjalan baik. Mereka saling menghargai dan menghormati walaupun berbeda agama. Bila terdapat salah satu umat beragama yang meninggal, masyarakat lainnya saling hadir di tempat umat yang meninggal tersebut (Fuzaemi, 2021).

Hubungan antarmazhab atau aliran paham keagamaan juga dipandang baik. Desa ini pernah kedatangan LDII dan Jamaah Tabligh dari Jawa. Mereka datang untuk iktikaf di masjid di desa ini. Biasanya kepala desa akan menanyakan apakah mereka melapor belum kepada RT, RW, dan Kelurahan. Kepala desa tidak berani memberikan izin jika aparat tidak membolehkan. Karena tidak mendapatkan izin pengurus masjid biasanya juga tidak mengizinkan mereka melakukan iktikaf, kecuali hanya untuk salat. Ini dialami KH. Siddiq pengurus masjid dan pimpinan pondok pesantren Bani Istiqlal.

Menurut Euis Muniro, guru mengaji kaum ibu di Majelis taklim Bani Istiqlal Kampung Ancol, perbedaan aliran bukan masalah berarti. Jemaah pengajiannya ada yang berasal dari Jamaah Tabligh dan LDII. Bahkan salah seorang jemaah dari LDII mengatakan jika terdapat jemaah pengajian ada yang sakit ia siap membantu. Euis menceritakan suatu ketika pernah seorang kerabat dari jemaah LDII meninggal. Warga setempat berdatangan untuk takziah ke rumah mereka sebagaimana tradisi pada warga lainnya. Jenazah tidak dikubur di pemakaman umum melainkan pemakaman khusus LDII (Muniro, 2021).

Muniro mengatakan kerja sama intern umat Islam di kampung itu baik. Mereka biasa saling tolong-menolong, dan memberi bantuan dana bagi jemaah yang membutuhkan. Menurutnya, tidak ada satu agama yang menyuruh umatnya berbuat kerusakan di dunia ini seperti pengeboman karena pada dasarnya agama mengajarkan perdamaian, saling menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, dan saling tolong menolong dalam kebaikan. Ia mengutip ayat Al-Qur'an, *wataʿāwanū ʿala al-birri wa at-taqwā wa lā taʿāwanū ʿala al-iṡmi wa al-ʿudwān* (Muniro, 2021).

***Beragama Secara Adil dan Seimbang***

KH Baijuri berpandangan bahwa yang dikatakan adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam suatu organisasi kemasyarakatan, contohnya dalam pembentukan kepengurusan FKUB, kita harus berbuat adil, kalau penduduknya mayoritas Islam otomatis yang menjadi pengurus harus lebih banyak dari orang Islam dibandingkan dengan agama lain. Begitu juga dalam penduduk yang mayoritas Buddha, maka pengurus dalam FKUB itu harus lebih banyak yang beragama Buddha, supaya adil dan seimbang. Masalah keberagaman agama memang sudah ada di dalam Al-Qur'an dan juga dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan itu tidak bisa dihilangkan, oleh karenanya tidak boleh ada larangan bagi umat beragama untuk menjalankan ibadatnya masing-masing. Kecuali agama-agama baru yang muncul, seperti Bahai harus dilarang oleh pemerintah karena tidak terdapat dalam Undang-Undang dan pemerintah harus membuat dahulu undang-undangnya. Apalagi masalah LGBT dan ateis harus dilarang oleh pemerintah, dan bahkan dalam pernikahannya tidak boleh dilegalkan (KH. Baijuri, 2021).

KH. Baijuri mencontohkan sikap adil dan seimbang. Di Indonesia, pemerintah melayani enam agama dan memiliki aturan tentang pendirian rumah ibadah berupa Nomor 9 dan 8. Pendirian rumah ibadat harus mempertimbangkan agama mayoritas penduduk sekitar. Rumah ibadah tidak dapat dibangun tanpa izin. Minimal harus terdapat tanda tangan 90 orang pengguna rumah ibadat dan 60 tokoh agama (KH. Baijuri 2021)

***Komitmen Kebangsaan***

Menurut KH. Khudori, sebagai dasar negara Pancasila tidak dapat diubah. Pancasila hasil pemikiran para ahli. Isi dan kandungannya tidak diragukan lagi. Dahulu, Pancasila memuat kalimat *umat Islam wajib melaksanakan syariatnya*. Sekarang kalimat tersebut telah dihapus. Tetapi meskipun telah dihapus, sebagai umat Islam wajib untuk terus melaksanakan syariat Islam. Selain itu dikatakan juga dalam buku Wawasan Pancasila bahwa di atas segala kebesaran, kekuasaan, dan kewajiban, bangsa Indonesia harus merumuskan konsepsi tentang dasar negara yang dapat meletakkan segenap elemen bangsa di atas suatu landasan yang statis, sekaligus dapat memberikan tuntunan yang dinamis.

Para pendiri bangsa berusaha menjawab tantangan tersebut dengan

melahirkan konsepsi negara persatuan (kekeluargaan) yang berwatak gotong royong dan bukan negara perseorangan seperti dalam konsepsi Liberalisme-Kapitalisme. Dengan semangat kekeluargaan, konsepsi sebagai dasar negara dirumuskan dengan merangkai lima prinsip utama sebagai "titik temu" (yang mempersatukan keragaman bangsa), titik tumpu (yang mendasari ideologi dan norma negara), serta titik tuju (yang memberi orientasi kenegaraan-kebangsaan) negara bangsa Indonesia. Kelima prinsip utama tersebut dikenal dengan sebutan Pancasila.

Dalam *Wawasan Pancasila* disebutkan bahwa Soekarno menyatakan Pancasila tidak hanya memiliki signifikansi nasional, akan tetapi juga memiliki signifikansi universal dan dapat diterapkan secara Internasional. Bhineka Tunggal Ika berarti berbeda namun tetap satu jua, hal tersebut menggambarkan terdapat agama yang beragam tetapi tetap menjalankan agama masing-masing sesuai agama dan kepercayaan yang diyakini. Menurut KH. Baijuri, walaupun beragam agama yang ada tetapi satu agama yang tetap kita yakini, harus tetap dipertahankan dengan sebaik-baiknya. Dengan kebinekaan itu manusia diuji keimanannya.

NKRI sudah tidak bisa diubah-ubah dan kita sebagai penduduk Indonesia harus mengakui negara kesatuan republik Indonesia dan harus mematuhi pada pimpinan kita. Oleh Karena itu kita harus mengakui Pancasila sebagai landasan negara kita dan tidak boleh melanggar Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Kalau ada orang yang berbuat sesuatu tetapi melanggar UUD 1945 maka harus ditindak, yang menindak juga harus aparat pemerintah, seperti contoh; Ahmadiyah, Syiah dan LDII (KH. Khudhori, 2021).

***Sikap Toleran dan Penerimaan pada Budaya Lokal***

Dalam sebuah FGD di Banten, peserta merumuskan toleransi beragama memiliki tiga kriteria: saling menghormati dan menghargai sesama umat beragama, baik intern maupun antarumat beragama; membiarkan orang lain untuk beribadat menurut agama dan keyakinannya; dan tidak memaksa orang lain untuk memeluk agama yang kita anut atau menyuruh beribadah seperti kita. Sedangkan toleransi diartikan sebagai sikap untuk tidak mencampuri atau mengintervensi urusan atau perilaku pihak lainnya (Hermawati, 2016).

Salah seorang yang tergabung dalam kelompok pemuda lintas agama me-

mandang bahwa di wilayah Kabupaten Lebak ini penduduknya beragam ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu dan Konghucu. Keberagaman agama yang ada di wilayah ini tidak menjadi penghalang terwujudnya Kerukunan Antarumat Beragama. Bahkan hubungan antar maupun intern umat beragama berjalan dengan baik. Di internal Islam walaupun berbeda dalam masalah khilafiah tapi masyarakatnya tetap rukun-rukun saja tidak pernah terjadi konflik. Karena yang terpenting kita saling menghargai dan menghormati perbedaan tersebut. Begitu juga terhadap umat minoritas agama kita harus saling menghormati dan berbuat baik. Pentingnya menghormati dan menerima perbedaan itu untuk mengurangi terjadinya konflik antar agama.

Relasi sosial merupakan hubungan yang dibangun oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan komunikasi yang dapat menghasilkan komunikasi yang baik yang dapat berhubungan dengan wilayah pekerjaan, persaudaraan, mediasi dan proses belajar mengajar (Sholichah, 2019). Islam di Indonesia sangat toleran terhadap budaya. Toleransi tersebut ditunjukkan dengan adanya sikap akomodatif terhadap budaya lokal. Sikap itu mencerminkan adanya kemampuan dan kemauan Muslim Indonesia untuk menyerap budaya lokal yang menjadi bagian dari ajaran Islam. Budaya dipandang sebagai bagian yang inheren (melekat) dengan kehidupan masyarakat, sehingga tidak memungkinkan bagi sebuah gerakan yang membawa napas *rahmatan lil'alamin* memberangus (melarang) sesuatu yang sudah menjadi bagian dari masyarakat.

Di wilayah Kabupaten Lebak dalam kehidupan sehari-hari di internal Islam terdapat kultur atau budaya (cara hidup yang berkembang, kepercayaan warisan leluhur), tradisi (kebiasaan) keagamaan yang dilakukan masyarakat Islam seperti: tahlilan orang meninggal hari pertama sampai hari ketujuh, *yasinan* dan selawatan, *maulidan*, ziarah kubur, *ngaji* kubur pada saat baru meninggal, haul, tujuh bulanan dan sebagainya. Masyarakat setempat ada yang setuju (melaksanakannya), ada yang tidak setuju tetapi mereka diam dan tidak membidahkan, karena sejak dahulu sudah ada perbedaan mazhab/aliran pemikiran/paham keagamaan. Di wilayah ini walaupun ada perbedaan-perbedaan tetapi tidak melakukan perdebatan, melainkan hidupnya rukun dan damai (KH. Baijuri, 2021). Masyarakat di Kabupaten Lebak, paham keagamaannya yang dominan adalah NU dan urutan kedua Muhammadiyah. Ke dua ormas ini hubungannya sangat baik walaupun ada

perbedaan-perbedaan dalam masalah khilafiah, tetapi tidak dipermasalahkan, masing-masing mereka mempunyai cara tersendiri. Budaya lokal atau tradisi yang biasa dilakukan ormas NU seperti tahlilan dan *yasinan* di rumah keluarga yang meninggal, sanak keluarga dan para tetangga sama-sama membaca Al-Qur'an dan membaca doa tahlil, kemudian disediakan makan dan minuman, ini tidak ada masalah.

Pada ormas Muhammadiyah bila di rumah keluarganya ada yang meninggal juga dibacakan Al-Qu'an untuk mendoakan orang yang meninggal tetapi tidak membaca doa tahlilan serta tidak menyediakan makan dan minuman, kecuali para sanak keluarga dan para tetangga yang mau menyiapkan makan untuk pihak keluarga yang sedang ditimpa musibah kematian. Pada intinya kedua ormas tersebut dalam tradisi pengajian di tempat keluarga yang meninggal, sama-sama mendoakan tetapi caranya berbeda. (Wawancara dengan Sanusi Pemuda Muhammadiyah, Juni 2021). Di wilayah Kabupaten Lebak Banten khususnya di Kecamatan Sajirah Desa Mekarsari, ada kultur/budaya lokal (warisan leluhur) yang namanya *adat ngembang* atau ziarah kubur tahunan yang biasa dilakukan pada setiap selesai panen padi, di mana para peziarah itu terdiri kaum laki-laki dan perempuan berdatangan dari beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Kuburan/pemakaman itu terdiri atas kuburan para syekh/wali yang berada di Kabupaten Lebak. Kegiatan yang dilakukan di kuburan tersebut adalah membaca Al-Qur'an dan berdoa. Setelah selesai berdoa masing-masing yang hadir makan secara bersama-sama dan saling berbagi makanan yang ia bawa masing-masing. Biasanya yang hadir membawa nasi tumpeng dan lauk pauk yang tidak terlupakan adalah ayam bakar bekakak. Sebagian kecil hasil panen, dibawa ke rumah Pemangku adat sesuai keinginan yang ia berikan mau menyerahkan berapa banyak dari hasil panennya itu (Pasundan, 2021).

Ada juga yang kedatangannya semata-mata untuk berziarah dan memberi sumbangan dana untuk berlangsungnya acara tersebut. Kuburan itu terdiri dari makam para syekh ataupun makam anak-anak dari keturunan cucu putu buyut para syekh/wali. Kuburan tersebut sudah dianggap keramat oleh masyarakat *adat ngembang*. Acara ini dilakukan dengan tujuan adalah tanda bersyukurnya atas hasil panen dan berdoa untuk para wali/syekh. Pelaksanaan adat *ngembang* ini diatur oleh pemangku adat. Ada yang

gelombang pertama dimulai dari jam 8.00-10.00. Gelombang kedua mulai jam 13.00 – 15,00. Pada malam harinya para tokoh *adat ngembang* berkumpul melakukan pembacaan kitab Syeh Abdul Qadir Djaelani. Acara pembacaan kitab SyeKh Abdul Qodir Djaelani dimulai pukul 20.00-22.00 WIB, setelah selesai lalu makan bersama dan hingga jam 24.00 berhenti.

***Pelembagaan Moderasi Beragama***

Salah satu Lembaga majelis taklim kaum ibu yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Bani Istiqlal yang berada di Desa Narimbang Mulia Kabupaten Lebak. Majelis taklim kaum ibu ini dipimpin Eis Muniro. Beliau mengatakan bahwa jemaah majelis taklim ini yang hadir kebanyakan berpaham *Ahlus Sunah Wal Jemaah* dan Muhammadiyah tetapi juga yang berpaham LDII dan Jemaah tablig ikut hadir, walaupun pemahaman keagamaannya berbeda. Para jemaah pengajian duduk bersama menyimak materi pengajian tanpa membahas masalah-masalah khilafiah. Materi pengajian yang disampaikan antara lain adalah praktik wudu, rukun wudu, praktik salat, baca tahlil, baca selawat. Bahkan salah seorag jemaah LDII mengatakan pada ketua majelis taklim, jika ada jemaah yang sakit, ia siap membantu.

Pemerintah Kabupaten Lebak mendukung tradisi lokal. Salah satunya *adat ngembang*. Dalam sambutan, Kepala Dinas Pariwisata mengatakan tradisi *ngembang* menjadi aset pariwisata. Meski tidak mendapat bantuan pemerintah tradisi ini terpelihara.

## Penutup

Masyarakat di Kabupaten Lebak Banten sudah lama mempraktikkan moderasi beragama. Istilah *moderasi beragama* baru muncul pada zaman Menteri Agama Lukmanul Hakim Saefudin, sedangkan dalam ajaran Islam moderasi beragama disebut dengan wasatiah. Moderasi beragama adalah tengah-tengah dalam artian tidak ke kanan dan tidak ke kiri, tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri, tidak hitam dan tidak putih. Moderasi beragama juga dapat berarti menjalankan agama dan mengamalkannya dengan tidak radikal dan tidak ekstrem, melainkan adil, dan seimbang. Fungsi moderasi beragama sangat penting diterapkan di masyarakat karena dapat memimengurangi konflik internal dan antarumat beragama.

Masyarakat Lebak Banten banyak melakukan tradisi keagamaan seperti

tahlilan, *ngaji* kubur, ziarah kubur, *maulidan*, *yasinan* ketika seseorang meninggal, membaca kunut, selawat, serta adanya tradisi lain seperti ritual adat *ngembang.* Terdapat sebagian masyarakat yang setuju untuk melakukannya, tetapi juga ada sebagian yang tidak setuju. Masyarakat yang tidak setuju hanya diam saja dan tidak melakukan perdebatan apa pun demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa, hal itu terjadi karena tradisi tersebut sudah mendarah daging sejak zaman nenek moyang mereka dan tidak dapat dihilangkan, bahkan termasuk aset pariwisata.

Lembaga atau pranata keagamaan yang dilakukan masyarakat Lebak Banten adalah pengajian di berbagai majelis taklim. Pengajian ini sudah terbiasa dilakukan secara bersama-sama tanpa melihat apa pemahaman keagamaan mereka, baik sebagai ormas NU, Muhammadiyah, LDII, dan Jemaah tablig. Mereka duduk sambil berkomunikasi dengan baik tanpa membicarakan masalah-masalah khilafiah. Perkumpulan semacam ini merupakan salah satu bukti masyarakat setempat melaksanakan apa yang dikatakan moderasi beragama. Pranta lainnya, adat *ngembang*, yang dipelihara masyarakat Kecamatan Sajira. Acara ini dilaksanakan setahun sekali setelah selesai panen padi, sebagai tanda bersyukur kepada sang pencipta Tuhan Yang Maha Esa. Pelaksanaan acara ini berjalan lancar atas kerja sama masyarakat dan tidak ada yang menentang walaupun ada sekelompok orang yang tidak menyetujuinya.

Pranata ketiga tempat berziarah yang dinamakan kuburan para wali atau syekh yang sudah dianggap keramat bagi sebagian masyarakat yang berada di Kabupaten Lebak. Kuburan ini tidak pernah sepi setiap hari selalu dikunjungi para peziarah. Terlebih lagi ketika akan datangnya bulan suci Ramadan dan pada hari setelah hari raya Idulfitri, para pengunjung sangat banyak yang datang untuk berziarah. Lokasi ini juga aman dari kerusuhan atau terjadinya konflik. Ini pertanda bahwa masyarakatnya sudah menjalankan moderasi beragama.

Kerukunan umat beragama di Kabupaten Lebak terjalin sangat baik, hal ini dapat terlihat bahwa masyarakatnya cukup toleran saling menghargai perbedaan pemahaman keagamaannya. Salah satu contoh ada seorang warga yang meninggal dari kalangan umat Buddha, namun warga setempat umat muslim dan umat beragama lainnya saling membantu dan ikut menjemput mayatnya dari rumah sakit menuju ke rumahnya. Begitu juga para

tetangga ikut berdatangan untuk takziah ke rumah yang berduka. Perlu dilakukan sosialisasi tentang moderasi beragama, karena dengan disosialisasikannya masyarakat dapat mengetahui dan mengerti makna dari moderasi beragama.

## Daftar Pustaka

Sholichah, A S (2019). Konsepsi Relasi Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an. *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman*, *3*(2), 191-205.

Abdulsyani, S (1994). *Sosiologi Skematika*, *Teori*, *dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara.

Thoha, A M (2006). *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis*. Jakarta: Gema Insani.

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.*

Geertz, C (1989). *Abangan Santri Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, terj. Jakarta: Pustaka Jaya.

Dahrendorft, R (1986). *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri*, *Sebuah Analisa Kritik*, terj. Yogyakarta: Rajawali.

Ar, E h (2013). Integrasi Sosial Dalam Masyarakat Multi Etnik. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, *21*(1), 191-218.

Hermawati, R, Paskarina, C, & Runiawati, N (2017). Toleransi antar umat beragama di Kota Bandung. *Umbara*, *1* (2).

Kementerian Agama RI (2019). *Moderasi Beragama.* Jakarta.

Kementerian Agama RI (2019, *Tanya Jawab Moderasi Beragama*. Jakarta.

Profil Desa Narimbang Mulia, 2020, Kecamatan Rangkas Bitung Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Rosidin. (2015). *Prosiding Bidang Kehidupan Keagamaan*, *Volume 2 Nomor 1*, 2015.

Setiadi, E, M, & Kolip, U (2013). *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori*, *Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta: Prenadamedia.

Poerwadinata, W J S (1985). Kamus umum bahasa Indonesia. *Jakarta: Balai Pustaka*.

Latif, Y (2020). *Wawasan Pancasila.* Mizan: Jakarta.

Mubarak, Z M (2008), *Genealogi Islam Radikal di Indonesia*, Jakarta.

# Moderasi Beragama di Dataran Tinggi Gayo

Wakhid Sugiyarto

## Pendahuluan

Sebagai warga negara, setiap umat beragama berkewajiban menjaga Indonesia dengan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan, apa pun agama, suku, dan etnisnya. Tantangan menjaga NKRI selalu ada dalam berbagai bentuk, baik *chauvinistic* (berlebihan dalam memandang nasionalisme kebangsaan), maupun ideologi ekstrem kanan dan yang tidak selaras dengan komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan bagi bangsa Indonesia adalah cara pandang kebangsaan yang mengakomodasi dan mengelola seluruh ideologi partisan/golongan agar tetap tegak mempertahankan komitmen Pancasila sebagai ideologi negara.

Meskipun banyak golongan masyarakat berideologi partisan, negara harus tetap moderat agar seluruh ideologi golongan atau partisan dapat dikelola dan tetap pada garis yang disepakati bersama, yaitu ideologi Pancasila. Bangsa Indonesia secara umum moderat, tidak memberi peluang terhadap golongan yang mengembangkan ideologi apa pun yang dapat menggusur ideologi Pancasila dalam kehidupan sosial politik dan keagamaan. Semua kelompok didorong berkomitmen kebangsaan yang sama. Mereka yang mencoba berbeda selalu kehilangan dukungan masyarakat, baik politik maupun keagamaan, karena masyarakat umumnya memang memilih sikap mo-

derat.

Untuk mengurangi konflik yang mungkin terjadi akibat pemahaman agama yang ekstrem atau liberal, dibutuhkan sebuah kebijakan nasional yang berbasis pada model-model moderasi beragama yang sudah ada dan tumbuh di masyarakat dari zaman ke zaman. Bahkan toleransi aktif yang menjadi gerakan terus tumbuh dan berkembang di negeri ini. Tak hanya dialog, wadah dan ruang perjumpaan masyarakat lintas agama, suku dan ras, gerakan toleransi aktif dikembangkan melalui aksi solidaritas kemanusiaan ketika bencana terjadi.

Di beberapa daerah, masyarakat membangun monumen sebagai simbol cinta perdamaian seperti Monumen Merpati Perdamaian di Kota Padang, Tugu Perdamaian di Kota Sampit, Tugu Cinta Damai di Tanjung Selor Kalimantan Utara, di Sulawesi Utara dan lain-lain (*Kompas*, 2018). Aneka tugu atau monumen ini "simbol diam" pengingat masyarakat dan generasi mendatang akan pengingat pentingnya merajut dan menjaga toleransi.

Dari seluruh pelosok negeri, simpul-simpul toleransi terus mengalir merajut temali kerukunan. Seperti masyarakat Hindu dan Islam di Desa Keramas Kecamatan Belahbatu Gianyar Bali, mereka hidup rukun sejak berabad-abad silam. Namun, kerukunan tidak dapat hanya mengandalkan toleransi pasif. Kerukunan membutuhkan toleransi aktif yang dikembangkan berbagai kelompok (Subagia, 2016). Saat umat Hindu melaksanakan Nyepi, umat Islam ikut serta mengarak ogoh-ogoh dan menyumbangkan minuman serta makanan. Sebaliknya, saat kaum Muslim berpuasa, tetangga mereka yang beragama Hindu menghormatinya dengan mengeluarkan larangan tidak makan, minum, dan merokok di depan umat Islam yang berpuasa. Saat umat Islam merayakan Maulid Nabi, umat Hindu memberi sumbangan makanan, dan ketika Idulfitri, umat Hindu datang bersilaturahmi. Kondisi yang lazim ditemui ini menandai sikap saling menghargai antarumat beragama sekaligus ruang perjumpaan kerukunan dan pranata sosial yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang dialog manakala terjadi persoalan sosial antarmereka.

Sesungguhnya model moderasi beragama di desa Keramas juga mudah dijumpai di tempat lain. Pada hari raya keagamaan seperti Idulfitri, di berbagai desa di Jawa dijumpai tradisi *ujung*, kegiatan silaturahmi beranjang sana ke tetangga dan kerabat sekaligus untuk saling memaafkan, diikuti se-

mua lapisan masyarakat tanpa mengenal batas agama. Begitu juga ronda bersama, saling menjaga tempat ibadah, dan saling melayat jika ada warga yang meninggal.

Tradisi toleransi di desa-desa di Jawa salah satunya dijumpai di Desa Balun Lamongan, desa paling unik di Kabupaten Lamongan, bahkan mungkin di Indonesia. Di sini, warganya memeluk tiga agama: Islam, Hindu, dan Kristen. Relasi sosio-kultur dan sosio-religi mereka relatif damai dan penuh toleransi. Desa ini dikenal dengan sebutan "Desa Pancasila" atau "Kampung Inklusif" (Huda, 2015). Di tengah perbedaan agama, mereka dapat membangun tata kehidupan sosio-kultur yang damai dan harmonis.

Tidak terlalu jauh dari Kota Bekasi, terdapat Kampung Sawah dengan model toleransi sangat unik dan menjelma menjadi adat-istiadat sejak lama. Masyarakat Kampung Sawah didominasi etnis Betawi yang biasanya identik dengan Muslim. Tiap warga baru yang datang bisa dengan mudah merasakan kerukunan di sini, cukup dengan melihat warna-warni perbedaan sebagai kekayaan bersama. Pelajaran menjaga hidup bersama dapat dipetik dari warga Islam, Kristen, dan Kristen di pinggiran Bekasi.

Tiga tempat rumah ibadah dibangun berdekatan satu sama lain. Semuanya berada di Jalan Raya Kampung Sawah, di Kelurahan Jatimurni hingga Kelurahan Jatimelati, Bekasi. Di sini terdapat Masjid Agung Al Jauhar yang dikelola Yayasan Pendidikan Fisabilillah (Yasfi), Gereja Kristen Pasundan (GKP), dan Gereja Katolik Santo Servatius. Bila ada konflik antarumat beragama, segera didiskusikan oleh pengurus rumah ibadah yang ada. Konflik pun bisa langsung diredam sejak dini. Saat Natal tiba, warga Muslim selalu membantu mengamankan lingkungan. Bila salat Idulfitri atau Idul Adha, warga Kristiani juga turut mengamankan. Bila ada acara di gereja namun jemaat kurang lahan parkir, maka jemaat dipersilakan parkir di halaman masjid. Untuk menjaga ketenteraman bersama, takmir masjid maupun pengurus gereja melarang ceramah-ceramah agama yang menyulut suasana permusuhan antarumat beragama.

Begitu pun di dataran tinggi Gayo Aceh Tengah, yang dijelaskan bagian pertama buku ini, memperlihatkan bahwa kehidupan sosial keagamaan masyarakatnya juga sangat rukun dan toleran. Toleransi dan kerukunan sudah *genuine*, dan tanpa rekayasa sejak dahulu kala. Emosi keagamaan bangkit karena kolonialisme, sebagai cara mengusir kolonial. Jadi persoalan ekono-

mi dan politik elite, bukan karena agamanya, hanya saja kebetulan si kolonial beragama non Islam. Kolonialisme adalah perbudakan dan penjarahan yang menafikan keberadaan dan kehormatan orang lain. Kaum pribumi umumnya dimasukkan manusia Indonesia klas tiga, setelah Eropa, dan Asia lainnya.

Tujuan penyusunan naskah ini adalah menyediakan bahan untuk merumuskan sebuah kebijakan moderasi beragama yang berbasis pada kebutuhan masyarakat. Sementara manfaat secara praksisnya adalah bisa menjadi bahan pancingan dalam menyusun model dan formula moderasi beragama. Naskah ini diharapkan dapat menjadi inspirasi baru dalam menyusun model implementasi moderasi beragama yang lebih kekinian tanpa meninggalkan pijakan kerukunan beragama yang sudah menjadi realitas kehidupan masyarakat Nusantara sejak zaman dahulu.

Kerangka konseptual buku penguatan moderasi beragama di kalangan masyarakat ini mengacu moderasi beragama yang telah mulai disosialisasikan di seluruh Indonesia, yaitu komitmen kebangsaan (Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD '45), toleransi, antikekerasan dan kearifan terhadap budaya lokal. Narasi moderasi beragama secara operasional sudah jelas, dan sesungguhnya sudah menjadi bacaan semua kita yang pernah duduk dibangku sekolah dasar dan menengah, apalagi di perguruan tinggi, serta sudah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sejak zaman dahulu kala. Bedannya hanyalah pada kosa kata Moderasi Beragama yang memang baru dan hendak dimassalkan di masyarakat agar lebih mudah dipahami dan lebih populis. Bangsa Indonesia dan Nusantara umumnya, bisa hidup bersama dalam berbagai perbedaan agama, teologi, tradisi, kelompok, bahasa dan cara mempertahankan hidup. Semua kelompok apa pun adanya, baik radikal kiri, radikal kanan, yang tidak beragama, yang *chauvinistic*, yang ideologinya kiri atau kanan, yang menghendaki khilafah dan yang menentangnya, semua bisa hidup bersama di gugusan kepulauan Nusantara ini. Semua dapat hidup nyaman asal tidak melakukan kekerasan pada lainnya dan memaksakan kehendak, maka semua dapat hidup damai bersama.

Dalam kehidupan sosial keagamaan, sesungguhnya dapat diteoretisasikan dalam beberapa kelompok berkaitan dengan moderasi beragama. Banyak kelompok sosial keagamaan secara teologis bersikap inklusif kon-

tekstual, memiliki komitmen kebangsaan tinggi, toleran, antikekerasan, arif terhadap budaya lokal dan berpenampilan menyejukkan. Ada juga yang secara teologis inklusif kontekstual, komitmen kebangsaan tinggi, antikekerasan, namun kurang toleran dan kurang arif terhadap budaya lokal, sehingga penampilannya menimbulkan rasa harap-harap cemas di masyarakat.

Ada pula yang secara teologis inklusif kontekstual, memiliki komitmen kebangsaan tinggi dan arif terhadap budaya lokal. namun kurang toleran dan suka dengan kekerasan dalam menyelesaikan masalah, sehingga penampilannya mengkhawatirkan dalam konteks kebangsaan. Ada pula yang secara teologis inklusif tekstual, komitmen kebangsaan tinggi, tidak suka kekerasan, tetapi memiliki perilaku merasa benar sendiri (kurang toleran), dan tidak arif terhadap budaya lokal, sehingga kehadirannya sering meresahkan. Ada juga yang secara teologis eksklusif tekstual, memiliki komitmen kebangsaan tinggi, tetapi merasa benar sendiri, suka kekerasan (setidaknya secara verbal) dan sekaligus tidak arif terhadap budaya lokal, sehingga meresahkan masyarakat.

Dengan teoretisasi di atas, maka kita dapat dengan mudah melihat ormas keagamaan atau kelompok sosial keagamaan di masyarakat mana yang benar-benar moderat, radikal, ekstrem dan liberal. Dengan teoretisasi seperti ini, maka sepertinya tidak banyak ormas keagamaan yang dalam konteks moderasi beragama tidak "bopeng", ketika kita kaitkan dengan narasi moderasi beragama yang sedan dan akan disosialisasikan. Kita dapat menelisik ormas keagamaan mana pun dan hampir kita selalu menemukan ketidaksempurnaannya dalam moderasi beragama. Contohnya ormas FPI. FPI secara teologis inklusif dan kontekstual, komitmen kebangsaan tinggi, arif terhadap budaya lokal, tetapi kurang toleran, dan suka kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Atau almarhum ormas HTI misalnya. HTI secara teologis inklusif kontekstual dan intelektual, toleran, antikekerasan, arif terhadap budaya lokal tetapi memiliki agenda khilafah, artinya hendak membubarkan komitmen kebangsaan dan sebagainya. Dari sini kita pun biasa memasukkan ke kelompok manakah ormas keagamaan kita seperti NU, Muhammadiyah, Persis, LDII, IJABI dan sebagainya. Atau bagaimana ormas keagamaan PGI (dan 8 aras utama lainnya atau 333 aliran Kristen di Indonesia), PHDI, MATAKIN, KWI, Walubi, MATASI dan seterusnya bahkan ormas kepemudaan apa pun. Ada misalnya ormas kepemudaan tertentu merasa paling ber-

hak untuk menjaga NKRI harga mati, tetapi melakukan kekerasan terhadap kelompok sosial lainnya, setidaknya kekerasan verbal.

Di Aceh Tengah pun begitu halnya. Apalagi masyarakat Aceh pernah terlibat dalam tindakan makar dalam bentuk pemberontakan untuk memisahkan diri dari pemerintah pusat, karena berbagai persoalan yang tidak dapat diselesaikan dengan pemerintah pusat. Kedua belah pihak, baik masyarakat Aceh bersama para elite politik sosial keagamaannya maupun pemerintah pusat tidak bisa disalahkan atas terjadinya pemberontakan masyarakat Aceh itu, yaitu peristiwa Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pada 1950an dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 2000an. Realitas sejarah memperlihatkan kekecewaan masyarakat diperlihatkan pemerintah pusat yang mengingkari janji kepada masyarakat Aceh kala itu. Untu memahami ini bisa dibaca buku-buku sejarah berkaitan dengan sejarah Aceh dan diaspora Aceh.

## Aceh Tengah

Aceh Tengah adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang terletak di Aceh bagian Tengah yang diapit Bener Meriah, Aceh Utara dan Bireun di Utara serta Gayo Luwes dan Aceh Barat. Sebagai dataran tingi Aceh Tengah atau sering disebut sebagai *highland* Gayo, Aceh Tengah merupakan lahan yang subur jika diolah dengan baik, karena lahannya yang melandai hingga ke pantai utara Sumatra (selat Malaka) dan banyak sungai mengalir di wilayah itu yang bermuara di Aceh Barat. Hawanya dingin dan sejuk karena merupakan bentangan barat utara dari di dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan yang membentang dari Provinsi Lampung di selatan, Bengkulu, Jambi, Sumatra Barat, Sumatra Utara (dataran tinggi Toba) hingga sampai di Provinsi Aceh.

Dari semua lokasi yang menjadi bentangan pegunungan Bukit Barisan itu banyak gunung tinggi, perbukitan, danau besar dan kecil yang bertebaran di semua wilayah itu. Bahkan di dataran tinggi Toba ada danau terbesar di Indonesia, yaitu danau Toba dengan pulau Samosir seluas sekabupaten Samosir. Danau terbesar kedua adalah danau Lot Tawar yang berada persis di pinggiran Kota Takengon yang luasnya kira-kira separuhnya danau Toba. Jadi besar sekali. Keduanya dikelilingi oleh perbukitan yang menjamin pasokan air untuk danau. Di danau Lot Tawar sudah dirancang pula bendung-

an dan kanal pembangkit listrik raksasa, yang rencananya dapat mencukupi kebutuhan listrik se-Sumatra dan Jawa. Tetapi entah kapan jadinya proyek yang sudah dimulai sejak tahun 2000an itu.

Di Aceh Tengah banyak terdapat perkebunan kopi dan coklat yang pada awalnya dilakukan pengusaha Belanda. Para pengusaha Belanda atas jaminan keamanan dari pemerintahnya, membuat perkebunan kopi, pala, lada, coklat, buah-buahan, persawahan dan bahkan mariyuana. Bekas-bekas kebun itu masih terdapat bekasnya hingga hari ini, meskipun semakin berkurang karena alih fungsi sebagian lahan, seperti menjadi hutan pinus karena desakan kebutuhan pabrik kertas di Lhokseumawe waktu itu. Lahan pinus itu sekarang sudah sangat berkurang juga karena penjarahan oleh rakyat pascakesepakatan Helsinki dan tidak beroperasinya pabrik kertas Indah Kiat di Lhokseumawe.

Lahan pinus itu sekarang berubah menjadi lahan kritis, karena rakyat yang membabat pohon pinus itu tidak memiliki keahlian untuk mengolahnya, karena harus bermodal besar. Dahulu jarang ada banjir di Aceh, karena hutan dipenuhi GAM hingga investor susah masuk. Sekarang siapa pun seperti leluasa membabat hutan untuk kepentingan lain yang sering tidak jelas kapan akan dimanfaatkan secara benar. Padahal jika ada intervensi pemerintah untuk membangun irigasi besar-besaran Aceh Tengah dapat menjadi wilayah lumbung pertanian yang dapat menjamin kebutuhan pokok rakyat.

Dataran tinggi pegunungan yang melandai menjauh sampai ke pantai selat Malaka (Aceh Utara dan Aceh Barat), adalah lahan yang sangat cocok untuk berbagai komoditas pertanian. Tetapi ini memerlukan modal sangat besar, dan hanya pemerintahlah yang bisa melakukan. Karena tidak ada intervensi pemerintah, seperti sekarang ini, tanah banyak dibiarkan meranggas dan rawan kebakaran di musim kemarau dan banjir besar melanda Aceh Barat dan Aceh Utara di musim hujan. Sungai-sungai mulai banyak yang mati, kecuali sungai yang berasal dari danau Lot Tawar yang berada di pinggiran Kota Takengon.

Dataran tinggi Gayo dihuni oleh beberapa suku besar yang dominan, dan Islam menjadi agama yang paling banyak dianut penduduknya. Mereka adalah etnis asli Gayo, kemudian disusul etnis Aceh lainnya, etnis Jawa, dan baru kemudian Minang, Melayu dst. Mereka sama-sama dominan seba-

gai petani sawah, kebun dan pedagang. Aparat Sipil Negara (ASN) rata-rata didominasi etnis Gayo dan Aceh, sementara Jawa banyak bergerak dibidang pertanian dan perkebunan. Etnis lain seperti agak banyak yang menjadi TNI dan Polri. Sementara itu, etnis lain seperti Tionghoa, dominan di perdagangan dan pemilik perkebunan.

Di Aceh Tengah ada istilah popular "bekerja dan bersopan santunlah seperti orang Jawa atau Sunda dan berpolitiklah seperti orang Batak atau Minang". Hal ini adalah karena etnis Jawa di Aceh Tengah (Aceh Tengah dan Bener Meriah, Gayo Luwes dan Kotacane) umumnya dikenal pekerja keras, ulet, sabar dalam bekerja dan tidak pernah membuat keributan. Seperti umumnya, memang etnis Jawa ke mana pun merantau, termasuk di Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Luwes dan Kotacane adalah untuk memperbaiki nasib hidupnya. Itulah sebabnya, etnis Jawa umumnya hidup makmur karena rajin, ulet dan sabar dalam bekerja. Pemalas tidak akan berani merantau mengadu nasib yang belum jelas. Mereka sangat adaptif dengan masyarakat setempat, termasuk dalam kehidupan sosial keagamaan.

Kabupaten di Aceh Tengah terdiri dari 13 kecamatan dengan jumlah penduduk sekitar 215.576 jiwa. Kecamatan paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Bebesan dengan jumlah penduduk 41.010 jiwa, yang posisinya di pusat Kota Takengon atau ibukota kabupaten, sedang yang paling sedikit adalah Kecamatan Abu Lintang dengan jumlah penduduk 6.879 jiwa. Sementara itu jumlah penduduk Aceh Tengah menurut agamanya adalah beragama Islam 214.671 jiwa, Kristen 410 jiwa, Katolik 132, Hindu tidak ada, Buddha 255 dan Konghucu tidak ada. Jadi Islam mayoritas mutlak di Aceh Tengah.

Dalam kehidupan sehari-hari di Kota Takengon utamanya Kecamatan Bebesan, kehidupan ekonomi relatif bagus perputarannya. Ha ini terlihat dari hiruk pikuknya masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Tidak ada riak-riak gelombang yang mengganggu seperti premanisme, baik dalam kehidupan ekonomi, sosial dan keagamaan, bahkan di masa ketika GAM mendominasi wacana publik Aceh untuk melepaskan diri dari NKRI, etnis Tionghoa yang umumnya beragama Buddha dan Batak yang Kristen sama sekali tidak diusik hak kehidupan ekonomi, sosial dan keagamaannya. Ketika razia jilbab misalnya, begitu ketahuan bahwa mereka tidak Muslim di KTP-nya, disuruh lanjutkan perjalanan atau aktivitas, tidak ada dipaksa pa-

kai jilbab. Mereka yang nonmuslim ini sebagian besar berada di Kecamatan Bebesan itu dan hidup rukun dengan saudara-saudaranya yang mayoritas muslim. Mereka hidup bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan. Jika nonmuslim ada acara hajatan misalnya, semua peralatan pesta dipinjam dari masjid dan yang memasak adalah muslim yang itu juga gratis alias tidak bayar.

Jumlah penduduk Aceh Tengah hanya sekitar 215.576 jiwa., sementara Kabupaten Bener Meriah hanya sekitar 80.000 Jiwa dan Gayo Luwes 75.000 jiwa. Dataran tinggi Gayo Aceh Tengah di masa lalu meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Luwes. Setelah pemekaran, Aceh Tengah menjadi kabupaten tersendiri dan ibukotanya tetap di Kota Takengon. Sementara Bener Meriah beribu kota baru di Simpang Tigo Redelong.

## Moderasi Beragama Di Aceh Tengah

### Pemahaman tentang Moderasi Beragama

Masyarakat Aceh Tengah sebagian besar menganut agama Islam atau sekitar 214 ribu jiwa. Ada sebagian kecil yang beragama lain yang jika ditotal tidak lebih dari 2 ribu jiwa. Mereka telah hidup rukun dan damai sejak zaman dahulu. Tidak pernah terjadi gesekan antar etnis dan agama. Gesekan dengan etnis lain, utamanya etnis Jawa baru terjadi ketika terjadi usaha sebagian masyarakat Aceh untuk melepaskan diri dari NKRI karena ketidakpuasan terhadap Pemerintah Pusat. Di masa-masa Gerakan Aceh Merdeka (GAM) bergerilya ini, provokasi bahwa suku Jawa telah menjajah Aceh telah diwacanakan sedemikian kuatnya. Karena itu jangan heran jika di sepanjang pantai barat maupun pantai selat Malaka dari perbatasan Sumatra Utara hingga Banda Aceh dan kemudian melingkar di pantai barat hingga Kabupaten Singkil agak sulit kita temukan rumah makan Jawa, meskipun kebun dan sawah-sawah banyak yang dikelola orang Jawa.

Di dataran tinggi Gayo, Gayo Luwes, Kotacane dan Aceh Tenggara adalah pengecualian, etnis Jawa cukup kuat secara ekonomi dan bahkan politik, sehingga sawah, kebun dan rumah makan Jawa pun tidak sulit kita temukan. Bahkan di Aceh Singkil, bupatinya pun dari etnis Jawa. Mereka yang hendak memisahkan diri dengan NKRI itu menyebut dirinya sebagai Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sisa-sia provokasi itu masih terasa hingga kini, ter-

utama jika akan ada perhelatan Pilkada. Sementara di masa gerakan Darul Islam (DI) masa Daud Beureuh tidak ada gesekan dengan etnis Jawa, karena tidak ada provokasi membangun wacana etnis Jawa sebagai penjajah di tanah Aceh. Kondisi sosial politik saat ini sudah sangat berubah dan masyarakat sudah paham semua petualangan politik para elite. Ketika hampir semua pimpinan daerah dipegang oleh mantan kombatan (tentara) GAM, ternyata kemakmuran juga tidak tiba-tiba datang. Para tengku (ulama) sering menyesali dua tindakan radikal ingin lepas dari NKRI.

Tengku Ahmad Romli, pensiunan Kementerian Agama, misalnya, sambil menangis menceritakan masa pemberontakan DI/TII dan separatis GAM.

> Janganlah lagi bermimpi ingin lepas dari NKRI, karena telah membuat rakyat menderita luar biasa. Di masa-masa kekerasan itu banyak anak-anak menjadi yatim, banyak kampung janda, sawah dan kebun terbengkalai tak terurus, pendidikan dan dayah lumpuh total hingga 60% anak lulusan SMU di tahun 2010 tidak dapat membaca Al-Qur'an, tidak tahu adab dan sopan santun yang Islami, kemiskinan merata di semua wilayah, masyarakat saling curiga sebagai pengkhianat, tetangga baik-baik tiba-tiba tega merampok dan membunuh dan seterusnya. Sudahlah, janganlah lagi ingin referendum agar lepas diri dari NKRI. Aceh ini kata orang merupakan modal perjuangan bagi tegaknya NKRI di awal kemerdekaan, masak ingin keluar (Romli, 2021).

Tengku Ramli bercerita, di masa lalu di Takengon waktu itu ada radio namanya Radio Rimba Raya yang ikut menyuarakan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berpusat di Bukittinggi bahwa Indonesia masih eksis, meskipun Yogya sudah diduduki oleh Belanda. Di era jayanya kelompok GAM, masyarakat Aceh menuntut adanya referendum, tetapi ditolah pemerintah pusat. Jika dilakukan referendum, jangankan Aceh yang para elitenya memang ingin lepas, kemungkinan besar masyarakat Madura pun yang posisinya di tengah-tengah Indonesia kalau dilakukan referendum juga akan lepas dari NKRI. Warga bersyukur, saat ini kehidupan sudah kembali normal, sekolah dan dayah mulai bangkit dengan pendidikan umum dan agama, sawah dan kebun mulai berproduksi, kampung janda sudah semakin berkurang, dan masyarakat semakin paham bahwa mereka se-

lama ini menjadi korban provokasi yang tidak bertanggungjawab.

Begitu pun kata Emanuel (2021) dan Paulus (2021). Menurut keduanya, kehidupan sosial keagamaan kembali normal dan semua rumah ibadah penuh jemaah ketika jam dan waktu ibadah. Masjid Raya Ruhama yang posisinya dekat dengan kompleks perkantoran Kabupaten Takengon, sangat ramai di waktu masuk salat. Rumah ibadah umat Katolik, Kristen dan umat Buddha ramai di waktu-waktu ibadah mereka. Umat Kristen yang umumnya dari etnis Batak dan bernaung di HKBP, bahkan menutup jalan besar di depan gerejanya saat perayaan Natal. Hal seperti ini dipersilahkan oleh masyarakat dan pemerintah.

Hal ini membuktikan bahwa implementasi kehidupan beragama sangat dihormati oleh masyarakat Aceh Tengah. Rumah ibadah HKBP itu juga baru dibangun pada 1990-an dan aman-aman saja tidak ada yang takut ada kristenisasi seperti politisasi keagamaan selama ini. Masyarakat sudah paham, bahwa mereka bukan orang Aceh pesisir maupun Aceh Gayo, tetapi suku Batak yang dalam persepsinya wajar jika beragama Kristen.

Masalah gesekan kehidupan keagamaan yang pernah terjadi justru di kalangan Muslim sendiri yang 99,6% dari penduduk Aceh Tengah itu. Gesekan itu sangat seru dan dinamis sebelum Indonesia merdeka, meskipun sudah reda dewasa ini, yaitu antara *Kom Tue* dan *Kom Mude.* Hubungan antara keduanya sangat memburuk saat terjadi gerakan Darul Islam (DI) Daud Beureuh. *Kom Mude* dianggap sebagai pengkhianat karena tidak ikut gerakan DI Daud Beureuh yang umumnya dilakukan oleh ulama dan pengikutnya itu. Hubungan itu tetap dingin sampai berakhirnya gerakan Darul Islam (DI), yang baru berakhir sekitar tahun 1980-an. Di tempat lain masih terjadi hingga sekarang, pascagerakan sparatis GAM. Hal ini karena *Kom Mude* tidak mau terlibat dalam gerakan separatis itu. *Kom Mude* pun tidak mau disebut pengkhianat, karena di masa kekerasan politik itu, anak-anak masjid yang tak terurus dan dayah yang terbengkalai, *Kom Mude* yang membuat tetap hidup sayup-sayup.

Di Aceh Tengah, saat ini kondisinya sudah sangat kondusif, dan cair di kalangan *Kom Tue* dan *Kom Muda*. Masjid yang sudah terlanjur dikelola keduanya tidak diusik sampai akhirnya muncul semangat pengambilalihan diam-diam oleh *Kom Tua* karena *Kom Muda* tidak memiliki kader dakwah di pedesaan. Generasi *Kom Mude* yang umumnya bersekolah, jarang yang kem-

bali ke desa, sehingga regenerasi ulama *Kom Mude* seperti terhenti. Sementara generasi *Kom Tue*, sepulang dari dayah langsung kembali ke desanya untuk mengamalkan ilmunya di desa dan hidup sebagai orang desa. Itulah sebabnya regenerasi ulama pembaharu atau *Kom Mude* tidak berjalan, setelah meninggalnya para ulama pembaharu generasi awal dan ketiga.

Perdebatan antara *Kom Tue* dan *Kom Mude* itu sudah terjadi sangat sengit di awal abad 20, ketika Muhammadiyah dan NU belum dikenal di Aceh Tengah. Di Bebesan (pusat kota Takengon) pernah difasilitasi debat antara ulama kom Tue dan kom Mude dengan moderator seorang *reje bebesan* (kepala desa). Hasilnya tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah.

Kedua kelompok memiliki pemahaman keagamaan yang sama-sama kuat. Hubungan antara ulama *Kom Tue* yang dipelopori Tengku Damanhuri dan *Kom Mude* yang dipelopori oleh Tengku Abdul jamil sangat dekat pascaperdebatan itu. Tokoh *Kom Mude* Abdul Jalil, menangis sejadi-jadinya ketika musuh bebuyutan dalam debat keagamaan (Tengku Damanhuri) meninggal dunia. Musuh debatnya yang memang lebih senior itu sangat dihormati Tengku Abdul Jalil karena ilmu keagamaannya yang tinggi dan kharisma juga luar biasa. Tengku Damanhuri ini kalau jalan selalu menunduk.

Menurut penuturan Tengku Romli (2021), tidak pernah Tengku Abdul Jalil menangis sejadi-jadinya seperti ketika ditinggal Tengku Damanhuri yang musuh debatnya itu. Belakangan *Kom Tue* sebagian besar menjadi simpatisan Al-Wasliyah dan pada umumnya menjadi tokoh dan pengasuh dayah (pesantren), sementara *Kom Mude* umumnya menjadi simpatisan Muhammadiyah. Kedua kelompok keagamaan ini secara umum sudah moderat dalam beragama.

***Komitmen Kebangsaan***

Dalam berbagai wawancara, baik dari tokoh-tokoh Muslim, Kristen, Katolik dan Buddha terlihat bahwa mereka sangat memegang komitmen kebangsaan. Bagi mereka Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD ’45 adalah realitas yang harus diterima sepenuh hati dan sepenuh jiwa sebagai bangsa Indonesia. Pancasila adalah dasar negara yang merupakan kelanjutan dari Piagam Jakarta yang dihapus tujuh katanya yang terkenal, yaitu Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namanya juga sudah Pancasila ketika menjadi rumusan panitia Sembilan.

Begitu pun Bhinneka Tunggal Ika harus dijaga karena itu adalah realitas sosial di Indonesia, bahkan Nusantara. Sejak zaman dahulu kala, bangsa Nusantara sudah merupakan masyarakat yang beragam dalam berbagai sisi kehidupan. Mereka hidup dalam harmoni dan kedamaian, kecuali berkaitan dengan kepentingan politik, dan hari ini juga tetap seperti itu. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat Nusantara sudah moderat sejak zaman dahulu kala, karena bisa hidup berdampingan dengan siapa pun. Ketika Indonesia baru merdeka, kita hidup dengan berbagai kelompok aliran politik, baik kiri, tengah maupun kanan. Politik ingin berkuasa sendirilah yang mengakibatkan pertumpahan darah, sementara dalam kehidupan sosial keagamaan, adem-adem saja (Abrar, 2021).

Berkaitan dengan NKRI, Tengku Romli (2021) menuturkan, masyarakat Aceh pernah berniat dan berusaha lepas dari NKRI dua kali. Sepertinya tidak ada suku bangsa Indonesia memberontak terhadap negara yang sah sampai dua kali seperti masyarakat Aceh. Tetapi jangan salah, bahwa di Aceh Tengah dukungan terhadap keinginan lepas dari NKRI itu sangat rendah, baik masa DI maupun GAM.

Beberapa tahun lalu ketika Pemerintah Daerah Provinsi Aceh mengajukan bendera sebagai simbol kedaerahan tetapi masih berbau bendera GAM, masyarakat Aceh Tengah dan beberapa wilayah dataran tinggi Gayo menaikkan bendera merah putih selama beberapa tahun, sebagai simbol perlawanan. Pengibaran bendera bukan hanya di bulan Agustus di depan rumahnya sebagai simbol ketidaksetujuan atas bendera provinsi yang masih berbau GAM itu. Barulah setelah usulan bendera provinsi disetujui pemerintah pusat, bendera merah putih itu diturunkan di luar bulan Agustus. Ini juga bentuk pengakuan NKRI adalah realitas untuk masyarakat Gayo (Romli, 2021).

Kemudian berkaitan dengan UUD '45, biarlah para elite politik yang membahasnya karena hal itu sudah berkaitan dengan bagaimana cara mengatur masyarakat negara ini agar tercapai kehidupan yang damai, adil dan sejahtera. Kita hanya bersedih ketika banyak aturan hasil legislasi di DPR kurang pertimbangan filosofis yang mendalam, bahkan terkesan dikuasai oleh para pedagang, sehingga hasilnya hanya menguntungkan para pedagang.

### *Toleransi, Antikekerasan, dan Akomodasi terhadap Budaya Lokal*

Dalam kehidupan beragama, seperti sudah dijelaskan, adalah bahwa

masyarakat Aceh Gayo, Aceh pesisir dan etnis Jawa merupakan masyarakat yang sangat toleran terhadap perbedaan agama dan kelompok keagamaan. Masyarakat nonmuslim sangat dihargai oleh masyarakat Muslim, sehingga bisa mengadakan perayaan Natal secara meriah hingga menutup jalan utama di dengan gedung gereja HKBP, begitu pun yang Katolik (Paulus, 2021; Arigayo, 2021). Masyarakat yang berbeda itu saling menghargai dan menghormati, rukun dan bergotong royong dalam segala perhelatan. Paulus misalnya menuturkan, ketika akan hajatan pernikahan anaknya, ia pinjam peralatan pesta termasuk alat masak dan juru masaknya dari masjid Raya Ruhama Bebesan Takengon (Hadi, 2021; Tiak, 2021; Arigayo, 2021; Emanuel, 2021)

Kabupaten Aceh Tengah, yang merupakan bagian dari dataran tinggi Gayo, ada tiga etnis dominan, yaitu etnis Gayo, Jawa dan Aceh pesisir. Sementara itu etnis Tionghoa pada masa lalu pernah sangat dominan di Kota Takengon (Kecamatan Bebesan), karena jumlahnya hampir separuh penduduk Kota Takengon. Mereka adalah pekerja perkebunan yang didatangkan Belanda sejak masa kolonial yang kemudian menetap. Mereka hidup di kampung Cina, di mana nama kampung Cina itu masih bertahan sampai saat ini dalam perbincangan masyarakat. Pada masa akhir Orde Lama, etnis Tionghoa disuruh memilih menjadi WNI atau tetap sebagai warga negara Tiongkok. Pilihan itu membuat etnis Tionghoa dalam posisi sulit juga, namun akhirnya sebagian besar etnis Tionghoa memilih berduyun-duyun meninggalkan Takengon kembali ke daratan Cina. Sampai saat ini di tengah-tegah Kota Takengon itu masih ada sebutan kampung Cina meskipun etnis Tionghoa sudah tidak terlalu banyak. Hanya puluhan orang.

Etnis Tionghoa ini sudah menggunakan bahasa harian bahasa Aceh Gayo, bahkan tinggal sedikit yang menggunakan bahasa mandarin. Mereka hidup rukun dan damai dengan masyarakat lokal etnis Gayo, Aceh, Jawa, Batak dan lainnya. Mereka pun tidak diganggu oleh lainnya, bahkan oleh simpatisan GAM. Mereka hidup nyaman, rukun, dan damai itu sudah memasuki generasi keempat, artinya sejak awal abad 20 etnis Tionghoa sudah begitu di Takengon. Tidak ada isu SARA anti-Cina, seperti di tempat lain di Indonesia yang selalu berhembus pada momen-momen tertentu. Semua etnis itu, berinteraksi dalam berbagai tradisi di kalangan masyarakat. Saling bantu antar etnis, adalah hal lumrah sejak zaman dahulu.

***Pranata Moderasi Beragama***

Masyarakat Aceh Tengah yang sudah moderat sejak zaman dahulu kala merasa tidak perlu membangun pranata sosial baru yang menata kehidupan sosial keagamaan. Satu-satunya pranata yang dibangun atas keinginan pemerintah adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Dalam FKUB itu berkumpullah tokoh Muslim, Kristen, Katolik dan Buddha, tidak ada perwakilan dari umat Hindu dan Konghucu. Kegiatannya adalah seremonial antarumat beragama belaka secara berkala. Belum pernah ada merekomendasikan berdirinya rumah ibadah baru, karena nonmuslim sangat lamban pertumbuhan umatnya, sementara rumah ibadah yang lama masih sangat cukup untuk menampung umatnya. Meski demikian pernah terjadi juga sebuah sekte gereja, yang melakukan peribadatan di tempat yang tidak pada tempatnya (di ruko) yang hanya 11 orang dan akhirnya meresahkan masyarakat. FKUB segera bergerak, menyelesaikan persoalan itu dan akhirnya selesai. (Kepala Kemenag, 2012; Mughni, 2021; Ridlo, 2021; Romli, 2021).

***Menggarami Laut***

Kosa kata moderasi beragama adalah kosakata baru yang digagas oleh tim Kementerian Agama yang kemudian dipopulerkan ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia. *Branding* kosa kata moderasi beragama ini sukses menuai pujian dan diterima seperti barang baru yang mendorong semua kalangan memahaminya. Namun demikian, di Aceh tidaklah seheboh di berbagai tempat di Indonesia. Menurut Kepala Kemenag Kabupaten Aceh Tengah, begitu maksud moderasi beragama dipahami masyarakat, yang terjadi adalah pujian kepada Kementerian Agama yang telah sukses mempopulerkan komitmen kebangsaan dengan bahasa yang berbeda. Menurutnya, kosa kata moderasi beragama telah berhasil menggantikan posisi kosa kata P4 yang pernah terkenal di era Orde Baru. Moderasi beragama seolah menggantikan dengan cara baru, tampilan baru, meskipun isinya adalah sama yaitu penguatan komitmen ideologi Pancasila, Bhineka tunggal Ika, NKRI, dan komitmen terhadap UUD'45. Bahkan ditambah dengan toleransi, antikekerasan dalam memecahkan masalah dan akomodatif terhadap budaya lokal. Gagasan moderasi beragama menjadi seperti barang baru di masyarakat yang sangat membuat penasaran, terutama kalangan generasi milenial. Gagasan moderasi beragama telah berhasil mempermudah masyarakat untuk meni-

lai kelompok sosial mana masuk dalam kategori moderat atau tidak. Tidak bisa lagi suatu kelompok sosial sebagai paling nasionalis dan paling berkomitmen kebangsaan (Mughni, 2021; Ridlo, 2021; Romli, 2021).

Namun demikian, secara faktual sosiologis, moderasi beragama sudah menjadi jati diri bangsa sejak zaman Indonesia belum merdeka. Kita bisa hidup dengan semua orang yang beda dalam segala hal, berinteraksi secara baik untuk menyelesaikan masalah bersama adalah bentuk praktik moderasi beragama yang sudah berjalan berabad-abad yang lalu. Kita bisa hidup dengan para teroris tetangga yang tidak kita ketahui, para preman jalanan, yang ingin mengganti NKRI menjadi khilafah, yang beragama penuh kebencian terhadap yang lain dan merasa benar sendiri, dan seterusnya. Semua berjalan begitu, meskipun terkadang menimbulkan keresahan dan kekhawatiran. Secara umum mereka hidup rukun dan gotong royong dalam berbagai peristiwa dan dalam berbagai bentuknya sesuai dengan lokalitasnya.

Untuk kasus di Aceh Tengah, kosa kata moderasi beragama yang mulai dipahami masyarakat karena di*branding* masif di media sosial secara melalui seminar, diklat, sosialiasi para penyuluh Kementerian Agama, baik ASN maupun non-ASN. Ini yang membuat masyarakat paham apa itu moderasi beragama, meskipun kemudian sering lupa dengan kosa kata itu, tetapi secara sosiologis sudah sangat moderat.

Sosialisasi moderasi beragama di Aceh Tengah sebenarnya seperti menggarami laut dan tidak mengubah apa pun fakta sosial yang sudah ada, karena masyarakat Aceh Tengah sudah moderat sejak dahulu kala. Yang berubah hanyalah kosa kata dari semua bentuk kehidupan beragama yang moderat dengan kosa kata moderasi beragama. Kosa kata moderasi beragama menjadi bungkus baru untuk menjelaskan komitmen kebangsaan, toleransi beragama, antikekerasan dalam memecahkan masalah, akomodatif terhadap budaya lokal. Dari komitmen kebangsaan dan moderasi beragama yang dibuat Kementerian Agama, kearifan budaya lokal menjadi kosa kata yang paling menimbulkan banyak perdebatan. Hal ini karena ketikdakjelasan batasan kearifan lokal yang mana yang dapat diakomodasi dalam kehidupan kebangsaan, utamanya bagi umat Islam. Begitu pun di kalangan masyarakat Aceh Tengah. Bahkan kosa kata ini menjadi kosakata pedang bermata dua yang dicurigai sebagai titipan sebagian kelompok keagamaan yang lain (Mughni, 2021; Ridlo, 2021; Romli, 2021).

## Penutup

Berdasarkan penelitian di Aceh Tengah, secara faktual dan sosiologis, tidak ada yang baru dalam konteks kehidupan sosial keagamaan. Masyarakat Aceh tengah, apa pun agama dan ideologinya, sudah terbiasa hidup bersama sejak dahulu kala.

## Daftar Pustaka


Al-Qaradhawi, Yusuf 2006. *Fiqh Maqashid Syariah; Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Al-Qurthubi (2006) *Al-Jami li Ahkami Al-Qur'an*, Beirut Lebanon: Muassasah ar-Risalah.

Ar-Razi, Fakhr al-Din Mahmud ibn Umar ibn al-Husain ibn al-Hasan ibn Ali al-Tamimi al-Bakar. *Mafatih al-Ghaib (Tafsir al-Kabir)*. Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, jilid. 9-10. 2009.

Azra, Azyumardi (1999). *Reinaisans Islam Asia Tenggara, Sejarah, Wacana, dan Kekuasaan*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Azra, Azyumardi (2017). *Islam Indonesia Inklusif vs Ekslusif*. Makalah tidak diterbitkan, untuk Pengajian Ramadhan PP Muhammadiyah. Jakarta 6 Juni 2017.

Burhanuddin, Jajat (2012). *Ulama dan Kekuasaan, Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia*. Bandung: Mizan.

Dhofier, Zamakhsyari (1994). *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.

Effendy, Bahtiar dan Hendro Prasetyo (1998). Radikalisme Agama. Jakarta: PPIM UIN Syarif Hidayatullah.

Effendy, Bahtiar (1998). *Munculnya Intelektualisme Islam Baru di Indonesia: Tiga Aliran Pemikiran*. Jakarta: Paramadina.

Esposito, John L (2010). *Masa depan Islam, antara Tantangan Kemajemukan dan Benturan dengan Barat*. Bandung: Mizan.

Graff, de and Th G Pigeaud (1974). De Erste Moslisme Vorstendommen op Java. Studien Over de Staatkundige Geschied van de 15 de en 16 de Eeuw (VKI 69), s-Gravenhage: Nijhoff.

Hadi, Amirul (2010). *Aceh, Sejarah, Budaya, dan Tradisi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Hafner, Robert W (2000). *Islam Pasar Keadilan*. Yogyakarta: LKiS.

Hill, A H (1960). "Hikayat Raja-Raja Pasai," JMBRAS 33: 1-165.

Jamhari (ed) (2005). *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

# Suara Moderasi dari Bukittinggi

Warnis

## Mengapa Moderasi Beragama?

Ekstremisme agama menguat di Indonesia. Meski jumlah para pelaku sangat kecil dibanding Muslim moderat, sikap militan kelompok ini harus diwaspadai. Terlalu moderatnya Muslim Indonesia, membuat paham-paham intoleransi dan radikalisme mudah berkembang dan bahkan bermetamorfosis menjadi aksi terorisme. Kewaspadaan harus terus dibangun karena paham-paham itu dapat menggerus nilai-nilai kebangsaan yang sudah dibangun serta mengancam kesepakatan atau komitmen kebangsaan. Kehadiran Pancasila pertama-tama justru melindungi dan menjamin keberagaman identitas primordial masyarakat bangsa Indonesia. Dalam arti itu, Pancasila menuntun bangsa ini untuk bersikap inklusif dan moderat dalam menampilkan identitas kesukuan dan keagamaan kita, toleran dan gotong royong sebagai kepribadian khas bangsa Indonesia yang takdirnya adalah majemuk. Karenanya, fenomena radikalisme agama merupakan tantangan kebangsaan.

Ekstremisme ibarat sebuah gerak sentrifugal dari sumbu menuju salah satu sisi paling ekstrem. Memahami lanskap ekstremisme, atau keberagamaan garis keras, baik secara konseptual maupun empiris, menjadi penting untuk dapat lebih memahami signifikansi penguatan visi moderasi beraga-

ma. Dalam konteks beragama, pandangan, sikap, dan perilaku ekstrem akan mendorong pemeluknya untuk menolak pandangan kebenaran orang lain, dan bersikukuh dengan tafsir kebenarannya sendiri. Dari sinilah muncul term "garis keras", atau ekstremisme, yang dikaitkan dengan praktik beragama.

Salah satu ciri awal ekstremisme seseorang dalam beragama adalah bahwa ia memiliki pandangan, sikap, dan perilaku fanatik terhadap satu tafsir keagamaan saja, seraya menolak pandangan lain yang berbeda, meski ia mengetahui adanya pandangan tersebut. Lebih dari sekadar menolak, seorang penganut garis keras lebih jauh bahkan akan mengecam dan berusaha melenyapkan kehadiran pandangan orang lain yang berbeda tersebut. Baginya, cara pandang hitam putih dalam beragama itu lebih memberikan keyakinan ketimbang menerima keragaman tafsir yang dianggap menimbulkan kegamangan. Itu mengapa, meski jumlahnya minoritas, seorang ekstremis atau penganut garis keras umumnya lebih 'nyaring' dan lebih mampu menarik perhatian publik, ketimbang seorang moderat, yang cenderung diam dan reflektif. Kemenangan kaum ekstremis bukan karena jumlahnya yang besar, melainkan karena kaum moderat mayoritas yang diam (*silent majority*).

Secara konseptual, pandangan dan praktik keagamaan seorang yang ekstrem sering muncul dari cara pandang teosentris secara ekstrem dalam beragama, dan mengabaikan dimensi antroposentrismenya. Pandangan teosentris mendoktrin penganutnya untuk memaknai ibadah sebagai upaya "membahagiakan" Tuhan, melalui sejumlah ritual ibadah, dalam pengertiannya yang sempit. Imajinasi "demi membela Tuhan" yang tertanam dalam cara berpikirnya, membuat kelompok garis keras memaknai ibadah dan agama hanya dalam perspektif "memuaskan hasrat ketuhanan" sembari mengabaikan nilai dan fungsi agama bagi kemanusiaan (Hilmy, 2019).

Jika cara pandang, cara berpikir atau paradigma ekstrem dalam beragama menjelma menjadi sebuah ideologi yang bersifat sosial politik, maka disebutlah sebagai radikalisme. Fenomena ekstremisme beragama akan mengganggu harmonisasi umat beragama. Kerukunan umat beragama yang merupakan cita-cita hampir semua penganut agama akan terkoyak jika dalam masyarakat masih bersemayam cara pandang yang ekstrem.

Di ujung ekstrem lainnya, muncul pandangan keagamaan liberal. Cara pandang ini mencirikan adanya penolakan terhadap hal-hal yang bersifat

ilahiah atau ketuhanan. Corak khas pandangan ini adalah mendewakan akal dan mengabaikan ritual hingga hukum-hukum Tuhan. Kekhasan ini sangat berbahaya jika telah merasuki sistem politik dan sistem ekonomi Indonesia. Karena akan berakibat sistem politik dan ekonomi di Indonesia tidak menciptakan keadilan sosial. Menghadapi situasi sosial keagamaan seperti ini maka dibutuhkan keberagamaan yang moderat harus dipromosikan. Namun hal ini bukan perkara yang mudah. Tantangan yang dihadapi tidaklah kecil. Namun, harus diwaspadai bahwa kalau umat beragama gagal mewujudkannya, konflik horizontal antarwarga negara akan mudah tersulut, persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa pun terancam tercabik-cabik. Untuk itulah perlu ada satu formula dan kesepakatan bersama sebagai perekat antara semangat beragama dan komitmen berbangsa. Itulah moderasi beragama, yang bertujuan untuk menyelaraskan relasi beragama dan bernegara.

Berdasarkan masalah penelitian di atas, maka pertanyaan penting yang dijawab dalam penelitian adalah bagaimana pemahaman masyarakat tentang moderasi beragama? Mengapa moderasi beragama dipandang penting untuk dikembangkan? bagaimana implementasi moderasi beragama di masyarakat? apa pranata yang dipilih untuk melembagakan moderasi beragama? dan mengapa pranata tersebut yang dipilih?

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan sebuah kebijakan moderasi beragama yang berbasis pada kebutuhan masyarakat. Manfaat secara praksis terletak pada upaya penelitian ini untuk menyusun sebuah model dan formula yang berguna untuk mengidentifikasi berbagai bentuk kebijakan moderasi beragama. Harapannya, model yang ditawarkan dapat mengurangi berkembangnya keberagamaan yang ekstrem dan liberal. Tulisan ini berusaha mendeskripsikan tentang pemahaman, implementasi dan penguatan moderasi beragama di kalangan umat beragama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan agama lokal), di Sumatra Barat yang dalam survei kerukunan umat beragama masuk urutan kedua dari bawah setelah Provinsi Aceh.

## Demografi, Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Berdasarkan registrasi 2015, jumlah penduduk Kota Bukittinggi tercatat 4.858.394 jiwa, terdiri dari laki-laki 59.419 jiwa dan perempuan 63.202

jiwa. Penyebaran penduduk paling banyak di Kecamatan Mandiangin Kota Selayan yaitu 40,98% yang ditandai dengan banyaknya pembangunan perumahan. Tingkat kepadatan tertinggi, sebanyak 6.264 jiwa per $Km^2$ terjadi di Kecamatan Guguk Panjang, diikuti Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh sebanyak 4.139 jiwa per $Km^2$, dan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan sebanyak 3.916 jiwa per $Km^2$.

Bukittinggi termasuk dalam bekas kerajaan Minangkabau atau dikenal juga dengan sebutan Ranah Minang. Masyarakat daerah ini umumnya menganut sistem kekerabatan matrilineal artinya setiap harta pusaka, gelar, dan nama suku ditarik berdasarkan garis keturunan ibu. Islam merupakan agama mayoritas yang dipeluk penduduk sebagaimana dasar falsafah yang dipegang kuat "*Adat Basandi Syarak*, *Syarak Basandi Kitabullah*". Jumlah umat Islam mencapai 97,89% dari total populasi. Selebihnya beragama Katolik, Protestan, Buddha dan Hindu. Jumlah komunitas Muslim sebanyak 121.060, Kriisten 1.962 jiwa, Katolik 56 jiwa, Hindu kosong, Buddha 3 jiwa (Profil Nagari Tahun 2018)

Masyarakat Bukit tinggi dikenal mandiri, dinamis, kritis dan unggul dalam mengembangkan kewirausahaan. Ciri-ciri sosial budaya masyarakat Kota Bukittinggi terlihat dari tatanan kehidupan masyarakat yang disebut *Kurai Limo Jorong*. Karakteristik tatanan kehidupan masyarakat *Kurai Limo Jorong* tersebut dapat digambarkan dengan adanya: Nilai-nilai adat istiadat yang terintegrasi dengan nilai agama yang disebut dengan "*Sarak Mangato Adaik Mamakai*", artinya di dalam *syarak* (kitabullah) dijelaskan sedangkan secara adat di jalankan.

Pola kepemimpinan informasi yang disebut dengan *Tali Tigo Sapilin* dan *Tungku Tigo Sajarangan* yaitu ninik mamak, alim ulama, dan cerdik pandai. Adanya sistem pemerintahan adat (struktur keruangan dan kelembagaan nagari yang masih hidup) yang secara hierarkis terlihat dari adanya Penghulu Pucuak, yang dikenal dengan *Penghulu Pucuak Nan Duo Puluah Anam*, *Ninik Mamak Pangka Tuo Nagari* serta *Ninik Mamak Saratuih*. Alim ulama sebagai unsur pimpinan masyarakat yang mempunyai peranan dalam mengendalikan dan meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama. Beberapa lembaga keagamaan yang utama yaitu 8 sidang mesjid sebagai bentuk pilar lembaga keagamaan dalam hal ini Agama Islam. Sistem matriarkat yang menempatkan keberadaan *Bundo Kanduang* sangat pen-

ting dalam kehidupan masyarakat sebagai tumpuan sistem keturunan dan pewarisan. Semangat dan jiwa kewirausahaan yang telah tumbuh dan berkembang sampai saat ini. Nilai dan semangat kebersamaan serta kegotongroyongan yang diliputi oleh suasana keakraban yang tinggi dan pembauran antara masyarakat asli dan masyarakat pendatang. Kota Bukittinggi juga didiami oleh beragam suku bangsa lainnya seperti suku Jawa, suku Batak, suku Melayu, dan etnis china.

Masyarakat Kota Bukittinggi terdiri dari beberapa suku yang sudah hidup berdampingan sejak lama, di antara suku yang ada adalah suku Minangkabau, suku Cina, Jawa dan suku Batak. Sebagai kota kecil dengan luas hanya 25,24 $km^2$, bahkan sepertiganya adalah Ngarai Sianok, membuat Kota Bukittinggi termasuk salah satu kota dengan wilayah tersempit di Indonesia. Meski demikian, Bukittinggi adalah kota yang padat dan kaya akan ragam budaya suku dan agama. Kota ini dikenal dengan masyarakat yang berkarakter saling menghormati antar pemeluk agama.

## Pandangan terhadap Moderasi Beragama

Terkait dengan cara pandang, sikap, dan praktik agama moderat di Kota Bukittinggi, berdasarkan wawancara dengan Kepala Kantor dan Kepala Seksi Bimas Kementerian Agama serta pengurus BKMT Kota Bukittinggi diketahui bahwa jika terjadi cara pandang sikap dan praktik beragama serta mengamati perbedaan antar dan intraumat beragama yang ada di Bukittinggi ada satu forum yang langsung menangani yaitu FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama). Dalam forum inilah tokoh-tokoh agama berhimpun, kemudian membicarakan agama masing-masing. Ketika ada gesekan atau pola-pola perbedaan yang terjadi di daerah lain, biasanya FKUB berkumpul untuk menghindari apa yang terjadi di daerah lain persoalan yang sama tidak terjadi di Kota Bukittinggi.

Kementerian Agama Kota Bukittingi pernah dikunjungi Kementerian Agama Pusat, dengan peserta suatu acara berkaitan dengan kerukunan umat beragama. Dalam acara tersebut narasumber Kementerian Agama pusat menyatakan bahwa keharmonisan kehidupan beragama di Kota Bukittinggi sangat baik, karena umat beragama non Islam nyaman dalam beribadah. Orang Hindu pun walaupun tidak memiliki wihara resmi tidak terganggu, rumah duka cina yang belum mendapat izin pun tidak pernah di-

usik, dan umat Islam juga tidak pernah diganggu oleh mereka. Itu menunjukkan bahwa kerukunan umat beragama di Kota Bukittingi tidak memiliki permasalahan.

Namun dalam perjalanannya akhir-akhir ini, ada upaya-upaya dari segelintir orang, organisasi kemasyarakatan untuk menurunkan Indeks Kerukunan di Kota Bukittinggi. Melalui beberapa kegiatan oleh yayasan tertentu atau sekelompok orang yang melibatkan tokoh-tokoh agama dan generasi muda. Kasus yang pernah terjadi adalah kegiatan Kemah Lintas Agama yang diadakan di Ngarai Sianok. Sebagai peserta dari kegiatan tersebut mengundang mahasiswa untuk mengubah pola pikir mereka agar menerima perbedaan agama, tetapi dibalik semua itu ada misi terselubung, karena disinyalir ada misi untuk membenturkan Indeks Kerukunan di akhir kegiatan tersebut.

Ketika Indeks Kerukunan KUB yang dikeluarkan Kementerian Agama RI, Bukitinggi, khususnya dan Sumatera Barat secara umum memang memiliki Indeks Kerukunan paling rendah. Akibat dari Sumatera Barat memperoleh Indeks Kerukunan paling rendah, Ketua FKUB Buya Salman mengundurkan diri. Ia mengatakan dirinya gagal merukunkan berbagai agama di kota ini. Prof. Dr. Abdul Rahman Ritonga menggantikannya. Ia meninggal sebelum menyelesaikan periode kepemimpinannya. Sekarang, belum ada yang menggantikan.

## Penguatan Moderasi Beragama

Provinsi Sumatera Barat memiliki dua kabupaten yang tidak berdiri FKUB: Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar. Ketiadaan FKUB di Agama karena beberapa sebab: tidak ada gereja, tidak ada rumah ibadah nonmuslim, dan tidak ingin keberadaan FKUB justru menghalalkan pembangunan gereja atau rumah ibadah baru. Ketiga alasan itu dikemukakan beberapa pimpinan ormas di Kabupaten Agam. Alasan yang hampir sama muncul untuk kasus Tanah Datar, yaitu tidak punya gereja. Jadi dua kabupaten itu di Sumatera Barat tidak punya FKUB. Sudah berapa kali pergantian Kepala Kakanwil tidak berhasil mendekati ormas dan tokoh masyarakat untuk membentuk FKUB di dua kabupaten tersebut.

Kegiatan dakwah dan pendidikan di majelis-majelis taklim di kota ini mulai memuat materi moderasi beragama. Muatan ini juga mulai diarahkan

untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi dan melahirkan kader-kader remaja mesjid. Ketua Barisan muda MT Bukittinggi saat ini dipimpin remaja mesjid. Perkembangan ini dampak dari pembinaan BKMT dalam menyusun dan membuat program kegiatan remaja mesjid Kota Bukittinggi. Program kerja Majelis Taklim juga diarahkan untuk isu kepedulian sosial.

Dalam kegiatan peduli sosial, majelis taklim melakukan beberapa hal seperti membantu membelikan tanah untuk Islamic Center di Mentawai, membantu membangun mesjid di Mentawai, kunjungan Aceh dan membangun masjid di Aceh. Ketika musibah Donggala Sulawesi Utara terjadi, BKMT mengirim donasi dan membangun musala di sana. BKMT juga membuat utama dan memberikan bantuan untuk para korban.

BKMT membentuk beberapa koperasi. Tiga kecamatan kini memiliki koperasi BMT syariah. BMT Kecamatan Mandiangin Koto Selayan diketuai Antoni. Koperasi ini memiliki aset awal Rp 26 juta dan kini mencapai Rp 221 juta. 30%pengurus dan anggota BKMT bergabung dengan ulama lain mendirikan BMT yang diberi nama Al-Hijrah. Modal awal Rp 60 juta dan kini melesat menjadi Rp 8 miliar. Kesuksesan ini dipengaruhi kerja dan komitmen manajer BMT. Jika dalam setahun tidak bisa menambah modal Rp 500 juta, si manajer berjanji mundur dari jabatannya. Penambahan bisa karena penambahan saham atau menambah anggota baru. Al-Hijrah menjadi percontohan bagi usaha sejenis di kecamatan lain di Bukittinggi.

Dalam isu antarumat beragama, BKMT Kota Bukittinggi terlibat dalam berbagai kegiatan lintas agama seperti kegiatan malam kerukunan. Semua kelompok hadir untuk menampakkan muka bahwa mereka bersaudara yang diadakan setiap sekali setahun. Kegiatan ini biasanya dipimpin FKUB. BMKT juga terlibat dalam berbagai aktivitas seperti maraton atau gerak jalan santai lintas agama dan aksi sosial saat bencana.

Ketika Virus Korona 19 terjadi pada Maret 2020, BKMT aktif membantu anggota dan masyarakat yang terdampak. Mereka mengumpulkan donasi dari berbagai pihak untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan. Aksi itu dilakukan pengurus BKMT dengan memanfaatkan telepon genggam dan media sosial. Mereka mengajak anggota dan masyarakat mengirim donasi ke rekening BMKT Kota Bukittinggi. Semua itu mereka lakukan dari rumah.

Setelah donasi terkumpul akan diserahkan pada keluarga yang memang membutuhkan atau masyarakat yang terdampak Virus Korona 19 dengan

syarat mengirimkan KTP, Kartu Keluarga, dan rekomendasi dari ketua MT yang ada di lingkungan tempat tinggal masyarakat yang terdampak. Jumlah donasi mencapai Rp 60 juta. Para donatur berasal dari anggota majelis taklim dan warga yang merantau di berbagai kota. Dana itu dibagi untuk program bantuan Rp 500 ribu per keluarga dan bantuan alat pelindung diri (APD) untuk Rumah Sakit Ahmad Mukhtar (RSAM). Bantuan ini termasuk aksi pertama sebelum wali kota membagi-bagikan beras, telur, minyak, atau mie.

Menurut Ketua Majelis Taklim Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, penguatan moderasi aktif dilakukan melalui didikan subuh, kegiatan membaca Al-Qur'an di TPA dan MDA, dan pembinaan remaja mesjid kecamatan. Menurutnya, hubungan antarumat Islam cukup baik. Kasus-kasus konflik dan ketegangan jarang terjadi. Kasus terakhir yang terjadi di kota ini terkait dengan LDII di kecamatan Mandiangin Koto Selayan. FKUB dapat mengatasi ketegangan tersebut.

Ketua Majelis Taklim Mandiangin Koto Selayan sekaligus sekretaris BKMT Kota Bukittinggi juga menjelaskan, bentuk kerja sama dalam mendukung kegiatan Majelis Taklim Kota Bukittinggi antara lain dengan anggota DPR asal Kota Bukittingi. Ia memberi BMKT dan untuk kegiatan perumusan Pokok Pikiran (Kokir). Kegiatan itu dimanfaatkan dengan mengajak anggota DPR membantu BMT. Empat anggota DPR berjanji akan memberi masing-masing Rp 40 juta.

Mula-mula, nak-anak muda tidak tertarik menjadi anggota BMT. Belakangan sebagian anak muda tercatat sebagai anggota BMT. Mereka melengkapi profil anggota BMT yang berasal dari kaum ibu, lansia, bahkan anak-anak. Kumpulan dari berbagai kelompok generasi muda diberi nama Badan Komunikasi Pemuda Remaja Mesjid Indonesia (BKPRMI) yang dibentuk pada 2014. Organisasi mendorong generasi muda aktif di berbagai kegiatan kepemudaan seperti remaja mesjid, karang taruna, dan kegiatan pemuda di lingkungan tempat tinggal.

Kendala yang dihadapi dalam pembinaan generasi muda bersama dengan lansia terkait waktu. Bagi ibu–ibu lansia, Minggu hari untuk wisata dan dakwah. Sedang bagi generasi muda, Minggu hari untuk berlibur. Akhirnya, hari yang dipilih Sabtu. Kegiatan pembinaan diadakan sekali seminggu, sedang kegiatan gabungan sekali sebulan.

Mendatangkan remaja ke masjid tidak mudah. Salah satu strategi menarik minat mereka dengan memberi bantuan yang bersumber dari dana BKMT. Untuk mengumpulkan bantuan, pengurus BKMT membuat proposal kegiatan dan mendatangi tokoh-tokoh dan anggota majelis taklim yang diharapkan bisa memberi bantuan dana. Pengurus membuat proposal kegiatan.

Meski tidak mendapat bantuan dana dari pemerintah aktivitas keagamaan berjalan. Pada 2015, dana yang berhasil dikumpulkan dari warga digunakan untuk MTQ tingkat masjid. Kegiatan itu diselenggarakan pemuda Masjid Sutera Mandiangin. Hingga kini kegiatan Ramadan tetap berjalan. FKUB pernah menyelenggarakan pendakian ngarai yang diisi pemuda lintas iman. Sejak Virus Korona 19, kegiatan terhenti.

## Beragama secara Adil dan Seimbang

Paparan moderasi beragama kepada warga Bukittinggi belum merata. Istilah ini baru dikenal kalangan terbatas. Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama sekaligus Ketua Badan Kontak Manjelis Taklim (BKMT) Kota Bukittinggi mengungkapkan istilah moderasi beragama pertama kali disosialisasikan pada 6 Januari 2021 melalui Sosialisasi Moderasi Beragama untuk penyuluh agama Kementerian Agama. Kegiatan berikutnya menyasar seluruh pegawai Kemenag pada 25 Januari 2021. Ada pula kegiatan sosialisasi dengan tema Pengarusutamaan Moderasi Beragama dan Wawasan Keagamaan bagi penyuluh agama di lingkungan Kementerian Agama Kota Bukittinggi 2021 di gedung MUI Kota Bukittinggi.

Narasumber dalam sosialisasi yang disebut terakhir, Kepala Kantor Kemenag dan Kepala Kesbanglinmas yang masing-masing menyampaikan materi seputar Pancasila, NKRI. Narasumber lainnya Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah yang membawakan materi seputar hukum, dan perwakilan dari Thawalib M. Ilham yang menjelaskan materi moderasi beragama dalam Islam dan negara.

Sosialisasi moderasi beragama terus berlanjut. Pada 7 Agustus 2021, kegiatan dilakukan di gedung Bung Hatta, dengan tema Muzakarah Ulama Sumatera Barat yang diadakan MUI Kota Bukittinggi. Dalam sosialisasi itu dibahas moderasi beragama dalam perspektif *adat basandi syarak syarak basandi kitabullah* (ABS SBK) di Ranah Minang. sosialisasi terakhir pada 30

Agustus 2021 yang dihadiri semua ASN Kemenag Sumatera Barat, yang diadakan di kantor Kementerian Agama kota Bukitting. Dalam sosialisasi ini Kakanwil berkesempatan menyerahkan secara resmi buku *Moderasi Beragama* dari Kementerian Agama Pusat dalam bentuk buku saku. Kemudian buku lengkap diserahkan oleh Kakanwil di kator KUA yang dibagi kepada tiga kantor KUA kecamatan agar disosialisasikan.

Senada dengan uraian di atas, berdasarkan wawancara dengan Ketua MUI Kota Bukittinggi, moderasi beragama merupakan istilah baru. Konsep yang lebih dulu adalah *intoleransi*. Menurutnya, istilah *Moderasi Beragama* baru muncul dua tahun terakhir. Istilah yang disampaikan di forum-forum majelis taklim tidak mendapatkan tentangan dari jemaah. Penentangan dan komentar kritis lebih banyak muncul di media sosial. Sebagian mereka menilai moderasi beragama sebagai pembaharuan terhadap agama. Ketua MUI bercerita, ketika mempublikasi fotonya ketika menerima buku *Moderasi Beragama* dari Kemenag RI pada 4 Februari 2021 di akun Facebook, muncul komentar "masak agama dimodernkan". Kejadian ini menunjukkan sosialisasi moderasi beragama belum maksimal.

Kehidupan di Bukittinggi seperti melihat miniatur Indonesia. Selain mayoritas muslim, kota ini dihuni warga beragama Kristen, Katolik, Hindu dan Konghucu, serta agama lain yang belum didata. Ketika mengisi data tokoh agama Kota Bukittinggi, jumlah tokoh Islam mencapai 85 orang Islam, seorang tokoh Kristen, seorang tokoh Katolik, dan seorang tokoh Hindu. Dari keempat agama yang punya rumah ibadah, Hindu belum memiliki rumah ibadah.

Menurut Ketua MUI, Wihara Buddha Susana di Kampung Cina belum mendapat izin dari Kementerian Agama. Ini dinilai memicu konflik. Warga pernah akan mendemo wihara karena sudah memasang plang namun belum. Potensi konflik menurutnya juga bisa datang dari penerimaan rumah duka etnis Tionghoa di bawah jembatan Limpapeh. Rumah itu belum diketahui apakah berizin atau tidak.

## Nilai Kebangsaan

Bagi masyarakat Kota Bukittinggi, Pancasila masih sangat relevan jika ditafsirkan tepat. Sayangnya, saat ini tafsir itu tampak kurang relevan. Para pendiri bangsa sudah memikirkan dan mempertimbangkan matang ketika

menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini terlihat dalam piagam Jakarta bahwa para pendiri bangsa sepakat menghapus ketuhanan yang maha esa dengan kewajiban menjalankan Islam. Kalimat tersebut merujuk pada satu agama yaitu Islam, maka hal ini tidak disetujui oleh yang lain, karena tidak menyinggung agama lain, maka dihapus kalimat itu, itulah toleransi pertama umat Islam ke negara ini.

Kini ada usaha mempertentangkan agama dengan negara seperti kasus pertanyaan dalam rekrutmen pegawai KPK tentang memilih Al-Qur'an atau Pancasila, NKRI atau kerudung. Kasus yang mendapat reaksi di Sumatera Barat adalah pernyataan Puan Maharani juga menyatakan masyarakat Minang tidak Pancasilais. Mereka merasa terusik disebut Pancasilais dan tidak mendukung NKRI.

Semenjak heboh masyarakat Minang terkait dengan tidak Pancasilais, menurut tokoh-tokoh masyarakat, kini ada sebagian warga Sumatera Barat yang mulai melihat kembali sejarah mereka. Salah seorang perumus Pancasila adalah M. Yamin, tokoh dari Sumatera Barat. Dari beberapa diskusi tokoh masyarakat diketahui lahirnya Pancasila bukan 1 Juni tetapi 18 Agustus 1945. Pada 1 Juni, peristiwa pidato Soekarno tentang Pancasila. Penolakan warga Sumatera Barat untuk perubahan Pancasila menjadi Ekasila dan Trisila bukti bahwa mereka sangat pancasilais.

Meski Indeks Kerukunan di Kota Bukittinggi menurun, menurut beberapa tokoh kerukunan di kota ini masih terjaga. Ini dibuktikan dengan usaha-usaha berbagai pihak untuk mencegah konflik. Suatu ketika pernah datang seorang pendeta ke Kantor Kemenag Kota Bukittinggi untuk melaporkan aliran sesat. Jika mereka diizinkan beraktivitas ini, si pelapor mengatakan akan mengancam umat Islam dan Kristen. Laporan itu direspons Kemenag Kota Bukittinggi bahwa jika mereka tidak berizin, Kemenag Bukittinggi tidak akan mengizinkan mereka. Potensi konflik bisa dihindari.

Kasus lain terjadi dengan kegiatan umat Hindu di wihara yang mengundang Kepala Kemenag Bukittinggi. Seandainya Kepala Kemenag memenuhi undangan itu berarti seolah-olah mengakui dan meresmikan gedung rumah ibadah mereka itu. Sedang umat Hindu di sana belum mengurus izin. Sikap ini menunjukkan taat aturan.

## Memaknai Toleransi Beragama

Dalam 20 tahun terakhir, konflik internal dan antarumat beragama di Kota Bukittinggi belum pernah. Itu dikatakan Ketua MUI Kota Bukittinggi. Konflik yang sempat terjadi terkait dengan hubungan muslim dan nonmuslim. Beberapa kasus yang mengemuka kasus kemarahan seorang tetangga muslim yang marah karena tetangganya yang nonmuslim memasak anjing. Tetangga yang muslim menilai tindakan memasak anjing itu tidak menghargai tetangga dan adat di Tanah Minang, *adat basandi syarak syarak basandi kitabullah*. Dari istilah ini berkembang pandangan bahwa Minang identik dengan Islam, orang Minang orang Islam. Jika ada orang Minang bukan Islam, ia bukan orang Minang tetapi kerbau.

Tokoh masyarakat dan niniak-mamak memiliki peran penting. Konflik yang dapat dicegah atau tidak melebar dipengaruhi oleh peran tokoh-tokoh ini. Jika konflik mulai mencuat, mereka dihadirkan dan mengundang pihak yang berkonflik. untuk mengatasi. Cara ini yang membuat konflik fisik tidak terjadi, meski tidak selalu menghilangkan ketidakpuasan di antara kedua pihak yang berkonflik.

Bukittinggi juga menghadapi konflik terkait kegiatan gereja HKBP. Suatu ketika gereja ini mengundang tokoh masyarakat termasuk MUI dalam kegiatan mereka. Warga dan pemuda setempat memprotes karena gereja memasang umbul-umbul.Ketua MUI menjelaskan kepada panitia pelaksana kegiatan bahwa *marawa* lambang dari Minangkabau. Minangkabau tidak bisa dilepaskan dari Islam, memasang *marawa* berarti memasang simbol Islam. Itu yang membuat pemuda dan masyarakat protes.

Dalam dialog, seorang pendeta menjelaskan kepada Ketua MUI, mereka memasang marawa sebagai bentuk penghargaan. “Kami tinggal di sini dan karena itu menghargai masyarakat setempat. Kami merasa bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat setempat,” kata pendeta itu. Dari niat dan bahasa, pihak gereja tidak memiliki maksud apa-apa, hanya ingin mengikuti tradisi yang ada. Namun, setelah mendapatkan penjelasan filosofi *marawa*, mereka paham dan mengerti. Konflik tidak terjadi.

Selain kasus gereja, muncul pula ketegangan antara pengelola masjid dan pemilik hotel beretnis Tionghoa dan nonmuslim. Hotel bersebelahan dengan musala. Lokasinya persis di depan mihrab musala. Semula bangunan itu berupa rumah tinggal. Melalui musyawarah dan pendekatan kekelu-

argaan, konflik ini dapat diselesaikan. Bangunan persis di mihrab masjid disepakati tetap akan dijadikan rumah yang membatasi bangunan hotel dan masjid.

Seorang pendeta mengatakan umat Kristen yang bertetangga dengan masjid kadang-kadang tersinggung dengan ceramah-ceramah agama yang keluar dari pengeras suara masjid. Ceramah-ceramah itu biasanya membiarkan akidah Islam dan bersinggungan dengan akidah umat lain. Untuk mengatasinya, pendeta ini berharap penggunaan pengeras suara bisa diarahkan untuk dalam ruangan dan tidak keluar. Isu itu disadari tidak mudah diatasi karena berkaitan dengan perubahan cara pandang dan pemahaman yang membutuhkan waktu panjang. Lembaga-lembaga keagamaan dan para penceramah perlu didorong untuk menyampaikan materi-materi akidah di ruang publik lebih lunak dan berusaha menghargai keyakinan agama lain. Bagaimanapun Bukittinggi dihuni oleh warga dengan berbagai agama dan etnis.

Pada isu internal agama, dua kasus yang mencuat di Bukittingi terkait dengan LDII dengan Islam Jemaah. Keduanya dalam pemantauan MUI karena dianggap aliran yang berbeda dengan arus utama. Dalam sebuah dialog dengan MUI, keduanya berjanji memperbaiki hal-hal yang dianggap tidak sesuai. Namun, sekitar seminggu lalu ketika studi ini ditulis, MUI mengeluarkan maklumat yang menyatakan LDII tidak tulus dan jujur menjalankan apa yang mereka ungkapkan. Sejauh ini warga tidak memprotes kehadiran LDII apalagi melakukan serangan fisik. LDII hanya dianggap eksklusif dalam kegiatan.

Gerakan Wahabi dan Salafi yang sering menimbulkan masalah karena mudah menyesatkan kelompok lain tidak mengemuka dalam kehidupan di Bukittinggi. Di daerah lain, seperti di Pulau Jawa, isu ini sering menjadi perbincangan publik. Di Bukittinggi aktivitas mereka tidak terbuka dan hanya dilakukan di kalangan anggota mereka. Perselisihan tidak terjadi. Jika ada, itu terjadi di media sosial.

Kondisi baik itu dinilai mampu dipertahankan karena keberhasilan dalam mengembangkan dialog sebagai cara mencegah dan mengatasi konflik. Dialog ditempatkan sebagai cara agar setiap pihak meletakkan sesuatu pada tempatnya dan sesuai porsi; mayoritas tidak merasa superior terhadap minoritas. Contohnya, aktivitas keagamaan bagi para pelajar selama Ramadan.

Umumnya, pembinaan pelajar selama Ramadan dipandang hanya untuk pelajar muslim. Dalam pelaksanaan, MUI menjadi pihak yang mengelola kegiatan, dari SOP hingga isi dan narasumber dari materi yang akan disampaikan. Biasanya materi pembinaan diserahkan kepada Dinas Pendidikan.

MUI sering mengingatkan Diknas, meskipun kegiatan Ramadan biasanya ditujukan untuk pelajar muslim, semestinya pelajar nonmuslim tetap mendapatkan ruang. Akhirnya ditetapkan jika untuk pelajar muslim disediakan ustaz, pelajar Kristen dan Katolik disediakan pendeta. Ketika peserta pelajar dihadirkan bersama-sama, seluruh guru berbicara tanpa merendahkan antara satu dengan yang lain.

## Beragama tanpa Kekerasan

Bukittinggi, kota seluas 25 kilometer persegi, belum pernah menghadapi konflik kekerasan keagamaan. Kabupaten tetangga yang mengalaminya: Kabupaten Agama. Konflik itu terjadi di Nagari Ranah yang dipicu pembuangan kepala babi. Seorang warga beragama Kristen membakar babi dan membuang kepalanya ke belakang rumah. Tetangganya yang muslim terganggu dan mempersoalkannya hingga kasusnya sampai ke kepala *jorong*. Kepala jorong mengundang pemuka masyarakat untuk berembuk dan melahirkan kesepakatan dalam bentuk *buek arek nan badagok*. Ini hukum terendah yang berlaku di nagari di Sumatera Barat. *Buek arek nan badagok* berisi bagaimana agama selain Islam itu menghormati agama Islam sesuai dengan adat Minangkabau di daerahnya. Warga nonmuslim diminta membakar babi di dalam rumah dan tidak melempar sisa ke tetangga.

Di Ranah, sebagian tanah milik warga muslim sudah dijual kepada warga nonmuslim. Di tanah itu mereka membuat rumah dan kebun-kebun. Setiap minggu warga biasa pergi ke gereja dengan membawa kitab suci di tangan. Sebagian warga mempersoalkan seolah-olah hendak menunjukkan identitas agama. Seharusnya kitab suci itu dipegang dan baru dikeluarkan ketika berada dalam gereja.

## Ramah Terhadap Kebudayaan Lokal

Tradisi tahlilan, maulud, haul, dan ziarah kubur masih dijalankan di sebagian warga Bukittinggi. Sebagian warga tidak setuju dari tradisi tersebut. Mereka yang tidak setuju biasanya tidak akan menghadiri tradisi-tradisi ter-

sebut. Kehadiran tradisi-tradisi tersebut menunjukkan bagaimana agama menghargai dan beradaptasi dengan budaya lokal. Tradisi tahlilan, misalnya, sebuah upaya penyesuaian terhadap tradisi yang ada. Bagi orang Hindu beribadah dengan bernyanyi. Dalam Islam budaya itu diisi dengan membaca kalimat tauhid *la ilaha illallah*. Ini cara yang baik agar tradisi yang ada tidak ditutup habis (*ambek mati ampang tuhua*). Sayangnya pemahaman semacam ini tidak dipahami masyarakat dan menganggapnya sebagai ajaran agama.

Tradisi membakar *kumayan* hingga kini masih dipraktikkan sebagian warga. Tradisi peninggalan Hindu ini dilakukan ketika akan memulai doa untuk melepas nazar, meminta rezeki, mendapatkan badan sehat dan mudah mendapatkan rezeki mudah dan dilakukan. Sebagian warga juga masih ada yang menjalankan tradisi untuk mendoakan bagi yang orang yang meninggal untuk tiga hari. Tradisi ini disebut *sedekah kaji*. Undangan mengikuti *sedekah kaji* biasanya diumumkan di lokasi pemakaman. Bagi masyarakat yang setuju mereka datang dan yang tidak setuju tidak datang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, tradisi sedekah kaji yang masih bertahan hanya untuk tiga hari. Sedangkan mendoa tujuh hari, 40 hari dan 100 hari sudah jarang dipraktikkan. Sebagian orang berpendapat tradisi 40 hari dan 100 hari sebagai parasit akidah yang hendak dihilangkan. Islam datang ke Indonesia, termasuk ke Ranah Minang Islam tidak langsung mengubah tradisi. Mula-mula yang diubah akidah, lalu syariah, fikih, ibadah, dan akhlak. Tradisi lewat di bawah keranda berisi jenazah oleh keluarga jenazah merupakan salah satu yang masih hidup. Konon jika itu dilakukan, mereka tidak ingat lagi pada jenazah. Tradisi ini tidak tercantum dalam hadis. Toleransi antar perbedaan doktrin di internal Islam ditunjukkan dengan sikap untuk salat di masjid milik organisasi keagamaan dengan ritual ibadah yang berbeda. Misalnya, pemuda dari organisasi yang menjalankan tradisi tahlil dan zikir akan tetap melaksanakan salat di masjid milik Muhammadiyah, seperti Masjid Muhammadiyah di Garegeh dan Tigobaleh. Di sekitar masjid ini, ada markas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), tempat yang sering digunakan aktivis tarbiah, NU, dan Muhammadiyah berkumpul. Namun ketika waktu salat tiba, mereka salat di masjid tersebut.

## Pranata Baru Moderasi Beragama

Hubungan antar organisasi kepemudaan seperti HMI, IMM, kepemudaan Katolik, kepemudaan Kristen, dan kepemudaan Buddha terlihat harmonis. Pada 2020, di awal Virus Korona 19, mereka menggelar aksi bersama saat Ramadan. Aksi yang diberi nama Satu Dunia itu berupa pengumpulan uang, pakaian bekas, makanan, dan sembako. Barang dan uang itu akan disalurkan kepada warga Bukittinggi yang terdampak Virus Korona 19.

Hubungan baik juga terlihat ketika HMI mengundang perwakilan dari agama lain datang pada kegiatan mereka atau juga sebaliknya. Ormas kepemudaan Muhammadiyah, HMI, IMAM, KAMI, dan SEMI sering melakukan kegiatan bersama pada momen-momen tertentu. Badan Kontak Pemuda Remaja Mesjid Indonesia (BKPRMI) juga salah satu organisasi kepemudaan yang ada di Kota Bukittinggi. BKPRMI fokus pada kegiatan yang menyasar remaja masjid. BKPRMI juga aktif dalam kegiatan kepemudaan.

Organisasi lintas iman yang aktif di Bukittinggi salah satunya Pemuda Lintas Agama (Pelita). Jaringan dan anggota organisasi ini terdiri dari para aktivis yang berasal dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan agama atau kepercayaan lain. Pelita lahir dari keinginan untuk merespons berbagai isu sosial-keagamaan di tingkat lokal. Gagasan itu lahir dari hasil diskusi dan obrolan ringan dengan pemuda Muhammadiyah, IMM, KMI, pemuda Katolik, dan pemuda Kristen. Dari diskusi tersebut disepakati mendirikan organisasi yang diberi nama Pelita.

Interaksi dan komunikasi yang terjalin antarorganisasi kepemudaan ini memengaruhi pemahaman dan keterbukaan di antara mereka. Dalam diskusi, masing-masing pihak berusaha menghindari *basitengang* dan ego yang bisa menciptakan konflik. Meski demikian, harus di akui sebagian pemuda dari organisasi ini merasa asing dengan isu-isu lintas agama.

Usaha-usaha membangun moderasi di Bukittinggi dilakukan dengan berbagai aktivitas dan pendekatan. FKUB memiliki forum pertemuan rutin setiap Rabu minggu pertama. Forum ini dihadiri pengurus FKUB dengan latar belakang agama berbeda. Mereka membicarakan isu-isu terbaru dan kasus-kasus yang perlu direspons. FKUB pernah menjadi tuan rumah Alam Kebersamaan, kegiatan yang mengundang seluruh perwakilan umat beragama, tokoh masyarakat, Musyawarah Pimpinan Daerah, untuk membicarakan isu-isu aktual dengan format yang santai. Acara diisi penampilan dari

komunitas agama seperti nyanyian, tari, dan sandiwara. Acara ini digelar setahun sekali.

FKUB juga menggelar Jalan Santai Kerukunan dan kegiatan yang menyasar anak muda dan akar rumput. Peserta yang hadir biasanya ribuan orang dan melibatkan tokoh-tokoh agama. Itu salah satu pembauran yang dilakukan sehingga tidak ada batas antarumat beragama dalam kehidupan sehari-hari. FKUB menggelar lomba futsal memperebutkan piala bergilir Kementerian Agama, menerbitkan 200 eksemplar buku dan video berisi toleransi dan kerukunan.

FKUB pernah menggelar dialog interaktif yang disiarkan teve lokal dan nasional seperti *Triarga TV* dan *TVRI*. Kini acara itu sudah tidak dilakukan karena alasan biaya. Namun sekarang TV lokal sudah tidak ada lagi mungkin karena biaya cukup besar. FKUB menjalankan kegiatan-kegiatan sosialisasi melalui tokoh agama di komunitas agama masing-masing. Ketika pandemi terjadi, tokoh agama berusaha menyampaikan pesan kepada jemaah agar siap mental dalam menghadapi musibah yang menempa kehidupan. Tokoh-tokoh FKUB mendorong pemuka agama menyampaikan kepada umatnya agar tetap tenang, dan tidak panik serta mematuhi protokol kesehatan. Tidak hanya sosialisasi, FKUB memberikan APD kepada warga.

## Tantangan Bagi Keberagaman

Di antara peran para tokoh agama yang berpikiran dan bersikap terbuka, terdapat tokoh agama yang masih berpikiran sempit, bahkan ekstrem. Mereka sering menjadi tantangan dalam membangun moderasi beragama. Mereka tidak bisa membedakan isu akidah dan muamalah. Dengan ayat *lakum dīnukum waliyadīn*, mereka berpandangan bahwa mengucapkan assalamualaikum kepada nonmuslim perbuatan yang dilarang. Ucapan itu bagian dari ibadah dan tidak boleh dicampuradukkan. Sebagai penggantinya, assalamualaikum diganti dengan selamat pagi, siang, sore, atau malam. Ada pula yang masih mempersoalkan ucapan assalamualaikum yang ditambah dengan ucapan selamat pagi, siag, sorem atau malam. Bagi mereka cukup assalamualaikum.

Meski tidak terdapat konflik besar, tidak berarti Bukittinggi terhindar dari potensi konflik dan gesekan. Keragaman dan interaksi memungkinkan gesekan seperti pepatah Minang ini, ibarat di dapur tidak mungkin *in-*

*dak kabalago sanduak jo pariuak*, *galeh jo piriang*, *ndak basinggungan*, *kalau inyo talatak sajo iyo indak kabagesekan doh*, *tapi kalaunyo manggarik pasti tasingguang tapi yang sampai pacah indak ado doh*.

Salah satu isu yang dapat menimbulkan ketegangan adalah ketersediaan tempat pemakaman umum (TPU), khususnya bagi nonmuslim. TPU yang ada kurang memadai. Karena tidak bisa, jenazah orang Kristen dimakamkan ke TPU terdekat seperti TPU di Padang atau ditumpangkan ke makam khusus warga Tionghoa. Sekarang pemakaman Tionghoa tidak bisa menumpangkan lagi.

Potensi konflik juga muncul dalam bentuk penolakan terhadap konsep moderasi beragama yang mulai masif dijalankan, terutama kalangan kampus. Fakultas Ushuluddin IAIN Bukittinggi salah satu yang memiliki perhatian dengan isu tersebut. Mereka sudah menggelar tiga kali konferensi internasional tentang moderasi Islam dengan mengundang berbagai tokoh masyarakat, tokoh-tokoh akademisi ditingkat internasional. Sebelum menjadi kebijakan nasional, Fakultas Ushuluddin sudah mendiskusikan topik yang terkait dengan moderasi.

Mencermati kehidupan di Bukittinggi, toleransi yang tumbuh bersifat pasif. Toleransi muncul karena konflik tidak muncul ke permukaan. Ketika ditanya konflik, sebagian besar tokoh dan warga mengatakan di Kota Bukittinggi tidak terjadi konflik. Sedang interaksi yang lebih intens belum berkembang. Interaksi dan komunikasi yang lebih erat antartokoh dan komunitas lintas iman belum tumbuh kuat. Tidak ada forum-forum untuk membicarakan isu-isu keagamaan lebih terbuka dan jujur. Perjumpaan terjadi pada kegiatan-kegiatan formal.

Bisa dikatakan, masyarakat Kota Bukittinggi belum siap menerima isu-isu baru dan sensitif terkait kerukunan dan moderasi beragama. Sebagian pihak bahkan memandang moderasi beragama sebagai jualan politik. Ini disebabkan sikap yang kokoh memegang falsafah *adat basandi syarak syarak basandi kitabullah* yang dipahami bahwa Minang adalah masyarakat agamis dan islamis. FKUB menjadi corong utama untuk meredam ketika ada muncul percikan-percikan konflik di tengah masyarakat. FKUB langsung berusaha meredam secepat mungkin karena mereka punya kegiatan bulanan, setiap awal bulan minggu pertama dibicarakan ketika ada gejolak-gejolak atau konflik yang timbul sedini mungkin. Keterlibatan pemuda sebenarnya ditu-

jukan untuk membantu FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama khususnya di Kota Bukittinggi.

## Penutup

Pemahaman masyarakat Kota Bukittinggi terhadap moderasi beragama bervariasi. Masih ada masyarakat yang memahami moderasi beragama sebagai memoderatkan agama. Sosialisasi moderasi beragama masih terbatas pada kalangan tertentu belum mencapai semua lapisan masyarakat.

Masyarakat Kota Bukittinggi memandang bahwa Pancasila masih sangat relevan kalau tafsirannya betul, tetapi kalau tafsirannya kian kemari tidak relevan lagi. Sehubungan dengan kekerasan dan konflik masyarakat Kota Bukittinggi cukup toleransi, hal ini dapat dilihat dari saling menghargai dan saling menghormati antarumat beragama maupun internal umat beragama. Adapun terkait dengan antikekerasan untuk Kota Bukittinggi tidak ada konflik yang sampai menimbulkan kekerasan. Jika ada konflik atau riak-riak yang timbul antarumat beragama dapat diselesaikan dengan baik melalui dialog dan musyawarah antar tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Masyarakat Kota Bukittinggi sangat akomodatif terhadap budaya lokal. Sehubungan dengan tahlilan, ziarah kubur, maulud dan pengajian atau doa kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari dan 100 hari masyarakat ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, Bagi masyarakat yang setuju silakan melakukannya dan bagi masyarakat yang tidak setuju tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut. Masyarakat menghormati dan menghargai terhadap keputusan setuju atau tidak setuju di kalangan masyarakat karena merupakan tradisi yang sudah berlangsung sejak lama ditengah-tengah masyarakat.

Terkait dengan pelembagaan moderasi beragama secara terstruktur belum ada di Kota Bukittinggi. Hanya saja di kalangan pemuda dan generasi muda sudah memiliki organisasi kepemudaan (OKP) untuk pemuda muslim seperti HMI, IMM, Muhammadiyah, KAMI dan organisasi kepemudaan lainnya. Sedangkan untuk organisasi kepemudaan lintas agama juga sudah ada Pelita yang anggotanya melibatkan semua pemuda dari unsur agama yang ada di Kota Bukittinggi.

Penguatan moderasi beragama sudah dilakukan dengan kegiatan rapat bulanan FKUB untuk mengantisipasi masalah-masalah kerukunan yang terjadi sedini mungkin dan untuk membicarakan program dan kegiatan yang

akan dilakukan. Penguatan moderasi beragama telah diperkuat dengan adanya sekelompok masyarakat yang memiliki pemikiran terbuka dan merasa yakin bahwa masyarakat kota Bukittingi sangat toleran. Sedangkan faktor penghambat penguatan moderasi beragama adalah masih ada tokoh masyarakat yang berwawasan sempit, masih ekstrem, dan tidak bisa membedakan antara akidah dan muamalah. Selain itu yang menjadi kendala adalah terkait dengan pendirian dan perluasan bangunan rumah ibadah. Kendala lainnya adalah terbatasnya lokasi pemakaman bagi nonmuslim karena keterbatasan wilayah Kota Bukittinggi yang kecil dan sempit.

## Daftar Pustaka


Akhmadi, A (2019). Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia. *Inovasi*, *13* (2),

Alim, N, Pairin, P, Ikhsan, M, Samrin, S, & Syamsuddin, S (2018). Singularitas Agama: Identifikasi Aliran dan Paham Radikal di Kendari. *Al-Ulum*, *18* (2), 271–300.

Almu'tasim, A (2019). Berkaca NU dan Muhammadiyah dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Moderasi Islam di Indonesia. *TARBIYA ISLAMIA: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, *8* (2), 199–212.

Alwasilah, A C (2002). *Pokoknya kualitatif: Dasar-dasar merancang dan melakukan penelitian kualitatif*. Pustaka Jaya.

Anwar, F, & Haq, I (2019). Religious Moderation Campaign Through Social Media at Multicultural Communities. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, *12* (2), 177–187.

Cholifah, T N (2019). *Bahan Ajar Pembelajaran Tematik berbasis Kearifan Lokal Malang Selatan*. Media Nusa Creative (MNC) PUBLISHING.

Harto, K, & Tastin, T (2019). Pengembangan pembelajaran PAI Berwawasan Islam Wasatiyah: Upaya Membangun Sikap Moderasi Beragama Peserta Didik. *At-Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam*, *18* (1), 89–110.

Hutagaol, R (2019). Peran Satuan Intelkam Dalam Mencegah Paham Radikal di Masyarakat Melalui Deradikalisasi (Studi Pada Satuan Intelkam Polres Deli Serdang. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, *19* (2),

Jena, Y (2019). Toleransi Antarumat Beragama di Indonesia dari Perspektif Etika Kepedulian. *Jurnal Sosial Humaniora*, *12* (2), 129–143.

Kementerian Agama RI (2019). Moderasi Beragama. *Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kemenag RI*.

Kosasih, E (nd) Literasi Media Sosial dalam Pemasyarakatan Sikap Moderasi Beragama. *Jurnal Bimas Islam Vol*, *12* (2), 264.

Mais, Y, & Purwanto, A (2019). Integrasi Sosial Antara Masyarakat Pendatang Dengan Masyarakat Setempat di Desa Trans Kecamatan Sahu Timur. *HOLISTIK*, *Journal Of Social and Culture*, *12* (1).

Nur, A (2016). Konsep Wasathiyah Dalam Al-Qur'an;(Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir Dan Aisar At-Tafasir). *Jurnal An-Nur*, *4* (2).

Prasetiawati, E (2017). Menanamkan Islam Moderat untuk Menanggulangi Radikalisme di Indonesia. *Fikri: Jurnal Kajian Agama*, *Sosial Dan Budaya*, *2* (2), 523–570.

Qadratulloh, W (nd) Tuntunan Al Quran Mengenai Pembinaan Toleransi Melalui Komunikasi pada Anak di Keluarga. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, *16* (1),

Rahmayuni, D, & Hidayat, h (2020). Hierarki Pengaruh Isu-Isu Moderasi Beragama pada Media Guo Ji Ri Bao 国际日报 Studi Kasus Berita Konflik Etnis Uighur di Xinjiang. *Jurnal Studi Jurnalistik*, *1* (2), 1–24.

Ramli, R (2019). Moderasi Beragama bagi Minoritas Muslim Etnis Tionghoa di Kota Makassar. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, *12* (2).

Sefriyono (2015). MALAKOK: Model Menegosiasikan Keragaman bagi Etnis Nias-Kristen dan Minangkabau-Islam di Kabupaten Padang Pariaman. *Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, *3* (2), 102–112.

Sinaga, F S S (2020). Musik Trunthung Sebagai Wujud Kearifan Lokal Dalam Konteks Pendidikan Seni. *Tonika: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Seni*, *3* (1), 27–38.

Sutrisno, E (2019). Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Bimas Islam*, *12* (2), 323–348.

Yulianto, R (2020). Implementasi Budaya Madrasah Dalam Membangun Sikap Moderasi Beragama. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, *1* (1), 111–123.

KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

Keberhasilan menjadikan moderasi beragama sebagai kebijakan nasional dengan segala perdebatannya merupakan sebuah cerita penting dalam penguatan toleransi dan perdamaian di Indonesia. Sementara itu, implementasi kebijakan adalah kisah lainnya. Buku ini merekam dan menganalisis berbagai pengalaman di 11 daerah dalam mengimplementasikan kebijakan moderasi beragama. Bukan hanya itu, buku ini berisi pula praktik-praktik baik moderasi beragama yang berakar dari tradisi yang sudah tumbuh kuat sebelumnya. Tentu saja, kritik dan tantangan mewujudkan nilai-nilai moderasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kisah tersebut. Buku ini hendak menegaskan betapa Indonesia memiliki modal besar dalam membangun moderasi beragama dari bawah.

**Kementerian Agama RI**
**2023**

ISBN 978-602-293-153-9 (PDF)